

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	6
III. IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	24
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	37
V. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	57
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	57
5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	120
5.3 NERACA.....	121
5.4 LAPORAN OPERASIONAL.....	123
5.5 LAPORAN ARUS KAS.....	250
5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	255
VI. INFORMASI NON KEUANGAN.....	276
VII. PENUTUP.....	280
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	: PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2018	6
Tabel 2	: Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018	9
Tabel 3	: Angka Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018	9
Tabel 4	: Pertumbuhan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Lumajang..... Tahun 2013 – 2018	12
Tabel 5	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan –Pendapatan Daerah Tahun 2018.....	24
Tabel 6	: Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2018	25
Tabel 7	: Realisasi PAD Tahun 2014 s/d 2018	26
Tabel 8	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja dan Transfer Tahun..... 2018	27
Tabel 9	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi Tahun 2018	28
Tabel 10	: Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018	29
Tabel 11	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal Tahun 2018	30
Tabel 12	: Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun 2018	30
Tabel 13	: Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 s.d. 2018	31
Tabel 14	: Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2014 s.d. 2018	32
Tabel 15	: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pembiayaan Daerah Tahun 2018	33
Tabel 16	: Perkembangan Posisi Aset Daerah Per 31 Desember 2014 s.d. 2018	34
Tabel 17	: Posisi Kewajiban Daerah Per 31 Desember 2014 s.d 2018.....	35
Tabel 18	: Perkembangan Posisi Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 s.d. 2018	35
Tabel 19	: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017	57
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017	58
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun..... Anggaran 2018 dan 2017	59
Tabel 22	: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017	60
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2018 & 2017.....	62
Tabel 24	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan	62
Tabel 25	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2018 dan 2017	63
Tabel 26	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2018 & 2017.....	64
Tabel 27	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	64
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017	65
Tabel 29	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang	

	Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	66
Tabel 30	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017	66
Tabel 31	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal	67
Tabel 32	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	68
	Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2018 dan 2017	68
Tabel 33	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	69
	Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2018 dan 2017	69
Tabel 34	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	69
	Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2018 dan 2017	69
Tabel 35	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – IMB Tahun Anggaran 2018 dan 2017	70
Tabel 36	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Trayek	71
	Tahun Anggaran 2018 dan 2017	71
Tabel 37	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan	71
	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 dan 2017	71
Tabel 38	: Modal Inti PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang Tahun 2018 dan 2017	72
Tabel 39	: Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018 dan 2017	73
Table 40	: Rincian Pendapatan Bunga Deposito Tahun 2018	74
Tabel 41	: Rincian Pendapatan Sewa 2018	76
Tabel 42	: Pendapatan Kapitasi JKN pada FKTP	77
Tabel 43	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Tahun	79
	Anggaran 2018 dan 2017	79
Tabel 44	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana	79
	Perimbangan Tahun Anggaran 2018 dan 2017	79
Tabel 45	: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Bagi Hasil	80
	Pajak Tahun 2018	80
Tabel 46	: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Bagi Hasil	80
	Sumber Daya Alam Tahun 2018	80
Tabel 47	: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana	80
	Alokasi khusus Tahun 2018	80
Tabel 48	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah	81
	Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2017	81
Tabel 49	: Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun	82
	Anggaran 2018 dan 2017	82
Tabel 50	: Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017	83
Tabel 51	: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018	84
Tabel 52	: Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017	85
Tabel 53	: Realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun 2018	88
Table 54	: Realisasi Anggaran Perjenis Belanja dan Jasa - Belanja Persediaan	89
	Tahun 2018 dan 2017	89
Tabel 55	: Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Tahun 2018 dan 2017	91
Tabel 56	: Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017	94
Tabel 57	: Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan	

	2017	98
Tabel 58	: Belanja Barang dan Jasa - Belanja Lainnya Tahun 2018 dan 2017	98
Tabel 59	: Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi – Hibah Tahun 2018 dan 2017.....	101
Tabel 60	: Daftar Rincian Realisasi Hibah Uang pada PPKD Tahun 2018 dan 2017.....	101
Tabel 61	: Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi – Hibah Barang Yang Diserahkan padam Masyarakat Tahun 2018 dan 2017	102
Tabel 62	: Daftar Realisasi Belanja Operasi – Bantuan Sosial	103
Tabel 63	: Belanja Bantuan Sosial pada PPKD	103
Tabel 64	: Daftar Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017.....	106
Tabel 65	: Daftar Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 dan 2017	106
Tabel 66	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017.....	107
Tabel 67	: Realisasi Belanja Modal	107
Tabel 68	: Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018	108
Tabel 69	: Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018	110
Tabel 70	: Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	111
Tabel 71	: Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	112
Tabel 72	: Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya	113
Tabel 73	: Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 danm 2017	114
Tabel 74	: Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa	115
Tabel 75	: Surplus/ Defisit	115
Tabel 76	: Daftar Rincian Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan	116
Tabel 77	: Daftar Penggunaan Silpa tahun 2018	116
Tabel 78	: Daftar Pencairan Dana Cadangan	117
Tabel 79	: Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Modal Tahun 2018 dan 2017	117
Tabel 80	: Daftar Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 dan 2017.....	118
Tabel 81	: Daftar Rincian Penyertaan Modal Pemda Tahun 2018 dan 2017	118
Tabel 82	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2018	120
Tabel 83	: Saldo Anggaran lebih awal	120
Tabel 84	: Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan.....	121
Tabel 85	: Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 2018 dan 2017.....	121
Tabel 86	: Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	122
Tabel 87	: Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 dan 2017	122
Tabel 88	: Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 dan 2017	122
Tabel 89	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018	123
Tabel 90	: Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2018	123
Tabel 91	: Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018.....	123
Tabel 92	: Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018	124
Tabel 93	: Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2018.....	125
Tabel 94	: Perkembangan Piutang Pajak Reklame.....	127
Tabel 95	: Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2018.....	127

Tabel 96 : Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam.....	128
Tabel 97 : Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2018.....	128
Tabel 98 : Perkembangan Piutang Pajak Restoran.....	128
Tabel 99 : Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018.....	128
Tabel 100 : Perkembangan Piutang Pajak Hiburan.....	129
Tabel 101 : Perkembangan Piutang Pajak Air Tanah.....	129
Tabel 102 : Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018.....	129
Tabel 103 : Perkembangan Piutang PBB P2.....	129
Tabel 104 : Perhitungan Penyisihan Piutang PBB P2 Tahun 2018.....	130
Tabel 105 : Perkembangan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018.....	131
Tabel 106 : Perhitungan Penyisihan Piutang PPJ Tahun 2018.....	131
Tabel 107 : Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan.....	132
Tabel 108 : Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2018.....	132
Tabel 109 : Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018.....	133
Tabel 110 : Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2018.....	134
Tabel 111 : Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018.....	135
Tabel 112 : Perhitungan Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018.....	135
Tabel 113 : Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2018.....	135
Tabel 114 : Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal 2018.....	136
Tabel 115 : Daftar Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2018.....	136
Tabel 116 : Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2018.....	136
Tabel 117 : Daftar dan Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2018.....	137
Tabel 118 : Daftar Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto Tahun 2018.....	138
Tabel 119 : Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2018.....	138
Tabel 120 : Daftar dan Mutasi Piutang/Pinjaman Modal Kepada Masyarakat Tahun 2018.....	139
Tabel 121 : Perhitungan Penyisihan Piutang Pinjaman Kepada Masyarakat Tahun 2018.....	139
Tabel 122 : Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2018.....	140
Tabel 124 : Perhitungan Penyisihan Piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2018.....	140
Tabel 123 : Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2018.....	141
Tabel 124 : Perhitungan Penyisihan Piutang bagi hasil pemerintah pusat Tahun 2018.....	141
Tabel 125 : Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian Tahun 2018 dan 2017.....	141
Tabel 126 : Perhitungan Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas Tahun 2018.....	142
Tabel 127 : Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas Tahun 2018.....	142
Tabel 128 : Perhitungan Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Tahun 2018.....	143
Tabel 129 : Piutang Kelebihan Pembayaran atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan.....	143
Tabel 130 : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2018.....	144
Tabel 131 : Daftar Persediaan Tahun 2018 dan 2017.....	145
Tabel 132 : Metode Penilaian Investasi.....	146
Tabel 133 : Perkembangan Investasi Jangka Panjang – Penyertaan Modal Tahun 2018.....	146
Tabel 134 : Perkembangan Penyertaan Modal Pada Bank Jatim.....	147

Tabel 135 : Perkembangan Penyertaan Modal Pada BPR Jatim.....	148
Tabel 136 : Penyertaan Modal Pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang.....	149
Tabel 137 : Jumlah Modal disetor-Penyertaan Modal Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang.....	149
Tabel 138 : Penyertaan Modal Pada PD. Semeru Lumajang.....	150
Tabel 139 : Jumlah Modal disetor-Penyertaan Modal Pada PD Semeru Kabupaten Luamajang.....	151
Tabel 140 : Perkembangan Penyertaan Modal Pada PD PDAM Kabupaten Lumajang.....	151
Tabel 141 : Saldo aset Tetap tahun 2018 dan 2017.....	152
Tabel 142 : Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	153
Tabel 143 : Ringkasan Perkembangan Saldo Aset tetap Tanah Tahun 2018.....	154
Tabel 144 : Daftar Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018.....	154
Tabel 145 : Daftar Rincian Kurang Catat Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	155
Tabel 146 : Daftar Rincian Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Tanah Antar SKPD Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	155
Tabel 147 : Daftar Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2018.....	156
Tabel 148 : Daftar Rincian dan Perkembangan Aset Tetap Tanah Per SKPD Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	156
Tabel 149 : Jumlah Perkembangan Tanah Yang Bersertifikat per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	158
Tabel 150 : Ringkasan Perkembangan Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018	159
Tabel 151 : Daftar Perkembangan dan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Lumajang Per 31 Desember 2018.....	160
Tabel 152 : Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2018.....	160
Tabel 153 : Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Per SKPD Pemerintah Lumajang Per 31 Desember 2018.....	160
Tabel 154 : Daftar Rincian Reklasifikasi Antar Bidang Barang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per SKPD Tahun 2018.....	163
Tabel 155 : Daftar Rincian Mutasi Keluar Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Antar SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	164
Tabel 156 : Daftar Penghapusan Peralatan dan Mesin Per SKPD Barang Milik.....	165
Tabel 157 : Daftar Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Per SKPD Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	165
Tabel 158 : Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018	166
Tabel 159 : Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	167
Tabel 160 : Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	167
Tabel 161 : Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Antar SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	170
Tabel 162 : Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2018	171
Tabel 163 : Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah.....	

	Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	171
Tabel 164	: Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	172
Tabel 165	: Daftar Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Jalan Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018	172
Tabel 166	: Daftar Reklasifikasi Selain Belanja Modal Jalan Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018	173
Tabel 167	: Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	174
Tabel 168	: Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	174
Tabel 169	: Daftar Realisasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	175
Tabel 170	: Ringkasan Perkembangan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018.....	176
Tabel 171	: Daftar Realisasi Belanja Modal Yang Masuk dalam Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018	176
Tabel 172	: Daftar Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Ke Aset Tetap Tahun 2018...	177
Tabel 173	: Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018.....	177
Tabel 174	: Daftar Akumulasi Penyusutan per SKPD Per 31 Desember 2018.....	178
Tabel 175	: Dana Cadangan	181
Tabel 176	: Saldo Aset Lainnya Tahun 2018	182
Tabel 177	: Daftar Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang.....	182
Tabel 178	: Perkembangan Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2018 dan 2017.....	183
Tabel 179	: Daftar Realisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	183
Tabel 180	: Daftar Rincian Aset Tak Berwujud Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	184
Tabel 181	: Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2018	185
Tabel 182	: Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per SKPD Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018	186
Tabel 183	: Daftar Perkembangan Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018.....	188
Tabel 184	: Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018.....	190
Tabel 185	: Rincian Utang Belanja Tahun 2018.....	191
Tabel 186	: Rekap Utang Belanja Pegawai Tahun 2018.....	192
Tabel 187	: Rincian Utang Gaji dan Tunjangan 2018.....	192
Tabel 188	: Rincian Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2018	192
Tabel 189	: Rincian Utang Honorarium pelayanan kesehatan 2018.....	194
Tabel 190	: Rincian Utang Insentif Pemungutan Pajak 2018	194
Tabel 191	: Rincian Utang Lembur 2018.....	195
Tabel 192	: Rekap Utang Barang dan Jasa Tahun 2018.....	195
Tabel 193	: Utang Listrik.....	195
Tabel 194	: Utang Bahan Obat-obatan	197
Tabel 195	: Utang Telepon	197

Tabel 196 : Utang Air	199
Tabel 197 : Utang Belanja Surat Kabar	199
Tabel 198 : Utang Belanja Faximile	200
Tabel 199 : Utang Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	202
Tabel 200 : Utang belanja jasa pengolahan limbah medis	202
Tabel 201 : Utang retribusi pelayanan persampahan	202
Tabel 202 : Utang belanja makanan dan minuman rapat	202
Tabel 203 : Utang perjalanan dinas dalam daerah	202
Tabel 204 : Utang perjalanan dinas luar daerah	202
Tabel 205 : Utang belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	202
Tabel 206 : Utang belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	202
Tabel 207 : Utang belanja premi asuransi ketenagakerjaan	202
Tabel 208 : Utang belanja bahan bakar minyak dan pelumas	203
Tabel 209 : Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	203
Tabel 210 : Utang belanja STNK kendaraan dinas/operasional	203
Tabel 211 : Utang belanja jasa konsultasi pengawasan	203
Tabel 212 : Utang belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	203
Tabel 213 : Utang belanja Penggantian Pengolahan Darah	203
Tabel 214 : Utang belanja pengisian tabung gas	204
Tabel 215 : Utang belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	204
Tabel 216 : Utang belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	204
Tabel 217 : Utang belanja pajak air tanah	204
Tabel 218 : Utang belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	204
Tabel 219 : Utang belanja makanan dan minuman pasien	204
Tabel 220 : Utang belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	204
Tabel 221 : Daftar Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018	205
dan 2017	205
Tabel 222 : Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang	205
Tabel 223 : Daftar Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2018 dan 2017	206
Tabel 224 : Daftar Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Per 31 Desember 2018	207
Tabel 225 : Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2018 dan	207
2017	207
Tabel 226 : Daftar Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO Tahun	208
2018 dan 2017	208
Tabel 227 : Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Per 31 Desember 2018 dan 2017	210
Tabel 228 : Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LO Tahun 2018 dan 2017	210
Tabel 229 : Rincian Pelayanan Tera / Tera Ulang LO Tahun 2018 dan 2017	211
Tabel 230 : Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 dan	211
2017	211
Tabel 231 : Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah LRA dan LO	212
Tabel 232 : Daftar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga LO per 31 Desember	214
2018 dan 2017	214
Tabel 233 : Daftar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan LO Per 31 Desember 2018	215
dan 2017	215
Tabel 234 : Daftar Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian LO Per 31 Desember 2018	215
dan 2017	215

Tabel 235 : Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan –LO per 31 Desember 2018 dan 2017	216
Tabel 236 : Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Per 31 Desember 2018 dan 2017.....	216
Tabel 237 : Lain-lain PAD yang sah LRA dan LO tahun 2018.....	218
Tabel 238 : Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LO Tahun 2018 dan 2017	219
Tabel 239 : Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan LO	219
Tabel 240 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian LO Tahun 2018 dan 2017	222
Tabel 241 : Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO Tahun 2018 dan 2017.....	222
Tabel 242 : Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA dan LO Tahun 2018 dan 2017 ..	223
Tabel 243 : Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017.....	223
Tabel 244 : Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA dan LO Tahun 2018 dan 2017	224
Tabel 245 : Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat Tahun 2018	224
Tabel 246 : Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.....	225
Tabel 247 : Pendapataan Hibah Tanah Fasilitas Umum dari Lembaga / Organisasi Swasta....	225
Tabel 248 : Rincian Pendapatan Lainnya LO Tahun 2018 dan 2017	228
Tabel 249 : Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017.....	229
Tabel 250 : Hubungan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2018.....	232
Tabel 251 : Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017.....	232
Tabel 252 : Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017	233
Tabel 253 : Hubungan Beban persediaan dengan Belanja belanja persediaan Tahun 2018	233
Tabel 254 : Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017	235
Tabel 255 : Hubungan Beban jasa dengan Belanja belanja jasa Tahun 2018.....	236
Tabel 256 : Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017	236
Tabel 257 : Hubungan Beban pemeliharaan dengan Belanja belanja pemeliharaan Tahun 2018	238
Tabel 258 : Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017	238
Tabel 259 : Hubungan Beban perjalanan dinas dengan Belanja belanja perjalanan dinas	239
Tabel 260 : Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel Tahun 2018 dan 2017.....	239
Tabel 261 : Hubungan Beban lainnya dengan Belanja belanja lainnya Tahun 2018.....	240
Tabel 262 : Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2018 dan 2017	243
Tabel 263 : Hubungan Beban hibah dengan Belanja belanja hibah Tahun 2018.....	244
Tabel 264 : Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017.....	244
Tabel 265 : Daftar Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2018 dan 2017	245
Tabel 266 : Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017.....	245
Tabel 267 : Hubungan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi dengan Beban Penyusutan / Amortisasi Tahun 2018.....	245
Tabel 268 : Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017	246
Tabel 269 : Penyisihan Piutang Dengan Beban Penyisihan Piutang.....	246
Tabel 270 : Daftar Rincian Transfer Tahun 2018 dan 2017.....	247
Tabel 271 : Daftar Rincian Transfer LRA dan LO Tahun 2018 dan 2017.....	247
Tabel 272 : Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	248
Tabel 273 : Daftar Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2018	249
Tabel 274 : Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2018 dan 2017	249
Tabel 275 : Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017	250

Tabel 276 : Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017.....	251
Tabel 277 : Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 dan 2017.....	252
Tabel 278 : Rincian Potongan Per Jenis Pajak Tahun 2018.....	253
Tabel 279 : Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 dan 2017.....	253
Tabel 280 : Rincian Kenaikan Kas Tahun 2018 dan 2017.....	253
Tabel 281 : Surplus/Defisit LO Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.....	255
Tabel 282 : Rekapitulasi Daftar Akun Yang Dikoreksi Tahun 2018.....	256
Tabel 283 : Koreksi Nilai Koreksi Kas Dana BOS Tahun 2018.....	256
Tabel 284 : Koreksi Nilai Piutang Pajak Reklame Tahun 2018.....	257
Tabel 285 : Koreksi Nilai Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018	257
Tabel 286 : Koreksi Nilai Persediaan Barang cetakan Tahun 2018.....	257
Tabel 287 : Koreksi Nilai Persediaan Obat-obatan Tahun 2018.....	259
Tabel 288 : Koreksi Nilai Persediaan Bahan Kimia Tahun 2018	261
Tabel 289 : Koreksi Nilai Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai	261
habis selain obat-obatan Tahun 2018.....	261
Tabel 290 : Koreksi Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2018	261
Tabel 291 : Koreksi Nilai Tanah Tahun 2018.....	262
Tabel 292 : Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018	262
Tabel 293 : Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018	263
Tabel 294 : Koreksi Nilai Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2018	263
Tabel 295 : Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	263
Tabel 296 : Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018	263
Tabel 297 : Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	263
Tabel 298 : Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	272
Tahun 2018	273
Tabel 299 : Koreksi Nilai Aset Lain-lain Tahun 2018.....	275
Tabel 300 : Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2018	275
Tabel 301 : Koreksi Nilai Utang Belanja Jasa Tahun 2018	275
Tabel 302 : Koreksi Nilai Utang Transfer Dana Desa Tahun 2018	275
Tabel 303 : Laporan Perubahan Ekuitas	275

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1	: Diagram Perbandingan Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Tahun 2014 s/d 2018.....	28
Gambar 2	: Diagram Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 s/d 2018	29
Gambar 3	: Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2014 s/d 2018	31
Gambar 4	: Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 s/d 2018.....	34
Gambar 5	: Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2014 s/d 2018	35

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

- z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLk berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1. Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
	5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	5.7. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII	PENUTUP

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.2.1. EKONOMI MAKRO

Indikator ekonomi makro Kabupaten Lumajang pada umumnya dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan laju inflasi. Indikator(indikator ekonomi makro tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

Pada saat penyusunan laporan keuangan daerah Tahun 2018, kondisi makro ekonomi Kabupaten Lumajang akhir tahun 2018 masih dalam proses penyusunan dan pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang. Oleh sebab itu dengan mengacu pada kondisi pada akhir Tahun 2017, yang merupakan representasi kondisi awal tahun 2018, variabel makro ekonomi Kabupaten Lumajang akhir Tahun 2018 masih berupa angka(angka estimasi).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB digunakan sebagai alat analisa untuk mengetahui tentang laju pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang, estimasi PDRB Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2018
dalam miliar rupiah

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.819,9	8.714,1	9.689,8	10.409,1	10.839,2	11.356,6
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.132,0	7.926,7	8.804,8	9.473,3	9.807,0	10.227,7
	a. Tanaman Pangan	2.108,0	2.302,8	2.574,0	2.729,6	2.707,9	2.745,1
	b. Tanaman Hortikultura	1.373,6	1.522,8	1.683,8	1.875,2	1.991,9	2.127,3
	c. Tanaman Perkebunan	1.908,1	2.175,5	2.397,9	2.549,5	2.595,8	2.642,2
	d. Peternakan	1.650,3	1.817,9	2.024,2	2.184,3	2.371,2	2.565,3
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	92,0	107,6	124,9	134,8	140,2	147,8
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	202,1	226,2	255,5	253,7	278,1	309,2
	3. Perikanan	485,8	561,3	629,5	682,1	754,1	819,7
	B	763,2	870,1	941,2	1.075,8	1.181,8	1.297,4
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Pertambangan Bijih Logam	30,1	36,2	28,4	0,0	0,0	0,0
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	733,1	833,9	912,8	1.075,8	1.181,8	1.297,4

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017	2018
C	Industri Pengolahan	3.645,8	4.144,8	4.600,8	5.052,1	5.562,0	6.062,6
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Industri Makanan dan Minuman	1.918,6	2.196,0	2.489,5	2.800,4	3.155,9	3.491,8
	3. Pengolahan Tembakau	170,5	191,2	209,9	231,2	253,6	273,9
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	82,5	92,5	101,5	109,4	117,1	126,7
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	6,5
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	976,7	1.111,0	1.187,4	1.264,8	1.362,8	1.460,6
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	54,4	58,3	62,6	66,3	72,3	78,9
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	15,0	16,4	17,7	18,7	19,5	20,4
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,5	5,7	6,0	6,3	6,5	6,9
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	48,6	51,7	56,3	60,1	66,2	72,1
	11. Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	231,8	262,2	292,6	305,4	311,2	324,8
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
	14. Industri Alat Angkutan	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9
	15. Industri Furnitur	87,7	99,1	112,1	121,0	124,1	129,9
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	46,6	51,8	55,8	58,8	62,4	65,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,5	9,6	10,6	11,2	13,0	13,8
	1. Ketenagalistrikan	7,0	7,9	8,6	9,2	10,8	11,5
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,5	1,7	2,0	2,1	2,2	2,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	12,5	13,1	14,0	14,6	15,3
F	Konstruksi	1.423,8	1.635,1	1.821,1	2.038,5	2.225,3	2.505,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.551,0	2.833,7	3.137,7	3.446,1	3.846,8	4.318,5
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	613,0	656,4	690,1	720,5	774,7	819,3
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.937,9	2.177,3	2.447,6	2.725,6	3.072,2	3.499,2
H	Transportasi dan Pergudangan	316,5	363,4	407,9	456,3	511,0	573,9
	1. Angkutan Rel	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
	2. Angkutan Darat	224,7	257,8	289,8	325,1	364,8	412,5

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017	2018
	3. Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	91,4	105,1	117,5	130,6	145,5	160,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,7	244,9	281,3	314,8	354,0	400,1
	1. Penyediaan Akomodasi	24,6	30,5	34,6	37,5	42,2	47,9
	2. Penyediaan Makan Minum	184,2	214,4	246,8	277,3	311,8	352,2
J	Informasi dan Komunikasi	611,4	670,1	730,1	805,2	879,8	967,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	320,7	368,1	415,1	455,1	493,9	538,6
	1. Jasa Perantara Keuangan	133,3	151,9	173,1	189,1	205,1	224,7
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	80,3	94,5	106,6	117,3	126,1	135,7
	3. Jasa Keuangan Lainnya	106,7	121,3	134,9	148,2	162,1	177,5
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
L	Real Estat	311,9	333,4	383,2	416,9	450,3	497,7
M, N	Jasa Perusahaan	62,9	69,1	76,7	83,9	91,6	101,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	672,4	691,9	760,1	809,2	853,0	914,3
P	Jasa Pendidikan	491,6	556,0	619,5	672,5	729,7	800,7
Q	Jasa Kesehatan	126,8	145,6	164,2	182,3	202,5	228,2
R,S .T, U	Jasa Lainnya	289,9	320,7	364,6	409,8	455,6	508,4
Produk Domestik Regional Bruto		19.637,0	21.983,1	24.417,1	26.652,8	28.703,9	31.101,1

Sumber data : BPS Kabupaten Lumajang

Estimasi PDRB berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan pada Tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif. PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2018 sebesar Rp31.101.085,10 dan pada akhir tahun 2017 diestimasikan naik menjadi Rp28.703.889,05 atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,35% dari tahun 2017. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 sebesar Rp20.542.930,67 dan diestimasikan naik menjadi Rp21.575.037,98 pada akhir tahun 2018, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018

Tahun	PDRB (juta rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2013	19.636.953,52	16.949.582,99		
2014	21.963.119,39	17.851.856,60	11,95	5,32
2015	24.417.114,79	18.676.946,21	11,07	4,62
2016	26.652.841,83	19.555.167,96	9,16	4,70
2017	28.703.889,05	20.542.930,67	7,70	5,05
2018	31.101.085,10	21.575.037,98	8,35	5,02

Sumber data : BPS Kabupaten Lumajang

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada akhir tahun 2018 diestimasikan sebesar 4,86% dimana angka ini lebih rendah dibandingkan periode lima tahun sebelumnya yang rata-rata hanya mencapai di bawah angka 6%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 4,70% di tahun 2016 menjadi 4,86% di Tahun 2018 disebabkan beberapa kinerja sektoral yang mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat, kecuali sektor industri pengolahan dan pengangkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 3. Angka Agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.521,7	6.729,7	6.941,3	7.122,6	7.262,2	7.401,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.952,4	6.134,2	6.321,3	6.495,7	6.599,6	6.694,8
	a. Tanaman Pangan	1.707,2	1.761,9	1.816,8	1.862,1	1.865,6	1.868,2
	b. Tanaman Hortikultura	1.216,1	1.252,6	1.291,4	1.349,9	1.364,1	1.376,3
	c. Tanaman Perkebunan	1.592,0	1.650,9	1.711,1	1.744,6	1.788,1	1.824,0
	d. Peternakan	1.355,9	1.382,3	1.412,2	1.447,0	1.487,5	1.529,7
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	81,2	86,5	89,8	92,2	94,3	96,5
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	170,7	173,1	177,4	168,0	180,0	195,0
	3. Perikanan	398,7	422,5	442,6	459,0	482,5	512,1
B	Pertambangan dan Penggalian	710,0	734,1	731,4	787,9	849,0	915,8
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Pertambangan Bijih Logam	28,3	30,4	26,7	0,0	0,0	0,0
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	681,6	703,7	704,7	787,9	849,0	915,8
C	Industri Pengolahan	3.219,3	3.454,5	3.642,3	3.829,7	4.099,4	4.348,7
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	2. Industri Makanan dan Minuman	1.703,3	1.832,2	1.973,9	2.111,5	2.318,8	2.500,1
	3. Pengolahan Tembakau	142,2	157,0	163,5	170,6	178,6	186,6
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	73,3	78,3	83,8	88,1	92,2	97,4
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,5
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	861,7	926,6	937,3	965,7	1.010,9	1.054,1
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	50,4	50,6	51,6	53,2	54,9	57,9
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	13,6	14,5	15,1	15,4	15,7	15,9
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,2
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	44,6	45,0	46,7	48,5	52,3	55,6
	11. Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	197,5	209,9	222,4	224,9	222,5	224,9
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	14. Industri Alat Angkutan	3,2	3,3	3,4	3,5	3,4	3,4
	15. Industri Furnitur	77,0	81,7	87,1	89,3	89,3	90,4
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	43,5	45,9	47,5	48,6	50,1	51,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,6	10,2	10,5	10,7	11,1	11,4
	1. Ketenagalistrikan	8,2	8,8	9,0	9,2	9,5	9,8
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,1	11,2	11,5	11,9	12,2	12,5

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
F	Konstruksi	1.162,7	1.234,0	1.273,5	1.342,7	1.424,1	1.530,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.287,3	2.444,5	2.609,7	2.776,5	2.988,7	3.193,1
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	527,6	549,4	565,0	582,8	601,4	622,5
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.759,8	1.895,1	2.044,7	2.193,7	2.387,2	2.570,6
H	Transportasi dan Pergudangan	289,4	315,1	339,1	365,1	394,2	427,3
	1. Angkutan Rel	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
	2. Angkutan Darat	215,9	236,3	254,7	274,8	297,5	323,8
	3. Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	73,2	78,6	84,0	89,9	96,3	103,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,3	204,0	223,9	240,9	263,3	289,1
	1. Penyediaan Akomodasi	19,3	21,1	23,0	24,4	26,6	29,4
	2. Penyediaan Makan Minum	166,0	182,9	200,8	216,5	236,7	259,8
J	Informasi dan Komunikasi	595,1	652,0	709,8	767,4	823,6	888,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	274,1	293,8	311,6	328,3	344,4	362,2
	1. Jasa Perantara Keuangan	109,8	118,3	127,6	135,1	141,9	149,8
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	70,6	76,7	80,8	84,4	87,7	91,5
	3. Jasa Keuangan Lainnya	93,4	98,5	102,9	108,4	114,4	120,6
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
L	Real Estat	270,3	288,3	308,2	326,5	344,0	369,2
M,N	Jasa Perusahaan	52,9	56,5	60,4	63,7	67,6	71,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	564,2	570,4	591,4	616,2	636,6	664,0
P	Jasa Pendidikan	411,6	439,9	472,6	499,9	529,5	564,8
Q	Jasa Kesehatan	113,6	126,3	133,3	140,4	149,0	160,1
R,S,T	Jasa Lainnya	271,4	287,3	306,3	324,8	344,1	364,6

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**	2018***
,U							
Produk Domestik Regional Bruto		16.949,6	17.851,9	18.676,9	19.555,2	20.542,9	21.575,0

Keterangan : *) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara***) Angka Target / Prediksi

c. Tingkat Inflasi

Tingkat perkembangan harga atau lebih dikenal dengan inflasi/deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Yang dimaksud perubahan harga adalah perubahan harga di tingkat produsen berdasarkan indeks implisit PDRB (PDRB adhb dibagi PDRB adhk dikali 100) sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi tidak berperan.

Tingkat inflasi PDRB ini dapat dimanfaatkan sebagai indikator daya elastisitas produsen dalam menghadapi isu global dan kebijakan pemerintah yang rentan berimplikasi terhadap perubahan harga barang/jasa. Inflasi yang terjadi pada tingkat produsen tahun 2014 sebesar 6,17 persen, sedangkan inflasi pada tahun 2015 sebesar 5,92 persen, terdapat penurunan sebesar 0,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Lumajang relatif masih terkendali. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dan perkiraan 2016, maka Inflasi tahun 2016 diperkirakan sekitar 5,88 % dan pada Tahun 2017 inflasi diprediksi sebesar 5,61%.

d. Pendapatan regional per kapita

Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Tingkat pendapatan yang diterima masyarakat yang tinggi dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tinggi. Sebaliknya tingkat pendapatan masyarakat yang rendah mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang rendah.

Pada umumnya pendapatan regional disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku. Karena pendapatan regional selain dipengaruhi faktor tingkat produksi juga dipengaruhi harga barang dan jasa, namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB maupun pendapatan regional per kapita.

Data statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang semakin membaik.

Tabel 4. Pertumbuhan Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2018

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan	%	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan	%
2013	17.947.751,15	1.673.711,57	9,33	15.491.552,55	800.648,92	5,17
2014	19.931.731,68	1.983.980,53	9,95	16.185.983,87	694.431,31	4,29
2015	22.056.611,75	2.124.880,07	9,63	16.871.368,90	685.385,03	4,06
2016	23.994.565,73	1.937.953,98	8,08	17.604.792,99	733.424,09	4,17
2017	25.763.162,23	1.768.596,50	6,86	18.438.297,84	833.504,85	4,52
2018	27.835.003,66	2.071.841,43	7,44	19.309.334,68	871.036,84	4,51

2.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal, kebijakan Pemerintah Daerah di bidang keuangan diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

a. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah. Kebijakan ini kemungkinan berlanjut pada tahun 2018, berdasarkan hal tersebut maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2018 diarahkan pada optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif yaitu akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Terdapat empat item penting yang perlu dilaksanakan/disempurnakan kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah ini, yaitu:

- a. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah penghasil
- b. Penyederhanaan regulasi dan perbaikan sistem pemungutan,
- c. Penyesuaian tarif,
- d. Penggalan potensi daerah, dan
- e. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah.

Gambaran umum rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang digali dari potensi yang ada di daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. PAD dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi perolehan PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah, yang berarti pula berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang selama ini di dapatkan dari Pemerintah Pusat.

PAD merupakan jenis pendapatan daerah yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah perlu ditetapkan rumusan tentang kebijakan apa yang akan ditempuh sehingga PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pendanaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public*) serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Secara umum kebijakan yang telah dirumuskan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah melalui upaya peningkatan PAD sebagai berikut.

- a) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- b) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, pengoptimalan Peraturan(peraturan Daerah dan diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;

- c) Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dan penempatan aparatur yang profesional dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD;
- d) Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional;
- e) Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi dilakukan melalui peningkatan sistem pemungutan. Implementasi kebijakan pemungutan PAD akan berhasil atau gagal tergantung kepada kualitas administrasi pemerintah daerah dan seberapa realitas kebijakan itu diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Kualitas administrasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui pembekalan (pembekalan yang diberikan kepada aparatur pemungut PAD melalui pelatihan (pelatihan agar lebih mampu menerjemahkan kebijakan (kebijakan sendiri dan menilai dampaknya terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat. Perbaikan kontrol terhadap petugas pemungut PAD dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi obyek wajib pajak;
- f) Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip (prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah, khususnya PD. Semeru, PDAM dan Bank Pasar; dan
- g) Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (*idle cash*) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang dari tiga bulan dengan memilih instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan, sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan. Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Dengan adanya manajemen kas di harapkan perolehan PAD dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan hasil investasi berupa pendapatan bunga.

Implementasi kebijakan di bidang pendapatan asli daerah dalam bentuk kegiatan sebagai berikut.

- (1) Melakukan pendataan yang akurat dan valid terhadap potensi PAD melalui kegiatan pemutakhiran data WP/WR dan obyek pajak/obyek retribusi;
- (2) Meninjau ulang tarif pajak/retribusi yang dipertimbangkan sudah tidak layak lagi diberlakukan;

- (3) Mengintensifkan sosialisasi berbagai Perda tentang pendapatan sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak ataupun wajib restibusi;
- (4) Mengadakan evaluasi tentang penerimaan PAD melalui:
 - (a) Rapat koordinasi antar unit penghasil;
 - (b) Umpan balik tentang pelaporan penerimaan PAD kepada seluruh unit penghasil setiap bulan;
 - (c) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan monitoring terhadap pemungutan PAD secara rutin dan periodik; dan
 - (d) Membuat/merevisi peraturan pelaksana pajak/retribusi daerah.

Kebijakan lainnya terkait dengan penatausahaan pendapatan, sebagai berikut.

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (4) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pendapatan tersebut diterima;
- (5) SKPD yang memungut pendapatan dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- (6) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (7) Semua pendapatan dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah; dan
- (8) Semua pendapatan harus dicatat dan dibukukan secara bruto dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran belanja.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran PAD di dalam APBD 2018 sebagai berikut.

- (1) Dalam merencanakan target PAD agar mempertimbangkan kondisi perekonomian dan realisasi penerimaan PAD yang terjadi pada tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- (2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- (3) Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pendapatannya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada;
- (4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telah dibatalkan dan/atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

- (5) Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit daerah dan akademik keperawatan, maka penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah; dan
- (6) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

2) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN (TRANSFER)

Berdasarkan kebijakan pencapaian target Pendapatan Dana Perimbangan maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain:

- a. mematuhi segala aturan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, di antaranya mengoptimalkan peran TEPRAs sehingga terhindar dari penundaan penyaluran DAU;
- b. penetapan APBD tepat waktu serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Penilaian Implementasi SAKIP;
- c. updating data-data kepegawaian yang dipergunakan dalam rekonsiliasi data pegawai untuk perhitungan DAU;
- d. penyampaian usulan DAK sesuai kebutuhan dengan format dan mekanisme yang ditentukan disertai data pendukung yang lengkap dan tepat waktu serta optimalisasi aplikasi e-planning DAK oleh Pemerintah Pusat;
- e. penyampaian informasi keuangan daerah tepat waktu dan valid; penerbitan NPWP Cabang bagi rekanan/pihak ketiga yang berusaha di wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga perolehan Bagi Hasil Pajak dapat meningkat;

Dalam rangka mengatasi adanya disparitas fiskal, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN. Pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Daerah antara lain berupa transfer dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (sumber daya alam/SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meliputi Dana Penyesuaian. Selain itu dari Pemerintah Propinsi diterima pendapatan transfer berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak serta bantuan keuangan lainnya.

Berbeda dengan PAD, pendapatan transfer merupakan jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan(kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan transfer ditentukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi.

Namun demikian, terhadap komponen dana perimbangan tertentu seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAK, pemerintah daerah membuat kebijakan(kebijakan tertentu dalam upaya peningkatan dana perimbangan, antara lain:

- 1) Secara aktif melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pemantauan di bidang perpajakan, khususnya pajak pusat oleh KPP. Kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor

Pelayanan Pajak terhadap para bendahara selaku wajib pungut dan dunia usaha termasuk rekanan pemerintah daerah; dan

- 2) Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan transfer Pemerintah Propinsi, seperti bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan dan bagi hasil lainnya, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi dengan harapan dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dapat meningkat sesuai dengan yang direncanakan.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Salah satu fokus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lumajang adalah meningkatkan perolehan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) melalui upaya penetapan APBD dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu, meningkatkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan menaikkan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

b. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2018, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian belanja daerah diarahkan untuk terwujudnya pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut.

- 1) Urusan **Pendidikan**, terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung perluasan akses pendidikan dasar dalam program wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan kegiatan strategis berupa perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak terutama pada pendidikan dasar untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran;
- 2) Urusan **kesehatan**, penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga miskin/tidak mampu dengan meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan yang mengutamakan kualitas layanan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan sampai pelosok desa, khususnya daerah terpencil dan tertinggal;
- 3) Urusan **pekerjaan umum**, meningkatkan & mempertahankan infrastruktur yang diarahkan untuk:

- (a) Mempertahankan/meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan kabupaten dan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan dan jembatan, dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang, dan jasa, terutama untuk meningkatkan akses(akses ke daerah potensial seperti pertanian, industri, dan pariwisata, membuka daerah terisolasi dan terpencil, serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional;
- (b) Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem jaringan irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten khususnya di daerah lumbung pangan daerah dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program ketahanan pangan; dan
- (c) Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) dan memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 4) Urusan **perumahan**, kebijakan diarahkan untuk penataan dan perbaikan lingkungan perumahan tidak layak huni di pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan dengan prioritas masyarakat tidak mampu dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan dan masyarakat sehat;
 - 5) Urusan **Penataan Ruang**, kebijakan belanja di prioritaskan untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang khususnya mengantisipasi perkembangan tata ruang kota sehingga perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan;
 - 6) Urusan **Perencanaan pembangunan**, kebijakan di arahkan untuk peningkatan program perencanaan pembangunan daerah sehingga selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - 7) Urusan **Perhubungan**, kebijakan diarahkan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
 - 8) Urusan **Lingkungan Hidup**, kebijakan diarahkan untuk mendukung upaya **pemerintah** daerah dalam melakukan tindakan nyata dalam rangka peningkatan pelestarian kualitas lingkungan dan pengendalian lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan bersih terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - 9) Urusan **Pertanahan**, melakukan penertiban dan penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik daerah serta memfasilitasi penyelesaian konflik(konflik pertanahan);
 - 10) Urusan **Kependudukan**, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil dengan melakukan penataan dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan untuk menghasilkan informasi kependudukan yang akurat dalam rangka pengendalian dan penentuan kebijakan kependudukan oleh pemerintah daerah;
 - 11) Urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
 - 12) Urusan **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, meningkatkan pelayanan KB dan KIE serta alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui pelayanan KB keliling dan

- pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri melalui kelompok kegiatan masyarakat dan posyandu;
- 13) Urusan **Sosial**, penanggulangan masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial lainnya dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan berusaha sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial;
 - 14) Urusan **Tenaga Kerja**, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemberian perlindungan tenaga kerja serta pembinaan lembaga ketenagakerjaan;
 - 15) Urusan **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif serta pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah;
 - 16) Urusan **Kebudayaan**, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian nilai-nilai keanekaragaman budaya;
 - 17) Urusan **Kepemudaan dan Olah Raga**, meningkatkan pembinaan dan peran kepemudaan serta pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
 - 18) Urusan **Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri**, meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan menjaga kondusifitas wilayah, peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam;
 - 19) Urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut.
 - (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD;
 - (b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - (c) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta fasilitas pengelolaan keuangan desa;
 - (d) Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - (e) Penataan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - (g) Peningkatan kerja sama dan koordinasi pemerintahan.
 - 20) Urusan **Ketahanan Pangan**, peningkatan ketahanan pangan daerah melalui pemetaan daerah rawan pangan, mengendalikan dan menjaga ketersediaan kebutuhan pangan serta menjaga kelancaran distribusi pangan daerah;
 - 21) Urusan **Pemberdayaan Masyarakat Desa**, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan peran perempuan di pedesaan;
 - 22) Urusan **Kearsipan**, peningkatan kualitas sistem administrasi kearsipan sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sebagai salah satu sumber informasi daerah;
 - 23) Urusan **Perpustakaan**, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang pembelajar.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut.

- 1) Urusan **Pertanian**, peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas/kuantitas hasil produksi pertanian, peternakan dan perkebunan dengan menyediakan sarana, prasarana dan teknologi pertanian, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kemudahan dalam mendapatkan pupuk, kemudahan akses distribusi pemasaran hasil produksi pertanian;
- 2) Urusan **Kehutanan**, pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pembinaan dan penertiban industri hasil hutan serta pengembangan hutan;
- 3) Urusan **Kelautan dan Perikanan**, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan dan pengembangan pemanfaatan budi daya perikanan laut dan air tawar dengan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi pemasaran hasil perikanan;
- 4) Urusan **Perdagangan**, peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah serta pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- 5) Urusan **Perindustrian**, pengembangan industri kecil menengah dengan meningkatkan kemampuan penerapan teknologi industri serta pengembangan sentra (sentra industri potensial).

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah di dalam APBD 2018 sebagai berikut.

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat tunjangan keluarga dan mutasi pegawai telah diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2018 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah; dan
- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2018.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b) Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah;
- c) Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria

yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas; dan

- d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

3) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

4) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah daerah menganggarkan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan maksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan estimasi kegiatan (kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018).

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Untuk merencanakan alokasi belanja dalam APBD agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur;
- 2) Anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

3) Belanja Pegawai

Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTD) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.

4) Belanja Barang dan Jasa

- a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

- b) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
 - d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
 - e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor;
 - f) Dalam rangkaantisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan agar mengambill langkah(langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, system, standar pengelolaan, keterampilan, dsb) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku serta penyiapan sarana dan prasarana;
 - g) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud.
- 5) Belanja Modal
- a) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam merencanakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah;
 - b) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; dan
 - c) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

c. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut.

- a. Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk :
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Pembayaran pokok utang;
 - 3) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial; dan
 - 4) Pemberian pinjaman kepada pihak lain maupun kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir.

- b. Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran antara lain:
- 1) Penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Pencairan dana cadangan;
 - 3) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank/ bukan bank maupun pihak lainnya; dan
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/masyarakat.

2.2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD meliputi indikator pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

a. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH

Indikator pencapaian target kinerja pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara keseluruhan mencapai Rp2.077.396.056.404,23. Jumlah tersebut merupakan 99,20% dari anggaran sebesar Rp2.094.116.512.299,30. Dengan demikian pencapaian target kinerja pendapatan secara total sudah memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

b. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA DAERAH

Indikator pencapaian target kinerja belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di dalam APBD tahun 2018 belanja dianggarkan sebesar Rp2.256.619.621.618,47 dengan realisasi sebesar Rp2.100.383.026.799,75.

c. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBIAYAAN DAERAH

Indikator pencapaian target pembiayaan daerah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp172.511.647.977,85 dari anggaran sebesar Rp171.003.109.319,17. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja pembiayaan 100,93% mengindikasikan pencapaian target kinerja sesuai harapan di dalam APBD.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3. 1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. PENDAPATAN DAERAH

Pada APBD Tahun 2018, secara keseluruhan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.094.116.512.299,30. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp2.077.396.056.404,23 atau 99,20% dari anggaran. Realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dimana realisasi tahun 2017 mencapai 98,17% dari anggaran. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pendapatan Daerah Tahun 2018
(dalam rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi 2018	Realisasi 2017	%	Pelampauan Target	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	324.253.671.099,01	95,63	(12.344.838.678,07)	(4,37)
Pendapatan Pajak Daerah	64.340.000.000,00	66.738.332.790,00	54.156.334.941,00	103,73	2.398.332.790,00	3,73
Pendapatan Retribusi Daerah	47.521.950.735,00	44.777.545.701,75	33.577.572.815,50	94,22	(2.744.405.033,25)	(5,78)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.846.067.911,00	5.756.141.496,43	2.983.324.803,80	84,08	(1.089.926.414,57)	(15,92)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.776.690.916,30	152.867.850.896,05	233.536.438.538,71	93,34	(10.908.840.020,25)	(6,66)
PENDAPATAN TRANSFER	1.726.189.256.737,00	1.722.898.573.232,00	1.627.362.540.768,00	99,81	(3.290.683.505,00)	(0,19)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.412.446.238.004,00	1.390.713.615.483,00	1.317.925.709.276,00	98,46	(21.732.622.521,00)	(1,54)
Dana Bagi Hasil Pajak	33.197.021.526,00	25.579.762.430,00	43.758.657.232,00	77,05	(7.617.259.096,00)	(22,95)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	60.080.676.447,00	68.776.133.401,00	16.703.105.162,00	114,47	8.695.456.954,00	14,47
Dana Alokasi Cukai	16.860.925.031,00	16.843.019.000,00	-	99,89	(17.906.031,00)	(0,11)
Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	100,00	-	-
Dana Alokasi khusus	329.454.686.000,00	306.661.771.652,00	284.611.017.882,00	93,08	(22.792.914.348,00)	(6,92)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	198.728.393.000,00	198.206.258.000,00	172.636.155.000,00	99,74	(522.135.000,00)	(0,26)
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	198.728.393.000,00	198.206.258.000,00	172.636.155.000,00	99,74	(522.135.000,00)	(0,26)
Transfer Pemerintah Provinsi	115.014.625.733,00	133.978.699.749,00	136.800.676.492,00	116,49	18.964.074.016,00	16,49
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.122.325.733,00	126.086.399.749,00	129.448.889.992,00	117,70	18.964.074.016,00	17,70
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.892.300.000,00	7.892.300.000,00	7.351.786.500,00	100,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	85.442.546.000,00	84.357.612.288,00	4.511.610.425,09	98,73	(1.084.933.712,00)	(1,27)

Keterangan	Anggaran	Realisasi 2018	Realisasi 2017	%	Pelampauan Target	%
Pendapatan Hibah	85.442.546.000,00	83.939.573.702,00	4.141.000.000,00	98,24	(1.502.972.298,00)	(1,76)
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	418.038.586,00	370.610.425,09	-	418.038.586,00	-
JUMLAH PENDAPATAN	2.094.116.512.299,30	2.077.396.056.404,23	1.956.127.822.292,10	99,20	(16.720.455.895,07)	(0,80)

Realisasi PAD Tahun 2018 mencapai 99,20% dari target yang telah ditetapkan di dalam APBD. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pencapaian terget periode sebelumnya, dimana pada Tahun 2017 realisasi PAD mencapai 98,17% dari target yang ditetapkan di dalam APBD tahun 2017.

Kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer, khususnya dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya, dimana besarnya realisasi pendapatan transfer dana perimbangan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penetapan besarnya dana perimbangan yang dialokasikan kepada Kabupaten Lumajang. Sehingga untuk mengukur kinerja keuangan sehubungan dengan pendapatan daerah tidak dapat dilihat dari seberapa besar total pendapatan yang diperoleh Kabupaten Lumajang. Akan sangat relevan jika kinerja tersebut dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dan di gali dari potensi yang ada di daerah yang mencerminkan seberapa besar kemandirian daerah. Dengan demikian, berbagai upaya dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan PAD.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, hanya mencapai 13,00% dari total pendapatan sebesar Rp2.077.396.056.404,23. Angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2017 kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 16,58% dari total pendapatan sebesar Rp1.956.127.822.292,10.

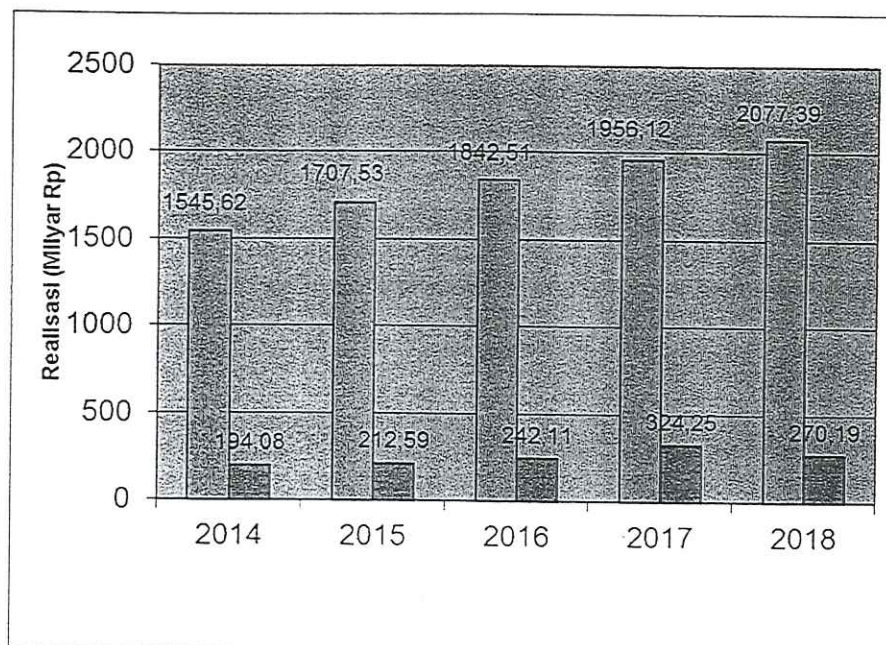
Demikian kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, karena sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Lumajang masih tergantung kepada Pemerintah Pusat. Kondisi ini merupakan tugas berat bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga PAD bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.

Tabel 6. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	270.139.870.884,23	13,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan	1.390.713.615.483,00	66,95
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	198.206.258.000,00	9,54
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	133.978.699.749,00	6,45
5	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	84.357.612.288,00	4,06
	Jumlah Pendapatan	2.077.396.056.404,23	100,00

Gambar 1. menyajikan data tentang perbandingan antara realisasi PAD dengan total pendapatan daerah selama lima tahun terakhir.

Gambar 1.
Diagram Perbandingan Realisasi PAD dengan Total Pendapatan
Tahun 2014 s/d 2018



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi PAD menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi persentase peningkatan PAD dari periode sebelumnya sempat mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel 7.

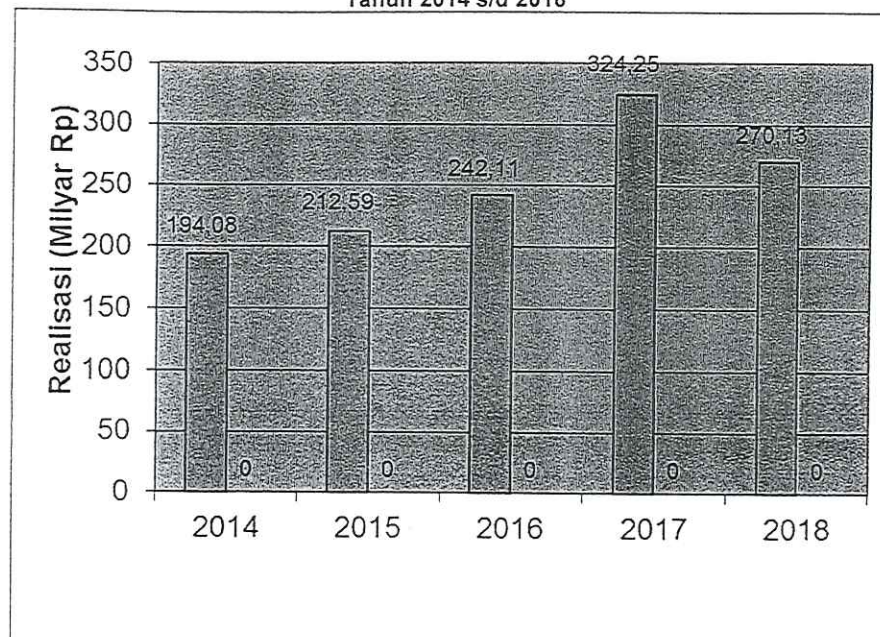
Tabel 7. Realisasi PAD Tahun 2014 s/d 2018

dalam rupiah

Tahun	Realisasi	Kenaikan/Penurunan	%
2014	194.076.104.164,10	81.669.280.030,73	72,66
2015	212.585.093.435,63	18.508.989.271,53	9,54
2016	242.111.541.251,56	29.526.447.815,93	13,89
2017	324.253.671.099,01	82.142.129.847,45	33,93
2018	270.139.870.884,23	(54.113.800.214,78)	(16,69)

Adanya kecenderungan meningkatnya realisasi PAD dari Tahun 2014 s/d Tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penurunan PAD pada tahun 2018 disebabkan karena perubahan nomenklatur pendapatan dana BOS, pada periode sebelumnya pendapatan dana BOS merupakan komponen PAD, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan dana BOS merupakan bagian dari pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 2.
Diagram perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014 s/d 2018



b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan transfer merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan (pemerintah daerah) kepada entitas pelaporan lain (misal pemerintah desa) termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Sebagaimana terlihat di tabel belanja daerah di dalam APBD Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.256.619.621.618,47 realisasi belanja mencapai 93,08% dari anggarannya atau sebesar Rp2.100.383.026.799,75.

**Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja dan Transfer
Tahun 2018**

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.560.844.394.721,67	1.447.790.192.451,79	92,76	(113.054.202.269,88)
2	Belanja Modal	323.810.661.690,80	288.428.035.220,96	89,07	(35.382.626.469,84)
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.976.833.238,00	98,84	(23.166.762,00)
4	Belanja Transfer	369.964.565.206,00	362.187.965.889,00	97,90	(7.776.599.317,00)
	Jumlah Belanja	2.256.619.621.618,47	2.100.383.026.799,75	93,08	(156.236.594.818,72)

1) Belanja Operasi

Pada Tahun 2018 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.560.844.394.721,67 dan terealisasi sebesar Rp1.447.790.192.451,79 dari anggaran. Tabel dibawah ini menyajikan data yang memberikan informasi tentang seberapa besar penyerapan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja operasi.

- a) Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp757.321.746.846,00 dari anggaran sebesar Rp797.477.838.612,76. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2017, penyerapan belanja pegawai tahun 2017 terjadi penurunan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp859.639.514.584,11 dari anggarannya;
- b) Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp513.221.030.400,79 dari anggaran sebesar Rp567.274.045.976,91. Dibandingkan dengan penyerapan tahun 2017, penyerapan belanja barang dan jasa tahun 2018 terjadi kenaikan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp421.895.061.848,97 dari anggarannya;
- c) Belanja bunga tidak dianggarkan jadi terealisasi 0% tidak di target di dalam APBD;
- d) Belanja hibah terealisasi sebesar Rp128.942.462.032,00 dari anggaran sebesar Rp142.948.157.176,00. Dibandingkan dengan penyerapan tahun 2017, penyerapan belanja hibah tahun 2018 terjadi kenaikan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp84.670.257.207,00 dari anggarannya;
- e) Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp47.278.414.217,00 dari anggaran sebesar Rp52.117.814.000,00. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2017, penyerapan belanja bantuan sosial Tahun 2017 terjadi kenaikan dimana pada tahun sebelumnya hanya terserap sebesar Rp31.181.675.232,00 dan;
- f) Belanja bantuan keuangan partai politik terealisasi sebesar Rp1.026.538.956,00 dari anggaran sebesar Rp1.026.538.956,00. Dibandingkan dengan penyerapan Tahun 2017, penyerapan belanja bantuan keuangan partai politik tahun 2017 sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan–Belanja Operasi Tahun 2018

Belanja Operasi	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	797.477.838.612,76	757.321.746.846,00	94,96	(40.156.091.766,76)	(5,30)
Belanja Barang dan Jasa	567.274.045.976,91	513.221.030.400,79	90,47	(54.053.015.576,12)	(10,53)
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	142.948.157.176,00	128.942.462.032,00	90,20	(14.005.695.144,00)	(10,86)
Belanja Bantuan Sosial	52.117.814.000,00	47.278.414.217,00	90,71	(4.839.399.783,00)	(10,24)
Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1.026.538.956,00	1.026.538.956,00	100,00	-	-
Jumlah	1.560.844.394.721,67	1.447.790.192.451,79	92,76	(113.054.202.269,88)	(7,81)

Perbandingan realisasi belanja operasi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

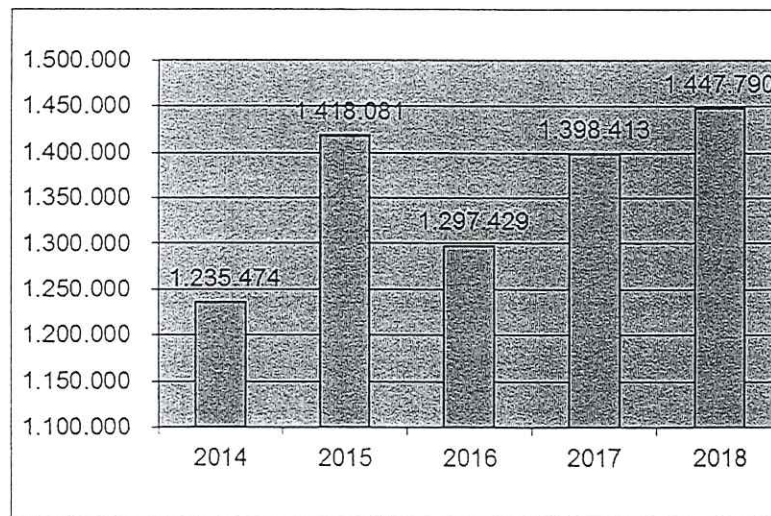
Tabel 10. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018

dalam rupiah

Belanja	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Pegawai	821.757.416.522,00	864.868.965.576,00	850.460.391.092,00	859.639.514.584,11	757.321.746.846,00
Belanja Barang	206.971.829.138,00	245.606.152.967,00	321.960.533.774,90	421.895.061.848,97	513.221.030.400,79
Belanja Bunga	1.015.211,00	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	124.429.865.324,00	105.627.598.950,00	100.026.167.533,00	84.670.257.207,00	128.942.462.032,00
Bantuan Sosial	18.740.111.966,00	19.069.692.457,00	24.016.354.509,00	31.181.675.232,00	47.278.414.218,00
Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota/ & Pemdes	-	587.741.237,00	-	-	-
Bantuan Keuangan Lainnya	63.574.254.746,87	182.321.607.148,46	966.159.267,00	1.026.538.956,16	1.026.538.956,16
Jumlah	1.235.474.492.907,87	1.418.081.758.335,46	1.297.429.606.175,90	1.398.413.047.828,24	1.447.790.192.452,95
% Kenaikan	15,24	14,78	(8,51)	7,78	3,53

Realisasi belanja operasi dari Tahun 2018 mengalami kenaikan 3,53% dari Tahun 2017, dimana realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.398.413.047.828,24 dan realisasi tahun 2018 Rp1.447.790.192.452,95. Kenaikan belanja operasi terutama disebabkan adanya kebijakan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan berimbang pada realisasi belanja pemerintah daerah. Gambar 3. menyajikan Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Operasi.

Gambar 3.
Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2014-2018



2) Belanja Modal

Pada tahun 2018 belanja modal dianggarkan sebesar Rp323.810.661.690,80 dan terealisasi sebesar Rp288.428.035.220,96. Tabel berikut menyajikan data yang memberikan informasi tentang realisasi belanja modal dibandingkan dengan anggarannya.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal Tahun 2018

dalam rupiah

No	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Tanah	8.876.250.000,00	7.004.632.997,00	78,91	(1.871.617.003,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.661.845.681,00	74.751.188.303,37	85,27	(12.910.657.377,63)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	93.808.612.213,00	84.921.598.485,16	90,53	(8.887.013.727,84)
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	107.104.854.693,00	98.178.259.981,43	91,67	(8.926.594.711,57)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.104.293.736,00	17.757.264.954,00	98,08	(347.028.782,00)
6	Belanja Aset Lainnya	8.254.805.367,80	5.815.090.500,00	70,44	(2.439.714.867,80)
	Jumlah	323.810.661.690,80	288.428.035.220,96	89,07	(35.382.626.469,84)

Tabel 11 menyajikan informasi mengenai proporsi realisasi tiap-tiap jenis belanja modal dalam memberikan kontribusi terhadap realisasi total. Dari total realisasi belanja modal Rp288.428.035.220,96 sebesar 98,08% terserap untuk belanja modal aset tetap lainnya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

Proporsi penyerapan kedua terbesar adalah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 91,67% yang digunakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam bentuk pembangun dan rehabilitasi gedung dan bangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar dan sarana umum lainnya serta pembangunan gedung dan bangunan kantor atau tempat kerja.

Yang ketiga adalah belanja modal gedung dan bangunan sebesar 90,53% yang mengindikasikan pemerintah daerah memiliki perhatian dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta irigasi dan jaringan.

Belanja peralatan dan mesin menyerap sebesar 78,91% dari total realisasi belanja modal, antara lain digunakan untuk belanja alat kantor dan alat rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran dan alat kesehatan, kendaraan dinas untuk operasional, alat-alat pertanian dan perikanan serta peralatan dan mesin lainnya.

Belanja modal tanah, belanja modal aset lainnya proporsinya kurang dari 80% dari total realisasi belanja modal.

Tabel 12. Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun 2018

dalam rupiah

No	Belanja Modal	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	7.004.632.997,00	2,43
2	Belanja Peralatan dan mesin	74.751.188.303,37	25,92
3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.921.598.485,16	29,44
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.178.259.981,43	34,04
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.757.264.954,00	6,16
6	Belanja Aset Lainnya	5.815.090.500,00	2,02
	Jumlah	288.428.035.220,96	100,00

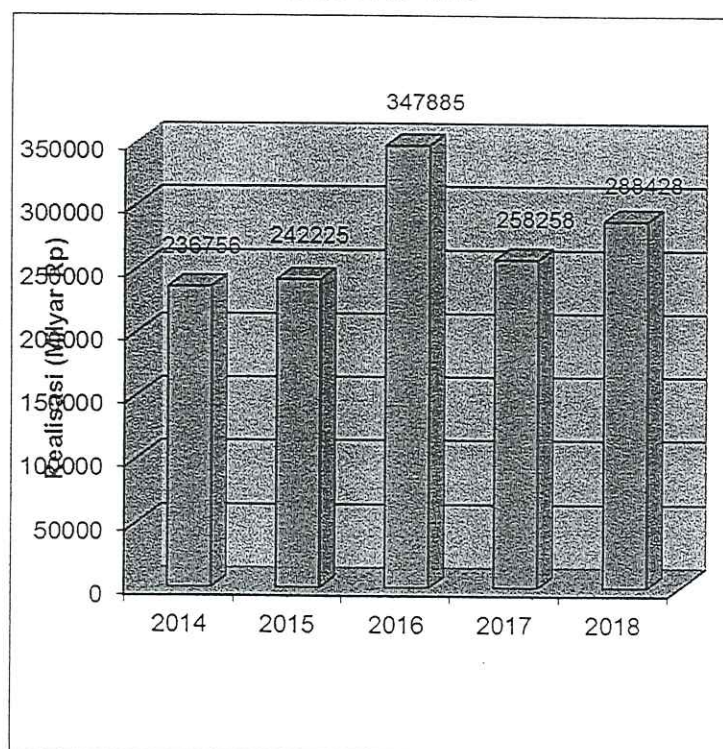
Realisasi belanja modal dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan sesuai dengan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 s.d. 2018

dalam rupiah

Jenis Belanja Modal	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Tanah	269.006.000,00	2.605.926.815,00	13.397.470.320,00	1.048.921.020,00	7.004.632.997,00
Belanja Peralatan dan Mesin	63.649.753.112,00	64.734.209.380,00	93.576.726.712,45	80.783.643.796,00	74.751.188.303,37
Belanja Gedung dan Bangunan	77.089.963.197,00	80.470.381.290,00	108.689.899.758,00	88.166.020.917,00	84.921.598.485,16
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.619.310.585,00	89.594.782.455,83	123.420.214.463,00	68.240.283.621,00	98.178.259.981,43
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.853.734.482,00	1.822.457.100,00	3.143.587.705,00	16.087.112.470,00	17.757.264.954,00
Belanja Aset Lainnya	3.274.968.775,00	2.997.402.200,00	5.657.702.350,00	3.932.169.180,00	5.815.090.500,00
Jumlah	236.756.736.151,00	242.225.159.240,83	347.885.601.308,45	258.258.151.004,00	288.428.035.220,96
Kenaikan (penurunan)	73.700.897.422,00	5.468.423.089,83	105.660.442.067,62	(89.627.450.304,45)	30.169.884.216,96
% Kenaikan (penurunan)	31,13	2,26	30,37	(34,70)	10,46

Gambar 4. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 - 2018



3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Tahun 2018 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.976.833.238,00 atau 98,84% dari anggaran.

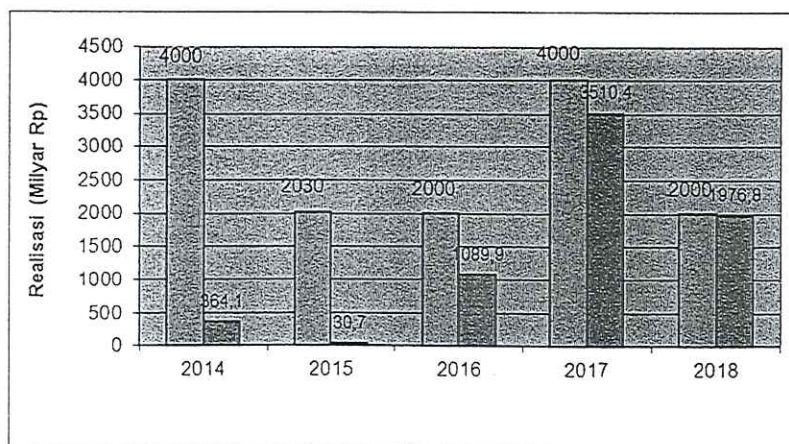
Realisasi belanja tak terduga selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan jika terjadi bencana alam. Kabupaten Lumajang merupakan daerah rawan bencana alam, mengingat kondisi sebagian wilayahnya terdiri dari pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 realisasi belanja tidak terduga cenderung naik turun, tetapi pada tahun 2018 realisasinya kembali naik.

Tabel 14. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2014 s.d. 2018

dalam rupiah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2014	4.000.000.000,00	364.110.000,00	9,10
2015	2.030.000.000,00	30.700.000,00	1,51
2016	2.000.000.000,00	1.089.978.150,00	54,50
2017	4.000.000.000,00	3.510.495.735,00	87,76
2018	2.000.000.000,00	1.976.833.238,00	98,84

Gambar 5. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2014 - 2018



4) Belanja Transfer (transfer keluar)

Belanja transfer (pengeluaran transfer) merupakan pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam hal ini adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa berupa dana bagi hasil yang diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan. Belanja transfer/bagi hasil ke desa Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp369.964.565.206,00 dan terealisasi sebesar Rp362.187.965.889,00 yang merupakan reklasifikasi pemberian bantuan keuangan kepada desa dan partai politik yang awalnya dicatat sebagai belanja operasi yang kemudian dicatat sebagai transfer.

c. PEMBIAYAAN DAERAH (FINANCING)

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pembiayaan Daerah Tahun 2018
dalam rupiah

No	Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Penggunaan Silpa	134.753.109.319,17	130.847.283.837,36	97,10	(3.905.825.481,81)
	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	40.490.365.140,49	115,69	5.490.365.140,49
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.250.000.000,00	1.173.999.000,00	93,92	(76.001.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	171.003.109.319,17	172.511.647.977,85	100,88	1.508.538.658,68
2	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	-
	Pembiayaan Netto	162.503.109.319,17	164.011.647.977,85	100,93	1.508.538.658,68

Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp171.003.109.319,17 yang bersumber dari silpa tahun lalu, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana yang tampak pada tabel, realisasinya mencapai 100,88% atau sebesar Rp172.511.647.977,85. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 untuk penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran pokok utang belanja yang realisasinya mencapai 100% atau Rp8.500.000.000,00. Secara keseluruhan pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp164.011.647.977,85 atau 100,93% dari yang direncanakan.

3.2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3.2.1. Aset Daerah

Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan. Posisi dan perkembangan aset daerah selama lima tahun terakhir sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 16. Perkembangan Posisi Aset Daerah Per 31 Desember 2014 s.d. 2018

Jenis Aset	2014	2015	2016	2017	2018
1. Aset Lancar	352.502.125.063,62	383.749.067.150,72	262.878.707.151,18	245.423.835.217,81	252.206.344.422,65
2. Investasi Jk. Panjang	22.041.971.178,15	22.974.465.900,73	37.561.519.154,17	45.194.519.321,15	54.905.352.834,12
3. Aset Tetap	2.125.736.573.235,00	1.416.517.066.369,28	1.744.311.754.595,48	1.988.904.196.618,94	1.963.591.557.110,59
4. Dana Cadangan	-	28.267.000.000,00	33.890.911.468,69	39.338.270.790,56	-
3. Aset Lainnya	108.028.398.399,00	106.028.728.565,80	115.634.214.251,65	111.732.438.254,12	114.651.847.084,04
Jumlah	2.608.309.067.875,77	1.957.536.327.986,53	2.194.277.106.621,17	2.430.593.260.202,58	2.385.355.101.451,40
Kenaikan (penurunan)	325.145.866.112,17	(650.772.739.889,24)	236.740.778.634,64	236.316.153.581,41	(45.238.158.751,18)
%	12,47	(33,24)	10,79	9,72	(1,90)

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.

Tabel 17. Perkembangan Posisi Kewajiban Daerah Per 31 Desember 2014 s.d. 2018

KEWAJIBAN	2014	2015	2016	2017	2018
1. Kewajiban Jangka Pendek	750.193.549,20	13.425.468.761,33	14.645.534.117,23	18.166.590.499,77	30.134.238.578,00
2. Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	750.193.549,20	13.425.468.761,33	14.645.534.117,23	18.166.590.499,77	30.134.238.578,00

Kewajiban jangka pendek tahun 2018 sebagaimana tabel diatas merupakan pendapatan diterima di muka dan utang belanja yang merupakan implikasi penerapan basis akrual. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki utang jangka panjang.

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih milik pemerintah daerah. Posisi ekuitas pemerintah daerah pada akhir tahun 2014 s/d 2018 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 18. Perkembangan Posisi Ekuitas Dana per 31 Des 2014 s.d. 2018

Tahun	Jumlah (Rp)
2012	1.980.855.794.064,47
2013	2.280.003.811.793,60
2014	2.608.309.067.875,62
2015	2.087.119.149.095,35
2016	2.194.277.106.621,17
2017	2.412.426.669.702,81
2018	2.355.220.862.873,40

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

3.1.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan Lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

3.1.2. Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan maupun BPK.

3.1.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam hal ini Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan entitas akuntansi terdiri dari:

- 1 Dinas Pendidikan
- 2 Dinas Pendidikan – Sekretariat
- 3 Dinas Pendidikan – Pendidikan Dasar
- 4 Dinas Pendidikan – Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- 5 Dinas Pendidikan – Guru dan Tenaga Kependidikan
- 6 Dinas Pendidikan – Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 7 Dinas Kesehatan
- 8 Puskesmas Tempursari
- 9 Puskesmas Pronojiwo
- 10 Puskesmas Candipuro
- 11 Puskesmas Penanggal
- 12 Puskesmas Pasirian
- 13 Puskesmas Bades
- 14 Puskesmas Tempeh
- 15 Puskesmas Gesang
- 16 Puskesmas Rogotrunan
- 17 Puskesmas Labruk Kidul
- 18 Puskesmas Tekung
- 19 Puskesmas Kunir
- 20 Puskesmas Yosowilangun
- 21 Puskesmas Summersari
- 22 Puskesmas Jatiroto
- 23 Puskesmas Randuagung
- 24 Puskesmas Sukodono
- 25 Puskesmas Padang
- 26 Puskesmas Pasrujambe
- 27 Puskesmas Senduro
- 28 Puskesmas Gucialit
- 29 Puskesmas Kedungjajang
- 30 Puskesmas Klakah
- 31 Puskesmas Ranuyoso
- 32 Puskesmas Tunjung
- 33 Laboratorium Kesehatan Kabupaten
- 34 Balai Kesehatan Olahraga
- 35 Instalasi Perbekalan Farmasi Kabupaten Lumajang
- 36 RSUD dr. Haryoto
- 37 RSUD Pasirian
- 38 Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang

- 39 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 40 Satuan Polisi Pamong Praja
- 41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 43 Dinas Sosial
- 44 Dinas Tenaga Kerja
- 45 Dinas Ketahanan Pangan
- 46 Dinas Lingkungan Hidup
- 47 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 48 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 49 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- 50 Dinas Perhubungan
- 51 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 52 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 53 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 54 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 55 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 56 Dinas Perikanan
- 57 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 58 Dinas Pertanian
- 59 Dinas Perdagangan
- 60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 61 Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 62 Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- 63 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- 64 Badan Kepegawaian Daerah
- 65 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 66 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 67 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 68 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
- 69 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan
- 70 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Energi Sumberdaya Alam dan Perekonomian
- 71 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
- 72 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
- 73 Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 74 Sekretariat Daerah - Bagian Umum
- 75 Sekretariat Daerah - Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- 76 Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- 77 Sekretariat DPRD
- 78 Inspektorat Kabupaten
- 79 Kecamatan Lumajang
- 80 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Citrodiwangsan
- 81 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Ditotrunan
- 82 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan
- 83 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogoyudan
- 84 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Tompokersan

- 85 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Rogotruman
- 86 Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo
- 87 Kecamatan Sukodono
- 88 Kecamatan Padang
- 89 Kecamatan Gucialit
- 90 Kecamatan Senduro
- 91 Kecamatan Pasrujambe
- 92 Kecamatan Sumbersuko
- 93 Kecamatan Tempeh
- 94 Kecamatan Pasirian
- 95 Kecamatan Candipuro
- 96 Kecamatan Pronojiwo
- 97 Kecamatan Tempursari
- 98 Kecamatan Kunir
- 99 Kecamatan Yosowilangun
- 100 Kecamatan Tekung
- 101 Kecamatan Rowokangkung
- 102 Kecamatan Jatiroto
- 103 Kecamatan Randuagung
- 104 Kecamatan Klakah
- 105 Kecamatan Ranuyoso
- 106 Kecamatan Kedungjajang

Entitas akuntansi sebagaimana tersebut di atas adalah entitas akuntansi sesudah diberlakukannya ketentuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

4.2. BASIS AKUNTANSI

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disusun berdasarkan basis akrual (*accrual*). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:

- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
- 3) Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari :
 - (a) Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu penerimaan pendapatan pada SKPD yang belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi:
 - (1) Kas di Bendahara Umum BLUD terdiri dari rekening penerimaan BLUD, rekening pengeluaran BLUD, dan rekening Kas Umum Umum BLUD;
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, yaitu penerimaan pendapatan BLUD yang belum disetorkan ke Rekening Penerimaan BLUD sampai dengan akhir periode akuntansi;
 - (3) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, meliputi sisa uang tunai dan/atau saldo bank yang ada pada rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas;
 - (4) Kas di entitas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Kas Daerah, seperti saldo rekening di bank maupun uang tunai yang menjadi tanggungjawab Bendahara Dana BOS serta kas lainnya dalam bentuk apapun yang pengelolaannya diluar mekanisme Rekening Kas Umum Daerah.

Kas dicatat sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
- 2) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
- 3) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Piutang Daerah

1) Piutang Pajak dan Retribusi

Piutang pajak dan piutang retribusi diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak/piutang retribusi daerah di ukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan.

2) Piutang lainnya

Piutang lainnya meliputi jenis piutang berikut:

a) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Atas penyertaan modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, piutang diakui pada saat perusahaan mengumumkan pembagian deviden melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.

Untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD) berbentuk selain perseroan terbatas, piutang diakui pada saat timbul hak atas laba perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah.

Di ukur sebesar nilai nominal pendapatan deviden/bagian laba perusahaan daerah yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

b) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat timbul hak tagih atas Lain-lain PAD yang sah dan diukur sebesar nilai nominal yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan berdasarkan bukti pendukung/dokumen.

c) Piutang Transfer

Piutang transfer meliputi piutang kepada Pemerintah Pusat atas dana bagi hasil pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah propinsi.

Piutang transfer diakui pada akhir periode akuntansi pada saat timbul hak atas pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi yang kurang salur/belum ditransfer ke kas daerah dan pemerintah pusat/propinsi mengakuinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.

Piutang transfer di ukur sebesar nilai pendapatan transfer yang belum di terima sampai dengan akhir periode akuntansi berdasarkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.

d) Piutang pendapatan daerah lainnya

Piutang pendapatan daerah lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya, disajikan sebesar jumlah hak atas pendapatan tersebut yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

e) Piutang pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan dari kas daerah, dan didukung dengan adanya naskah perjanjian pemberian pinjaman yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya (biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

f) Piutang Tuntutan Ganti Rugi (Piutang TGR)

TGR yang diselesaikan di luar pengadilan, piutang diakui pada saat diterbitkan SK Pembebanan/SKP2K/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang tuntutan ganti rugi disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang disebabkan karena pelunasan, penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern pemerintah daerah, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbuku

Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbuku, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan akun penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

a. Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1) Kualitas Piutang Pajak dibedakan sebagai berikut.

- a) Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Macet, jika umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2) Kualitas Piutang Retribusi dibedakan sebagai berikut.

- a) Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b) Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c) Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d) Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

3) Kualitas Piutang Lainnya dibedakan sebagai berikut.

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

b. Penyisihan piutang tidak tertagih

Prosentase penyisihan piutang tak tertagih ditentukan sebagai berikut.

- 1) 0,5% dari jumlah piutang kategori lancar;
- 2) 10% dari jumlah piutang kategori kurang lancar;
- 3) 50% dari jumlah piutang kategori diragukan; dan
- 4) 100% dari jumlah piutang kategori macet.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan penyesuaian agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

c. Persediaan

1) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang

- cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

Pengukuran persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

- 1) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;
- 2) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
- 4) Persediaan dicatat dengan metode fisik/periodik.

d. Investasi

Perolehan investasi secara tunai, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah. Sedangkan investasi yang perolehannya dengan penyerahan aset selain kas diakui pada saat aset selain kas tersebut diserahkan.

Pengakuan investasi harus memenuhi kriteria yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran investasi jangka pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga yang terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Sedangkan jika tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

Pengukuran investasi jangka panjang sebagai berikut

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek (proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi

- a. **Metode biaya**, untuk kepemilikan investasi kurang dari 20% dan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.
- b. **Metode ekuitas**, untuk kepemilikan investasi 20% sampai 50%; lebih dari 50%; atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan:
 - (1) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
 - (2) Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
 - (3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, termasuk investasi non permanen. Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi

Pengakuan hasil investasi

- a. Hasil investasi jangka pendek seperti bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividen*), diakui pada saat diperoleh dan di catat sebagai pendapatan.

- b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
- d. Hasil investasi berupa dividen saham tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan karena sebab lainnya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi dan disajikan di laporan operasional.

e. Aset Tetap

Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtanggankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 2 tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.

- 2) Masa manfaat 4 tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.
- 3) Masa manfaat 5 tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.
- 4) Masa manfaat 8 tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- 5) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Alat-Alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga/Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory; senjata api;
- 6) Masa manfaat 15 tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
- 7) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
- 2) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Jalan; Bang. Pengaman Sungai & Penangg Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;
- 2) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Instalasi Pengaman, jaringan telepon;
- 3) Masa manfaat 25 tahun (4%) untuk aset tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sbr. Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;
- 4) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
- 5) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Jembatan; bangunan air irigasi; bangunan air pasang surut;

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

Kapitalisasi aset tetap

Pengeluaran atas pembelian baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap sepanjang pengeluaran tersebut memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tanah dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap tanah, meliputi biaya pembebasan tanah; biaya pembayaran honor tim pembebasan tanah; biaya pembuatan sertifikat tanah; biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan tanah; biaya-biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga membawa aset tetap tanah ke kondisi siap untuk dimanfaatkan.

Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.

Pengeluaran biaya setelah perolehan awal dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat dan memenuhi batas minimal pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin Rp500.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin dengan jumlah berapapun untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar peralatan dan mesin berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

Pengeluaran biaya setelah perolehan awal aset tetap minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikapitalisasi menambah nilai gedung dan bangunan sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.

Pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi atau untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar gedung dan bangunan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat, yang disebabkan karena adanya perbaikan, penambahan dan pengembangan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar jalan, irigasi dan jaringan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai jalan, irigasi dan jaringan serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap lainnya, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar aset tetap lainnya berfungsi normal sebagaimana

mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap lainnya serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika pekerjaan konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman seperti bunga dan biaya pinjaman lainnya yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain.

1). Tagihan jangka panjang, meliputi:

- Tagihan penjualan angsuran diperoleh dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat daerah pemerintah daerah, diakui pada saat timbul hak/klaim atas penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam 1 (satu) periode akuntansi diakui sebagai piutang sebagai bagian dari aset lancar.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2). Kemitraan dengan pihak ke tiga, meliputi :

- (a) Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.
- (b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).
- (c) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) adalah kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- (d) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3). Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi *Software* komputer; Lisensi dan *Frenchise*; Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dikukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) tahun.

4). Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain.

g. Dana Cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS).

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam SP2D LS pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Bunga/Jasa Giro dari rekening dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal diakui/dikapitalisasi menambah saldo dana cadangan; dan

Pencairan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah berdasarkan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bank tempat Rekening Dana Cadangan di simpan.

h. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Jenis Kewajiban

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan kewajiban

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (*non exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain

di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government acknowledge events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

- 1) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- 2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
- 5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- 6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut.
 - (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
 - (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

i. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

j. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

k. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

I. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan

- 1) Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.

Pengeluaran pembiayaan

- 1) Adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
- e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA mencakup pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA; pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
A. Pendapatan Daerah	2.094.116.512.299,30	2.077.396.056.404,23	1.956.127.822.292,10

Pendapatan daerah di dalam LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2018 dan 2017 sebagaimana tersaji dalam Tabel 19 berikut.

Tabel 1. Rrealisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4(6)	8=7/6
1	Pendapatan Asli Daerah	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	95,63	324.253.671.099,01	(54.113.800.214,78)	(16,69)
2	Pendapatan Transfer	1.726.189.256.737,00	1.722.898.573.232,00	99,81	1.627.362.540.768,00	95.536.032.464,00	5,87
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	85.442.546.000,00	84.357.612.288,00	98,73	4.511.610.425,09	79.846.001.862,91	1.769,79
	Jumlah	2.094.116.512.299,30	2.077.396.056.404,23	99,20	1.956.127.822.292,10	121.268.234.112,13	6,20

Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp2.077.396.056.404,23 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp2.094.116.512.299,30. Realisasi per kelompok pendapatan daerah berkisar antara 95,63%, 98,73%, 99,81%.

- Realisasi pendapatan asli daerah mencapai 95,63% dari anggaran sebesar Rp282.484.709.562,30. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat penurunan sebesar Rp54.113.800.214,78 atau 16,69%. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2017 pendapatan dari Dana Bos merupakan komponen lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan Dana BOS merupakan pendapatan hibah dan menjadi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Realisasi pendapatan transfer mencapai 99,81% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp95.536.032.464,00 atau 5,87%.

- c. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah mencapai 98,73% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat kenaikan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2018 pendapatan Dana Bos menjadi komponen pendapatan hibah sedangkan pada tahun 2017 pendapatan Dana Bos merupakan komponen lain-lain PAD yang sah.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	324.253.671.099,01

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian realisasi PAD tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Daerah	64.340.000.000,00	66.738.332.790,00	103,73	54.156.334.941,00	12.581.997.849,00	23,23
2	Retribusi Daerah	47.521.950.735,00	44.777.545.701,75	94,22	33.577.572.815,50	11.199.972.886,25	33,36
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.846.067.911,00	5.756.141.496,43	84,08	2.983.324.803,80	2.772.816.692,63	92,94
4	Lain-lain PAD Yang Sah	163.776.690.916,30	152.867.850.896,05	93,34	233.536.438.538,71	(80.668.587.642,66)	(34,54)
	Jumlah	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	95,63	324.253.671.099,01	(54.113.800.214,78)	(16,69)

Realisasi pendapatan asli daerah mencapai 95,63% dari anggaran sebesar Rp282.484.709.562,30. Realisasi setiap obyek PAD tidak mencapai target, kecuali pajak daerah mencapai 103,73%.

Dibandingkan tahun 2017 realisasi PAD tahun 2018 turun Rp54.113.800.214,78 atau 16,69%. Penurunan ini dikarenakan pendapatan Dana Bos yang semula merupakan komponen lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan Dana BOS merupakan pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.1 Pajak Daerah	64.340.000.000,00	66.738.332.790,00	54.156.334.941,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak reklame, pajak air tanah dan PBB-P2 dipungut dengan sistem *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sedangkan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan dan BPHTB dipungut berdasarkan sistem *self assesment* dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak daerah yang terutang. Rincian realisasi pajak daerah tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	824.407.778,00	82,44	845.426.039,00	(21.018.261,00)	(2,49)
2	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	4.680.983.446,00	156,03	2.631.642.334,00	2.049.341.112,00	77,87
3	Pajak Hiburan	95.000.000,00	91.451.350,00	96,26	96.942.250,00	(5.490.900,00)	(5,66)
4	Pajak Reklame	1.255.000.000,00	1.611.428.122,00	128,40	899.581.713,00	711.846.409,00	79,13
5	Pajak Penerangan Jalan	24.500.000.000,00	25.658.935.797,00	104,73	23.793.100.047,00	1.865.835.750,00	7,84
6	Pajak Parkir	190.000.000,00	168.494.200,00	88,68	190.356.500,00	(21.862.300,00)	(11,48)
7	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	95.584.180,00	191,17	49.049.257,00	46.534.923,00	94,87
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.500.000.000,00	9.482.562.500,00	70,24	5.195.469.150,00	4.287.093.350,00	82,52
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.750.000.000,00	11.310.838.058,00	96,26	11.463.769.872,00	(152.931.814,00)	(1,33)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	12.813.647.359,00	142,37	8.990.997.779,00	3.822.649.580,00	42,52
	Jumlah Pendapatan	64.340.000.000,00	66.738.332.790,00	103,73	54.156.334.941,00	12.581.997.849,00	23,23

Realisasi pajak daerah secara total mencapai Rp66.738.332.790,00 atau 103,73% dari anggarannya. Realisasi tersebut naik 23,23% dibanding realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp54.156.334.941,00. Sebanyak 5 (lima) jenis pajak dari 10 (sepuluh) jenis pajak yang dipungut realisasinya melampaui target dan mengalami peningkatan di banding realisasi tahun 2017, sedangkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak realisasinya tidak mencapai target dan mengalami penurunan di banding realisasi tahun 2017.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.2 Retribusi Daerah	47.521.950.735,00	44.777.545.701,75	33.577.572.815,50

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2018 dan 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel 22 berikut ini.

Tabel 22 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.964.893.935,00	24.248.843.717,00	97,13	11.908.681.794,00	12.340.161.923,00	103,62
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.100.000.000,00	796.175.000,00	72,38	944.400.000,00	(148.225.000,00)	(15,70)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.979.000.000,00	4.943.266.500,00	99,28	4.807.396.500,00	135.870.000,00	2,83
4	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	7.315.318.533,75	97,54	6.969.885.232,50	345.433.301,25	4,96
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.166.000.000,00	1.282.222.500,00	109,97	1.218.470.000,00	63.752.500,00	5,23
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	0,00	0,00	52.701.000,00	(52.701.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	172.357.300,00	161.997.200,00	93,99	20.184.600,00	141.812.600,00	702,58
8	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	934.430.500,00	572.076.998,00	61,22	634.943.038,00	(62.866.040,00)	(9,90)
9	Retribusi Terminal	109.519.000,00	112.678.900,00	102,89	113.110.600,00	(431.700,00)	(0,38)
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.000.000,00	25.190.000,00	104,96	24.015.000,00	1.175.000,00	4,89
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	225.000.000,00	268.125.000,00	119,17	228.770.000,00	39.355.000,00	17,20
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.802.750.000,00	3.132.308.000,00	111,76	3.078.061.000,00	54.247.000,00	1,76
13	Retribusi Ijin Mendirikan	3.033.000.000,00	1.905.703.353,00	62,83	2.342.448.198,00	(436.744.845,00)	(18,64)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
	Bangunan						
14	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00	1.222.185.853,00	(1.222.185.853,00)	(100,00)
15	Retribusi Ijin Trayek	11.000.000,00	13.640.000,00	124,00	12.320.000,00	1.320.000,00	10,71
	Jumlah	47.521.950.735,00	44.777.545.701,75	94,22	33.577.572.815,50	11.199.972.886,25	33,36

Total pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar Rp44.777.545.701,75 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp47.521.950.735,00. Dibanding tahun 2017 realisasi pendapatan retribusi tahun 2018 turun sebesar Rp11.199.972.886,25 atau 33,36%.

Beberapa jenis pendapatan retribusi pencapaiannya telah melampaui target (diatas 100%) seperti retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi rumah potong hewan; retribusi tempat rekreasi dan olah raga serta retribusi ijin trayek. Sementara itu beberapa jenis retribusi yang lainnya realisasinya tidak mencapai terget, antara lain retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengendalian menara telekomunikasi; retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi ijin mendirikan bangunan dan retribusi ijin gangguan/keamanan.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.964.893.935,00	24.248.843.717,00	11.908.681.794,00

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan adalah pendapatan yang dipungut atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan -puskesmas) dan unit kerja lainnya serta Rumah Sakit Daerah yang belum melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan umum Daerah (BLUD), dalam hal ini Rumah Sakit Pasirian.

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan realisasinya tidak mencapai target, mencapai 81,72% atau Rp24.248.843.717,00 dari anggaran sebesar Rp24.964.893.935,00. Dibanding tahun 2017, realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 naik 103,62%.

Realisasi retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas tahun 2018 tidak mencapai target. Realisasi mencapai 81,72% atau Rp7.309.864.750,00. Dibanding dengan tahun 2017 turun sebesar 13,46% atau Rp.1.136.487.600,00. Penurunan ini sebagai dampak dari kebijakan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas.

Sedangkan realisasi retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pasirian mencapai 105,74% dari anggarannya. Dibanding tahun 2017 realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 389,24%. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2018 Rumah Sakit Pasirian beroperasi penuh selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan pada tahun 2017 beroperasi hanya 5 (lima) bulan, mulai tanggal 15 Agustus sampai 31 Desember 2017.

Perbandingan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi (Rp)			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Puskesmas	8.945.003.555,00	7.309.864.750,00	81,72	8.446.352.450,00	(1.136.487.600,00)	(13,46)
2	RSU Pasirian	16.019.890.380,00	16.938.978.967,00	105,74	3.462.329.344,00	13.476.649.623,00	389,24
	Jumlah	24.964.893.935,00	24.248.843.717,00	81,72	11.908.681.794,00	12.340.162.023,00	103,62

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan	1.100.000.000,00	796.175.000,00	944.400.000,00

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan dipungut atas jasa pelayanan di bidang persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) kepada masyarakat meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan tahun 2018 tidak mencapai target, realisasi hanya mencapai 72,38% dari anggarannya dan turun 15,69% dibandingkan realisasi tahun 2017.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	1.000.000.000,00	944.400.000,00	94,44
2	2018	1.100.000.000,00	796.175.000,00	72,38
	Kenaikan (Penurunan)	100.000.000,00	(148.225.000,00)	
	% Kenaikan (Penurunan)	10%	15,69%	

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	4.979.000.000,00	4.943.266.500,00	4.807.396.500,00

Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Lumajang meliputi :

- Parkir berlangganan pemungutannya bekerjasama dengan Samsat Kabupaten Lumajang, dipungut sekali untuk 12 (dua belas) bulan ke depan, pada saat pemilik kendaraan bermotor yang bernomor polisi wilayah kabupaten Lumajang melakukan transaksi dengan samsat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Selanjutnya kendaraan

tersebut tidak di pungut lagi retribusi parkir pada saat memanfaatkan fasilitas parkir di wilayah kabupaten Lumajang.

- b. Parkir konvensional di pungut terhadap kendaraan bermotor dengan nomor polisi di luar wilayah kabupaten Lumajang yang memanfaatkan area parkir di tepi jalan umum yang ada di wilayah kabupaten Lumajang sehingga wajib membayar retribusi parkir di tepi jalan umum.
- c. Tempat khusus parkir

Realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2018 mencapai Rp4.943.266.500,00 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp4.979.000.000,00. Dibanding tahun 2017, realisasi mengalami penurunan sebesar Rp135.870.000,00 atau 2,83%. Rincian realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Parkir Konvensional	100.027.500,00	114.980.000,00	114,95	105.661.000,00	9.319.000,00	8,82
2	Retribusi Parkir Khusus	12.000.000,00	12.284.000,00	102,37	13.623.000,00	(1.339.000,00)	(9,83)
3	Retribusi Parkir Berlangganan	4.866.972.500,00	4.816.002.500,00	98,95	4.688.112.500,00	127.890.000,00	2,73
	Jumlah	4.979.000.000,00	4.943.266.500,00	99,28	4.807.396.500,00	135.870.000,00	2,83

Dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2018 sebesar Rp4.943.266.500,00 termasuk di dalamnya pendapatan retribusi parkir berlangganan diterima di muka sebesar Rp2.384.101.041,67 yang akan menjadi hak atas pendapatan LO di tahun 2019. Sedangkan dari pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2017 sebesar Rp4.807.396.500,00 termasuk di dalamnya pendapatan retribusi parkir berlangganan diterima di muka sebesar Rp2.280.643.333,34 yang sudah menjadi hak atas pendapatan LO di tahun 2018.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan pasar	7.500.000.000,00	7.315.318.533,75	6.969.885.232,50

Retribusi pelayanan pasar dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pelayanan pasar di kabupaten Lumajang meliputi retribusi pasar umum, pasar hewan, perijinan atas peralatan/bangunan pasar dan MCK pasar. Retribusi pelayanan pasar di kelola oleh Dinas Perdagangan.

Retribusi pelayanan pasar tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.315.318.533,75 atau mencapai 97,54%. Untuk tiap-tiap jenis retribusi pelayanan pasar, realisasi retribusi pasar umum daerah dan retribusi pasar hewan tidak mencapai target, masing-masing hanya mencapai 98,34% dan 79,16%. Sedangkan untuk perijinan dan MCK pasar realisasinya melampaui target, masing-masing mencapai 107,09% dan 103,16%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar Rp345.433.301,25 atau 4,96%.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pasar Umum Daerah	6.438.976.800,00	6.332.039.950,00	98,34	6.006.798.448,00	325.241.502,00	5,41
2	Pasar Hewan	545.550.000,00	431.884.000,00	79,16	444.696.500,00	(12.812.500,00)	(2,88)
3	Perijinan atas Peralatan / Bangunan Pasar	499.813.200,00	535.239.583,75	107,09	500.640.284,50	34.599.299,25	6,91
4	MCK Pasar	15.660.000,00	16.155.000,00	103,16	17.750.000,00	(1.595.000,00)	(8,99)
	Jumlah	7.500.000.000,00	7.315.318.533,75	97,54	6.969.885.232,50	345.433.301,25	4,96

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian Kend. Bermotor	1.166.000.000,00	1.282.222.500,00	1.218.470.000,00

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun
Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.166.000.000,00	1.282.222.500,00	109,97	1.218.470.000,00	63.752.500,00	5,23
	Jumlah	1.166.000.000,00	1.282.222.500,00	109,97	1.218.470.000,00	63.752.500,00	5,23

Realisasi tahun 2018 mencapai 109,07% dari anggarannya. Di banding tahun 2017, realisasi meningkat sebesar 5,23% atau Rp63.752.500,00.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekom.	500.000.000,00	0,00	52.701.000,00

Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	% 5=4/3	2017		
1	2	3	4		6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	0,00	0,00	52.701.000,00	(52.701.000,00)	(100)
	Jumlah	500.000.000,00	0,00	0,00	52.701.000,00	(52.701.000,00)	

Tidak terealisasinya pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2018 disebabkan karena pada tahun 2018 kewenangan pemungutannya dilimpahkan dari Dinas Kominfo ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) sedangkan Dinas PUTR pada tahun 2018 masih belum memiliki landasan hukum untuk melaksanakan pemungutan. Akibatnya potensi pendapatan yang sudah di anggarkan menjadi hilang karena tidak di pungut.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(7) Retribusi Pelayanan Tera Ulang	172.357.300,00	161.997.200,00	20.184.600,00

Pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan) atas pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang retribusi tera/tera ulang. Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Didalam APBD tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp172.357.300,00 dengan realisasi sebesar Rp161.997.200,00 atau 93,99%. Dibanding tahun 2017, realisasi tahun 2018 naik sebesar Rp141.812.600,00. atau 702,56%.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Tahun Anggaran 2018 & 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Tera Ulang	172.357.300,00	161.997.200,00	93,99	20.184.600,00	141.812.600,00	702,56
	Jumlah	172.357.300,00	161.997.200,00	93,99	20.184.600,00	141.812.600,00	702,56

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	934.430.500,00	572.076.998,00	634.943.038,00

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian barang milik daerah. Di kabupaten Lumajang retribusi pemakaian kekayaan daerah di pungut oleh beberapa entitas, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Umum, Dinas Pertanian, Puskesmas dan Balai Kesehatan Olahraga.

Secara total realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi hanya mencapai 61,22% dari anggarannya.

Beberapa jenis pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya telah melampaui target (lebih dari 100%), seperti Sewa Alat Berat (Dinas PU), Sewa Alat Laboratorium (Dinas PU) dan pemanfaatan fasilitas fitness pada BAKOR. Sedangkan untuk yang tidak mencapai target (kurang dari 100%) meliputi Sewa Tanah dan Bangunan Pengairan (Dinas PU), Sewa Tanah dan Bangunan (Bagian Umum), Sewa Tanah Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian).

Dibanding tahun 2017 total realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2018 turun 9,90% atau sebesar Rp62.866.040,00. Realisasi tahun 2017 sebesar Rp634.943.038,00 dan realisasi tahun 2018 Rp572.076.998,00. Jika dilihat dari tiap-tiap jenis pendapatan tidak seluruhnya mengalami penurunan di banding tahun 2017. Beberapa jenis pendapatan mengalami penurunan antara lain sewa tanah dan bangunan pengairan (12,93%); sewa tanah dan bangunan (54,83%); sewa tanah untuk ATM pada Puskesmas (77,44%) dan sewa rumah dinas puskesmas (1,63%). Sedangkan yang mengalami peningkatan meliputi sewa alat berat/walla; sewa alat laboratorium; dan pemanfaatan fasilitas fitness pada BAKOR

Tabel 30 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Sewa Tanah dan Bangunan Pengairan	300.952.500,00	128.942.088,00	42,84	148.093.938,00	(19.151.850,00)	(12,93)
2	Sewa alat berat/Walls	160.600.000,00	167.100.000,00	104,05	162.250.000,00	4.850.000,00	2,99

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
3	Sewa Alat Laboratorium	119.473.000,00	142.131.000,00	118,96	121.989.000,00	20.142.000,00	16,51
4	Sewa Tanah dan Bangunan	263.400.000,00	27.244.350,00	10,34	60.313.100,00	(33.068.750,00)	(54,83)
5	Sewa Rumah Dinas (Pertanian)	0,00	502.560,00	0,00	0,00	502.560,00	0,00
6	Sewa Tanah Rumah Potong Hewan	644.000,00	434.000,00	67,39	434.000,00	0,00	0,00
7	Sewa Tanah untuk ATM Puskesmas	0,00	12.000.000,00	0,00	53.200.000,00	(41.200.000,00)	(77,44)
8	Pemanfaatan Fasilitas Fitnes pada BKOR	83.125.000,00	87.579.000,00	105,36	82.417.000,00	5.162.000,00	6,26
9	Sewa Rumah Dinas / Puskesmas	6.236.000,00	6.144.000,00	98,52	6.246.000,00	(102.000,00)	(1,63)
	Jumlah	934.430.500,00	572.076.998,00	61,22	634.943.038,00	(62.866.040,00)	(9,90)

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(9) Retribusi Jasa Usaha Terminal	109.519.000,00	112.678.900,00	113.110.600,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp109.519.000,00 terealisasi 102,89% atau sebesar Rp112.678.900,00, meliputi :

- Retribusi taksi/MPU dianggarkan Rp92.799.900,00 terealisasi Rp92.435.400,00 atau 99,61%;
 - Retribusi kios terminal, dianggarkan Rp12.719.100,00 terealisasi Rp16.393.500,00 atau 128,89%.
 - MCK terminal dianggarkan Rp4.000.000,00 terealisasi Rp3.850.000,00 atau 96,25%.
- Dibanding tahun 2017, total realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal mengalami penurunan sebesar Rp431.700,00 atau 0,38%.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun Anggaran 2018 & 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Taksi/MPU	92.799.900,00	92.435.400,00	99,61	93.575.100,00	(1.139.700,00)	(1,22)

2	Retribusi Kios Terminal	12.719.100,00	16.393.500,00	128,89	15.529.500,00	864.000,00	5,56
3	M C K Terminal	4.000.000,00	3.850.000,00	96,25	4.006.000,00	(156.000,00)	(3,89)
	Jumlah	109.519.000,00	112.678.900,00	102,89	113.110.600,00	(431.700,00)	(0,38)

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(10) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	24.000.000,00	25.190.000,00	24.015.000,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan atas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi mencapai 104,96%. Dibanding tahun 2017, realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus/Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp1.175.000,00 atau naik 4,89%.

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Kend. Bermotor Dengan berat kurang 3.500 Kg	6.750.000,00	9.991.500,00	148,02	4.538.500,00	5.453.000,00	120,14
2	Kend. Bermotor Dng berat 3.500 Kg s/d 15.000 Kg	13.500.000,00	11.786.000,00	87,30	15.349.000,00	(3.563.000,00)	(23,21)
3	Kend. Bermotor Dengan berat lebih 15.000 Kg	3.750.000,00	3.412.500,00	91,00	4.127.500,00	(715.000,00)	(17,32)
	Jumlah	24.000.000,00	25.190.000,00	104,96	24.015.000,00	1.175.000,00	4,89%

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(11) Retribusi Jasa Usaha rumah Potong hewan	225.000.000,00	268.125.000,00	228.770.000,00

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan tahun 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai 119,17% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi retribusi sapi usaha mengalami kenaikan Rp26.225.000,00 atau sebesar 12,96%, sedang retribusi kambing

mengalami penurunan sebesar Rp30.000,00 atau 20,00%. Retribusi sapi hajat tidak ada target dalam APBD.

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Sapi Usaha	217.500.000,00	267.975.000,00	123,21	228.650.000,00	39.325.000,00	17,20
2	Kambing	7.500.000,00	150.000,00	2,00	120.000,00	30.000,00	25,00
	Jumlah	225.000.000,00	268.125.000,00	119,17	228.770.000,00	39.355.000,00	17,20

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.802.750.000,00	3.132.308.000,00	3.078.061.000,00

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Lumajang, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut oleh beberapa entitas antara lain Kantor Pariwisata dan Seni Budaya, Kantor Pemuda dan Olah Raga, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Rincian realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pemandian alam Selokambang	1.450.000.000,00	1.757.609.000,00	121,21	1.612.789.000,00	144.820.000,00	8,98
2	Kawasan Wonorejo Terpadu/KWT	750.000.000,00	784.440.000,00	104,59	743.050.000,00	41.390.000,00	5,57
3	Segitiga Ranu	75.000.000,00	150.336.000,00	200,45	145.080.000,00	5.256.000,00	3,62
4	Pantai bambang	10.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
5	Pantai Wot Galih	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6	Pantai Tempursari	15.000.000,00	8.316.000,00	55,44	35.225.000,00	(26.909.000,00)	(76,39)
7	Goa Tetes	15.000.000,00	4.875.000,00	32,50	9.395.000,00	(4.520.000,00)	(48,11)
8	Tumpak Sewu	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	0,00	5.000.000,00	0,00
9	B 29	12.000.000,00	16.555.000,00	137,96	10.000.000,00	6.555.000,00	65,55
10	Watu Pecak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pantai Dampar	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kolam Renang Veteran	84.000.000,00	99.934.000,00	118,97	97.988.000,00	1.946.000,00	1,99
13	Stadion Semeru	73.750.000,00	64.683.000,00	87,71	140.609.000,00	(75.926.000,00)	(54,00)
14	Sewa GOR Wira Bakti	95.000.000,00	71.060.000,00	74,80	69.925.000,00	1.135.000,00	1,62

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
15	Sewa Gedung	200.000.000,00	159.500.000,00	79,75	180.000.000,00	(20.500.000,00)	(11,39)
	Jumlah	2.802.750.000,00	3.132.308.000,00	111,76	3.078.061.000,00	54.247.000,00	1,76

Realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2018 sebesar Rp 3.132.308.000,00 atau 11,76% dari anggaran sebesar Rp2.802.750.000,00. Dibanding tahun 2017, realisasinya naik sebesar Rp54.247.000,00 atau naik 1,76%.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	3.033.000.000,00	1.905.703.353,00	2.342.448.198,00

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kantor Pelayanan Terpadu atas pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Rincian realisasi pendapatan retribusi IMB tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - IMB Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi IMB	3.033.000.000,00	1.905.703.353,00	62,83	2.342.448.198,00	(436.744.845,00)	(18,64)
	Jumlah	3.033.000.000,00	1.905.703.353,00	62,83	2.342.448.198,00	(436.744.845,00)	(18,64)

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Gangguan/HO	0,00	0,00	1.222.185.853,00

Ijin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada tahun 2018 atas ijin gangguan sudah tidak lagi di pungut retribusi karena tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(15) Retribusi Ijin Trayek	11.000.000,00	13.640.000,00	12.320.000,00

Retribusi Ijin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Rincian realisasi retribusi ijin trayek tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Ijin Trayek dengan KPS tmpt duduk s/d 15 orang	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	4.400.000,00	(2.800.000,00)	(63,64)
2	Ijin Trayek dengan KPS tmpt duduk lebih 16 orang	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33	750.000,00	500.000,00	66,67
3	Jenis angkutan KP tempat duduk s/d 15 orang	3.000.000,00	2.080.000,00	69,33	1.960.000,00	120.000,00	6,12
4	Jenis angkutan KP tempat duduk lebih 16 orang	1.250.000,00	300.000,00	24,00	50.000,00	250.000,00	500,00
5	Truck Insidentil MPU	1.230.000,00	2.070.000,00	168,29	1.140.000,00	930.000,00	81,58
6	Truck Insidentil BUS	2.020.000,00	6.340.000,00	313,86	4.020.000,00	2.320.000,00	57,71
	Jumlah	11.000.000,00	13.640.000,00	124,00	12.320.000,00	1.320.000,00	10,71

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.846.067.911,00	5.756.141.496,43	2.983.324.803,80

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai berikut :

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	PT. Bank Jatim	4.000.000.000,00	2.963.786.584,50	74,09	2.932.871.803,80	30.914.780,70	1,05
2	PT. BPR Jatim	110.316.000,00	56.603.000,00	51,31	50.453.000,00	6.150.000,00	12,19
3	PD. Bank Pasar	-	-	-	-	-	-

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan	%
			2018	%	2017	(Penurunan)	
4	PDAM	2.735.751.911,00	2.735.751.911,93	100,00	-	2.735.751.911,93	-
5	PD. Semeru	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.846.067.911,00	5.756.141.496,43	84,08	2.983.324.803,80	2.772.816.692,63	92,94

- Hasil penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk pada tahun 2018 berupa pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2017 sebesar Rp2.963.786.584,50 dan pada tahun 2017 diterima pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2016 sebesar Rp2.932.871.803,80.
- Hasil penyertaan modal pada PT. BPR Jatim, pada tahun 2018 diperoleh pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2017 sebesar Rp56.603.000,00 dan tahun 2017 diterima pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2016 sebesar Rp50.453.000,00
- PD. BPR Bank Pasar Lumajang, sampai dengan tahun 2018 belum bisa merealisasikan penyetoran bagian laba ke kas daerah dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 5/PJOK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa, BPR dilarang melakukan distribusi laba jika (a) distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); atau (b) BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Oleh karena modal inti PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang tahun 2017 belum mencapai minimum Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), maka distribusi atas laba tahun 2016 dan 2017 belum bisa dilakukan.

Tabel 38 Modal Inti PD. BPR Bank Pasar Kab. Lumajang Tahun 2018 dan 2017

Modal	2018	2017
1. Modal Disetor	16.475.000.000,00	13.475.000.000,00
2. Saldo Laba (Rugi) s/d periode lalu	(9.961.880.485,00)	(10.473.007.908,00)
3. Laba Tahun Berjalan	511.127.423,00	553.563.629,00
4. Modal Inti (1+2+3)	6.513.119.515,00	3.001.992.092,00

Pada tahun 2018 modal inti PD. BPR Bank Pasar mencapai Rp6.513.119.515,00, sehingga atas laba bersih tahun 2018 sebesar Rp511.127.423,00 akan dibagikan ditahun 2019. Sesuai pasal 51 ayat (1) huruf a Perda nomor 03 tahun 2005, bahwa bagian laba untuk daerah sebesar 40% dari laba bersih.

- Bagian laba atas laba baersih PDAM sebesar Rp2.735.751.911,93 merupakan bagian atas laba bersih tahun 2017 dan 2016.
- Pada tahun 2018 tidak ada penerimaan bagian laba dari PD. Semeru.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	163.776.690.916,30	152.867.850.896,05	233.536.438.538,71

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp152.867.850.896,05 atau mencapai 93,34% dari anggaran sebesar Rp163.776.690.916,30. Dibanding tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 34,54% atau (Rp80.668.587.642,66)

Tabel 39 Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah Tahun
Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	321.525.000,00	284.580.000,00	88,51	292.026.000,00	(7.446.000,00)	(2,55)
2	Penerimaan Jasa Giro	5.177.500.000,00	2.545.880.697,16	49,17	3.143.795.180,08	(597.914.482,92)	(19,02)
3	Penerimaan Deposito	13.555.508.964,30	7.118.431.591,21	52,51	9.922.972.880,50	(2.804.541.289,29)	(28,26)
4	Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	0,00	30.493.000,00	0,00	14.945.000,00	15.548.000,00	104,03
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	410.133.618,00	0,00	289.622.782,00	120.510.836,00	41,61
6	Pendapatan Denda Pajak	0,00	183.957.597,00	0,00	134.918.240,00	49.039.357,00	36,35
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	99.850.000,00	0,00	0,00	99.850.000,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.042.584.535,26	0,00	3.043.308.961,84	(2.000.724.426,58)	(65,74)
9	Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto	103.000.000.000,00	100.769.589.493,00	97,83	97.278.908.354,00	3.490.681.139,00	3,59
10	Pendapatan BLUD Akper Pemkab Lumajang	0,00	0,00	0,00	3.325.326.987,00	(3.325.326.987,00)	(100,00)
11	Pendapatan Sewa	1.246.057.000,00	1.344.895.300,00	107,93	1.333.091.553,00	11.803.747,00	0,89
12	Dana Kapitasi JKN	36.276.099.952,00	36.920.833.925,00	101,78	33.954.927.800,00	2.965.906.125,00	8,73
13	Pendapatan Denda Sewa	0,00	2.623.800,00	0,00	2.110.000,00	513.800,00	24,35
14	Penerimaan Lain-lain	4.200.000.000,00	2.073.367.874,00	49,37	1.966.890.350,00	106.477.524,00	5,41
15	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	78.784.812.666,00	(78.784.812.666,00)	(100,00)
16	Pendapatan Bunga Dana BOS	0,00	40.629.465,42	-	48.781.784,29	(8.152.318,87)	(16,71)
	Jumlah	163.776.690.916,30	152.867.850.896,05	93,34	233.536.438.538,71	(80.668.587.642,66)	(34,54)

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp284.580.000,00 meliputi pendapatan sebagai berikut :

- Hasil penjualan drum bekas pada Dinas PUTR sebesar Rp45.810.000,00
- Penjualan hasil pertanian pada Dinas Pertanian sebesar Rp54.480.000,00
- Penjualan hasil perkebunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp60.140.000,00
- Penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp124.150.000,00

Penerimaan jasa giro sebesar Rp2.545.880.697,16 meliputi penerimaan jasa giro rekening sebagai berikut :

- Jasa giro rekening kas umum daerah sebesar Rp2.334.306.560,87
- Jasa giro rekening pengeluaran daerah sebesar Rp121.078.736,36
- Jasa giro rekening penerimaan daerah sebesar Rp233.075,48
- Jasa giro rekening bendahara pengeluaran Rp90.262.324,45

Penerimaan bunga deposito sebesar Rp7.118.431.591,21 merupakan pendapatan bunga deposito atas penempatan uang daerah pada beberapa bank umum dalam bentuk deposito. Penempatan dana dalam bentuk deposito adalah dalam rangka manajemen kas, dan penempatannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Daerah. Rincian deposito beserta pendapatan bunga deposito sebagai berikut.

Tabel 40 Rincian Pendapatan Bunga Deposito Tahun 2018

No	Nama Bank	Nominal (Rp)	No. & Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Pendapatan Bunga	Tanggal Penarikan Kembali
1	PT. BRI Cabang Lumajang	5.000.000.000	<u>916/387/427.73/2014</u> B.2233KC.XVII/OPS/05/2017	1 Bulan	338.315.088,00	27 Desember 2018
2	PT. BRI Cabang Lumajang	10.000.000.000	<u>916/576.3/427.73/2017</u> B.3124A/KC/XVII/OPS/06/2017	1 Bulan	629.150.720,00	27 Desember 2018
3	PT. BRI Cabang Lumajang	10.000.000.000	<u>916/576.3/427.73/2017</u> B.3124A/KC/XVII/OPS/06/2017	1 Bulan	629.150.720,00	27 Desember 2018
4	PT. BRI Cabang Lumajang	5.000.000.000	<u>916/576.3/427.73/2017</u> B.3124A/KC/XVII/OPS/06/2017	1 Bulan	314.575.360,00	27 Desember 2018
5	PT. BRI Cabang Lumajang	10.000.000.000	<u>910/434/427.73/2018</u> B.2209/KC.XVII/OPS/04/2018	1 Bulan	430.246.564,00	27 Desember 2018
6	PT. BRI Cabang Lumajang	10.000.000.000	<u>910/434/427.73/2018</u> B.2209/KC.XVII/OPS/04/2018	1 Bulan	430.246.564,00	27 Desember 2018
7	PT. Bank Jatim Cabang Lumajang	50.000.000.000	<u>916.422/427.36/2015</u> 053/063/PN.C.Lmj	1 Bulan	3.193.493.150,60	26 Desember 2018
8	PT. Bank Jatim Cabang Lumajang	35.000.000.000	<u>910/688.1/427.73/2018</u> 052/160/LM.J/PN/PKS	1 Bulan	916.952.054,77	Belum Ditarik
9	PT. Bank Mandiri Cabang Lumajang	5.000.000.000	<u>916/174/427.73/2017</u> DSB.R08/BR/LM.J/053/2017	1 Bulan	236.301.369,84	Belum Ditarik
	Jumlah	140.000.000.000			7.118.431.591,21	

Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp30.493.000,00 merupakan penerimaan ganti rugi atas kerugian barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang hilang, terinci sebagai berikut :

- Penerimaan pembayaran TGR kehilangan kendaraan dinas roda 2 a.n Sulis Inspektorat Rp1.700.000,00
- Penerimaan pembayaran TGR kehilangan kendaraan dinas roda 2 Honda Revo tahun 2010 Rp4.050.000,00

- Penerimaan pembayaran TGR kehilangan kendaraan dinas pada Dinas Pendidikan Rp8.000.000,00
- Penerimaan pembayaran TGR kehilangan sepeda motor pada Dinas Pertanian Rp16.743.000,00

Pendapatan dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp410.133.618,00 merupakan pendapatan atas denda yang di pungut kepada rekanan pemerintah daerah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terinci sebagai berikut :

- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Pendidikan sebesar Rp62.148.539,00
- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Kesehatan sebesar Rp40.438.829,00
- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp135.771.292,00
- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp129.667.440,00
- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Pertanian sebesar Rp45.000,00
- Denda keterlambatan pelaksanaan Bidang Pemerintahan Umum sebesar Rp42.062.518,00

Pendapatan denda pajak sebesar Rp183.957.597,00 merupakan denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah sehingga dikenakan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian denda pajak sebagai berikut :

- Denda pajak hotel Rp35.810,00
- Denda pajak restoran Rp31.854.701,00
- Denda pajak hiburan Rp6.000,00
- Denda pajak reklame Rp499.148,00
- Denda pajak parkir Rp133.320,00
- Denda pajak air tanah Rp188.367,00
- Denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp6.429.025,00
- Denda PBB-P2 Rp104.397.798,00
- Denda BPHTB Rp40.413.428,00

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp99.850.000,00 merupakan klaim atas jaminan pelaksanaan pekerjaan cetak dan penggandaan pada Dinas Kesehatan a.n. CV. Anggrek Jingga Pekalongan.

Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.042.584.535,26 merupakan penerimaan atas :

- Penerimaan kembali belanja tahun lalu Rp1.041.615.488,26
- Penerimaan kembali belanja gaji pegawai Rp969.047,00

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dr. Haryoto sebesar Rp100.769.589.493,00 terdiri dari :

- Pendapatan dari jasa layanan Rp99.527.799.965,00
- Pendapatan dari hasil kerjasama Rp327.966.200,00
- Pendapatan lain-lain BLUD Rp913.823.328,00

Pendapatan sewa sebesar Rp1.344.895.300,00 terdiri dari pendapatan sewa tanah sebesar Rp1.101.176.500,00 dan pendapatan sewa bangunan sebesar Rp243.718.800,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Pendapatan Sewa 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	
A	PENDAPATAN SEWA TANAH		
1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
	- Pendapatan sewa tanah untuk tanaman tebu periode tahun 2018-2019 seluas 4,895 Ha di Desa Wonosari Kec. Tekung masa sewa 01 September 2018-31 Agustus 2019	78.500.000,00	
	- Pendapatan sewa tanah untuk tanaman tebu periode Tahun 2018-2019 seluas 4 Ha di Desa Kebonan Kec. Klakah masa sewa 01 September 2018-31 Agustus 2019	45.000.000,00	
	- Pendapatan sewa tanah untuk tanaman tebu periode tahun 2018-2019 seluas 2,969 Ha di Desa Kebonan Kec. Klakah masa sewa 01 September 2018-31 Agustus 2019	33.350.000,00	
	- Sewa Eks. Tanah Bengkok Kelurahan	782.884.000,00	
	Jumlah (1)		939.734.000,00
2	DINAS PERTANIAN		
	- Pendapatan Sewa tanah lahan pertanian di Kecamatan Pronojiwo	1.500.000,00	
	- Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2018-2019 Seluas 2.550 Ha di Desa Duren Kecamatan Klakah (An. Khusnul Khuluq)	28.850.000,00	
	- Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2018-2019 Seluas 0.549 Ha di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang (An. Muh. Yusuf)	6.350.000,00	
	- Pendapatan Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Tanaman Tebu Periode Tahun 2018-2019 Seluas 6.500 Ha di Desa Kebonan Kecamatan Klakah (An. Budi santoso)	73.000.000,00	
	- Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Krai Kec. Yosowilangun a.n. Valderama	23.750.000,00	
	- Pendapatan sewa tanah kebun dinas Desa Sumber Urip Kecamatan Peonjiwo An. SUGITO	25.000.000,00	
	Jumlah (2)		158.450.000,00
3	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN		
	Pendapatan Sewa Tanah atas dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Lumajang untuk Pendirian ATM di Kawasan Wonorejo Terpadu selama 1 Tahun (23-11-2018 s.d 23-11-2019)	2.992.500,00	
	Jumlah (3)		2.992.500,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Tanah (1+2+3)		1.101.176.500,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)	
B	PENDAPATAN DSEWA BANGUNAN		
1	BPKD		
	- Pendapatan sewa gedung oleh Koperasi Dinas Kesehatan	15.000.000,00	
	- Pendapatan sewa ruangan kantor dari Bank Jatim tahun 2018 pada BPKD	12.000.000,00	
	- Pendapatan sewa bangunan kec.ranuyoso kabupaten lumajang dari Bank jatim cabang lumajang untuk pembayaran masa sewa selama dua tahun 1 januari 2018 - 31 desember 2019	10.000.000,00	
	- Pendapatan sewa bangunan kecamatan padang oleh bank jatim masa sewa 22 pebruari 2018 - 21 pebruari 2020	10.000.000,00	
	- Pendapatan sewa bangunan eks kecamatan pasirian kabupaten lumajang oleh bank jatim lumajang untuk pembayaran sewa selama 2 tahun 02 januari 2018 - 31 desember 2019	50.000.000,00	
	- Pendapatan sewa gedung rumah dinas BKD untuk Lembaga Balita Centre	3.000.000,00	
	Jumlah (1)		100.000.000,00
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	- Pendapatan Sewa Bangunan Rusunawa tahun 2018	143.718.800,00	
	Jumlah (2)		143.718.800,00
	Jumlah Pendapatan Sewa Bangunan (1+2)		243.718.800,00
	Jumlah Pendapatan Sewa		1.344.895.300,00

Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp36.920.833.925,00 merupakan pendapatan Kapitasi JKN pada 25 (dua puluh lima) Puskesmas sebagai berikut :

Tabel 42 Pendapatan Kapitasi JKN Pada FKTP

No	Puskesmas	Anggaran	Realisasi	%
1	Puskesmas Tempursari	836.794.200,00	761.014.675,00	90,94
2	Puskesmas Pronojiwo	1.143.985.408,00	1.139.132.700,00	99,58
3	Puskesmas Candipuro	1.417.590.838,00	1.449.694.350,00	102,26
4	Puskesmas Penanggal	775.247.394,00	747.268.000,00	96,39
5	Puskesmas Pasirian	1.909.530.081,00	1.903.043.550,00	99,66
6	Puskesmas Bades	1.088.038.800,00	998.482.750,00	91,77
7	Puskesmas Tempeh	1.989.541.800,00	2.184.861.450,00	109,82
8	Puskesmas Gesang	1.049.734.800,00	910.318.700,00	86,72
9	Puskesmas Rogotrunan	2.293.999.200,00	2.428.290.000,00	105,85
10	Puskesmas Labruk Kidul	977.544.000,00	981.528.300,00	100,41

No	Puskesmas	Anggaran	Realisasi	%
11	Puskesmas Tekung	854.859.298,00	851.307.650,00	99,58
12	Puskesmas Kunir	2.043.095.611,00	2.139.072.000,00	104,70
13	Puskesmas Yosowilangun	1.832.002.024,00	1.841.187.650,00	100,50
14	Puskesmas Sumpster	1.422.864.000,00	1.451.534.700,00	102,01
15	Puskesmas Jatiroto	1.981.688.046,00	1.982.410.800,00	100,04
16	Puskesmas Randuagung	1.746.840.234,00	1.753.272.300,00	100,37
17	Puskesmas Sukodono	1.576.004.400,00	1.633.428.600,00	103,64
18	Puskesmas Padang	1.200.967.200,00	1.195.446.975,00	99,54
19	Puskesmas Pasrujambe	720.875.801,00	780.434.500,00	108,26
20	Puskesmas Senduro	1.320.811.200,00	1.402.053.150,00	106,15
21	Puskesmas Gucialit	940.294.800,00	1.066.777.650,00	113,45
22	Puskesmas Kedungjajang	1.789.480.800,00	1.881.868.200,00	105,16
23	Puskesmas Klakah	2.417.664.415,00	2.416.322.950,00	99,94
24	Puskesmas Ranuyoso	2.158.035.002,00	2.219.402.475,00	102,84
25	Puskesmas Tunjung	788.610.600,00	802.679.850,00	101,78
	Jumlah	36.276.099.952,00	36.920.833.925,00	101,78

Pendapatan denda sewa sebesar Rp2.623.800,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran biaya sewa gedung Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penerimaan lain-lain tahun 2018 sebesar Rp2.073.367.874,00 merupakan penerimaan pendapatan sebagai berikut :

- Penerimaan dari PT. Mutiara Halim Rp2.065.235.000,00
- Penerimaan kembali piutang PBB P2 periode yang lalu yang telah di hapus sebesar Rp8.132.874,00.

Pendapatan Bunga Dana Bos sebesar Rp40.629.465,42 merupakan pendapatan bunga pada tahun 2018.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2017 dari Penerimaan Lain lain sebesar Rp1.966.890.350,00 adalah penerimaan dari PT Mutiara Halim.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2. Pendapatan Transfer	1.726.189.256.737,00	1.722.898.573.232,00	1.627.362.540.768,00

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah propinsi, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan	1.412.446.238.004,00	1.390.713.615.483,00	98,46	1.317.925.709.276,00	72.787.906.207,00	5,52
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	198.728.393.000,00	198.206.258.000,00	99,74	172.636.155.000,00	25.570.103.000,00	14,81
3	Transfer Pemerintah Propinsi	115.014.625.733,00	133.978.699.749,00	116,49	136.800.676.492,00	(2.821.976.743,00)	(2,06)
	Jumlah	1.726.189.256.737,00	1.722.898.573.232,00	99,81	1.627.362.540.768,00	95.536.032.464,00	5,87

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1 Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	1.412.446.238.004,00	1.390.713.615.483,00	1.317.925.709.276,00

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan tahun 2018 meliputi penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, bagi hasil cukai tembakau, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Total realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan tidak melampaui target, realisasi hanya mencapai 98,46% terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.197.021.526,00	25.579.762.430,00	77,05	43.758.657.232,00	(18.178.894.802,00)	(41,54)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /SDA	76.941.601.478,00	85.619.152.401,00	111,28	16.703.105.162,00	68.916.047.239,00	412,59
3	Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00	100,00	972.852.929.000,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus						
	DAK Fisik Reguler	49.345.656.000,00	43.795.352.405,00	88,75	37.759.729.600,00	6.035.622.805,00	15,98
	DAK Fisik Penugasan	41.968.482.000,00	36.075.805.517,00	85,96	35.218.992.200,00	856.813.317,00	2,43
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	238.140.548.000,00	226.790.613.730,00	95,23	201.531.595.997,00	25.259.017.733,00	12,53
	Penyelesaian DAK Fisik Tahun 2016	0,00			10.100.700.085,00	(10.100.700.085,00)	(100,00)
	Jumlah DAK	329.454.686.000,00	306.661.771.652,00	93,08	284.611.017.882,00	22.050.753.770,00	7,75
	Jumlah	1.412.446.238.004,00	1.390.713.615.483,00	98,46	1.317.925.709.276,00	72.787.906.207,00	5,52

Realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp25.579.762.430,00 atau 77,05% dari anggaran sebesar Rp33.197.021.526,00. Dibanding tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp18.178.894.802,00 atau 41,54%.

Tabel 45 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak Tahun 2018

No	Bagi Hasil Pajak	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	12.666.025.448,00	10.416.893.615,00	82,24
2	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 21	17.523.853.415,00	13.058.711.641,00	74,52
3	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, 29	3.007.142.663,00	2.104.157.174,00	69,97
	Jumlah	33.197.021.526,00	25.579.762.430,00	77,05

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2018 sebesar Rp85.619.152.401,00 atau 111,28% dari anggaran sebesar Rp76.941.601.478,00. Dibanding tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 68.916.047.239,00 atau 412,59%.

Tabel 46 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2018

No	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi	54.848.786.774,00	62.568.101.586,00	114,07
2	Bagi hasil sumber daya alam gas bumi	2.791.092.688,00	3.099.167.031,00	111,04
3	Bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara	708.235.929,00	1.927.030.345,00	272,09
4	Bagi hasil sumber daya alam kehutanan	648.826.072,00	449.395.854,00	69,26
5	Bagi hasil sumber daya alam perikanan	1.042.211.671,00	701.234.591,00	67,28
6	Bagi hasil sumber daya alam panas bumi	41.523.313,00	31.203.994,00	75,15
7	Bagi hasil cukai hasil tembakau	16.860.925.031,00	16.843.019.000,00	99,89
	Jumlah	76.941.601.478,00	85.619.152.401,00	111,28

Dana Alokasi Umum Tahun 2018 terealisasi 100% sesuai dengan anggarannya yaitu sebesar Rp972.852.929.000,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp306.661.771.652,00 atau 93,08% dari anggaran sebesar Rp329.454.686.000,00. Di banding tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp22.050.753.770,00 atau sebesar 7,75%

Tabel 47 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Alokasi Khusus Tahun 2018

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran	Realisasi	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	49.345.656.000,00	43.795.352.405,00	88,75
	DAK fisik reguler bidang pendidikan	10.488.917.000,00	10.019.451.300,00	95,52
	DAK fisik reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana	19.096.112.000,00	15.309.007.905,00	80,17
	DAK fisik reguler bidang perumahan dan permukiman	4.941.455.000,00	4.941.455.000,00	100
	DAK fisik reguler bidang pertanian	4.020.737.000,00	4.013.623.000,00	99,82
	DAK fisik reguler bidang kelautan dan perikanan	1.138.057.000,00	1.125.403.500,00	98,89

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran	Realisasi	%
	DAK fisik reguler bidang pariwisata	2.931.312.000,00	2.872.243.000,00	97,98
	DAK fisik reguler bidang air minum	1.650.348.000,00	1.438.818.000,00	87,18
	DAK fisik reguler bidang sanitasi	2.024.350.000,00	1.624.350.000,00	80,24
	DAK fisik reguler bidang pasar	3.054.368.000,00	2.451.000.700,00	80,25
2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	41.968.482.000,00	36.075.805.517,00	85,96
	DAK fisik penugasan bidang air minum	7.618.951.000,00	5.782.154.000,00	75,89
	DAK fisik penugasan bidang sanitasi	5.600.000.000,00	3.920.000.000,00	70
	DAK fisik penugasan bidang jalan	17.874.858.000,00	17.119.229.000,00	95,77
	DAK fisik penugasan bidang pasar	3.103.336.000,00	3.101.441.600,00	99,94
	DAK fisik penugasan bidang irigasi	5.898.670.000,00	4.649.465.000,00	78,82
	DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	1.872.667.000,00	1.503.515.917,00	80,29
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	238.140.548.000,00	226.790.613.730,00	95,23
	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	21.252.000.000,00	21.241.464.225,00	99,95
	DAK non fisik tunjangan profesi guru	188.575.484.000,00	180.551.378.800,00	95,74
	DAK non fisik tambahan penghasilan guru	1.377.000.000,00	757.350.000,00	55
	DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB	24.661.009.000,00	22.330.202.385,00	90,55
	DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan	2.275.055.000,00	1.910.218.320,00	83,96
	Jumlah DAK	329.454.686.000,00	306.661.771.652,00	93,08

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.2 Transfer Pem. Pusat Lainnya	198.728.393.000,00	198.206.258.000,00	172.636.155.000,00

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat lainnya meliputi alokasi dana desa (DD) dan Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2018 sebesar Rp198.206.258.000,00 atau mencapai 99,74% dari anggaran sebesar Rp198.728.393.000,00. Dibanding tahun 2017, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya naik sebesar Rp25.570.103.000,00 atau 14,81%.

Alokasi Dana Desa terealisasi sebesar Rp163.206.258.000,00 atau 99,68 dari anggaran sebesar Rp163.728.393.000,00. Sedangkan Dana Insentif Daerah terealisasi 100% yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00.

**Tabel 48 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun
Anggaran 2018 dan 2017**

No	Dana Penyesuaian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5=4/3	6
2	Alokasi Dana Desa	163.728.393.000,00	163.206.258.000,00	99,68	165.136.155.000,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	Jumlah	198.728.393.000,00	198.206.258.000,00	99,74	172.636.155.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.3 Transfer Pem. Propinsi	115.014.625.733,00	133.978.699.749,00	136.800.676.492,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, meliputi bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp126.086.399.749,00 dan Pendapatan bagi hasil lainnya sebesar Rp7.892.300.000,00.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah propinsi tahun 2018 mencapai 116,49% dari anggaran. Dibanding tahun 2017, realisasi pendapatan transfer dari pemerintah propinsi tahun 2018 secara total mengalami kenaikan sebesar Rp2.821.976.743,00 atau 2,06%. Pendapatan bagi hasil pajak naik sebesar Rp3.362.490.243,00 atau 2,60% sedang bagi hasil lainnya naik sebesar Rp540.513.500,00 atau 7,35%.

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi
Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
A	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	107.122.325.733,00	126.086.399.749,00	117,70	129.448.889.992,00	(3.362.490.243,00)	(2,60)
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor / PKB	27.244.477.833,00	31.216.741.076,00	114,58	29.385.835.884,00	1.830.905.192,00	6,23
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB	15.545.416.163,00	16.611.149.913,00	106,86	16.469.512.292,00	141.637.621,00	0,86
	Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor / PBBKB	28.162.207.711,00	32.687.973.544,00	116,07	31.373.292.424,00	1.314.681.120,00	4,19
	Bagi Hasil Pengambilan Pemanfaatan AP	428.909.635,00	486.249.569,00	113,37	539.801.425,00	(53.551.856,00)	(9,92)
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	35.741.314.391,00	45.084.285.647,00	126,14	51.680.447.967,00	(6.596.162.320,00)	(12,76)
B	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.892.300.000,00	7.892.300.000,00	100,00	7.351.786.500,00	540.513.500,00	7,35
1	Bantuan Keu. Bidang Pendidikan	5.127.500.000,00	5.127.500.000,00	100,00	4.547.500.000,00	580.000.000,00	12,75
	Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)	4.417.500.000,00	4.417.500.000,00	100,00	4.417.500.000,00	-	-
	BOP Madin	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	-	-
	Honorarium kinerja Kepala Guru TK/PAUD Non PNS	336.000.000,00	336.000.000,00	100,00	0,00	336.000.000,00	-
	Jenjang Pendidikan TK	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	-
	Jenjang Pendidikan SD	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	0,00	96.000.000,00	-
	Jenjang Pendidikan SMP	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00	0,00	132.000.000,00	-
	Pelaksanaan Hari Guru	0,00	0,00		20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	-	-
2	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan	2.514.800.000,00	2.514.800.000,00	100,00	2.679.286.500,00	(164.486.500,00)	(6,14)
	Honor 127 Perawat Ponkendes	2.209.800.000,00	2.209.800.000,00	100,00	2.209.800.000,00	-	-
	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	-	-
	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00	-	-
	Pengembangan Taman Posyandu	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	-	-
	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,00	0,00	-	164.486.500,00	(164.486.500,00)	(100,00)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
3	Bantuan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-	150.000.000,00	100
4	Bantuan untuk HUT Prop Jatim Tahun 2018	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	-	-
5	Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)
	Jumlah	115.014.625.733,00	133.978.699.749,00	116,49	136.800.676.492,00	(2.821.976.743,00)	(2,06)

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	85.442.546.000,00	84.357.612.288,00	4.511.610.425,09

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan selain PAD dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2018 dan 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 50 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (penurunan)	%
			2018	%	2017		
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat						
1.1	Pendapatan hibah untuk air minum perkotaan yang nantinya akan diteruskan kepada PDAM sebagai penyertaan modal	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	3.448.000.000,00	1.051.000.000,00	30,47
1.2	Hibah untuk air minum pedesaan yang kemudian dialokasikan pada kegiatan di belanja langsung yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. (Water Hibah)	1.700.000.000,00	1.704.000.000,00	100,24	692.000.000,00	1.012.000.000,00	146,24
1.3	Dana hibah IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program) 2018	1.793.686.000,00	459.733.702,00	25,63	0,00	459.733.702,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.993.686.000,00	6.663.733.702,00	83,36	4.141.000.000,00	2.522.733.702,00	60,92
2	Hibah BOS dari Pemerintah Popinsi	77.448.860.000,00	77.275.840.000,00		0,00	77.275.840.000,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah (1+2)	85.442.546.000,00	83.939.573.702,00	83,36	4.141.000.000,00	79.798.573.702,00	1.927,04
3	Pendapatan lainnya						
3.1	Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu		116.921.365,00		56.458.290,00	60.463.075,00	107,09

No	Uraian	Anggaran	Realisasi			Kenaikan (penurunan)	%
			2018	%	2017		
3.2	Pendapatan dari Tim Lelang Gula PTR		94.344.500,00		101.470.750,00	(7.126.250,00)	(7,02)
3.3	Penerimaan dari PG. Padjarajan		21.597.300,00			21.597.300,00	
3.4	Penerimaan dari PG. Gending		23.310.000,00			23.310.000,00	
3.5	Penerimaan lain-lain		161.865.421,00		212.681.385,09	(50.815.964,09)	(23,89)
	Jumlah Pendapatan Lainnya		418.038.586,00		370.610.425,09	47.428.160,91	12,80
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	85.442.546.000,00	84.357.612.288,00	98,73	4.511.610.425,09	79.846.001.862,91	1.769,79

Pendapatan Hibah BOS dari Pemerintah Propinsi, pada tahun 2017 disajikan sebagai bagian dari lain-lain PAD yang sah, sedangkan pada tahun 2018 penyajiannya sebagai bagian dari pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan yang sah.

Penerimaan lain-lain tahun 2018 sebesar Rp161.865.421,00 dan tahun 2017 sebesar Rp212.681.385,09, merupakan pendapatan yang tidak disertai dengan informasi yang jelas di dalam bukti setor/nota kredit. Konfirmasi dan koordinasi dengan Bank Jatim Cabang Lumajang dan pihak terkait lainnya sudah dilakukan namun tidak diperoleh kejelasan mengenai penerimaan setoran tersebut.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
B. Belanja Daerah	2.256.619.621.618,47	2.100.383.026.799,75	1.998.722.819.796,24

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja dan transfer tahun 2018 sebesar Rp2.100.383.026.799,75. Realisasinya mencapai 93,08% dari anggaran sebesar Rp2.256.619.621.618,47. Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi belanja dan transfer Tahun 2018 naik 7,77%.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1. Belanja Operasi	1.560.844.394.721,67	1.447.790.192.451,79	1.398.413.047.828,24

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2018 anggaran belanja operasi sebesar Rp1.560.844.394.721,67, dengan realisasi mencapai 92,76% atau sebesar Rp1.447.790.192.451,79. Dibanding tahun 2017 belanja operasi turun sebesar Rp49.377.144.623,55 atau 3,53%.

Tabel 51 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Tahun 2018							
No	Belanja Operasi	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	797.477.838.612,76	757.321.746.846,00	94,96	859.639.514.584,11	(102.317.767.738,11)	(11,90)
2	Belanja Barang	567.274.045.976,91	513.221.030.400,79	90,47	421.895.061.848,97	91.325.968.551,82	21,65

No	Belanja Operasi	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Hibah	142.948.157.176,00	128.942.462.032,00	90,20	84.670.257.207,00	44.272.204.825,00	52,29
4	Bantuan Sosial	52.117.814.000,00	47.278.414.217,00	90,71	31.181.675.232,00	16.096.738.985,00	51,62
5	Bantuan Keuangan	1.026.538.956,00	1.026.538.956,00	100,00	1.026.538.956,16	(0,16)	(0,00)
	Jumlah	1.560.844.394.721,67	1.447.790.192.451,79	92,76	1.398.413.047.828,24	49.377.144.623,55	3,53

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.1 Belanja Pegawai	797.477.838.612,76	757.321.746.846,00	859.639.514.584,11

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 52 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		2017	Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%			
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung						
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	382.002.230.827,00	380.357.711.553,00	99,57	402.690.175.245,00	(22.332.463.692,00)	(5,55)
2	Tunjangan keluarga	36.204.132.573,00	35.687.151.182,00	98,57	35.268.638.890,00	418.512.292,00	1,19
3	Tunjangan jabatan	9.683.474.704,00	9.490.471.322,00	98,01	9.495.115.750,00	(4.644.428,00)	(0,05)
4	Tunjangan fungsional	28.022.955.403,00	27.776.072.000,00	99,12	26.951.217.000,00	824.855.000,00	3,06
5	Tunjangan fungsional umum	4.456.861.003,00	4.404.275.000,00	98,82	4.367.300.000,00	36.975.000,00	0,85
6	Tunjangan beras	19.494.237.988,00	18.363.973.872,00	94,20	19.582.243.092,00	(1.218.269.220,00)	(6,22)
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	358.287.471,00	350.986.448,00	97,96	311.805.695,00	39.180.753,00	12,57
8	Pembulatan gaji	5.309.584,00	5.105.134,00	96,15	5.245.975,00	(140.841,00)	(2,68)
9	Iuran BPJS Kesehatan	10.762.904.227,52	10.738.351.354,00	99,77	11.372.103.117,00	(633.751.763,00)	(5,57)
10	Uang paket	112.381.080,00	111.426.000,00	99,15	94.878.000,00	16.548.000,00	17,44
11	Tunjangan badan musyawarah	35.901.288,00	35.352.450,00	98,47	30.510.900,00	4.841.550,00	15,87
12	Tunjangan komisi	72.080.232,00	71.192.100,00	98,77	60.839.100,00	10.353.000,00	17,02
13	Tunjangan badan anggaran	38.481.024,00	37.910.250,00	98,52	32.246.550,00	5.663.700,00	17,56
14	Tunjangan badan kehormatan	9.244.032,00	9.165.450,00	99,15	7.856.100,00	1.309.350,00	16,67
15	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	26.578.287,00	8.860.950,00	33,34		8.860.950,00	
16	Tunjangan perumahan	5.506.995.000,00	5.466.000.000,00	99,26	5.430.000.000,00	36.000.000,00	0,66
17	Uang duka wafat/tewas	0,00	0,00		3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
18	Uang jasa pengabdian	142.707.600,00	0,00	0,00		0,00	
19	Dana operasional pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	346.080.000,00	47.040.000,00	13,59
20	Tunjangan badan legislasi	20.320.176,00	19.579.350,00	96,35	16.991.100,00	2.588.250,00	15,23
21	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	4.212.281.748,00	3.815.680.946,00	90,58	1.846.471.747,00	1.969.209.199,00	106,65
22	Tunjangan bahaya radiasi	119.400.000,00	119.400.000,00	100,00	119.400.000,00	0,00	0,00
23	Tambahan penghasilan guru	1.964.500.000,00	497.250.000,00	25,31	2.657.500.000,00	(2.160.250.000,00)	(81,29)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		2017	Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%			
24	Tunjangan profesi guru	198.787.424.800,00	175.130.471.425,00	88,10	219.583.527.700,00	(44.453.056.275,00)	(20,24)
25	Tunjangan transportasi	4.449.120.000,00	4.416.000.000,00	99,26	1.816.000.000,00	2.600.000.000,00	143,17
26	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	8.391.253.676,00	7.995.332.064,00	95,28		7.995.332.064,00	
27	Tunjangan uang makan	15.895.387.763,24	15.278.517.503,00	96,12	16.410.638.854,00	(1.132.121.351,00)	(6,90)
28	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.886.150.000,00	8.820.000.000,00	99,26	4.792.200.000,00	4.027.800.000,00	84,05
29	Belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati	450.000.000,00	400.000.000,00	88,89	1.200.000.000,00	(800.000.000,00)	(66,67)
30	Tunjangan rekes	2.216.025.000,00	2.205.000.000,00	99,50	514.500.000,00	1.690.500.000,00	328,57
31	Belanja insentif pemungutan pajak hotel	50.000.000,00	35.403.011,00	70,81	23.186.948,00	12.216.063,00	52,69
32	Belanja insentif pemungutan pajak restoran	150.000.000,00	118.549.017,00	79,03	99.418.015,00	19.131.002,00	19,24
33	Belanja insentif pemungutan pajak hiburan	4.750.000,00	3.304.530,00	69,57	3.122.750,00	181.780,00	5,82
34	Belanja insentif pemungutan pajak reklame	62.750.000,00	41.242.254,00	65,72	38.770.166,00	2.472.088,00	6,38
35	Belanja insentif pemungutan pajak penerangan jalan	1.225.000.000,00	1.060.048.277,00	86,53	909.377.355,00	150.670.922,00	16,57
36	Belanja insentif pemungutan pajak parkir	9.500.000,00	8.778.544,00	92,41	8.434.520,00	344.024,00	4,08
37	Belanja insentif pemungutan pajak air tanah	2.500.000,00	2.032.848,00	81,31	4.586.742,00	(2.553.894,00)	(55,68)
38	Belanja insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	675.000.000,00	203.925.674,00	30,21	83.267.105,00	120.658.569,00	144,91
39	Belanja insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	587.500.000,00	268.124.976,00	45,64	562.557.621,00	(294.432.645,00)	(52,34)
40	Belanja insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	450.000.000,00	395.721.447,00	87,94	308.429.698,00	87.291.749,00	28,30
41	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa usaha	200.316.925,00	151.037.282,00	75,40	175.989.775,00	(24.952.493,00)	(14,18)
42	Belanja insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	152.200.000,00	21.089.152,00	13,86	119.690.936,00	(98.601.784,00)	(82,38)
43	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa umum	770.417.865,00	569.283.239,00	73,89	845.297.373,00	(276.014.134,00)	(32,65)
	Jumlah Belanja Pegawai - Tidak Langsung	747.059.680.276,76	714.882.896.604,00	95,69	768.188.763.819,00	(53.305.867.215,00)	(6,94)
II	Belanja Pegawai - Belanja Langsung						
1	Honorarium tim teknis kegiatan	3.099.990.000,00	2.459.025.000,00	79,32	3.094.395.000,00	(635.370.000,00)	(20,53)
2	Honorarium pengadaan barang/jasa	1.202.654.800,00	1.116.380.800,00	92,83	973.508.000,00	142.872.800,00	14,68
3	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	7.763.714.540,00	7.426.651.440,00	95,66	7.708.951.800,00	(282.300.360,00)	(3,66)
4	Honorarium pengurus barang	1.958.130.000,00	1.922.805.000,00	98,20	1.895.200.000,00	27.605.000,00	1,46
5	Honorarium penerima hasil pekerjaan	359.990.000,00	331.955.200,00	92,21	285.834.000,00	46.121.200,00	16,14
6	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	465.070.000,00	414.250.000,00	89,07	557.000.000,00	(142.750.000,00)	(25,63)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		2017	Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%			
7	Honorarium tim penyusun perencanaan dan LKPJ	12.850.000,00	10.850.000,00	84,44	8.150.000,00	2.700.000,00	33,13
8	Honorarium tim baperjakat	37.500.000,00	0,00	0,00	64.350.000,00	(64.350.000,00)	(100,00)
9	Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah	0,00	0,00		5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
10	Honorarium tim pengelola website	86.500.000,00	83.550.000,00	96,59	16.200.000,00	67.350.000,00	415,74
11	Honorarium tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	32.200.000,00	18.400.000,00	57,14	42.900.000,00	(24.500.000,00)	(57,11)
12	Honorarium tim peneliti RKA-SKPD	75.000.000,00	38.750.000,00	51,67	28.250.000,00	10.500.000,00	37,17
13	Honorarium pelayanan kesehatan	20.148.631.346,00	14.983.594.279,00	74,37	48.824.429.032,00	(33.840.834.753,00)	(69,31)
14	Honorarium penyelenggara ujian	545.823.050,00	495.971.550,00	90,87	382.179.150,00	113.792.400,00	29,77
15	Honorarium petugas SIAK	253.050.000,00	246.975.000,00	97,60	240.645.000,00	6.330.000,00	2,63
16	Honorarium perencanaan pekerjaan	128.241.250,00	103.288.750,00	80,54	61.840.000,00	41.448.750,00	67,03
17	Honorarium pengawas pekerjaan	22.574.350,00	13.710.350,00	60,73	17.300.000,00	(3.589.650,00)	(20,75)
18	Honorarium tim otonomi daerah	3.800.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	(7.100.000,00)	(100,00)
19	Honorarium pengelola sekolah	1.085.143.000,00	1.081.453.000,00	99,66	1.054.020.000,00	27.433.000,00	2,60
20	Honorarium tim akuisisi arsip	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00		27.750.000,00	
21	Honorarium tim pemeriksa kasus (Inspektorat)	134.000.000,00	133.850.000,00	99,89		133.850.000,00	
22	Honorarium tim pengelola aplikasi	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	31.800.000,00	(1.200.000,00)	(3,77)
23	Honorarium verifikasi jampersal	22.080.000,00	16.560.000,00	75,00	4.800.000,00	11.760.000,00	245,00
24	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	186.704.000,00	155.494.000,00	83,28		155.494.000,00	
25	Honorarium tim verifikasi APBDesa	206.200.000,00	202.375.000,00	98,15		202.375.000,00	
26	Honorarium pejabat pengelola informasi daerah	140.400.000,00	136.400.000,00	97,15	0,00	136.400.000,00	
27	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00		27.600.000,00	
28	Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah	67.970.000,00	30.795.000,00	45,31	34.000.000,00	(3.205.000,00)	(9,43)
29	Honorarium tim teknis kegiatan	248.650.000,00	171.796.000,00	69,09	458.125.000,00	(286.329.000,00)	(62,50)
30	Honorarium pegawai honororer/tidak tetap	501.600.000,00	480.250.000,00	95,74	5.869.360.760,00	(5.389.110.760,00)	(91,82)
31	Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00		6.800.000,00	
32	Honorarium tim pengelola website	0,00	0,00		27.750.000,00	(27.750.000,00)	(100,00)
33	Honorarium tim FLS	15.800.000,00	15.550.000,00	98,42	15.800.000,00	(250.000,00)	(1,58)
34	Honorarium pelayanan kesehatan	0,00	0,00		9.251.479.830,00	(9.251.479.830,00)	(100,00)
35	Honorarium penyelenggara ujian	0,00	0,00		44.112.500,00	(44.112.500,00)	(100,00)
36	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00		72.000.000,00	
37	Uang lembur PNS	8.984.056.000,00	7.798.347.873,00	86,80	8.444.475.693,11	(646.127.820,11)	(7,65)
38	Uang lembur non PNS	59.860.000,00	59.700.000,00	99,73	129.068.000,00	(69.368.000,00)	(53,75)
39	Uang lembur PNS kegiatan khusus	751.227.000,00	676.088.000,00	90,00		676.088.000,00	
40	Belanja Pegawai Dana BOS	1.653.999.000,00	1.649.284.000,00	99,71	1.872.627.000,00	(223.343.000,00)	(11,93)
	Jumlah Belanja	50.418.158.336,00	42.438.850.242,00	84,17	91.450.750.765,11	(49.011.900.523,11)	(53,59)

No	Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		2017	Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%			
	Pegawai - Belanja Langsung						
	Total Belanja Pegawai	797.477.838.612,76	757.321.746.846,00	94,96	859.639.514.584,11	(102.317.767.738,11)	(11,90)

Realisasi belanja pegawai tahun 2018 secara total mencapai Rp757.321.746.846,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp797.477.838.612,76,00. Di banding realisasi tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp102.317.767.738,11 atau turun 11,90%.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.2 Belanja Barang dan Jasa	567.274.045.976,91	513.221.030.400,79	421.895.061.848,97

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga.

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 53 Realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun 2018

No	Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
			2018	%			
1	Belanja Persediaan	191.931.304.725,91	178.225.445.875,00	92,86	169.510.448.563,00	8.714.997.312,00	5,14
2	Belanja Jasa	269.444.189.029,00	242.226.929.205,79	89,90	160.369.267.806,97	81.857.661.398,82	51,04
3	Belanja Pemeliharaan	49.394.649.104,00	43.882.391.155,00	88,84	46.375.633.592,00	(2.493.242.437,00)	(5,38)
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.880.177.100,00	43.121.717.221,00	86,45	37.667.538.543,00	5.454.178.678,00	14,48
5	Belanja Lainnya	6.623.726.018,00	5.764.546.944,00	87,03	7.972.173.344,00	(2.207.626.400,00)	(27,69)
	Jumlah	567.274.045.976,91	513.221.030.400,79	90,47	421.895.061.848,97	91.325.968.551,82	21,65

(1) Belanja Persediaan

Realisasi belanja persediaan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp178.225.445.875,00, atau 92,86% dari anggaran sebesar Rp191.931.304.725,91 terinci sebagai berikut.

Tabel 54 Realisasi Anggaran Perjenis Belanja dan Jasa - Belanja Persediaan
Tahun 2018 dan 2017

No	Akun Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
1	Belanja alat tulis kantor	7.101.232.563,00	6.612.701.297,00	93,12	7.600.540.088,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.708.811.285,00	1.691.924.156,00	99,01	1.544.063.407,00
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	284.254.000,00	256.402.000,00	90,20	394.269.100,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.727.054.908,00	2.666.688.422,00	97,79	2.668.967.979,00
5	Belanja bahan bakar minyak/gas	614.062.000,00	230.347.080,00	37,51	717.800.544,00
6	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	44.749.000,00	41.222.500,00	92,12	12.650.000,00
7	Belanja pengisian tabung gas	2.160.230.000,00	1.692.856.174,00	78,36	1.534.841.796,00
8	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	19.998.955.150,00	23.587.639.844,00	117,94	21.408.810.087,00
9	Belanja peralatan pengolahan tanah dan tanaman sekali pakai	8.800.000,00	5.800.000,00	65,91	7.370.000,00
10	Belanja peralatan bangunan sekali pakai	237.450.200,00	152.488.700,00	64,22	2.262.200,00
11	Belanja peralatan perikanan sekali pakai	24.000.000,00	23.540.000,00	98,08	23.540.000,00
12	Belanja cinderamata	205.501.000,00	192.670.000,00	93,76	232.160.000,00
13	Belanja alat olah raga habis pakai	121.635.500,00	121.451.100,00	99,85	103.451.000,00
14	Belanja karangan bunga/bunga tabur	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	10.900.000,00
15	Belanja pakan ikan/ternak	101.515.000,00	99.701.800,00	98,21	32.689.000,00
16	Belanja pupuk	104.068.250,00	96.440.620,00	92,67	238.103.600,00
17	Belanja make up	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18	Belanja umbul-umbul/bendera	147.517.800,00	142.931.000,00	96,89	158.646.100,00
19	Belanja spanduk/baliho/banner	403.830.200,00	366.944.250,00	90,87	477.665.000,00
20	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	224.234.700,00	200.832.830,00	89,56	13.893.800,00
21	Belanja bahan baku bangunan	728.557.000,00	652.809.560,00	89,60	1.058.278.325,00

No	Akun Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
22	Belanja bahan/bibit tanaman	1.118.076.000,00	654.527.000,00	58,54	515.059.500,00
23	Belanja bibit ternak	272.327.600,00	271.599.600,00	99,73	135.900.000,00
24	Belanja bahan obat-obatan	29.295.797.767,91	28.261.473.582,00	96,47	32.339.435.649,00
25	Belanja bahan kimia	1.745.742.766,00	1.567.037.430,00	89,76	2.148.193.201,00
26	Belanja bahan makanan	4.138.639.500,00	3.986.041.733,00	96,31	3.884.524.203,00
27	Belanja bahan sandang	272.170.000,00	279.248.500,00	102,60	2.374.763.960,00
28	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	593.453.750,00	500.749.900,00	84,38	455.295.150,00
29	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bi mtek	2.175.446.550,00	1.534.668.525,00	70,54	1.824.920.155,00
30	Belanja bahan/sampel uji lab	26.450.000,00	25.441.000,00	96,19	80.000,00
31	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	0,00	0,00	0,00	29.644.000,00
32	Belanja cetak	14.118.481.677,00	10.892.895.755,00	77,15	9.030.926.690,00
33	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyimpulan	3.494.638.265,00	2.766.307.339,00	79,16	3.011.426.422,00
34	Belanja makanan dan minuman rapat	32.504.973.300,00	27.225.115.375,00	83,76	24.321.289.400,00
35	Belanja makanan dan minuman tamu	2.770.440.000,00	2.511.086.159,00	90,64	2.436.045.002,00
36	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	6.138.543.500,00	5.717.192.400,00	93,14	3.890.348.250,00
37	Belanja makanan dan minuman pasien	3.329.580.000,00	2.383.649.000,00	71,59	1.728.101.500,00
38	Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	50.000.000,00	46.000.000,00	92,00	9.800.000,00
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	265.000.000,00	263.890.000,00	99,58	265.890.000,00
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	8.000.000,00	7.600.000,00	95,00	39.900.000,00
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	154.500.000,00	153.727.500,00	99,50	156.481.000,00
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	148.250.000,00	147.595.000,00	99,56	159.895.000,00
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
45	Belanja pakaian kerja lapangan	819.475.000,00	831.675.450,00	101,49	919.783.900,00
46	Belanja pakaian adat daerah	134.920.000,00	7.420.000,00	5,50	99.450.000,00
47	Belanja pakaian batik	962.235.000,00	939.213.700,00	97,61	1.061.693.500,00

No	Akun Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
	tradisional				
48	Belanja pakaian olah raga	1.158.708.800,00	1.149.572.850,00	99,21	1.205.433.850,00
49	Belanja pakaian seragam	2.111.690.000,00	2.018.690.000,00	95,60	356.638.250,00
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu	2.323.322.500,00	2.201.231.550,00	94,74	1.466.892.675,00
51	Belanja hadiah uang tunai	2.952.548.468,00	2.544.862.591,00	86,19	2.929.223.891,00
52	Belanja hadiah barang	573.455.500,00	509.315.500,00	88,82	492.948.000,00
53	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	9.256.638.200,00	8.116.621.515,00	87,68	3.269.434.750,00
54	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	29.815.000,00	22.495.000,00	75,45	10.105.000,00
55	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	32.035.527.026,00	31.847.410.588,00	99,41	30.686.723.639,00
	JUMLAH	191.931.304.725,91	178.225.445.875,00	92,86	169.510.448.563,00

Beberapa jenis belanja persediaan seperti belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai ; belanja bahan sandang dan belanja pakaian kerja lapangan, realisasinya malampaui anggarannya. Pelampauan anggaran tersebut terjadi pada RSUD Dr. Haryoto yang diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggarannya karena berstatus Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

- Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai dianggarkan sebesar Rp14.871.103.502,00 terealisasi sebesar Rp18.539.541.501,00 (124,67%)
- Belanja Bahan Obat-obatan dianggarkan sebesar Rp18.490.757.329,91 terealisasi sebesar Rp20.144.298.116,00 (108,94%)
- Belanja Bahan Sandang dianggarkan sebesar Rp161.250.000,00 terealisasi sebesar Rp170.803.500,00 (105,92%)

(2) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp242.226.929.205,79, atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp269.444.189.029,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 55 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa
Tahun 2018 dan 2017

No	Akun Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
1	Belanja telepon	1.065.436.400,00	569.890.572,00	53,49	624.846.719,00
2	Belanja air	1.072.002.000,00	712.556.645,00	66,47	734.002.239,00
3	Belanja listrik	27.163.288.162,00	23.769.782.147,00	87,51	23.096.480.978,00
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja surat kabar/majalah	253.692.000,00	226.575.500,00	89,31	224.894.250,00
6	Belanja	3.799.147.660,00	3.224.167.070,00	84,87	2.738.383.223,00

No	Akun Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
	kawat/faksimili/internet				
7	Belanja paket/pengiriman	153.463.000,00	74.805.079,00	48,74	117.637.817,00
8	Belanja sertifikasi	110.550.000,00	65.316.500,00	59,08	9.317.300,00
9	Belanja jasa transaksi keuangan	24.677.500,00	25.851.175,00	104,76	18.319.863,97
10	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	1.084.200.000,00	865.878.750,00	79,86	898.679.550,00
11	Belanja jasa siaran radio	303.170.000,00	234.780.000,00	77,44	120.060.000,00
12	Belanja jasa transportasi/akomodasi	11.953.782.000,00	9.697.088.100,00	81,12	8.747.275.669,00
13	Belanja dokumentasi	223.348.578,00	159.193.000,00	71,28	213.795.300,00
14	Belanja dekorasi	1.259.839.942,00	1.072.829.271,00	85,16	744.400.350,00
15	Belanja jasa tera/kir	105.595.000,00	54.112.500,00	51,25	8.235.000,00
16	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	2.651.475.000,00	2.459.743.250,00	92,77	2.999.780.903,00
17	Belanja jasa gelombang radio/televisi	40.700.000,00	10.305.447,00	25,32	9.345.447,00
18	Belanja jasa uji laboratorium	233.860.000,00	170.042.500,00	72,71	174.853.700,00
19	Belanja jasa cleaning service	634.211.200,00	631.464.000,00	99,57	715.555.900,00
20	Belanja pajak bumi dan bangunan	1.400.000,00	1.047.427,00	74,82	1.082.427,00
21	Belanja pajak air tanah	6.600.000,00	5.239.582,00	79,39	1.353.024,00
22	Belanja jasa tenaga keamanan	1.164.900.000,00	1.158.900.000,00	99,48	240.550.000,00
23	Belanja penggantian transport	17.940.460.000,00	13.981.649.352,00	77,93	8.527.229.500,00
24	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	11.103.090.700,00	8.432.072.500,00	75,94	7.952.029.250,00
25	Belanja jasa pendukung kegiatan	636.600.000,00	504.550.000,00	79,26	534.350.000,00
26	Belanja jasa laundry	60.050.000,00	39.605.000,00	65,95	21.702.000,00
27	Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2	1.250.425.000,00	1.185.280.000,00	94,79	899.563.500,00
28	Belanja jasa juri/wasit	444.750.000,00	418.050.000,00	94,00	559.397.000,00
29	Belanja jasa petugas korsik dan drum band	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00
30	Belanja jasa penata rias/make up	12.975.000,00	12.975.000,00	100,00	8.250.000,00
31	Belanja jasa event organizer	4.243.100.000,00	3.641.635.420,00	85,82	4.153.875.500,00
32	Belanja jasa fumigasi	80.000.000,00	79.400.000,00	99,25	27.150.000,00
33	Belanja jasa siaran televisi	20.000.000,00	19.000.000,00	95,00	4.000.000,00
34	Belanja jasa pembuatan video	48.505.000,00	44.155.000,00	91,03	22.425.000,00
35	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	72.725.000,00	700.000,00	0,96	19.992.000,00
36	Belanja jasa pengolahan limbah medis	798.900.000,00	667.114.605,00	83,50	207.441.350,00
37	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	50.000.000,00	21.641.750,00	43,28	0,00
38	Belanja jasa penyelenggaraan diklat	421.500.000,00	320.300.000,00	75,99	304.100.000,00
39	Belanja jasa sewa pengharum ruangan	77.984.500,00	50.400.000,00	64,63	43.000.000,00
40	Belanja retribusi pelayanan persampahan	15.150.000,00	11.750.000,00	77,56	2.400.000,00
41	Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	1.634.630.500,00	1.500.941.500,00	91,82	558.617.900,00
42	Belanja akomodasi transmigran	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
43	Belanja jasa pelayanan kesehatan	49.522.970.973,00	46.208.600.435,00	93,31	0,00
44	Belanja penggantian pengolahan darah	190.000.000,00	164.260.000,00	86,45	0,00
45	Belanja jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL	14.000.000,00	6.389.095,00	45,64	0,00

No	Akun Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
46	Belanja jasa penyedotan tinja dan air limbah rumah tangga	6.730.000,00	6.730.000,00	100,00	0,00
47	Belanja jasa uji kesehatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja jasa lainnya BLUD	223.600.000,00	110.425.000,00	49,39	0,00
49	Belanja premi asuransi kesehatan	994.104.108,00	874.193.633,00	87,94	17.966.760,00
50	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	646.685.926,00	548.397.167,79	84,80	27.000.850,00
51	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	782.343.000,00	649.978.300,00	83,08	775.430.700,00
52	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	544.600.000,00	369.000.000,00	67,76	353.933.000,00
53	Belanja sewa tanah/lahan	685.700.000,00	657.462.517,00	95,88	1.065.858.611,00
54	Belanja sewa penginapan	506.137.000,00	223.755.798,00	44,21	233.642.692,00
55	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.092.997.400,00	894.261.445,00	81,82	735.349.247,00
56	Belanja sewa eskavator	67.200.000,00	66.952.000,00	99,63	80.600.000,00
57	Belanja sewa traktor	55.245.000,00	4.000.000,00	7,24	0,00
58	Belanja sewa mesin proses	0,00	0,00	0,00	45.650.000,00
59	Belanja sewa electric generating set	30.800.000,00	28.800.000,00	93,51	18.000.000,00
60	Belanja sewa alat kantor	17.992.000,00	17.632.000,00	98,00	37.670.000,00
61	Belanja sewa alat rumah tangga	201.785.000,00	170.535.000,00	84,51	108.335.000,00
62	Belanja sewa komputer	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	24.795.000,00
63	Belanja sewa meja dan kursi	583.162.500,00	472.878.000,00	81,09	456.612.600,00
64	Belanja sewa alat studio	336.040.000,00	281.140.000,00	83,66	233.716.000,00
65	Belanja sewa barang bercorak kebudayaan	33.850.000,00	33.850.000,00	100,00	17.350.000,00
66	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	1.285.445.000,00	1.120.076.000,00	87,14	1.400.786.100,00
67	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.578.503.000,00	1.657.013.500,00	64,26	2.874.915.265,00
68	Belanja beasiswa tugas belajar S1	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
69	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0,00	0,00	0,00	62.200.000,00
70	Belanja sosialisasi	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
71	Belanja bimbingan teknis	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	105.150.297,00
72	Belanja pendidikan struktural	63.000.000,00	62.850.000,00	99,76	172.800.000,00
73	Belanja fit and proper test	0,00	0,00	0,00	708.000.000,00
74	Belanja jasa konsultasi penelitian	319.000.000,00	266.246.500,00	83,46	52.747.500,00
75	Belanja jasa konsultasi perencanaan	532.576.207,00	423.596.207,00	79,54	663.427.400,00
76	Belanja jasa konsultasi pelaporan	376.000.000,00	373.102.000,00	99,23	416.772.500,00
77	Belanja jasa konsultasi pengawasan	402.436.025,00	358.619.025,00	89,11	225.038.000,00
78	Belanja jasa konsultasi hukum	625.340.000,00	371.742.000,00	59,45	420.184.400,00
79	Belanja jasa konsultasi IT	190.000.000,00	139.590.000,00	73,47	99.390.000,00
80	Belanja jasa konsultasi evaluasi	268.500.000,00	266.305.600,00	99,18	148.230.500,00
81	Belanja jasa konsultasi psikologi	11.500.000,00	4.100.000,00	35,65	7.500.000,00
82	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	1.403.020.000,00	1.234.000.000,00	87,95	741.690.000,00
83	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	60.087.423.450,00	56.301.150.515,00	93,70	41.893.882.000,00
84	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	1.082.070.600,00	1.308.122.045,00	120,89	972.653.375,00
85	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	8.322.865.000,00	7.682.832.900,00	92,31	5.636.402.200,00
86	Belanja upah/ongkos tenaga pendidik	12.796.576.760,00	12.751.798.600,00	99,65	7.015.106.000,00

No	Akun Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
87	Belanja tambahan upah tenaga pendidik	13.767.450.000,00	13.708.850.000,00	99,57	10.508.800.000,00
88	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	527.100.000,00
89	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.490.000.000,00	1.400.500.000,00	93,99	0,00
90	Belanja praktek industri	0,00	0,00	0,00	251.370.250,00
91	Belanja Jasa BOS	14.060.555.938,00	13.878.605.281,00	98,71	14.794.728.900,00
	Jumlah	269.444.189.029,00	242.226.929.205,79	89,90	160.369.267.806,97

Belanja jasa transaksi keuangan dianggarkan sebesar Rp24.677.500,00 terealisasi sebesar Rp25.851.175,00 atau 104,76%. Di dalam realisasi tersebut terdapat belanja jasa transaksi keuangan dana BOS sebesar Rp11.207.675,00 yang tidak di anggarakan di dalam RKAS tahun 2018. Hal ini dikarenakan Rekening Tabungan BOS setiap lembaga sekolah terdapat potongan biaya jasa transaksi keuangan (biaya administrasi bank) tetapi di awal tahun anggaran biaya administrasi bank tersebut tidak dianggarkan dalam APBD BOS.

Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan di anggarakan sebesar Rp1.082.070.600,00 terealisasi sebesar Rp1.308.122.045,00 atau 120,89%. Terjadinya pelampauan anggaran disebabkan karena pada RSUD dr. Haryoto terdapat belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan dianggarkan sebesar Rp496.825.000,00 terealisasi sebesar Rp777.474.045,00 atau 156,49%. RSUD Dr. Haryoto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggarannya karena berstatus Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

(3) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp43.882.391.155,00 atau 88,84% dari anggaran sebesar Rp49.394.649.104,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 56 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan
Tahun 2018 dan 2017

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	8.855.276.400,00	7.746.061.330,00	87,47	7.086.812.322,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	4.386.083.194,00	3.575.198.065,00	81,51	3.284.594.085,00
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	60.470.000,00	9.543.000,00	15,78	6.172.000,00
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	929.742.100,00	623.909.400,00	67,11	666.278.450,00
5	Belanja pemeliharaan grader	0,00	0,00	0,00	187.050.000,00
6	Belanja pemeliharaan excavator	373.595.000,00	370.250.000,00	99,10	98.751.000,00
7	Belanja pemeliharaan asphal equipment	100.000.000,00	99.324.000,00	99,32	98.000.000,00
8	Belanja pemeliharaan electric generating set	382.680.500,00	335.567.954,00	87,69	202.465.564,00
9	Belanja pemeliharaan pompa	80.365.000,00	42.825.000,00	53,29	25.893.000,00
10	Belanja pemeliharaan alat pengolahan air kotor	193.900.000,00	192.764.532,00	99,41	0,00
11	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	38.000.000,00	6.754.605,00	17,78	1.740.500,00
12	Belanja pemeliharaan	66.000.000,00	9.393.556,00	14,23	10.664.103,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
	kendaraan bermotor berpenumpang				
13	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	385.000.000,00	189.734.383,00	49,28	241.610.368,00
14	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	7.500.000,00	743.000,00	9,91	1.001.500,00
15	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang	0,00	0,00	0,00	12.271.300,00
16	Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	98.048.000,00	52.567.520,00	53,61	70.655.000,00
17	Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	42.200.000,00	41.200.000,00	97,63	29.750.000,00
18	Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	29.500.000,00
19	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga	0,00	0,00	0,00	530.000,00
20	Belanja pemeliharaan alat kalibrasi	200.000.000,00	196.279.200,00	98,14	194.044.500,00
21	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	393.860.000,00	386.026.300,00	98,01	122.611.000,00
22	Belanja pemeliharaan alat pengolahan tanah dan tanaman	6.000.000,00	5.978.500,00	99,64	0,00
23	Belanja pemeliharaan alat prosesing	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	750.000,00
24	Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	2.500.000,00	30.000,00	1,20	1.740.000,00
25	Belanja pemeliharaan mesin tik	5.600.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26	Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	147.220.000,00	55.602.160,00	37,77	39.261.600,00
27	Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
28	Belanja pemeliharaan office use	147.070.000,00	100.987.453,00	68,67	102.195.700,00
29	Belanja pemeliharaan meubelair	359.033.300,00	325.869.600,00	90,76	608.628.500,00
30	Belanja pemeliharaan alat pembersih	37.805.000,00	20.692.000,00	54,73	6.250.000,00
31	Belanja pemeliharaan alat pendingin	878.327.000,00	767.044.250,00	87,33	783.819.000,00
32	Belanja pemeliharaan alat dapur	6.600.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
33	Belanja pemeliharaan home use	408.722.000,00	255.732.900,00	62,57	204.223.100,00
34	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran	5.500.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
35	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	88.203.250,00	60.739.000,00	68,86	36.850.000,00
36	Belanja pemeliharaan personal komputer	1.536.243.000,00	1.327.775.673,00	86,43	1.516.031.350,00
37	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	793.911.000,00	697.406.300,00	87,84	847.035.500,00
38	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan	168.130.000,00	94.111.500,00	55,98	43.917.500,00
39	Belanja pemeliharaan meja kerja pejabat	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	530.000,00
40	Belanja pemeliharaan peralatan studio visual	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	27.400.000,00
42	Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone	600.000,00	500.000,00	83,33	500.000,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
43	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	4.000.000,00
44	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	43.000.000,00	42.856.000,00	99,67	2.300.000,00
45	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	15.140.000,00	14.900.000,00	98,41	18.960.000,00
46	Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	1.161.900.000,00	930.013.171,00	80,04	1.575.123.500,00
47	Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi	34.272.100,00	31.622.500,00	92,27	11.049.000,00
48	Belanja pemeliharaan alat rontgen	17.600.000,00	10.630.000,00	60,40	1.650.000,00
49	Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan	38.500.000,00	893.000,00	2,32	16.350.000,00
50	Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	3.250.000,00
51	Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	14.500.000,00	10.300.000,00	71,03	5.150.000,00
52	Belanja pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia	46.500.000,00	42.650.000,00	91,72	18.900.000,00
53	Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	11.300.000,00	9.000.000,00	79,65	3.700.000,00
54	Belanja pemeliharaan alat laboratorium fisika	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
55	Belanja pemeliharaan alat laboratorium biologi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
56	Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	0,00	0,00	0,00	700.000,00
57	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	21.000.000,00	13.305.680,00	63,36	0,00
58	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kualitas air dan tanah	255.163.750,00	216.096.500,00	84,69	0,00
59	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	1.952.499.215,00	1.844.175.300,00	94,45	1.843.104.750,00
60	Belanja pemeliharaan bangunan gedung laboratorium	4.971.200,00	4.971.200,00	100,00	0,00
61	Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan	1.158.221.200,00	772.224.100,00	66,67	600.275.000,00
62	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	12.515.000,00	12.515.000,00	100,00	35.775.000,00
63	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	381.422.950,00	381.422.950,00	100,00	5.189.685.975,00
64	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	332.975.000,00	327.730.000,00	98,42	870.215.600,00
65	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	279.500.400,00	278.150.000,00	99,52	435.434.000,00
66	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pemotongan hewan	30.000.000,00	29.227.300,00	97,42	0,00
67	Belanja pemeliharaan bangunan stasiun bus	19.775.000,00	16.637.000,00	84,13	24.865.000,00
68	Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	2.703.000,00
69	Belanja pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan	199.990.000,00	198.826.000,00	99,42	74.577.000,00
70	Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	1.277.000.000,00	1.250.330.933,00	97,91	758.200.000,00
71	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I	0,00	0,00	0,00	9.760.000,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2017
			2018	%	
72	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II	42.058.000,00	41.712.000,00	99,18	33.668.500,00
73	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III	0,00	0,00	0,00	19.784.000,00
74	Belanja pemeliharaan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan	26.824.340,00	26.804.000,00	99,92	0,00
75	Belanja pemeliharaan flat/rumah susun	251.088.500,00	244.032.000,00	97,19	183.087.400,00
76	Belanja pemeliharaan rumah peninggalan sejarah	208.000.000,00	207.848.000,00	99,93	0,00
77	Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah	24.300.000,00	23.494.000,00	96,68	115.670.000,00
78	Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas	0,00	0,00	0,00	270.282.000,00
79	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	51.400.000,00	50.737.000,00	98,71	197.440.000,00
80	Belanja pemeliharaan rambu tidak bersuar	10.000.000,00	9.788.000,00	97,88	0,00
81	Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota	6.631.900.000,00	6.075.012.000,00	91,60	4.951.680.000,00
82	Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	291.150.000,00	287.524.000,00	98,75	407.461.000,00
83	Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	430.700.000,00	427.950.000,00	99,36	371.684.000,00
84	Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	1.999.745.000,00	1.875.047.500,00	93,76	1.392.709.000,00
85	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman irigasi	187.565.000,00	186.984.000,00	99,69	0,00
86	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman air kotor	0,00	0,00	0,00	53.912.500,00
87	Belanja pemeliharaan bangunan pembuang air kotor	41.350.000,00	41.199.000,00	99,63	0,00
88	Belanja pemeliharaan instalasi air bersih/air baku lainnya	33.800.000,00	23.059.000,00	68,22	0,00
89	Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestik	137.725.000,00	77.861.000,00	56,53	73.120.400,00
90	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	687.989.900,00	714.351.900,00	103,83	441.123.500,00
91	Belanja pemeliharaan instalasi gardu listrik induk	330.000.000,00	143.430.500,00	43,46	50.267.500,00
92	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	1.657.940.200,00	1.652.433.260,00	99,67	1.818.404.000,00
93	Belanja pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah	20.000.000,00	15.457.650,00	77,29	8.220.000,00
94	Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	65.325.000,00	64.975.000,00	99,46	77.650.000,00
95	Belanja pemeliharaan tanaman	298.000.000,00	270.078.296,00	90,63	481.856.400,00
96	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud	179.481.000,00	158.038.000,00	88,05	120.276.000,00
97	Belanja pemeliharaan taman	114.943.450,00	112.046.389,00	97,48	116.185.000,00
98	Belanja pemeliharaan air tanah dalam	0,00	0,00	0,00	56.475.000,00
99	Belanja pemeliharaan instalasi air tanah dangkal	0,00	0,00	0,00	4.838.300,00
100	Belanja pemeliharaan jaringan transmisi	0,00	0,00	0,00	148.377.300,00
101	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan	0,00	0,00	0,00	65.623.000,00
102	Belanja Pemeliharaan Dana BOS	7.091.583.155,00	7.033.590.845,00	99,18	6.810.464.025,00
	Jumlah	49.394.649.104,00	43.882.391.155,00	88,84	46.375.633.592,00

Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik terealisasi sebesar Rp714.351.900,00 atau 103,83% dari anggaran sebesar Rp687.989.000,00. Terjadinya

pelampauan anggaran disebabkan karena pada RSUD dr. Haryoto terdapat belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp69.401.000,00 atau 173,50%. RSUD Dr. Haryoto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggarannya karena berstatus Badan Layanan umum Daerah (BLUD).

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp43.121.717.221,00, atau 86,45% dari anggaran sebesar Rp49.880.177.100,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 57 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas

Tahun 2018 dan 2017

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.832.176.500,00	13.356.613.388,00	79,35	11.204.821.488,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.013.386.600,00	27.782.061.833,00	89,58	24.071.170.455,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dana BOS	2.034.614.000,00	1.983.042.000,00	97,47	2.391.546.600,00
	Jumlah	49.880.177.100,00	43.121.717.221,00	86,45	37.667.538.543,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya merupakan belanja untuk pembelian barang-barang *extrakomptabel* yang tidak di catat di neraca karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap, sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp5.764.546.944,00 atau 87,03% dari anggaran sebesar Rp6.623.726.018,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 58 Belanja Barang dan Jasa - Belanja Lainnya

Tahun 2018 dan 2017

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja pompa	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2	Belanja kendaraan tak bermotor angkutan barang	3.440.000,00	2.340.000,00	68,02	1.230.000,00
3	Belanja perkakas konstruksi logam yang berpindah	49.350.000,00	49.035.000,00	99,36	87.400.000,00
4	Belanja perkakas bengkel listrik	450.000,00	450.000,00	100,00	510.000,00
5	Belanja perkakas standar (standart tool)	0,00	0,00	0,00	450.000,00
6	Belanja perkakas bengkel kerja	35.135.000,00	32.371.700,00	92,14	10.175.000,00
7	Belanja alat ukur universal	6.000.000,00	4.950.000,00	82,50	2.887.500,00
8	Belanja alat ukur/pembanding	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00
9	Belanja alat ukur lainnya	4.930.000,00	3.500.999,00	71,01	11.909.375,00
10	Belanja alat timbangan	1.904.200,00	1.864.200,00	97,90	3.340.000,00
11	Belanja alat pengolahan tanah dan tanaman	43.324.000,00	40.965.000,00	94,55	9.525.000,00
12	Belanja alat-alat peternakan	30.400.000,00	30.202.000,00	99,35	46.250.000,00
13	Belanja alat prosesing	6.640.000,00	6.640.000,00	100,00	0,00
14	Belanja alat pemeliharaan tanaman	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	39.710.000,00
15	Belanja alat panen	2.860.000,00	2.860.000,00	100,00	0,00
16	Belanja mesin hitung/jumlah	21.831.800,00	21.360.500,00	97,84	12.870.900,00
17	Belanja alat penyimpanan perlengkapan kantor	55.000.000,00	54.340.000,00	98,80	30.706.500,00
18	Belanja office use	54.895.200,00	48.000.000,00	87,44	36.004.400,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
19	Belanja meubelair	1.198.507.900,00	811.999.977,00	67,75	1.251.327.600,00
20	Belanja alat pengukur waktu	36.575.000,00	30.396.000,00	83,11	10.024.550,00
21	Belanja alat pembersih	36.134.000,00	35.925.000,00	99,42	179.337.000,00
22	Belanja alat pendingin	61.081.000,00	60.116.000,00	98,42	45.669.700,00
23	Belanja alat dapur	149.587.000,00	146.148.500,00	97,70	59.933.385,00
24	Belanja home use	962.659.000,00	838.364.955,00	87,09	833.734.070,00
25	Belanja alat pemadam kebakaran	6.915.000,00	6.909.000,00	99,91	5.886.000,00
26	Belanja personal komputer	0,00	0,00	0,00	12.658.000,00
27	Belanja peralatan personal komputer	31.287.900,00	19.887.900,00	63,56	11.010.000,00
28	Belanja peralatan jaringan	65.889.085,00	54.831.200,00	83,22	65.524.700,00
29	Belanja alat komunikasi telephone	600.000,00	600.000,00	100,00	4.925.000,00
30	Belanja alat kedokteran umum	294.185.413,00	213.462.605,00	72,56	278.840.020,00
31	Belanja alat kedokteran gigi	49.061.050,00	46.296.235,00	94,36	25.975.619,00
32	Belanja alat kedokteran mata	11.700.000,00	10.045.750,00	85,86	510.000,00
33	Belanja alat kedokteran THT	3.250.000,00	3.217.500,00	99,00	4.631.000,00
34	Belanja alat farmasi	580.700,00	575.300,00	99,07	4.050.000,00
35	Belanja alat kedokteran bedah	28.078.000,00	0,00	0,00	935.000,00
36	Belanja alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	14.505.100,00	14.211.150,00	97,97	17.248.000,00
37	Belanja poliklinik set	3.750.000,00	3.600.000,00	96,00	0,00
38	Belanja alat kedokteran gawat darurat	2.500.000,00	2.475.000,00	99,00	1.969.000,00
39	Belanja alat kesehatan perawatan	11.130.500,00	10.002.070,00	89,86	0,00
40	Belanja alat kesehatan olah raga	2.700.000,00	2.640.000,00	97,78	0,00
41	Belanja alat laboratorium microbiologi	7.588.680,00	7.174.056,00	94,54	0,00
42	Belanja alat laboratorium umum	2.200.000,00	660.000,00	30,00	15.266.000,00
43	Belanja alat laboratorium kedokteran	16.015.000,00	7.905.000,00	49,36	11.143.000,00
44	Belanja alat laboratorium kimia	22.091.000,00	21.328.000,00	96,55	0,00
45	Belanja alat laboratorium biologi	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00
46	Belanja alat laboratorium hematologi	154.150.000,00	141.200.092,00	91,60	865.000,00
47	Belanja alat peraga bidang studi IPA Dasar	50.280.000,00	49.935.600,00	99,32	0,00
48	Belanja alat peraga bidang studi IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	5.620.800,00
49	Belanja alat peraga bidang studi Olah Raga	13.640.000,00	13.240.000,00	97,07	83.356.000,00
50	Belanja alat peraga/praktek kerja	12.217.000,00	12.200.050,00	99,86	23.942.000,00
51	Belanja alat laboratorium lingkungan	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja alat laboratorium penunjang	230.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja bangunan gedung kantor	67.500.000,00	66.924.000,00	99,15	106.788.000,00
54	Belanja bangunan gedung tempat ibadah	7.468.799,00	7.151.000,00	95,74	0,00
55	Belanja rumah negara golongan I	7.504.000,00	6.767.000,00	90,18	0,00
56	Belanja bangunan kerangka reklame	20.000.000,00	19.998.000,00	99,99	24.825.000,00
57	Belanja tugu/tanda batas	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	
58	Belanja rambu bersuar	151.855.000,00	148.634.000,00	97,88	134.000.000,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
59	Belanja rambu tidak bersuar	1.313.370.000,00	1.179.506.600,00	89,81	2.202.599.000,00
60	Belanja bangunan pengamanan air kotor	146.300.000,00	145.948.000,00	99,76	0,00
61	Belanja alat kesenian	4.636.000,00	4.624.000,00	99,74	9.600.000,00
62	Belanja alat olah raga	11.776.000,00	11.500.000,00	97,66	8.427.000,00
63	Belanja binatang ikan	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00	19.250.000,00
64	Belanja tanaman perkebunan	74.800.000,00	74.375.000,00	99,43	0,00
65	Belanja alat keamanan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
66	Belanja buku umum	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00
67	Belanja buku agama	0,00	0,00	0,00	568.000,00
68	Belanja Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
69	Belanja alat kesehatan olah raga	0,00	0,00	0,00	687.500,00
70	Belanja Lainnya Dana BOS	1.049.142.691,00	1.040.893.005,00	99,21	2.186.309.725,00
	Jumlah	6.623.726.018,00	5.764.546.944,00	87,03	7.972.173.344,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.3 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2018 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang yang mengharuskan dianggarkan dan direalisasikannya belanja bunga, baik penerusan pinjaman maupun pinjaman kepada lembaga keuangan bank dan bukan bank.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.4 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2018 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja subsidi.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.5 Belanja Hibah	142.948.157.176,00	128.942.462.032,00	84.670.257.207,00

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp142.948.157.176,00 terealisasi sebesar Rp128.942.462.032,00 terdiri dari:

- Belanja hibah uang sebesar Rp111.480.797.482,00; dan
- Hibah barang sebesar Rp17.461.664.550,00 merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 59 Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi – Hibah

Tahun 2018 dan 2017

No	Belanja Hibah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Hibah pada PPKD	122.206.666.000,00	111.480.797.482,00	91,22	70.393.340.000,00	41.087.457.482,00	58,37
2	Hibah barang	20.741.491.176,00	17.461.664.550,00	84,19	14.276.917.207,00	3.184.747.343,00	22,31
	Jumlah hibah	142.948.157.176,00	128.942.462.032,00	90,20	84.670.257.207,00	44.272.204.825,00	52,29

D banding tahun 2017, realisasi belanja hibah tahun 2018 naik sebesar Rp44.272.204.825,00 atau naik 52,29%. Rincian belanja hibah uang pada PPKD dan hibah barang sebagai berikut :

Tabel 60 Daftar Rincian Realisasi Hibah Uang pada PPKD Tahun 2018 dan 2017

No	Hibah PPKD	ANGGARAN	REALISASI	%	Realisasi 2017
I	Belanja Hibah pada Pemerintah Pusat				
1	Belanja Hibah kepada KPU	34.600.266.000,00	31.367.596.750,00	90,66	3.967.380.000,00
2	Belanja Hibah kepada Polres	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00	
3	Belanja Hibah kepada Panwaslu	5.450.000.000,00	5.450.000.000,00	100,00	1.100.000.000,00
II	Belanja Hibah pada Masyarakat				
1	Belanja hibah kepada masyarakat (bidang pendidikan)				
2	Hibah Pendamping BOS kpd Sekolah SD/SMP Swasta	6.226.200.000,00	6.215.880.000,00	99,83	5.972.160.000,00
3	Hibah kepada TK Swasta dan PAUD (159 Lembaga)	318.000.000,00	54.000.000,00	16,98	50.000.000,00
4	Hibah BOSDA Madin	8.835.000.000,00	8.835.000.000,00	100,00	8.611.800.000,00
5	Hibah kepada sekolah swasta (Honor Non NIP)	24.012.000.000,00	23.873.500.000,00	99,42	19.209.600.000,00
6	Akademi Komunitas Negeri Lumajang	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00
7	Pembangunan Perpustakaan SMP Swasta	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	0,00
8	RKB dan Sarpras SMP Swasta	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00	666.900.000,00
9	Rehap Ruang kelas SD Swasta	198.000.000,00	195.000.000,00	98,48	0,00
10	Hibah untuk 2 Lembaga Pendidikan Swasta Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
11	Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik 2018)	20.989.200.000,00	20.391.000.000,00	97,15	20.018.400.000,00
12	DAK SMP 2018	220.000.000,00	209.000.000,00	95,00	0,00
13	Hibah kepada RA/MI/MTs/SMP Swata (23 lembaga)	1.405.000.000,00	1.405.000.000,00	100,00	0,00
15	Hibah kepada Yayasan / Ponpes / Organisasi Keagamaan / Tempat Ibadah	2.165.000.000,00	2.095.000.000,00	96,77	1.125.000.000,00
16	Honor Guru Ngaji (3150 org x 100.000 x 12 bln)	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	3.024.000.000,00
III	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan				
1	Belanja Hibah kepada KONI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada PMI	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Pramuka	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada MUI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	75.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada BAZ	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	100.000.000,00
6	Belanja Hibah kepada GNOTA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Hibah kepada GOW	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00

No	Hibah PPKD	ANGGARAN	REALISASI	%	Realisasi 2017
9	Hibah kepada Dewan Kesenian Lumajang	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
10	PWRI	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
11	LVRI	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
12	PEPABRI	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
13	ORARI	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
14	RAPI	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
15	Muaslimat NU	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Jumlah Hibah PPKD	122.206.666.000,00	117.878.976.750,00		72.195.240.000,00
IV	Pengembalian (Contra Post):				
1	Setor Kembali Hibah kepada KONI	0,00	0,00		(433.900.000,00)
2	Setor Kembali Hibah Bidang Pendidikan	0,00	0,00		(1.368.000.000,00)
3	POLRES	0,00	(216.629.000,00)		0,00
4	BAWASLU	0,00	(146.042.955,00)		0,00
5	IPTQ KEC.KEDUNGAJANG	0,00	(7.200.000,00)		0,00
6	KPU	0,00	(5.750.475.543,00)		0,00
7	BAZNAS	0,00	(10.000.000,00)		0,00
8	Akademi Komunitas Negeri Lumajang	0,00	(267.831.770,00)		0,00
	Jumlah Hibah PPKD	122.206.666.000,00	111.480.797.482,00	91,22	70.393.340.000,00

Tabel 61 Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi – Hibah Barang Yang Diserahkan pada Masyarakat

Tahun 2018 dan 2017					
No	Nama SKPD	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Kesehatan	239.600.000,00	220.808.800,00	92,16	
	Satuan polisi Pamomng Praja	180.000.000,00	179.490.000,00	99,72	149.490.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Petmebrdayaan masyarakat & Desa	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00
	Dinas Perikanan	1.501.000.000,00	1.475.718.200,00	98,32	991.034.000,00
	Dinas Pertanian	1.146.809.000,00	980.271.500,00	85,48	657.445.000,00
	Jumlah (1)	3.153.409.000,00	2.882.288.500,00	91,40	1.797.969.000,00
2	Belanja hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00		320.211.100,00
	Dinas Pertanian	74.750.000,00	72.946.000,00	97,59	0,00
	Jumlah (2)	74.750.000,00	72.946.000,00	97,59	320.211.100,00
3	Belanja hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	10.087.903.826,00	7.774.375.800,00	77,07	3.888.881.600,00
	Dinas Pertanian	3.970.737.000,00	3.938.361.750,00	99,18	5.953.878.550,00
	Dinas Lingkungan Hidup	193.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah (3)	14.251.640.826,00	11.712.737.550,00	82,19	9.842.760.150,00
4	Belanja hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Pendidikan - Bidang PAUD & Pendidikan Masyarakat	387.891.600,00	351.307.000,00	90,57	385.469.100,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	304.933.000,00
	Dinas Pertanian	640.188.000,00	469.188.000,00	73,29	
	Jumlah (4)	1.028.079.600,00	820.495.000,00	79,81	690.402.100,00
5	Belanja hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00	89.464.357,00
	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	712.500.000,00	689.479.000,00	96,77	418.927.000,00
	Dinas Perikanan	600.000.000,00	589.689.750,00	98,28	693.760.500,00
	Dinas Pertanian	413.637.000,00	378.605.750,00	91,53	423.423.000,00
	Jumlah (5)	1.726.137.000,00	1.657.774.500,00	96,04	1.625.574.857,00
6	Belanja hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD				
	Dinas Pendidikan - Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan	507.474.750,00	315.423.000,00	62,16	0,00
	Jumlah (6)	507.474.750,00	315.423.000,00	62,16	0,00
	Jumlah (1) s/d (6)	20.741.491.176,00	17.461.664.550,00	84,19	14.276.917.207,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.6 Belanja Bantuan Sosial	52.117.814.000,00	47.278.414.217,00	31.181.675.232,00

Belanja bantuan sosial pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp52.117.814.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.278.414.217,00 terdiri dari:

- (1) Belanja bantuan sosial pada PPKD terealisasi sebesar Rp47.027.414.217,00 dan
- (2) Belanja bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp251.000.000,00.

Tabel 62 Daftar Realisasi Belanja Operasi – Bantuan Sosial

No	Bantuan Sosial	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bansos uang pada PPKD	51.865.814.000,00	47.027.414.217,00	90,67	30.940.675.232,00	16.086.738.985,00	51,99
2	Bansos barang	252.000.000,00	251.000.000,00	99,60	241.000.000,00	10.000.000,00	4,15
	Jumlah bansos	52.117.814.000,00	47.278.414.217,00	90,71	31.181.675.232,00	16.096.738.985,00	51,62

Dibanding tahun 2017, belanja bantuan sosial naik sebesar Rp16.096.738.986,00 atau 51,62%. Rincian belanja bantuan sosial sebagaimana tabel berikut.

Tabel 63 Belanja Bantuan Sosial pada PPKD

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Keterangan
1	Bantuan Sosial untuk Program Kegiatan Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) th 2018	961.705.000,00	2.327.565.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Bantuan Sosial Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP)	1.785.000.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Keterangan
	dan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) Tahun 2018			Ruang
3	Bantuan Sosial untuk operasi jantung untuk anaknya Bapak Rudi Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2018	10.000.000,00		Dinas Sosial
4	Bantuan Sosial untuk pengobatan sakit lumpuh An. Usman anak dari Ibu Sanis Dusun Kebonan Rt 002 Rw 011 Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018	5.000.000,00		Dinas Sosial
5	Bantuan Sosial untuk pengobatan penyakit Hydrocephalus An. Nevan Fabian Putra Prasetyo anak dari Bapak Dwi Prasetyo Utomo Tahun 2018	5.000.000,00		Dinas Sosial
6	Bantuan Sosial biaya pengobatan untuk 3 orang di 3 Kecamatan Kabupaten Lumajang Tahun 2018	15.000.000,00		Dinas Sosial
7	Bantuan Sosial untuk biaya transport rujukan dan pendampingan kasus jiwa dan kasus khusus bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang Tahun 2018	81.652.000,00	41.009.000,00	Dinas Kesehatan
8	Bantuan Sosial keperluan pembuatan prothese kaki palsu tahun 2018	3.000.000,00		Dinas Sosial
9	Bantuan Sosial untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) guna Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2018	725.000.000,00	435.000.000,00	Dinas Pemberdayaan masyarakat & Desa
10	Bantuan Sosial untuk 2 Lembaga pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018	55.000.000,00		Dinas Sosial
11	Bantuan Sosial untuk Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Lumajang di Rumah Sakit Tersier dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	1.491.243.217,00	1.070.843.232,00	Dinas Kesehatan
12	Bantuan Sosial untuk Pembangunan Asrama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nahdlatuth Thullab Desa Tanggung Kec Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018	100.000.000,00		Dinas Sosial

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Keterangan
13	Bantuan Sosial Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan Kotaku Tahun 2018	1.970.000.000,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Bantuan Sosial untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Tahun 2017		1.537.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Bantuan Sosial untuk Pengobatan Tumor seorang warga Dusun Kalibendo Selatan Rt 001 Rw 002 Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Tahun 2018	5.000.000,00		Dinas Sosial
16	Bantuan Sosial untuk Program kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK 2018 Reguler) Tahun 2018	5.374.350.000,00	4.339.909.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	Bantuan sosial untuk Peserta BPJS kesehatan PBI - D	14.624.389.000,00	3.087.474.000,00	Dinas Kesehatan
18	Bantuan sosial- korban kebakaran	90.000.000,00	22.500.000,00	Dinas Sosial
19	Bantuan Sosial untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan)	1.916.575.000,00	1.680.875.000,00	Dinas Sosial
20	Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	14.099.500.000,00	14.061.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Bantuan sosial - Santunan kematian	3.867.000.000,00	2.528.000.000,00	Dinas Sosial
22	Bantuan Sosial untuk Ibu Sutami korban bencana rumah roboh akibat hujan deras desa pasirian Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2017		5.000.000,00	Dinas Sosial
23	Bantuan Sosial untuk Tali Asih bagi 8 tenaga kontrak dilingkungan Kabupaten Lumajang Tahun 2017		40.000.000,00	
	PENGEMBALIAN :			
24	Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	(153.000.000,00)	(235.500.000,00)	
25	Pengembalian Bantuan Sosial Santunan Kematian An.Asmadi Ds.Kaliboto Kidul Kec.Jatiroto	(1.000.000,00)		
26	Pengembalian Bantuan Sosial Santunan Kematian An.JAti Ds.Salak Kec.Randuagung	(1.000.000,00)		
27	Pengembalian Bantuan Sosial Santunan Kematian An.Slamet Gunawan Jl.Slamet Riyadi Lumajang	(1.000.000,00)		

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Keterangan
28	Pengembalian Bantuan Sosial Santunan Kematian AN.Suratin Ds. Sumbersari Rowokangkung	(1.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial PPLD	47.027.414.217,00	30.940.675.232,00	

Tabel 64 Daftar Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD Dinas Sosial	252.000.000,00	251.000.000,00	241.000.000,00
	Jumlah	252.000.000,00	251.000.000,00	241.000.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	1.026.538.956,00	1.026.538.956,00	1.026.538.956,16

Realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp1.026.538.956,16 merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lumajang, terinci sebagai berikut.

Tabel 65 Daftar Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 dan 2017

No	Partai Politik	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Hanura	43.562.641,00	43.562.641,00	100,00	43.562.641,44
2	Gerindra	114.267.015,00	114.267.015,00	100,00	114.267.015,04
3	PKS	70.532.296,00	70.532.296,00	100,00	70.532.295,52
4	PAN	60.379.689,00	60.379.689,00	100,00	60.379.688,80
5	PKB	170.939.855,00	170.939.855,00	100,00	170.939.855,20
6	Golkar	74.083.198,00	74.083.198,00	100,00	74.083.198,40
7	PPP	68.847.364,00	68.847.364,00	100,00	68.847.364,32
8	PDIP	207.655.223,00	207.655.223,00	100,00	207.655.223,04
9	Demokrat	146.904.491,00	146.904.491,00	100,00	146.904.490,88
10	Nasdem	69.367.184,00	69.367.184,00	100,00	69.367.183,52
	Jumlah II	1.026.538.956,00	1.026.538.956,00	100,00	1.026.538.956,16

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2. Belanja Modal	323.810.661.690,80	288.428.035.220,96	258.258.151.004,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp323.810.661.690,80 terealisasi sebesar Rp288.428.035.220,96.

Tabel 66 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja Modal Tanah	8.876.250.000,00	7.004.632.997,00	78,91	1.048.921.020,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.661.845.681,00	74.751.188.303,37	85,27	80.783.643.796,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.808.612.213,00	84.921.598.485,16	90,53	88.166.020.917,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.104.854.693,00	98.178.259.981,43	91,67	68.240.283.621,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.104.293.736,00	17.757.264.954,00	98,08	16.087.112.470,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	8.254.805.367,80	5.815.090.500,00	70,44	3.932.169.180,00
	Jumlah	323.810.661.690,80	288.428.035.220,96	89,07	258.258.151.004,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.1 Belanja Modal Tanah	8.876.250.000,00	7.004.632.997,00	1.048.921.020,00

Belanja modal tanah tahun 2018 dianggarkan pada Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, BPKD dan Dinas Pendidikan, terinci sebagai berikut :

Tabel 67 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018 dan 2017

No	Rincian Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja modal perkebunan				4.625.800,00
2	Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	8.468.250.000,00	6.960.246.480,00	82,19	1.043.523.500,00
3	Belanja modal tanah untuk bangunan instalasi	0,00	0,00	0,00	771.720,00
4	Belanja Modal Tanah pada kosong	40.000.000,00	15.777.200,00	39,44	0,00
5	Belanja modal tanah untuk bangunan jalan	368.000.000,00	28.609.317,00	7,77	0,00
	Jumlah	8.876.250.000,00	7.004.632.997,00	78,91	1.048.921.020,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.2 Belanja Modal Peralatan & Mesin	87.661.845.681,00	74.751.188.303,37	80.783.643.796,00

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp87.661.845.681,00 terealisasi sebesar 85,27% atau sebesar Rp74.751.188.303,37 terinci sebagai berikut :

Tabel 68 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja modal compacting equipment	402.650.000,00	398.450.000,00	98,96
2	Belanja modal compressor	4.000.000,00	3.850.000,00	96,25
3	Belanja modal electric generating set	1.177.787.282,00	1.092.943.259,00	92,80
4	Belanja modal pompa	133.150.000,00	193.054.000,00	144,99
5	Belanja modal mesin bor	800.000,00	730.000,00	91,25
6	Belanja modal unit pemeliharaan lapangan	247.350.000,00	245.750.000,00	99,35
7	Belanja modal kendaraan bermotor perorangan	2.315.000.000,00	2.266.942.000,00	97,92
8	Belanja modal kendaraan bermotor berpenumpang	3.621.100.000,00	1.953.132.000,00	53,94
9	Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	4.018.450.500,00	3.736.337.294,00	92,98
10	Belanja modal kendaraan bermotor khusus	2.597.789.200,00	2.609.420.700,00	100,45
11	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	1.682.203.000,00	1.525.851.000,00	90,71
12	Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga	422.260.000,00	390.378.242,00	92,45
13	Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang	539.572.600,00	586.447.997,00	108,69
14	Belanja modal kendaraan tak bermotor berpenumpang	60.000.000,00	59.000.000,00	98,33
15	Belanja modal perkakas konstruksi logam yang berpindah	13.850.000,00	13.750.000,00	99,28
16	Belanja modal perkakas bengkel listrik	0,00	3.321.120,00	
17	Belanja modal perkakas pengangkat	3.500.000,00	55.000.000,00	1.571,43
18	Belanja modal perkakas bengkel kerja	106.650.000,00	106.650.000,00	100,00
19	Belanja modal alat ukur universal	10.850.000,00	10.740.000,00	98,99
20	Belanja modal alat kalibrasi	131.500.000,00	298.637.000,00	227,10
21	Belanja modal alat ukur lainnya	555.520.950,00	469.021.000,00	84,43
22	Belanja modal alat timbangan	649.120.000,00	549.231.000,00	84,61
23	Belanja modal anak timbangan	299.173.000,00	256.201.000,00	85,64
24	Belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman	30.980.000,00	30.250.000,00	97,64
25	Belanja modal alat-alat peternakan	271.680.000,00	268.963.200,00	99,00
26	Belanja modal alat pemeliharaan tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
27	Belanja modal alat panen	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00
28	Belanja modal alat reproduksi (pengganda)	295.950.000,00	293.970.000,00	99,33
29	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	1.655.260.421,00	1.698.743.485,00	102,63

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
30	Belanja modal office use	2.425.320.520,00	2.063.636.050,00	85,09
31	Belanja modal meubelair	3.204.369.460,00	3.295.557.573,00	102,85
32	Belanja modal alat pembersih	84.544.250,00	119.388.890,00	141,21
33	Belanja modal alat pendingin	1.245.909.326,00	1.502.590.000,00	120,60
34	Belanja modal alat dapur	57.460.000,00	78.990.000,00	137,47
35	Belanja modal home use	2.907.413.411,00	2.998.830.037,17	103,14
36	Belanja modal alat pemadam kebakaran	345.797.000,00	337.488.000,00	97,60
37	Belanja modal komputer unit/jaringan	746.530.000,00	572.800.000,00	76,73
38	Belanja modal personal komputer	7.604.588.483,00	7.672.603.950,00	100,89
39	Belanja modal peralatan personal komputer	1.674.040.176,00	1.894.509.670,00	113,17
40	Belanja modal peralatan jaringan	913.066.250,00	2.919.117.349,00	319,70
41	Belanja modal meja kerja pejabat	80.116.000,00	77.635.000,00	96,90
42	Belanja modal meja rapat pejabat	12.000.000,00	11.935.000,00	99,46
43	Belanja modal kursi kerja pejabat	242.530.000,00	238.354.400,00	98,28
44	Belanja modal kursi rapat pejabat	40.900.000,00	39.375.000,00	96,27
45	Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat	25.900.000,00	25.820.000,00	99,69
46	Belanja modal peralatan studio visual	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00
47	Belanja modal alat komunikasi telephone	580.416.000,00	542.115.920,00	93,40
48	Belanja modal alat komunikasi radio VHF	495.034.160,00	417.185.000,00	84,27
49	Belanja modal alat-alat sandi	40.000.000,00	39.500.000,00	98,75
50	Belanja modal peralatan pemancar UHF	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
51	Belanja modal peralatan antena VHF/FM	34.000.000,00	23.495.000,00	69,10
52	Belanja modal feeder	42.900.000,00	0,00	0,00
53	Belanja modal alat kedokteran umum	4.727.043.833,00	8.401.078.794,20	177,72
54	Belanja modal alat kedokteran gigi	299.531.253,00	408.313.659,00	136,32
55	Belanja modal alat rontgen	9.000.000,00	0,00	0,00
56	Belanja modal alat farmasi	1.108.448.052,00	1.081.644.500,00	97,58
57	Belanja modal alat kedokteran bedah	1.500.074.000,00	1.438.736.136,00	95,91
58	Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	633.504.917,00	569.168.882,00	89,84
59	Belanja modal alat kesehatan anak	117.750.000,00	91.250.000,00	77,49
60	Belanja modal poliklinik set	0,00	190.850.000,00	
61	Belanja modal alat kedokteran radiologi	12.295.900.000,00	12.389.888.325,00	100,76
62	Belanja modal alat kedokteran gawat darurat	123.750.100,00	119.900.000,00	96,89
63	Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis	8.550.000,00	0,00	0,00
64	Belanja modal alat kesehatan olah raga	363.395.100,00	258.525.000,00	71,14
65	Belanja modal alat laboratorium	14.000.000,00	12.810.000,00	91,50

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
	microbiologi			
66	Belanja modal alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	79.500.000,00	42.899.000,00	53,96
67	Belanja modal alat laboratorium umum	75.889.118,00	69.810.000,00	91,99
68	Belanja modal alat laboratorium kedokteran	175.913.400,00	468.340.268,00	266,23
69	Belanja modal alat laboratorium kimia	160.184.000,00	141.750.000,00	88,49
70	Belanja modal alat laboratorium hematologi	49.108.400,00	38.600.000,00	78,60
71	Belanja modal alat laboratorium makanan	933.940.000,00	0,00	0,00
72	Belanja modal alat peraga bidang studi IPA Dasar	204.720.000,00	201.277.800,00	98,32
73	Belanja modal alat peraga bidang studi Kesenian	85.000.000,00	84.106.000,00	98,95
74	Belanja modal alat peraga/praktek kerja	25.315.000,00	25.315.000,00	100,00
75	Belanja modal alat laboratorium lingkungan	1.465.775.000,00	367.136.000,00	25,05
76	Belanja modal alat laboratorium penunjang	4.100.000,00	4.050.000,00	98,78
77	Belanja modal peralatan dan mesin pada BLUD	14.750.485.000,00	0,00	0,00
78	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	4.308.486.519,00	4.264.547.803,00	98,98
	Jumlah	87.661.845.681,00	74.751.188.303,37	85,27

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.3 Belanja Modal Gedung & Bangunan	93.808.612.213,00	84.921.598.485,16	88.166.020.917,00

Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp84.921.598.485,16 terealisasi sebesar 90,53% atau sebesar Rp84.921.598.485,16 terinci sebagai berikut :

Tabel 69 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018

No	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	12.202.698.335,00	10.623.538.004,00	87,06
2	Belanja modal bangunan gudang	565.000.000,00	522.098.882,46	92,41
3	Belanja modal bangunan gedung instalasi	207.600.000,00	3.695.227.400,00	1.779,97
4	Belanja modal bangunan gedung laboratarium	92.860.000,00	92.011.000,00	99,09
5	Belanja modal bangunan kesehatan	17.689.162.140,00	16.021.430.940,00	90,57
6	Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan	200.000.000,00	285.417.000,00	142,71

No	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
7	Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	35.064.407.750,00	33.314.528.051,00	95,01
8	Belanja modal bangunan gedung tempat olah raga	5.395.515.000,00	5.304.451.200,00	98,31
9	Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	4.808.147.968,00	4.387.378.200,00	91,25
10	Belanja modal bangunan gedung garasi/pool	529.850.000,00	519.412.500,00	98,03
11	Belanja modal bangunan stasiun bus	100.000.000,00	95.985.000,00	95,99
12	Belanja modal bangunan gedung perpustakaan	1.022.000.000,00	1.080.617.000,00	105,74
13	Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandar	94.000.000,00	93.265.000,00	99,22
14	Belanja modal bangunan taman/wisata/rekreasi	5.144.173.600,00	5.085.027.000,00	98,85
15	Belanja modal rumah negara golongan I	1.662.101.420,00	1.488.735.000,00	89,57
16	Belanja modal rumah negara golongan II	379.445.000,00	261.623.807,70	68,95
17	Belanja modal rumah negara golongan III	408.875.000,00	399.741.000,00	97,77
18	Belanja modal bangunan menara perambuan penerangan pantai	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
19	Belanja modal bangunan menara telekomunikasi	94.046.000,00	91.241.500,00	97,02
20	Belanja modal bangunan kerangka reklame	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
21	Belanja modal tugu/tanda batas	199.760.000,00	185.547.000,00	92,88
22	Belanja modal rambu bersuar	929.800.000,00	869.282.000,00	93,49
23	Belanja modal rambu tidak bersuar	426.640.000,00	420.041.000,00	98,45
24	Belanja modal gedung dan bangunan pada BLUD	6.507.530.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.808.612.213,00	84.921.598.485,16	90,53

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.4 Belanja Modal Jalan & Jaringan	107.104.854.693,00	98.178.259.981,43	68.240.283.621,00

Belanja modal jalan dan jaringan dianggarkan sebesar Rp107.104.854.693,00 terealisasi sebesar 91,67% atau sebesar Rp98.178.259.981,43,16terinci sebagai berikut :

Tabel 70 Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

No	Belanja Modal Jalan & Jaringan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja modal jalan kabupaten/kota	51.742.407.693,00	49.265.014.514,13	95,21
2	Belanja modal jalan khusus	550.000.000,00	443.547.692,30	80,65

3	Belanja modal penunjang jalan kabupaten/kota	11.123.300.000,00	10.710.149.900,00	96,29
4	Belanja modal jembatan kabupaten/kota	25.615.700.000,00	21.667.285.625,00	84,59
5	Belanja modal bangunan pengambil irigasi	1.051.975.000,00	1.041.888.500,00	99,04
6	Belanja modal bangunan pembawa irigasi	3.910.428.138,00	3.328.783.000,00	85,13
7	Belanja modal bangunan pengaman irigasi	300.000.000,00	289.134.750,00	96,38
8	Belanja modal bangunan pelengkap irigasi	7.256.041.862,00	5.980.638.000,00	82,42
9	Belanja modal bangunan pembuang pengamanan sungai	354.325.000,00	350.080.000,00	98,80
10	Belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai	1.216.959.000,00	1.203.311.000,00	98,88
11	Belanja modal bangunan pelengkap pengamanan sungai	1.050.000.000,00	1.043.471.000,00	99,38
12	Belanja modal bangunan air tawar	318.150.000,00	310.965.000,00	97,74
13	Belanja modal jaringan distribusi	2.615.568.000,00	2.543.991.000,00	97,26
	Jumlah	107.104.854.693,00	98.178.259.981,43	91,67

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.104.293.736,00	17.757.264.954,00	16.087.112.470,00

Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp18.104.293.736,00 terealisasi sebesar 98,08% atau sebesar Rp17.757.264.954,00,16terinci sebagai berikut :

Tabel 71 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja modal buku umum	1.940.392.500,00	1.705.351.700,00	87,89
2	Belanja modal buku filsafat	26.000.000,00	25.994.000,00	99,98
3	Belanja modal buku agama	26.000.000,00	25.966.400,00	99,87
4	Belanja modal buku ilmu sosial	26.650.000,00	25.950.800,00	97,38
5	Belanja modal buku ilmu bahasa	26.000.000,00	25.954.600,00	99,83
6	Belanja modal buku matematika & pengetahuan alam	26.000.000,00	25.990.000,00	99,96
7	Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
8	Belanja modal buku arsitektur, kesenian, olah raga	7.000.000,00	6.995.200,00	99,93
9	Belanja modal buku geografi, biografi,	6.000.000,00	5.956.400,00	99,27

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran	Realisasi	%
	sejarah			
10	Belanja modal buku laporan	0,00	1.996.500,00	-
11	Belanja modal alat kesenian	173.012.000,00	171.430.000,00	99,09
12	Belanja modal benda-benda berserajah	22.500.000,00	0,00	0,00
13	Belanja modal alat permainan	79.127.000,00	66.552.000,00	84,11
14	Belanja modal aset tetap lainnya pada BLUD	2.000.000,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	15.717.612.236,00	15.643.127.354,00	99,53
	Jumlah	18.104.293.736,00	17.757.264.954,00	98,08

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	8.254.805.367,80	5.815.090.500,00	3.932.169.180,00

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2018 merupakan pengadaan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, penyertaan modal maupun aset tetap, seperti pengadaan software/aplikasi komputer. Anggaran belanja modal aset lainnya sebesar Rp8.254.805.367,80 dan terealisasi sebesar Rp5.815.090.500,00. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 72 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Software komputer	1.565.630.000,00	1.858.937.500,00	118,73
2	Hasil kajian/pengembangan	4.210.270.000,00	3.956.153.000,00	93,96
3	Belanja modal aset lainnya pada BLUD	2.478.905.367,80	0,00	0,00
	Jumlah	8.254.805.367,80	5.815.090.500,00	70,44

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
3. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.976.833.238,00	3.510.495.735,00

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang menurut sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Tahun 2018 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.976.833.238,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 73 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Realisasi	SKPD
1	Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas penerimaan tahun 2017 karena salah setor ke rekening kas daerah An. Hari Mistanto Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	8.000.000,00	BPKD
2	Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas penerimaan tahun 2017 karena salah setor ke Rekening Kas Daerah dari BRI Cabang Lumajang	114.657.530,00	BPKD
3	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan darurat bencana alam banjir kali jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018	287.407.000,00	BPBD
4	Belanja Tidak Terduga guna penanganan darurat bencana alam banjir dan bantuan bencana angin kencang di beberapa kecamatan Tahun 2018	120.156.900,00	BPBD
5	Belanja Tidak Terduga guna penanganan darurat longsor dan banjir di beberapa Kecamatan pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018	164.095.000,00	BPBD
6	Kekeringan Desa Boreng dan Desa Blukon Kecamatan Lumajang Tahun 2018	34.983.000,00	BPBD
7	Belanja Tidak Terduga guna Penanganan darurat bencana alam longsor jalan rabat beton Desa Grobongan Kecamatan Kedungjajang Tahun 2018	90.041.600,00	BPBD
8	Belanja Tidak Terduga guna Penanganan darurat kekeringan pada masa transisi kepemulihan di Kabupaten Lumajang Tahun 2018	132.429.400,00	BPBD
9	Belanja Tidak Terduga guna penanganan darurat banjir kaliaseh pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018	120.716.000,00	BPBD
10	Belanja Tidak Terduga guna penanganan darurat longsor di 2 Kecamatan pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018	171.701.200,00	BPBD
11	Belanja Tidak Terduga guna pemulihan fungsi pasar Pronojiwo Blok A1 - A8 Pasca Kebakaran Tahun 2018	336.976.000,00	BPBD
12	Belanja Tidak Terduga guna Penanganan Darurat Banjir, Longsor dan Perbaikan Rumah di Beberapa Kecamatan Kabupaten Lumajang Tahun 2018	153.576.188,00	BPBD
13	Belanja Tidak Terduga guna Penanganan Darurat Bencana Alam Longsor Jalan Rabat Beton Dusun Sidomukti Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2018	193.419.600,00	BPBD
14	Belanja Tidak Terduga untuk korban terdampak banjir genangan wilayah Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018	70.957.500,00	BPBD
	Jumlah	1.999.116.918,00	
	PENGEMBALIAN :		
	Pengembalian Dana Belanja Tidak Terduga	(22.283.680,00)	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.976.833.238,00	

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
c. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	369.964.565.206,00	362.187.965.889,00	338.541.125.229,00

Belanja transfer / bagi hasil desa meliputi bagi hasil pajak/retribusi daerah ke desa, dan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus kepada desa. Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp369.964.565.206,00 dengan realisasi sebesar 362.187.965.889,00. Rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.079.399.599,00	2.885.220.334,00	93,69	2.210.606.526,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.921.676.607,00	1.849.710.155,00	96,26	891.976.271,00
3	Bantuan Keuangan	364.963.489.000,00	357.453.035.400,00	97,94	335.438.542.432,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Umum)	128.468.212.000,00	128.468.212.000,00	100,00	119.151.371.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Khusus)	163.728.393.000,00	162.975.939.400,00	99,54	164.614.020.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya	72.766.884.000,00	66.008.884.000,00	90,71	51.673.151.432,00
	Jumlah	369.964.565.206,00	362.187.965.889,00	97,90	338.541.125.229,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
d. Surplus (Defisit)	(162.503.109.319,17)	(22.986.970.395,52)	(42.594.997.504,14)

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja dan transfer, sebagai berikut :

Tabel 75 Surplus/Defisit

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Pendapatan & Transfer	2.094.116.512.299,30	2.077.396.056.404,23	99,20	1.956.127.822.292,10
2	Belanja & Transfer	2.256.619.621.618,47	2.100.383.026.799,75	93,08	1.998.722.819.796,24
	Surplus (Defisit)	(162.503.109.319,17)	(22.986.970.395,52)	14,15	(42.594.997.504,14)

e. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1) Penerimaan Pembiayaan	171.003.109.319,17	172.511.647.977,85	186.094.606.823,31

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018, meliputi penggunaan SILPA tahun 2017 untuk pelaksanaan APBD 2018 sebesar Rp130.847.283.837,36 ; pencairan Dana Cadangan Rp40.490.365.140,49 dan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2018 sebesar Rp1.173.999.000,00.

Tabel 76 Daftar Rincian Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Penggunaan Silpa	134.753.109.319,17	130.847.283.837,36	97,10	185.336.398.823,31
2	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	40.490.365.140,49	115,69	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.250.000.000,00	1.173.999.000,00	93,92	758.208.000,00
	Jumlah	171.003.109.319,17	172.511.647.977,85		186.094.606.823,31

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(a) Penggunaan SILPA	134.753.109.319,17	130.847.283.837,36	185.336.398.823,31

Realisasi SILPA sebesar Rp130.847.283.837,36 merupakan realisasi SILPA tahun anggaran 2016 yang digunakan di dalam APBD 2017 terinci sebagai berikut.

Tabel 77 Daftar Penggunaan Silpa tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Silpa LRA tahun 2017 (audited)	134.753.109.319,17
2	Koreksi Pelimpahan saldo kas Akper ke Dikti	(3.927.732.517,00)
3	Koreksi Saldo kas BOS tahun 2017 kurang catat	21.907.035,19
	Jumlah Penggunaan Silpa tahun 2017 (1+2+3)	130.847.283.837,36

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
(a) Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	40.490.365.140,49	0,00

Realisasi pencairan dana cadangan tahun 2018 sebesar Rp40.490.365.140,49 merupakan pencairan dan cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Dana cadangan tersebut di bentuk pada tahun 2015 dengan Perda nomor 7 tahun 2015.

Tabel 78 Daftar Pencairan Dana Cadangan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana cadangan tahun 2015	28.267.000.000,00
2	Tambahan dana cadangan tahun 2016	3.367.000.000,00
3	Bunga dana cadangan tahun 2016	2.256.911.468,69
4	Jumlah dana cadangan tahun 2016 (1+2+3)	33.890.911.468,69
5	Tambahan dana Cadangan tahun 2017	3.366.000.000,00
6	Bunga dana cadangan tahun 2017	2.081.359.321,87
7	Jumlah dana cadangan tahun 2017 (4+5+6)	39.338.270.790,56
8	Bunga dana cadangan tahun 2018	1.152.094.349,93
9	Pencairan Dana Cadangan tahun 2018 (7+8)	40.490.365.140,49

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
(b)Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.250.000.000,00	1.173.999.000,00	758.208.000,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan jumlah penerimaan kembali atas pinjaman modal kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan yang direalisasikan melalui pengeluaran pembiayaan, terinci sebagai berikut.

Tabel 79 Daftar Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Modal
Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Dinas Koperasi dan UKM	540.582.000,00	470.908.000,00
2	Dinas Pertanian	300.000,00	7.300.000,00
3	Kantor Ketahanan Pangan	565.000.000,00	280.000.000,00
4	Dinas Perdagangan	68.117.000,00	0,00
	Jumlah	1.173.999.000,00	758.208.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
2) Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	8.746.500.000,00

Pengeluaran pembiayaan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 terealisasi 100% sebesar Rp8.500.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan penyertaan modal pada perusahaan daerah, terinci sebagai berikut :

Tabel 80 Daftar Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2018 dan 2017

No.	Keterangan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	3.366.000.000,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100	3.449.000.000,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	1.931.500.000,00
	Jumlah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100	8.746.500.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(a) Pembentukan Dana cadangan	0,00	0,00	3.366.000.000,00

Pada tahun 2018 tidak ada realisasi pembentukan dana cadangan. Sedangkan tahun 2017 Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah sebesar Rp3.366.000.000,00 merupakan tambahan pembentukan dana cadangan pada periode sebelumnya yang dipergunakan untuk mendanai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(b) Penyertaan Modal Pemda	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	3.449.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Kabupaten Lumajang tahun 2018 dan 2017 merupakan tambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagai berikut :

Tabel 81 Daftar Rincian Penyertaan Modal Pemda
Tahun 2018 dan 2017

No	Perusahaan Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	PD. Semeru	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100	0,00
2	PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100	3.449.000.000,00

No	Perusahaan Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
3	Bank Pasar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	0,00
	Jumlah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100	3.449.000.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(c) Pembayaran Utang pinjaman	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2018 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menganggarkan Pembayaran Pokok Utang Pinjaman.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
(d) Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	1.931.500.000,00

Pada tahun 2018 tidak ada realisasi pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2017 pinjaman modal kepada masyarakat sebesar Rp1.931.500.000,00 merupakan pemberian pinjaman modal usaha yang nantinya akan ditagih kembali menjadi penerimaan pembiayaan, pelaksanaannya di koordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Bantuan Pinjaman Dana untuk 170 Modal Usaha dari Usaha Mikro Kecil menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebesar Rp1.541.500.000,00; dan
- 2) Bantuan Pinjaman Dana Modal Usaha untuk 2 Kelompok Usaha Bersama (Disperindag) pada Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebesar Rp390.000.000,00.

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
3) Pembiayaan Netto	162.503.109.319,17	164.011.647.977,85	177.348.106.823,31

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp172.511.647.977,85 dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp.8.500.000.000,00

	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

SILPA sebesar Rp141.024.677.582,33 merupakan surplus (defisit) sebesar (Rp22.986.970.395,52) ditambah pembiayaan netto sebesar Rp164.011.647.977,85. SILPA

tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 82 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2018

No	Rekening Kas	2018	2017
1	Kas di BUD	135.646.547.586,02	116.308.323.705,47
2	Kas di bendahara penerimaan	33.408.678,00	103.687.523,00
3	Kas BLUD	3.926.633.224,91	16.909.677.946,91
4	Kas lainnya	1.418.088.093,40	1.431.420.143,79
	Jumlah	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	134.753.109.319,17	184.327.805.232,84

Saldo anggaran lebih awal merupakan saldo anggaran lebih akhir periode sebelumnya. Saldo anggaran lebih awal tahun 2018 sebesar Rp134.753.109.319,17 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2017, dan saldo anggaran lebih awal tahun 2017 sebesar Rp184.327.805.232,84 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2016. Masing-masing terdiri dari saldo kas sebagai berikut :

Tabel 83 Saldo Anggaran lebih awal

No	Saldo Awal	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Kas di BUD	116.308.323.705,47	155.540.000.145,84
2	Kas di bendahara penerimaan	103.687.523,00	0
3	Kas BLUD	16.909.677.946,91	28.787.805.087,00
5	Kas lainnya	1.431.420.143,79	0
	Jumlah saldo awal	134.753.109.319,17	184.327.805.232,84

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	130.847.283.837,36	185.336.398.823,31

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp130.847.283.837,36 merupakan saldo anggaran lebih tahun 2017 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2018

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp185.336.398.823,31 merupakan saldo anggaran lebih tahun 2016 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2017. Jumlah tersebut merupakan SILPA tahun 2017, meliputi:

Tabel 84 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	2018	2017
1	Silpa periode sebelumnya (audited)	134.753.109.319,17	184.327.805.232,84
2	Koreksi Silpa periode sebelumnya	(3.905.825.481,81)	1.008.593.590,47
3	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan	130.847.283.837,36	185.336.398.823,31

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) merupakan jumlah surplus (defisit) LRA ditambah pembiayaan netto. SILPA (SIKPA) tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang pada akhir periode, sebagai berikut :

Tabel 85 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Surplus (defisit)	(22.986.970.395,52)	(42.594.997.504,14)
2	Pembiayaan netto	164.011.647.977,85	177.348.106.823,31
3	Silpa / Sikpa (1+2)	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	3.905.825.481,81	1.008.593.590,47

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas SILPA tahun lalu, sebagai berikut.

- Di dalam silpa tahun 2017 terdapat kas Akademi Keperawatan sebesar Rp3.927.732.517,00 dan pada tahun 2018 Akper sudah bukan menjadi antitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lumajang karena telah dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke Dirjen Dikti, sehingga Silpa Akper tidak menjadi bagian dari Silpa yang digunakan kembali dalam penerimaan pembiayaan.
- Saldo kas lainnya Dana BOS di neraca per 31 Desember 2017 dicatat terlalu rendah sebesar Rp21.907.035,19 sehingga Silpa tahun lalu perlu dikoreksi sebesar Rp21.907.035,19.

Tabel 86 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya

No	Keterangan	2018	2017
1	Pelimpahan saldo kas Akper ke Dikti	(3.927.732.517,00)	
2	Saldo kas BOS tahun 2017 kurang catat	21.907.035,19	
3	Koreksi kas BOS 31 Desember 2016		1.667.201.575,48
4	Koreksi Saldo Kas BOS SMKN/SMAN/SDLB tahun 2016		(658.607.985,01)
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	3.905.825.481,81	1.008.593.590,47

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

Saldo anggaran lebih akhir merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), sebagai berikut :

Tabel 87 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Saldo anggaran lebih awal	134.753.109.319,17	184.327.805.232,84
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	(130.847.283.837,36)	(185.336.398.823,31)
3	Silpa/Silpa Tahun Berjalan	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(3.905.825.481,81)	1.008.593.590,47
5	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 s/d 4)	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

Saldo anggaran lebih per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari saldo kas sebagai berikut :

Tabel 88 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Surplus (defisit)	(22.986.970.395,52)	(42.594.997.504,14)
2	Pembiayaan neto	164.011.647.977,85	177.348.106.823,31
3	Silpa / Sikpa (1+2)	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17
	Rincian Silpa / Sikpa		
1	Kas di kas daerah	135.646.547.586,02	116.308.323.705,47
2	Kas di bendahara penerimaan	33.408.678,00	103.687.523,00
3	Kas di BLUD RSUD dr. Haryoto	3.926.633.224,91	12.981.945.429,91
4	Kas di BLUD Akper		3.927.732.517,00
5	Kas lainnya	1.418.088.093,40	1.431.420.143,79
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 s/d 5)	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

A. ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Saldo masing-masing aset lancar dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 89 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018

Keterangan	2018	2017
Kas dan setara kas	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang	89.927.873.986,57	115.813.199.346,25
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(19.593.294.171,74)	(43.315.358.721,03)
Biaya Dibayar Dimuka	-	2.778.333,00
Persediaan	40.847.087.025,48	38.170.106.940,42
Jumlah	252.206.344.422,65	245.423.835.217,81

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Kas dan Setara Kas	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2018 dan 2017 terinci sebagaimana berikut ini.

Tabel 90 Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2018

No	Jenis Kas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kas di Kas Daerah	135.646.547.586,02	116.308.323.705,47
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	33.408.678,00	103.687.523,00
4	Kas di BLUD	3.926.633.224,91	16.909.677.946,91
5	Kas Lainnya	1.418.088.093,40	1.431.420.143,79
	Jumlah	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a) Kas di Kas Daerah	135.646.547.586,02	116.308.323.705,47

Kas di kas daerah adalah kas milik pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD), meliputi rekening giro dan deposito sebagaimana tersaji di dalam tabel.

Tabel 91 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2018

No	Nama Bank	Jenis	Nomor Rekening	Jangka Waktu	31-Des-18	31-Des-17
		Rekening			(Rp)	(Rp)
1	Bank Jatim Cab. Lumajang	Giro	91026881	-	95.646.547.586,02	31.308.323.705,47

No	Nama Bank	Jenis	Nomor Rekening	Jangka Waktu	31-Des-18	31-Des-17
		Rekening			(Rp)	(Rp)
2	Bank BNI Cabang Lumajang	Deposito	312271332 No. PAA 07744665)	1 bulan	-	-
3	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	0044-01-003153-40-8	1 bulan	-	-
4	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	0044-01-003398-40-6	1 bulan	-	-
5	Bank BNI Cabang Lumajang	Deposito	373462063	1 bulan	-	-
6	Bank Jatim Cab. Lumajang	Deposito	DB 278114	1 bulan	-	50.000.000.000,00
7	Bank Mandiri Cabang Lumajang	Deposito	DB 278150	1 bulan	-	-
8	Bank Mandiri Cabang Lumajang	Deposito	DB 717255	1 bulan	-	-
9	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	Rekening 0044-01-003716-40-0	1 bulan	-	-
10	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	Rekening 0044-01-003716-40-5	1 bulan	-	5.000.000.000,00
11	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	Rekening 0044-01-003716-40-1	1 bulan	-	10.000.000.000,00
12	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	Rekening 0044-01-003716-40-7	1 bulan	-	10.000.000.000,00
13	Bank BRI Cabang Lumajang	Deposito	Rekening 0044-01-003716-40-8	1 bulan	-	5.000.000.000,00
14	Bank Mandiri Cabang Lumajang	Deposito	DB 717645	1 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
15	Bank Jatim Cab. Lumajang	Deposito	DB 371504	1 bulan	35.000.000.000,00	-
Jumlah					135.646.547.586,02	116.308.323.705,47

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92 Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2018

Uraian	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	306.108.826.072,20	306.108.826.072,20	0,00
Jumlah	0,00	306.108.826.072,20	306.108.826.072,20	0,00

Penambahan dan Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran masing –masing sebesar Rp306.108.826.072,20 merupakan jumlah dana UP/GU/TU yang diterima dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada BUD pada tahun anggaran 2018.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
c) Kas di Bendahara Penerimaan	33.408.678,00	103.687.523,00

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2018.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp33.408.678,00 dan Rp103.687.523,00. Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 93 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2018

No	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
1	RSUD Pasirian	0,00	16.961.376.490,00	16.927.967.812,00	33.408.678,00
	Jumlah	0,00	16.961.376.490,00	16.927.967.812,00	33.408.678,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
d) Kas di BLUD	3.926.633.224,91	16.909.677.946,91

Kas di BLUD adalah kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai dan di bawah tanggungjawab bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja di bawah OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut ketentuan perundang-undangan. BLUD dapat menggunakan langsung pendapatannya. Dengan demikian saldo kas di bendahara BLUD pada akhir periode meliputi saldo kas tunai, rekening giro dan deposito di bank yang berasal dari sisa pendapatan yang dikelola sendiri. Di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang, OPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai BLUD adalah RSUD dr. Haryoto.

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp3.926.633.224,91 dan Rp16.909.677.946,91

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2018 Rp3.926.633.224,91 terinci sebagai berikut :

- Rekening Bank Jatim Nomor 0091031752 sebesar Rp3.843.620.692,00.
- Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp83.012.532,91.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
e) Kas Lainnya	1.418.088.093,40	1.431.420.143,79

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2018 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2) Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing tercatat sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak memiliki investasi jangka pendek dalam bentuk apapun.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3) Piutang Pajak	21.316.458.158,00	50.274.875.524,00

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut.

	31 Des. 2018 (Rp)	31 Des. 2017 (Rp)
Piutang pajak reklame	134.015.708,00	141.934.013,00
Piutang pajak mineral bukan logam	53.685.500,00	92.291.500,00
Piutang pajak restoran	34.179.550,00	42.001.100,00
Piutang pajak hiburan	0,00	3.683.000,00
Piutang pajak air tanah	2.638.448,00	371,00
Piutang PBB P2	18.833.886.632,00	47.874.488.310,00
Piutang pajak penerangan jalan	2.258.052.320,00	2.120.477.230,00
Jumlah	21.316.458.158,00	50.274.875.524,00

a) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018 sebesar Rp134.015.708,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 94 Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Tahun SKP	Saldo 31-Des-17	Koreksi / Mutasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31-Des-18
2009	33.816.000,00	-	-	33.816.000,00	0,00
2010	-	-	-	-	0,00
2011	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	0,00
2014	72.278.615,00	-	-	-	72.278.615,00
2015	12.387.000,00	-	-	-	12.387.000,00
2016	7.385.540,00	(2.087.560,00)	-	-	5.297.980,00
2017	14.766.858,00	(1.229.928,00)	-	11.747.530,00	1.789.400,00
2018	-	-	1.641.943.305,00	1.599.680.592,00	42.262.713,00
Jumlah	141.934.013,00	(3.317.488,00)	1.641.943.305,00	1.646.544.122,00	134.015.708,00

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*).

Penambahan sebesar Rp1.641.943.305,00 merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2018. Pengurangan sebesar Rp1.646.544.122,00 merupakan pengurangan piutang di tahun 2018 meliputi penghapusan piutang sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/103/427.12/2018 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sebesar Rp33.816.000,00 (2009) dan sebesar Rp1.300.000,00 (2011), pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp11.747.530,00 (2017) dan realisasi di tahun 2018 sebesar Rp1.599.680.592,00. Adapun pengurangan yang disebabkan oleh adanya koreksi kurang catat sebesar Rp3.317.488,00.

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 95 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des. 2018 (Rp)
	Piutang Pajak	(Rp)		
Lancar	< 1 tahun	44.052.113,00	0,50%	220.260,57
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	5.297.980,00	10%	529.798,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	84.665.615,00	50%	42.332.807,50
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		134.015.708,00		43.082.866,07

b) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2017 sebesar Rp92.291.500,00. Jumlah tersebut merupakan piutang tahun 2008 dan 2012 yang belum tertagih sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan piutang namun ada pengurangan dengan jumlah Rp 38.606.000,00 yang diperoleh dari penghapusan piutang sesuai SK, sehingga saldo akhir piutang 31 Desember 2018 senilai Rp 53.685.500,00.

Tabel 96 Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2018
2008	38.606.000,00	-	38.606.000,00	-
2012	53.685.500,00	-	-	53.685.500,00
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
Jumlah	92.291.500,00	-	38.606.000,00	53.685.500,00

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 97 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2016
Lancar	< 1 tahun	-	0,50%	-
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	-	10%	-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	-	50%	-
Macet	> 5 Tahun	53.685.500,00	100%	53.685.500,00
Jumlah		53.685.500,00		53.685.500,00

c) Piutang Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 42.001.100,00. Pada tahun 2018 tidak ada penambahan piutang namun ada pengurangan sebesar Rp 7.821.550,00 yang diperoleh dari penghapusan piutang sesuai SK, sehingga saldo akhir 2018 senilai Rp 34.179.550,00.

Tabel 98 Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2018
2009	7.821.550,00	-	7.821.550,00	-
2012	34.179.550,00	-	-	34.179.550,00
Jumlah	42.001.100,00	-	7.821.550,00	34.179.550,00

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 99 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 tahun	-	0,50%	-
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	-	10%	-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	-	50%	-
Macet	> 5 Tahun	34.179.550,00	100%	34.179.550,00
Jumlah		34.179.550,00		34.179.550,00

d) Piutang Pajak Hiburan

Saldo piutang pajak hiburan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Piutang tersebut telah dihapus sesuai Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/103/427.12/2018, sehingga bersaldo nihil.

Tabel 100 Perkembangan Piutang Pajak Hiburan

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2018
2009	3.683.000,00		3.683.000,00	0,00
Jumlah	3.683.000,00		3.683.000,00	0,00

e) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.638.448,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 101 Perkembangan Piutang Pajak Air Tanah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Koreksi	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2018
2015	-	-	-	-	-
2016	71,00	-	-	71,00	-
2017	300,00	-	-	300,00	-
2018	-	-	98.222.257,00	95.583.809,00	2.638.448,00
Jumlah	371,00	-	-	95.584.180,00	2.638.448,00

Pajak Air Tanah merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau bisa disebut *Official Assessment*. Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 371,00. Pada tahun 2018 ada penambahan piutang dengan jumlah Rp 98.222.257,00 dan ada pengurangan piutang sebesar Rp 95.584.180,00 yang mana pengurangan piutang tersebut diperoleh dari pelunasan piutang senilai Rp 371,00 dan realisasi di tahun 2018 senilai Rp 95.583.809,00, sehingga saldo akhir piutang pajak air tanah sebesar Rp 2.638.448,00.

Penyisihan piutang pajak air tanah tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 102 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2016
Lancar	< 1 tahun	2.638.448,00	0,50%	13.192,24
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	-	10%	-
Diragukan	>2 – 5 Tahun	-	50%	-
Macet	> 5 Tahun	-	100%	-
Jumlah		2.638.448,00		13.192,24

f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo piutang PBB P2 per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.833.886.632,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 103 Perkembangan Piutang PBB P2

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
1994	609.446.909,00	-	609.446.909,00	-
1995	1.261.045.808,00	-	1.261.045.808,00	-
1996	992.072.035,00	-	992.072.035,00	-
1997	846.656.352,00	-	846.656.352,00	-
1998	509.594.966,00	-	509.594.966,00	-
1999	829.117.112,00	-	829.117.112,00	-

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
2000	1.815.614.060,00	-	1.815.614.060,00	-
2001	1.062.302.263,00	-	1.062.302.263,00	-
2002	1.582.238.641,00	-	1.582.238.641,00	-
2003	1.824.167.281,00	-	1.824.167.281,00	-
2004	400.348.803,00	-	400.348.803,00	-
2005	1.493.638.318,00	-	1.493.638.318,00	-
2006	1.994.484.490,00	-	1.994.484.490,00	-
2007	4.445.889.926,00	-	4.445.889.926,00	-
2008	3.751.517.557,00	-	3.751.517.557,00	-
2009	3.783.220.795,00	-	3.783.220.795,00	-
2010	1.694.789.779,00	-	1.694.789.779,00	-
2011	2.628.203.013,00	-	2.628.203.013,00	-
2012	3.418.920.041,00	-	1.690.047,00	3.417.229.994,00
2013	4.575.175.435,00	-	8.619.662,00	4.566.555.773,00
2014	2.649.971.888,00	-	34.022.550,00	2.615.949.338,00
2015	1.482.390.414,00	-	25.680.821,00	1.456.709.593,00
2016	1.761.231.218,00	-	36.898.304,00	1.724.332.914,00
2017	2.462.451.206,00	-	325.168.442,00	2.137.282.764,00
2018	-	13.794.584.488,00	10.878.758.232,00	2.915.826.256,00
Jumlah	47.874.488.310,00	13.794.584.488,00	42.835.186.166,00	18.833.886.632,00

PBB P2 pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*) dengan menerbitkan SPPT-PBB. Penambahan sebesar Rp13.794.584.488,00 merupakan jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan pada tahun 2018 dan pengurangan sebesar Rp42.835.186.166,00 terdiri dari penghapusan piutang sesuai SK sebesar Rp31.524.348.108,00 (1994 – 2011), pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp432.079.826,00 dan realisasi di tahun 2018 sebesar Rp10.878.758.232,00.

Penyisihan piutang PBB-P2 tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 104 Perhitungan Penyisihan Piutang PBB P2 Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 tahun	5.053.109.020,00	0,50%	25.265.545,10
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	1.724.332.914,00	10%	172.433.291,40
Diragukan	>2 – 5 Tahun	8.639.214.704,00	50%	4.319.607.352,00
Macet	> 5 Tahun	3.417.229.994,00	100%	3.417.229.994,00
Jumlah		18.833.886.632,00		7.934.536.182,50

g) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.258.052.320,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 105 Perkembangan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018

Tahun SKP	Saldo 31 Des. 2017 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo 31 Des. 2018 (Rp)
2017	2.120.477.230,00	-	2.120.477.230,00	-
2018	-	25.796.510.887,00	23.538.458.567,00	2.258.052.320,00
Jumlah	2.120.477.230,00	25.796.510.887,00	25.658.935.797,00	2.258.052.320,00

Penambahan piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp2.258.052.320,00 merupakan pendapatan bulan Desember 2018 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi. Jumlah tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara hasil koordinasi dan rekonsiliasi data pajak penerangan jalan antara Badan Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lumajang dengan Manager PT. PLN Area Jember.

Penyisihan piutang pajak penerangan jalan berdasarkan umur piutang sebagai berikut.

Tabel 106 Perhitungan Penyisihan Piutang PPJ Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 tahun	2.258.052.320,00	0,50%	11.290.261,60
Kurang Lancar	1 – 2 tahun		10%	
Diragukan	>2 – 5 Tahun		50%	
Macet	> 5 Tahun		100%	
Jumlah		2.258.052.320,00		11.290.261,60

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4) Piutang Retribusi	6.416.072.004,50	2.368.146.858,25

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp6.416.072.004,50 dan Rp2.368.146.858,25 terinci sebagai berikut.

	31 Des 2018	31 Des 2017
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.799.465.353,00	865.839.676,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	499.830.402,00	451.937.552,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	507.579.182,50	434.034.391,25
Piutang Retribusi Terminal	21.092.900,00	21.092.900,00
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	588.104.167,00	588.104.167,00
Piutang Retribusi IMB	0,00	7.138.172,00
Jumlah	6.416.072.004,50	2.368.146.858,25

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.799.465.353,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 107 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
1	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	574.612.426,00	3.045.261.887,00	588.386.960,00	3.031.487.353,00
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi (BPJS Puskesmas)	291.227.250,00	1.735.832.350,00	259.081.600,00	1.767.978.000,00
	Jumlah	865.839.676,00	4.781.094.237,00	847.468.560,00	4.799.465.353,00

Penambahan sebesar Rp4.781.094.237,00 meliputi:

- Sebesar Rp3.031.487.353,00 merupakan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Pasirian yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2018.
- Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS di Puskesmas sebesar Rp1.767.978.000,00 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp847.468.560,00 meliputi:

- Retribusi pelayanan kesehatan yang sudah diterima dari RSUD Pasirian pada tahun 2018 sebesar Rp588.386.960,00
- Penerimaan jasa pelayanan kesehatan non kapitasi (BPJS Puskesmas) sebesar Rp259.081.600,00

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 108 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2018

No	Jenis Piutang	Saldo	Kualitas Piutang			
		31 Des 2018	Lancar	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
			(0,50%)			
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	3.031.487.353,00	1.938.168.275,00	980.019.710,00	110.521.471,00	2.777.897,00
	Penyisihan Piutang	165.731.444,88	9.690.841,38	98.001.971,00	55.260.735,50	2.777.897,00
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi-BPJS Puskesmas	1.767.978.000,00	972.102.000,00	63.973.971,33	693.813.728,67	38.088.300,00
	Penyisihan piutang	396.253.071,47	4.860.510,00	6.397.397,13	346.906.864,34	38.088.300,00
	Jumlah	4.799.465.353,00	2.910.270.275,00	1.043.993.681,33	804.335.199,67	40.866.197,00
	Jumlah Penyisihan Piutang 1 + 2	561.984.516,34	14.551.351,38	104.399.368,13	402.167.599,84	40.866.197,00

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2018 sebesar Rp499.830.402,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 109 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018

No	Uraian	Saldo 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
I	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Baru Lumajang	1.308.000,00	0	0	1.308.000,00
2	Pasar Plaza	3.218.000,00	0	0	3.218.000,00
3	Pasar Serangin	26.556.000,00	0	0	26.556.000,00
4	Pasar Senggol	432.000,00	0	0	432.000,00
5	Pasar Senduro	1.359.000,00	0	0	1.359.000,00
6	Pasar Gucialit	219.600,00	0	0	219.600,00
7	Pasar Sukodono	270.000,00	0	0	270.000,00
8	Pasar Ranuyoso	1.223.200,00	0	0	1.223.200,00
9	Pasar Yosowilangun	450.000,00	0	0	450.000,00
10	Pasar Tempeh	32.212.800,00	0	0	32.212.800,00
11	Pasar Pasirian	2.292.000,00	0	0	2.292.000,00
12	Pasar Candipuro	10.830.000,00	0	0	10.830.000,00
13	Pasar Pronojiwo	480.000,00	0	0	480.000,00
	Jumlah (1)	80.850.600,00	0	0	80.850.600,00
II	Ret. Daftar Ulang				
1	Baru Lumajang	28.588.504,50	3.243.500,00	0	31.832.004,50
2	Plaza Lumajang	39.042.719,00	6.998.450,00	0	46.041.169,00
3	Hewan Jogotrunan	1.139.600,00	369.000,00	0	1.508.600,00
4	Serangin	13.700.538,00	2.129.125,00	0,00	15.829.663,00
5	Klojen	7.401.025,00	723.000,00	0	8.124.025,00
6	Senggol	5.772.356,00	1.171.875,00	0,00	6.944.231,00
7	Toga	7.205.250,50	1.841.062,50	0	9.046.313,00
8	Senduro	6.778.285,00	3.505.250,00	0,00	10.283.535,00
9	Agropolitan	2.270.625,00	1.098.750,00	0,00	3.369.375,00
10	Dawuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sukodono	8.486.501,00	936.500,00	0	9.423.001,00
12	Randuagung	8.664.417,00	2.135.750,00	0	10.800.167,00
13	Klakah	8.892.150,00	4.624.850,00	0,00	13.517.000,00
14	Yosowilangun	22.645.607,50	2.308.737,50	0	24.954.345,00
15	Hewan Krai	977.940,00	270.000,00	0	1.247.940,00
16	Nogosari	6.346.233,00	1.851.962,50	0	8.198.195,50
17	Tekung	1.227.625,00	198.937,50	0	1.426.562,50
18	Kunir	7.992.702,25	2.371.375,00	300.250,00	10.063.827,25
19	Tempeh	22.732.545,75	1.999.100,00	0	24.731.645,75
20	Pasirian	28.830.115,00	5.441.062,50	0	34.271.177,50
21	Candipuro	1302000	1.766.312,50	0,00	3.068.312,50
22	Pronojiwo	7.215.000,00	2.476.500,00	0,00	9.691.500,00

No	Uraian	Saldo 31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2018
23	Hygenis	1.730.200,00	250.500,00	0	1.980.700,00
24	Hewan Pasirian	653.000,00	90.000,00	0	743.000,00
25	Hewan Klakah	14.400,00	0	0	14.400,00
26	Artagama	3.128.475,00	268.875,00	0	3.397.350,00
27	LSS	890.400,00	0,00	0	890.400,00
28	Gucialit	122.625,00	122.625,00	0	245.250,00
	Jumlah (2)	243.750.839,50	48.193.100,00	300.250,00	291.643.689,50
III	Ret. Perijinan Pasar				
1	H. Jogotrunan	2.804.000,00	0	0	2.804.000,00
2	Serangin	14.644.749,90	0	0	14.644.749,90
3	Pasirian	11.164.000,00	0	0	11.164.000,00
4	Hewan Pasirian	4.764.000,00	0	0	4.764.000,00
5	Yosowilangun	5.401.669,50	0	0	5.401.669,50
6	Klakah	30.926.200,00	0	0	30.926.200,00
7	Hewan Klakah	3.255.000,00	0	0	3.255.000,00
8	Senduro	3.482.000,00	0	0	3.482.000,00
9	Tempeh	673.312,00	0	0	673.312,00
10	Kunir	763.255,50	0	0	763.255,50
11	Nogosari	1.194.874,80	0	0	1.194.874,80
12	Senggol	2.874.875,00	0	0	2.874.875,00
13	Ranuyoso	1.783.500,00	0	0	1.783.500,00
14	Randuagung	710.275,81	0	0	710.275,81
15	Hewan Krai	2.884.400,00	0	0	2.884.400,00
16	Plaza Lumajang	4.657.250,00	0	0	4.657.250,00
17	Baru Lumajang	33.357.250,00	0	0	33.357.250,00
18	Pronojiwo	1.995.500,00	0	0	1.995.500,00
	Jumlah (3)	127.336.112,50	0,00	0,00	127.336.112,50
	Jumlah (1+2+3)	451.937.552,00	48.193.100,00	300.250,00	499.830.402,00

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 110 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan	23.021.835,00	0,50%	115.109,18
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	16.591.760,00	10%	1.659.176,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	77.459.350,00	50%	38.729.675,00
Macet	> 12 bulan	382.752.457,00	100%	382.752.457,00
Jumlah		499.830.402,00		423.256.417,18

c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp507.579.182,50, terinci sebagai berikut.

Tabel 111 Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018

No	Jenis Piutang Pajak	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
1	Sewa Pemakaian Tanah Stren Kali (Dinas PU)	433.702.391,25	202.818.879,25	128.942.088,00	507.579.182,50
2	Sewa Rumah Dinas (Bagian Umum)	180.000,00	-	180.000,00	-
3	Sewa Rumah Dinas	152.000,00	-	152.000,00	-
	Jumlah	434.034.391,25	202.818.879,25	129.274.088,00	507.579.182,50

Penambahan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp202.818.879,25 merupakan Sewa Tanah Stren Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2018.

Sedangkan pengurangan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp129.274.088,00 terdiri dari:

- (1) Penerimaan piutang sewa tanah stren kali (Dinas PU) sebesar Rp128.942.088,00
- (2) Penerimaan piutang sewa rumah dinas pada Bagian Umum sebesar Rp180.000,00
- (3) Penerimaan piutang sewa rumah dinas pada Puskesmas Kedungjajang sebesar Rp152.000,00

Penyisihan Piutang Retribusi terinci sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 112 Perhitungan Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2018	Kualitas Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			0,50%	0,10%	50%	100%
1	Piutang Sewa Tanah Stren kali (Dinas PU)	507.579.182,50	-	-	114.201.716,25	393.377.466,25
	Jml Penyisihan	507.579.182,50	-	-	114.201.716,25	393.377.466,25

d) Piutang Retribusi Terminal

Saldo piutang retribusi terminal per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.092.900,00. Jumlah tersebut merupakan sewa kios terminal yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018.

Tabel 113 Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2018

No	SKRD	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
1	2018	21.092.900,00	-	-	21.092.900,00
	Jumlah	21.092.900,00	-	-	21.092.900,00

Penyisihan piutang retribusi terminal tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 114 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan		0,50%	
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan		10%	
Diragukan	>3 – 12 bulan		50%	
Macet	> 12 bulan	21.092.900,00	100%	21.092.900,00
Jumlah		21.092.900,00		21.092.900,00

e) Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)

Saldo piutang retribusi ijin gangguan (HO) per 31 Desember 2018 sebesar Rp588.104.167,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 115 Daftar Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2018

No	SKRD	31 Des 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
1	2018	588.104.167,00	-	-	588.104.167,00
	Jumlah	588.104.167,00	-	-	588.104.167,00

Penyisihan piutang retribusi ijin gangguan (HO) tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 116 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan		0,50%	
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan		10%	
Diragukan	>3 – 12 bulan		50%	
Macet	> 12 bulan	588.104.167,00	100%	588.104.167,00
Jumlah		588.104.167,00		588.104.167,00

f) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Saldo piutang retribusi IMB per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 merupakan Surat Ketetapan Retribusi IMB yang sudah tercetak namun tidak diproses lebih lanjut karena tidak dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi, sehingga IMB nya tidak dicetak / diterbitkan, maka dilakukan penghapusan.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5) Biaya di bayar di muka	0,00	2.778.333,00

Saldo biaya di bayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, hal ini dikarenakan Akademi Keperawatan yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk tahun 2018 sudah di limpahkan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Dikti).

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6) Piutang Lainnya	62.195.343.824,07	63.170.176.964,00

Piutang lainnya merupakan piutang yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut.

Tabel 117 Daftar dan Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2018

No	Jenis Piutang Lainnya	31 Des 17	Penambahan	Pengurangan	31 Des 18
1	Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Haryoto	10.720.878.589,00	20.018.670.154,71	10.720.878.589,00	20.018.670.154,71
2	Piutang Pendapatan BLUD Iuran Pelaksanaan Pendidikan (Akper)	20.650.000,00	-	20.650.000,00	-
	Jumlah Piutang BLUD	10.741.528.589,00	20.018.670.154,71	10.741.528.589,00	20.018.670.154,71
3	Piutang Atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat	6.361.315.224,00	-	1.173.999.000,00	5.187.316.224,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	22.605.286.512,00	9.006.415.747,00	22.605.286.512,00	9.006.415.747,00
5	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	23.437.296.639,00	9.713.874.411,00	5.439.498.068,00	27.711.672.982,00
6	Piutang Kebun Dinas (Dinas Pertanian)	24.750.000,00	-	-	24.750.000,00
7	Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas	-	3.090.450,00	-	3.090.450,00
8	Piutang kelebihan pembayaran atas nilai aset gedung dan bangunan (6 OPD)	-	243.428.266,36	-	243.428.266,36
	Jumlah	63.170.176.964,00	38.985.479.029,07	39.960.312.169,00	62.195.343.824,07

a) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD pada RSUD Haryoto per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.018.670.154,71.

Tabel 118 Daftar Piutang Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto Tahun 2018

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2018	Penambahan Piutang 2018	Pengurangan Piutang 2018	Saldo Akhir 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6
1	Piutang dengan surat pernyataan	508.716.010,00	610.984.697,00	508.716.010,00	610.984.697,00
2	Piutang Pihak III	-	-	-	-
3	Piutang BPJS & JAMPERSAL	84.605.300,00	26.280.900,00	84.605.300,00	26.280.900,00
4	Piutang pasien SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)	178.532.032,00	-	178.532.032,00	-
5	Piutang Honorarium Pelayanan Kesehatan / Penyelenggaraan Diklat	13.049.988,00	3.861.000,00	13.049.988,00	3.861.000,00
6	Piutang kepada PT. Jasa Raharja	175.865.388,00	123.383.583,00	175.865.388,00	123.383.583,00
7	Klaim BPJS Ketenagakerjaan	97.338.920,00	119.254.596,00	97.338.920,00	119.254.596,00
8	Piutang pelayanan kesehatan pasien peserta JKN/BPJS	9.189.362.701,00	18.983.086.663,00	9.189.362.701,00	18.983.086.663,00
9	Piutang kepada pihak ketiga (rekanan) atas pembayaran uang muka 30% Pengadaan panel induk genset dan pendukung	405.778.500,00	-	405.778.500,00	-
10	Piutang kepada pihak ketiga (rekanan) atas hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan	67.629.750,00	-	67.629.750,00	-
11	Piutang kepada PT. Semeru Makmur Kayunusa	-	4.931.495,00	-	4.931.495,00
12	Piutang kepada KPRI Pangudi Luhur	-	6.591.495,00	-	6.591.495,00
13	Klaim BPJS Obat Kronis	-	100.436.842,00	-	100.436.842,00
14	Klaim BPJS Obat Kemoterapi	-	27.909.280,00	-	27.909.280,00
15	Piutang atas pendapatan bunga	-	11.949.603,71	-	11.949.603,71
	JUMLAH	10.720.878.589,00	20.018.670.154,71	10.720.878.589,00	20.018.670.154,71

Penyisihan piutang BLUD tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 119 Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan	4.136.653.258,71	0,50%	20.683.266,29
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	10.351.673.597,00	10%	1.035.167.359,70
Diragukan	>3 – 12 bulan	5.038.609.295,00	50%	2.519.304.647,50
Macet	> 12 bulan	491.734.004,00	100%	491.734.004,00
Jumlah		20.018.670.154,71		4.066.889.277,49

(1) Piutang atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat

Saldo piutang atas pinjaman modal kepada masyarakat per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.187.316.224,00. Pinjaman modal kepada masyarakat anggaran dan realisasinya melalui pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada masyarakat di PPKD yang menyalurkannya melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman modal kepada masyarakat melalui penerimaan pembiayaan. Mutasi piutang pinjaman modal kepada masyarakat sebagai berikut (rincian di lampiran).

Tabel 120 Daftar dan Mutasi Piutang/Pinjaman Modal Kepada Masyarakat Tahun 2018

No	Leading Sektor	31 Des 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2018
1	Dinas Koperasi dan UKM	4.369.116.200,00	-	540.582.000,00	3.828.534.200,00
2	Dinas Pertanian	162.799.024,00	-	300.000,00	162.499.024,00
3	Kantor Ketahanan Pangan	1.439.400.000,00	-	565.000.000,00	874.400.000,00
4	Dinas Perdagangan	390.000.000	-	68.117.000,00	321.883.000,00
Jumlah		6.361.315.224,00	-	1.173.999.000,00	5.187.316.224,00

Pengurangan piutang sebesar Rp1.173.999.000,00 direalisasikan melalui penerimaan pembiayaan meliputi:

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp540.582.000,00 meliputi penerimaan kembali atas pemberian pinjaman tahun 2011 sebesar Rp2.950.000,00; tahun 2012 sebesar Rp2.320.000,00; tahun 2014 sebesar Rp630.000,00; tahun 2015 sebesar Rp23.969.500,00; tahun 2016 sebesar Rp78.386.900,00, tahun 2017 sebesar Rp437.325.600,00.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp565.000.000,00 dari 8 (delapan) lembaga/keompok.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Pertanian sebesar Rp300.000,00.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Perdagangan sebesar Rp681.170.000,00 dari 2 (dua) lembaga/keompok.

Penyisihan piutang pemberian pinjaman kepada masyarakat tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 121 Perhitungan Penyisihan Piutang Pinjaman Kepada Masyarakat Tahun 2018

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des. 2018	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Dinas Koperasi dan UKM					
	So. Piutang	3.828.534.200,00	-	1.272.000.500,00	502.122.200,00	2.054.411.500,00
	Penyisihan	2.432.672.650,00	-	127.200.050,00	251.061.100,00	2.054.411.500,00
2	Dinas Pertanian					
	So. Piutang	162.499.024,00	-	-	-	162.499.024,00
	Penyisihan	162.499.024,00	-	-	-	162.499.024,00
3	Kantor Ketahanan Pangan					

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des. 2018	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
	So. Piutang	874.400.000,00	-	-	150.000.000,00	724.400.000,00
	Penyisihan	799.400.000,00	-	-	75.000.000,00	724.400.000,00
4	Dinas Perdagangan					
	So. Piutang	321.883.000,00	-	321.883.000,00	-	-
	Penyisihan	32.188.300,00	-	32.188.300,00	-	-
	Jml Piutang	5.187.316.224,00	-	1.593.883.500,00	652.122.200,00	2.941.310.524,00
	Jml. Penyisihan	3.426.759.974,00	-	159.388.350,00	326.061.100,00	2.941.310.524,00

(2) Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.006.415.747,00 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lumajang atas bagi hasil pajak propinsi atas pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi TW IV sesuai SK Gubernur Nomor 188/788/KPTS/01/2018.

Tabel 122 Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2018

No	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	Saldo Akhir 31 Des 17	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31 Des 18
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.577.933.600,00	-	5.577.933.600,00	-
2	Piutang Bagi hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.080.164.168,00	-	3.080.164.168,00	-
3	Piutang Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.816.168.788,00	-	5.816.168.788,00	-
4	Piutang Bagi hasil Pajak Air Permukaan	84.363.095,00	-	84.363.095,00	-
5	Piutang Bagi hasil Pajak Rokok	8.046.656.861,00	9.0006.415.747,00	8.046.656.861,00	9.0006.415.747,00
	Jumlah	22.605.286.512,00	9.0006.415.747,00	22.605.286.512,00	9.0006.415.747,00

Tabel 124 Perhitungan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
	Piutang			
Lancar	< 1 bulan	9.006.415.747,00	0,50%	45.032.078,74
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	-	10%	-
Diragukan	>3 – 12 bulan	-	50%	-
Macet	> 12 bulan	-	100%	-
Jumlah		9.006.415.747,00		45.032.078,74

(3) Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Piutang bagi hasil pemerintah pusat merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan

pajak/sumber daya alam yang belum disalurkan/belum diterima oleh pemerintah daerah sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut.

Tabel 123 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2018

No	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Saldo Akhir	Mutasi Piutang		Saldo Akhir
		31 Des 17			31 Des 18
			Bertambah	Berkurang	
1	Bagi Hasil Pajak	83.591.014,00	2.908.868.098,00	-	2.992.459.112,00
2	Bagi Hasil SDA Panas Bumi	11.158.327,00		-	11.158.327,00
3	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	22.955.567.379,00	5.303.584.480,00	5.303.584.198,00	22.955.567.661,00
4	Bagi Hasil PPH Psl 25	-	957.488.415,00	-	957.488.415,00
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	17.906.031,00	-	17.906.031,00
6	Bagi Hasil SDA Kehutanan	196.189.716,00	280.478.892,00	-	476.668.608,00
7	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	190.790.203,00	136.012.967,00	135.913.870,00	190.889.300,00
8	Bagi Hasil SDA Perikanan	-	99.184.671,00	-	99.184.671,00
	Jumlah	23.437.296.639,00	9.703.523.554,00	5.439.498.068,00	27.701.322.125,00

Penyisihan piutang bagi hasil pemerintah pusat tahun 2018 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 124 Perhitungan Penyisihan Piutang bagi hasil pemerintah pusat Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan	9.713.874.411,00	0,50%	48.569.372,06
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	17.997.798.571,00	10%	1.799.779.857,10
Diragukan	> 3 – 12 bulan		50%	
Macet	> 12 bulan		100%	
Jumlah		27.711.672.982,00		1.848.349.229,16

(4) Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian

Saldo Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing tercatat sebesar Rp24.750.000,00 dan Rp24.750.000,00. Saldo tersebut merupakan piutang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Dinas Pertanian yang sampai dengan 31 Desember 2018 masih belum diterima.

Tabel 125 Piutang Sewa Kebun Dinas Pertanian Tahun 2018 dan 2017

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir 31 Des 17	Mutasi Piutang (Rp)		Saldo Akhir 31 Des 18
			Bertambah	Berkurang	
1	Sewa Kebun Dinas	24.750.000,00			24.750.000,00
	Jumlah	24.750.000,00			24.750.000,00

Penyisihan piutang sewa kebun dinas berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 126 Perhitungan Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2018
Lancar	< 1 bulan		0,5%	
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan		10%	
Diragukan	>3 – 12 bulan		50%	
Macet	> 12 bulan	24.750.000,00	100%	24.750.000,00
Jumlah		24.750.000,00		24.750.000,00

(5) Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas.

Saldo piutang kapitasi (klaim BPJS) puskesmas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.090.450,00

Tabel 127 Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Puskesmas Tahun 2018

No	Puskesmas	Jumlah Peserta Tertanggung BPJS	Tarif Kapitasi	Total Kapitasi	Besaran Operasional 40%	Besaran jasa Pelayanan 60%
1	TUNJUNG	28	5.700,00	159.600,00	63.840,00	95.760,00
2	ROGOTRUNAN	50	6.000,00	300.000,00	120.000,00	180.000,00
3	LABRUK	34	6.000,00	204.000,00	81.600,00	122.400,00
4	SUKODONO	58	5.550,00	321.900,00	128.760,00	193.140,00
5	PADANG	33	5.550,00	183.150,00	73.260,00	109.890,00
6	GUCIALIT	7	5.550,00	38.850,00	15.540,00	23.310,00
7	SENDURO	41	5.550,00	227.550,00	91.020,00	136.530,00
8	PASRUJAMBE	7	6.000,00	42.000,00	16.800,00	25.200,00
9	KLAKAH	31	5.700,00	176.700,00	70.680,00	106.020,00
10	KEDUNGAJANG	13	6.000,00	78.000,00	31.200,00	46.800,00
11	RANUYOSO	21	6.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00
12	RANDUAGUNG	26	5.700,00	148.200,00	59.280,00	88.920,00
13	YOSOWILANGUN	71	5.550,00	394.050,00	157.620,00	236.430,00
14	KUNIR	42	6.000,00	252.000,00	100.800,00	151.200,00
15	TEKUNG	17	5.700,00	96.900,00	38.760,00	58.140,00
16	JATIROTO	31	5.700,00	176.700,00	70.680,00	106.020,00
17	SUMBERSARI	29	6.000,00	174.000,00	69.600,00	104.400,00
18	PASIRIAN	92	5.700,00	524.400,00	209.760,00	314.640,00
19	BADES	23	5.550,00	127.650,00	51.060,00	76.590,00
20	TEMPEH	42	5.700,00	239.400,00	95.760,00	143.640,00
21	GESANG	33	5.550,00	183.150,00	73.260,00	109.890,00
22	CANDIPURO	82	5.550,00	455.100,00	182.040,00	273.060,00
23	PENANGGAL	17	5.700,00	96.900,00	38.760,00	58.140,00
24	PRONOJIWO	26	5.550,00	144.300,00	57.720,00	86.580,00

No	Puskesmas	Jumlah Peserta Tertanggung BPJS	Tarif Kapitasi	Totdal Kapitasi	Besaran Operasional 40%	Besaran jasa Pelayanan 60%
25	TERMPURSARI	59	4.750,00	280.250,00	112.100,00	168.150,00
JUMLAH		913		5.150.750,00	2.060.300,00	3.090.450,00

Penyisihan piutang kapitasi (klaim BPJS) berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 128 Perhitungan Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS) Tahun 2018

Kualitas Piutang	Umur	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018
	Piutang			
Lancar	< 1 bulan	3.090.450,00	0,50%	15.452,25
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan		10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan		50%	0,00
Macet	> 12 bulan		100%	0,00
Jumlah		3.090.450,00		15.452,25

(6) Piutang Kelebihan Pembayaran atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan

Saldo piutang atas nilai aset gedung dan bangunan berupa kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK TA 2018 pada beberapa puskesmas, terinci sebagai berikut :

Tabel 129 Piutang Kelebihan Pembayaran atas atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Padang	31.264.387,06
2	Puskesmas Sukodono	43.291.244,55
3	Puskesmas Tekung	50.201.261,18
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga	50.245.097,78
5	Bagian Umum	35.980.966,31
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	32.445.309,48
	Jumlah	243.428.266,36

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(19.593.294.171,74)	(43.315.358.721,04)

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2018, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp19.593.294.171,74) dan sebesar (Rp43.315.358.721,04) untuk tahun 2017, untuk setiap jenis piutang.

Tabel 130. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2018

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 2017	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31 Des 2018
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
• Penyisihan Piutang Pajak Reklame	72.604.769,49		(29.521.903,43)	43.082.866,06
• Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	65.448.750,00		(11.763.250,00)	53.685.500,00
• Penyisihan Piutang Pajak Restoran	24.911.325,00		9.268.225,00	34.179.550,00
• Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	3.683.000,00		(3.683.000,00)	-
• Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	371,00		13.190,48	13.561,48
• Penyisihan Piutang PBB P2	37.015.739.243,52		(29.081.203.946,50)	7.934.535.297,02
• Penyisihan Piutang PPj PLN	10.602.386,15		687.875,45	11.290.261,60
Jumlah (1)	37.192.989.845,16	-	(29.116.202.809,00)	8.076.787.036,16
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI				
• Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (labkes)	3.302.416,67		1.537.213,33	4.839.630,00
• Penyisihan Piutang Retr. Pelayanan Kesehatan (puskesmas)	62.755.890,39		586.720.990,05	649.476.880,44
• Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	406.551.503,18		(181.785.126,68)	224.766.376,50
• Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	320.852.546,50		129.625.777,87	450.478.324,37
• Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	19.997.900,00		1.095.000,00	21.092.900,00
• Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	466.910.439,50		121.193.727,50	588.104.167,00
• Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	59.304.708,62		(59.304.708,62)	-
• Penyisihan Piutang Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD Pasiiran	3.969.897,71		161.843.877,67	165.813.775,38
Jumlah (2)	1.343.645.302,57	-	760.926.751,12	2.104.572.053,69
PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA				
• Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.643.389.526,05		2.423.499.751,44	4.066.889.277,49
• Penyisihan Piutang Pinjaman Modal Kepada Masyarakat	2.871.338.631,50		555.421.342,50	3.426.759.974,00
• Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	113.026.432,56		(67.994.353,83)	45.032.078,74
• Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	117.186.483,20		1.731.162.745,96	1.848.349.229,16
• Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas	24.750.000,00		-	24.750.000,00
• Penyisihan Piutang Iuran Pelaksanaan Pendidikan	9.032.500,00		(9.032.500,00)	-
• Penyisihan Piutang Kapitasi (klaim BPJS)	-		154.522,50	154.522,50
• Piutang Kelebihan Pembayaran atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan	-		-	-
Jumlah (3)	4.778.723.573,31	-	4.633.211.508,58	9.411.935.081,89
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	43.315.358.721,04	-	(23.722.064.549,31)	19.593.294.171,74

Mutasi bertambah (berkurang) sebesar (Rp23.722.064.549,31) merupakan beban penyisihan piutang tahun 2018.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
8) Persediaan	40.847.087.025,48	38.170.106.940,42

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 131. Daftar Persediaan Tahun 2018 dan 2017
PERSEDIAAN 2018

No	Persediaan	2018	2017
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.586.327.345,97	2.965.413.484,00
2	Persediaan Barang cetakan	3.875.112.828,35	2.613.650.487,00
3	Persediaan Material/Bahan	-	-
4	Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.184.100,00	11.065.600,00
5	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	49.150.000,00	29.644.000,00
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	54.198.700,00	49.176.400,00
7	Persediaan Bibit Ternak	39.293.100,00	-
8	Persediaan Obat-obatan	23.690.996.226,07	26.560.451.466,93
9	Persediaan Bahan Kimia	829.454.446,00	582.073.385,00
10	Persediaan bahan praktek kegiatan	554.000,00	152.000,00
11	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran	3.004.256.882,05	2.732.254.453,15
12	Persediaan suku cadang peralatan dan perlengkapan bidang kesehatan dan laboratorium	1.701.817.147,62	-
13	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan)	-	49.454.091,00
14	Persediaan Perangko	-	5.325.000,00
15	Persediaan Materai	9.702.500,00	-
16	Persediaan Bahan Makanan Pokok	1.803.793.808,70	1.288.259.100,34
17	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	609.755.127,72	706.050.439,00
18	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	1.026.286.348,00	355.046.925,00
19	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	313.512.400,00	210.070.609,00
20	Persediaan souvenir/cinderamata	40.502.000,00	-
21	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	-	12.019.500,00
22	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
23	Alat Peraga dan Mainan	-	-
24	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga	1.208.190.065,00	-
	Jumlah	40.847.087.025,48	38.170.106.940,42

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
B. INVESTASI JANGKA PANJANG	54.905.352.834,12	45.194.519.321,15

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi jangka panjang pemerintah kabupaten Lumajang berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang, PD. Semeru Kabupaten Lumajang dan PDAM Kabupaten Lumajang.

Terhadap PT. Bank Jatim Tbk dan PT. BPR Jatim, pemerintah kabupaten Lumajang adalah pemegang saham minoritas sehingga penyertaan modal di catat menggunakan metode biaya. Sedangkan terhadap PD. BPR Bank Pasar, PD. Semeru dan PDAM, pemerintah kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham mayoritas (pengendali) penyertaan modal pada perusahaan tersebut di catat menggunakan metode ekuitas.

Kebijakan akuntansi terhadap metode penilaian investasi sebagai berikut.

Tabel 132 Metode Penilaian Investasi

No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal Per Lembar	Metode Penilaian
1	PT. Bank Jatim	0,56%	67.206.045	250,00	Metode Biaya
2	PT. BPR Jatim	0,37%	14.900	100.000,00	Metode Biaya
3	BPR Bank Pasar	100%			Metode Ekuitas
4	PD. Semeru	100%			Metode Ekuitas
5	PDAM	100%			Metode Ekuitas

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a) Investasi Permanen	54.905.352.834,12	45.194.519.321,15

Saldo investasi permanen per 31 Desember 2018 dan 2017 pada beberapa perusahaan daerah, terinci sebagai berikut.

Tabel 133 Perkembangan Investasi Jangka Panjang – Penyertaan Modal Tahun 2018 dan 2017

No	Nama Perusahaan	32 Des. 2017	Penambahan	Pengurangan	31-Des-18
1	2	3	4	5	6 = 5+4(5)
1	PT. Bank Jatim	16.801.511.250,00	0,00	0,00	16.801.511.250,00
2	PT. BPR Jatim	1.490.000.000,00	0,00	0,00	1.490.000.000,00
3	BPR Bank Pasar	3.001.992.091,00	3.511.127.423,00	0,00	6.513.119.514,00

No	Nama Perusahaan	32 Des. 2017	Penambahan	Pengurangan	31-Des-18
4	PD. Semeru	2.547.318.514,35	1.000.000.000,00	535.205.778,13	3.012.112.736,22
5	PDAM	21.353.697.465,80	8.470.663.780,03	2.735.751.911,93	27.088.609.333,90
	Jumlah	45.194.519.321,15	12.981.791.203,03	3.270.957.690,06	54.905.352.834,12

Penambahan penyertaan modal sebesar Rp12.981.791.203,03 meliputi :

- 1) Penambahan pada PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp3.511.127.423,00 terdiri dari tambahan modal disetor tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan pengakuan atas laba bersih perusahaan sebesar Rp511.127.423,00.
- 2) Penambahan pada PD. Semeru sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan tambahan modal disetor tahun 2018.
- 3) Penambahan pada PDAM sebesar Rp8.470.663.780,03 merupakan tambahan modal disetor tahun 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 dan tambahan modal disetor berupa barang Rp812.518.000,00 serta pengakuan atas laba bersih PDAM tahun 2018 sebesar Rp3.158.145.780,03

Pengurangan penyertaan modal sebesar Rp3.270.957.690,06 terdiri dari :

- 1) Laba (Rugi) bersih PD. Semeru tahun 2018 sebesar Rp535.205.778,13
- 2) Pembagian laba PDAM tahun 2018 sebesar Rp2.735.751.911,93

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(1) Penyertaan Modal pada Bank Jatim	16.801.511.250,00	16.801.511.250,00

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 67.206.045 lembar dari 11.934.147.982 lembar saham seri A yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,56%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (dividen) di catat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk pada tahun 2018 diperoleh pendapatan dividen tunai atas laba bersih tahun 2017 sebesar Rp2.963.786.584,50 dan pada tahun 2017 diterima pendapatan dividen tunai atas laba bersih tahun 2016 sebesar Rp2.932.871.803,80.

Pada tahun 2018 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk. Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tbk sebagai berikut.

Tabel 134 Perkembangan Penyertaan Modal Pada Bank Jatim

Tahun	Nominal	Keterangan
s/d 2007	4.139.779.323,71	Perda. No. 02 Th. 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Jatim
2008	1.500.000.000,00	Perda. No. 08 Th. 2008 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Jatim
2011	1.000.000.000,00	Perda. No. 07 Th. 2011 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang

Tahun	Nominal	Keterangan
		pada PT. Bank Jatim
2012	9.508.511.250,00	Perda. No. 03 Th. 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Penerimaan Dana Cadangan Umum Bank Jatim yang dikonversi menjadi saham)
2018	653.220.676,29	Pengakuan atas stock dividen tahun 2007 (Perda No. 17 Tahun 2018)
Jumlah	16.801.511.250,00	67.206.045 lembar @ Rp.250,00

		31 Desember 2018 (Rp)	32 Desember 2017 (Rp)
(2) Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim		1.490.000.000,00	1.490.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebanyak 14.900 lembar dari 3.994.823 lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,37%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (deviden) di catat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Atas penyertaan modal pada PT. BPR Jatim, pada tahun 2018 diperoleh pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2017 sebesar Rp56.603.000,00 dan tahun 2017 diterima pendapatan deviden tunai atas laba bersih tahun 2016 sebesar Rp50.483.000,00

Pada tahun 2018 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT. BPR Jatim. Rincian jumlah setoran modal pembelian saham PT. BPR Jatim sebagai berikut.

Tabel 135 Perkembangan Penyertaan Modal Pada BPR Jatim

Tahun	Nominal	Keterangan
2001	60.000.000,00	Setoran tunai
2002	180.000.000,00	Setoran tunai
2004	150.000.000,00	Setoran tunai
2005	100.000.000,00	Setoran tunai
2006	100.000.000,00	Setoran tunai
2007	200.000.000,00	Setoran tunai
2008	200.000.000,00	Setoran tunai
2012	500.000.000,00	Setoran tunai
Jumlah	1.490.000.000,00	

		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(3) Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar		6.513.119.514,00	3.001.992.091,00

PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Pada tahun 2005 berubah menjadi Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua atas Perda Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang.

Pemerintah kabupaten Lumajang adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 100%, sehingga pencatatan investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas, dimana Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PD. BPR Bank Pasar sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%. Bagian laba yang diterima dari PD. BPR Bank Pasar di catat sebagai pengurang penyertaan modal sebesar jumlah bagian laba yang diterima.

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017, bahwa modal dasar PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah modal disetor sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp16.475.000.000,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terinci sebagai berikut.

- Modal disetor berupa uang s/d tahun 2017 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Modal disetor berupa penyerahan aset tetap tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Tambahan modal disetor berupa uang pada tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam APBD 2018.

Saldo penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang dan rincian modal disetor per 31 Desember 2018 dan 2017, terinci sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 136 Penyertaan Modal Pada PD. BPR Bank Pasar Lumajang

Keterangan	2018	2017
1. Modal disetor	13.475.000.000,00	13.475.000.000,00
2. Tambahan Modal disetor	3.000.000.000,00	
3. Jumlah modal disetor s/d 2018 (1+2)	16.475.000.000,00	13.475.000.000,00
4. Saldo laba tahun lalu	(10.473.007.908,00)	(11.026.571.537,00)
5. Laba tahun berjalan	511.127.423,00	553.563.629,00
6. Koreksi saldo laba tahun lalu	0,00	0,00
7. Setoran bagian laba kepada Pemda	0,00	0,00
8. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6+7)	(9.961.880.485,00)	(10.473.007.908,00)
9. Jumlah Penyertaan Modal (3+8)	6.513.119.515,00	3.001.992.092,00

**Tabel 137 Jumlah Modal disetor-Penyertaan Modal
Pada BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang**

Tahun	Nominal	Keterangan
2003	1.377.413.000,00	Jumlah s/d 2003
2003	975.000.000,00	Tanah dan Bangunan
2004	622.587.000,00	
2005	4.000.000.000,00	
2006	6.000.000.000,00	
2012	500.000.000,00	
2018	3.000.000.000,00	
Jumlah	16.475.000.000,00	

Sesuai pasal 51 ayat (1) huruf a Perda nomor 03 tahun 2005, bahwa bagian laba untuk daerah sebesar 40% dari laba bersih. Mulai tahun 2015, PD. BPR Bank Pasar belum bisa merealisasikan penyetoran bagian laba ke kas daerah dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 5/PJOK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa, BPR dilarang melakukan distribusi laba jika (a) distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); atau (b) BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pada tahun 2018, modal inti PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang telah mencapai Rp6.513.119.515,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah), dan distribusi atas laba bersih tahun 2017 akan direalisasikan pada tahun 2019.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(4) Penyertaan Modal pada PD Semeru	3.012.112.736,22	2.547.318.514,35

PD. Semeru Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Lumajang.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018, modal dasar PD. Semeru Kabupaten Lumajang ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PD. Semeru sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100% dan mencatat pembagian laba sebagai pengurang penyertaan modal sebesar bagian laba yang diterima.

Saldo penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Semeru Lumajang dan jumlah modal disetor per 31 Desember 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut.

Tabel 138 Penyertaan Modal Pada PD. Semeru Lumajang

Keterangan	2018	2017
1. Modal disetor	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2. Tambahan penyertaan modal	1.000.000.000,00	0,00
3. Jumlah modal disetor (2+3)	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4. Saldo laba tahun lalu	47.318.514,35	330.880.807,18
5. Laba tahun berjalan	(535.205.778,13)	(283.562.292,82)
6. Setoran bagian laba kepada Pemda	0,00	0,00
7. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6))	(487.887.263,78)	47.318.514,35
8. Jumlah Penyertaan Modal (3+7)	3.012.112.736,22	2.547.318.514,35

**Tabel 139 Jumlah Modal disetor-Penyertaan Modal Pada PD Semeru
Kabupaten Lumajang**

Tahun	Nominal	Keterangan
2004	200.000.000,00	
2005	1.000.000.000,00	
2013	500.000.000,00	
2014	800.000.000,00	
2018	1.000.000.000,00	
Jumlah	3.500.000.000,00	

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(5) Penyertaan Modal pada PDAM	<u>27.088.609.333,90</u>	<u>21.353.697.465,80</u>

PDAM Kabupaten Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 18 September 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Di dalam Perda PDAM tidak ditentukan besarnya modal dasar, dan seluruh penyertaan modal adalah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang. Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih PDAM sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%.

Perkembangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada PDAM sebagai berikut.

**Tabel 140 Perkembangan Penyertaan Modal Pada PD PDAM
Kabupaten Lumajang**

Keterangan	2018	2017
1. Modal disetor	51.166.451.983,76	47.717.451.983,76
2. Tambahan modal disetor berupa uang	4.500.000.000,00	3.449.000.000,00
3. Tambahan modal disetor berupa barang	812.518.000,00	0,00
4. Jumlah modal disetor (1+2+3)	56.478.969.983,76	51.166.451.983,76
5. Saldo laba tahun lalu	(29.812.754.517,96)	(33.726.753.348,76)
6. Laba tahun berjalan	3.158.145.780,03	3.913.998.830,80
7. Setoran bagian laba kepada Pemda	(2.735.751.911,93)	0,00
8. Jumlah saldo laba (rugi) (5+6+7)	(29.390.360.649,86)	(29.812.754.517,96)
9. Jumlah penyertaan modal Pemda (4+8)	27.088.609.333,90	21.353.697.465,80

Modal disetor sebesar Rp56.478.969.983,76 terdiri dari :

- Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Rp46.236.500.088,75
- Penyertaan Pemerintah Pusat Rp1.427.707.895,00
- Bantuan/hibah Rp53.244.000,00
- Tambahan modal disetor sebesar Rp3.449.000.000,00 merupakan realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada PDAM melalui APBD tahun 2017.

- Tambahan modal disetor berupa barang pada tahun 2018 sebesar Rp812.518.000,00 (Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK Sumpersuko dan IKK Padang yang telah diserahkan pada tahun 2016) (Perda No. 16 Tahun 2018).
- Tambahan penyertaan modal berupa uang tunai melalui APBD tahun 2018 sebesar Rp.4.500.000.000,00

C. ASET TETAP

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset tetap	3.346.813.664.829,81	2.950.317.987.119,53

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut :

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan)
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.346.813.664.829,81 dan Rp.2.950.317.987.119,53 Jumlah penambahan aset tetap tahun 2018 sebesar Rp449.617.282.342,02 dan pengurangan aset tetap sebesar tahun 2018 Rp53.121.604.631,74 sebagai berikut:

Tabel 141 Saldo aset Tetap tahun 2018 dan 2017

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017	2.950.317.987.119,53
2. Penambahan Aset Tetap Tahun 2018	449.617.282.342,02
3. Jumlah (1+2)	3.399.935.269.461,55
4. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2018	53.121.604.631,74
5. Aset Tetap per 31 Desember 2018	3.346.813.664.829,81

Ringkasan saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir aset tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 142 Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017	Mutasi		Saldo 31 Des 2018
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	475.870.707.301,42	83.539.145.762,00	15.383.423.997,33	544.026.429.066,09
2	Peralatan dan Mesin	495.062.229.811,57	86.382.143.248,48	12.701.181.401,41	568.743.191.658,64
3	Gedung dan Bangunan	874.365.877.476,54	138.909.410.951,40	21.164.760.162,00	992.110.528.265,94
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.023.606.686.552,00	114.685.670.575,14	774.057.730,00	1.137.518.299.397,14
5	Aset Tetap Lainnya	76.580.640.642,00	18.808.401.805,00	1.140.112.051,00	94.248.930.396,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.831.845.336,00	7.292.510.000,00	1.958.069.290,00	10.166.286.046,00
	Jumlah	2.950.317.987.119,53	449.617.282.342,02	53.121.604.631,74	3.346.813.664.829,81

Penambahan Aset Tetap sebesar Rp449.617.282.342,02 diperoleh melalui transaksi sebagai berikut :

- 1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp281.891.108.098,90
- 2) Realisasi belanja barang dan jasa yang menambah Aset Tetap sebesar Rp19.786.900,00
- 3) Koreksi kurang catat sebesar Rp89.239.124.413,71
- 4) Reklasifikasi dari aset lain - lain ke Aset Tetap sebesar Rp104.800.000,00
- 5) Hutang Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp12.763.600,00
- 6) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp42.529.177.789,00
- 7) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp3.330.801.462,00
- 8) Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan Aset Tetap sebesar Rp17.339.820.920,41
- 9) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp15.149.899.158,00

Sedangkan pengurangan Aset Tetap sebesar Rp53.121.604.631,74 meliputi transaksi sebagai berikut :

- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp523.772.000,00
- 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp2.126.844.260,00
- 3) Koreksi lebih catat karena hasil validasi aset Rp14.562.484.597,33
- 4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp3.330.801.462,00
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp87.982.234,00
- 6) Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan Aset Tetap sebesar Rp17.339.820.920,41
- 7) Mutasi keluar Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp15.149.899.158,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Tanah	544.026.429.066,09	475.870.707.301,42

Saldo aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp544.026.429.066,09 dan Rp475.870.707.301,42. Penambahan aset tetap tanah tahun 2018 sebesar Rp83.539.145.762,00 dan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp15.383.423.997,33 terinci sebagai berikut :

Tabel 143 Ringkasan Perkembangan Saldo Aset tetap Tanah Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	
1. Saldo 31 Desember 2017		475.870.707.301,42
2. Penambahan Tanah:		
3. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018	7.004.632.997,00	
4. Koreksi Kurang Catat Hasil Penilaian dan Validasi	69.638.551.550,00	
5. Hibah Tanah dari Pengembang	6.074.521.815,00	
6. Mutasi Masuk Antar SKPD	821.439.400,00	
7. Jumlah Penambahan (3+4+5+6)		83.539.145.762,00
8. Pengurangan Tanah:		
9. Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	50.000,00	
10. Koreksi lebih catat	14.561.934.597,33	
11. Mutasi Keluar Antar SKPD	821.439.400,00	
12. Jumlah Pengurangan (9+10+11)		15.383.423.997,33
13. Saldo 31 Desember 2018 (1+7-12)		544.026.429.066,09

a. Penambahan Aset Tetap Tanah

Rincian nilai penambahan aset tetap tanah sebesar Rp83.539.145.762,00 sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut :

- (1) Penambahan aset tetap tanah berasal dari realisasi belanja modal tanah tahun 2018 sebesar Rp7.004.632.997,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 144 Daftar Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018

No	SKPD	Lokasi	Jml Bidang	Realisasi Belanja Modal Tanah (Rp)	Peruntukan
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Stadion Lumajang dan Hutan Bambu	2	6.145.680,00	Biaya Pensertifikatan Tanah
2	Dinas Pendidikan	SMPN. 1 Sukodono SDN Rojopolo 3 SDN Sumberurip 2	3	6.923.000.000,00	Ganti rugi
		Tersebar di 20 Sekolah	20	31.100.800,00	Biaya Pensertifikatan Tanah Sekolah
3	Dinas Pertanian	Kantor dan Tanah di UPT Klakah	1	15.777.200,00	Biaya Pensertifikatan Tanah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan Lingkar Timur	1	28.609.317,00	Biaya Pensertifikatan Tanah
	Jumlah			7.004.632.997,00	

Biaya ganti rugi dan penyertifikatan tanah tersebut diatas telah di kapitalisasikan ke dalam aset induknya masing-masing.

- (2) Koreksi kurang catat hasil penilaian dan validasi sebesar Rp69.638.551.550,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 145 Daftar Rincian Kurang Catat Aset Tetap Tanah
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun 2018

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dindik - SMPN 1 Padang	300.000.000,00	Kurang catat bidang tanah pada Dinas Pendidikan
2	Dindik - SMPN 2 Lumajang	24.780.000,00	Kurang catat bidang tanah pada Dinas Pendidikan
3	Dindik - SMPN 3 Lumajang	201.000.000,00	Kurang catat bidang tanah pada Dinas Pendidikan
4	Dindik - SMP Satu Atap Ranupane	4.473.000,00	Kurang catat bidang tanah pada Dinas Pendidikan
5	Dindik - SDN2 Uranggantung 02	181.730.000,00	Kurang catat bidang tanah pada Dinas Pendidikan
6	Dinas Kesehatan	17.875.000,00	Kurang catat bidang tanah Puskesmas Tunjung Randuagung
6	Dinas PU Tata Ruang	68.846.938.550,00	Kurang catat Penilaian tanah dibawah jalan
7	Dinas Perdagangan	4.875.000,00	Kurang catat penilaian tanah pasar Gucialit
8	Dinas Perdagangan	15.080.000,00	Kurang catat penilaian tanah pasar Dawuhan Lor
9	Dinas Perdagangan	41.800.000,00	Kurang catat penilaian tanah pasar Gucialit
Jumlah Kurang Catat		69.638.551.550,00	

(3) Hibah tanah dari pengembang sebesar Rp6.074.521.815,00

Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018 telah mencatat hibah berupa Aset Tanah Prasarana, Sarana, Dan Utilitas sebanyak 64 bidang tanah di perumahan dan kawasan pemukiman dengan nilai Rp6.074.521.815,00. Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai dengan 31 Desember 2018 telah mencatat 304 tanah prasarana, sarana, dan utilitas, namun belum dilakukan sertifikat atas tanah tersebut.

(4) Penambahan aset tetap tanah dari mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp821.439.400,00 terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 146 Daftar Rincian Mutasi Masuk Aset Tetap Tanah Antar SKPD
Tahun 2018

No	Mutasi masuk		Keterangan
	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	
1	BPKD	559.674.000,00	Mutasi dari Bagian Umum, Tanah Gedung PMI
2	BPRD	28.254.000,00	Mutasi dari BPKD, Tanah eks Kawedanan
3	RSUD dr Hariyoto	230.965.000,00	Mutasi dari BPKD Tanah di Kel.Tompokersan
4	Dispora	2.546.400,00	Mutasi dari BPKD Biaya Sertifikat Tanah
	Jumlah	821.439.400,00	

b. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Rincian pengurang aset tetap tanah sebesar Rp15.383.423.997,33 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 147 Daftar Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	2.780.520.000,00	Penghapusan 5 bidang aset tetap tanah dibawah badan jalan milik PJKA (Jalan Gajah Mada, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Piere Tendean, Jalan Iskandar Muda, Jalan Demokrasi)
2	Dinas Pendidikan	11.370.229.030,33	Koreksi lebih catat nilai tanah lembaga sekolah - SDN Rogotrunan 02 Rp3.973.462.500,00 - SDN Kepuharjo 2 Rp1.735.877.333,33 - SDN Uranggantung 02 Rp3.271.801.667,00 - SDN Rowokangkung 05 Rp2.149.590.667,00 - SDN Arjosari 04 Rp37.920.000,00 - SDN Pajarakan 02 Rp25.982.250,00 - SDN Banyuputih 03 Rp53.823.733,00 - SDN Kalipenggung 04 Rp121.770.880,00
3	Dinas Kesehatan	30.673.067,00	Koreksi lebih catat nilai aset tetap tanah Puskesmas Tekung
4	Dinas Lingkungan Hidup	34.912.500,00	Koreksi dobel catat, nilai aset tetap tanah DLH sudah dicatat di Kelurahan Kepuharjo sesuai dengan bukti kepemilikan tanah
5	Dinas Pertanian	345.600.000,00	Koreksi dobel catat, nilai aset tetap tanah Dinas Pertanian sudah dicatat di Kelurahan Kepuharjo sesuai dengan bukti kepemilikan tanah
6	Bagian Umum	559.674.000,00	Mutasi keluar ke BPKD tanah Gedung PMI
7	BPKD	28.254.000,00	Mutasi keluar ke BPRD tanah eks Kawedanan
8	BPKD	230.965.000,00	Mutasi keluar ke RSUD dr. Haryoto Tanah di Kel.Tompokersan
9	BPKD	2.546.400,00	Mutasi keluar ke Dinas Pemuda Olah Raga biaya pensertifikatan tanah dikapitalisasi nilai aset tetap tanah
	Jumlah Pengurangan	15.383.423.997,33	

c. Saldo aset tetap tanah SKPD Per 31 Desember 2018 dan 2017

Saldo aset tetap tanah per SKPD per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 148 Daftar Rincian dan Perkembangan Aset Tetap Tanah Per SKPD
Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No.	Nama SKPD	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Badan Kepegawaian Daerah	1.167.678.667,00	1.167.678.667,00
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5.221.707.664,00	4.917.653.384,00
3	Badan Pajak dan Restribusi Daerah	155.614.000,00	127.360.000,00
4	Badan Kesbangpol.	156.264.000,00	156.264.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	315.424.000,00	315.424.000,00

No.	Nama SKPD	Tahun 2018	Tahun 2017
6	RSD. Dr. Haryoto	16.087.378.334,00	15.856.413.334,00
7	RSUD. Pasirian	155.630.000,00	155.630.000,00
8	Dinas Pendidikan	116.280.141.186,67	119.984.286.417,00
9	Dinas Sosial	2.220.679.000,00	2.220.679.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	1.181.333.400,00	1.181.333.400,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	668.260.000,00	668.260.000,00
12	Dinas Pertanian	8.516.808.367,00	8.846.631.167,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	69.696.000,00	69.696.000,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	810.019.074,00	810.019.074,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemb. Perempuan	298.620.000,00	298.620.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	9.095.437.374,00	9.130.349.874,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.879.979.770,00	23.879.979.770,00
18	Dinas Perdagangan	18.173.293.267,00	18.111.538.267,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.070.744.400,00	12.068.198.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja	875.000.000,00	875.000.000,00
21	Dinas Kesehatan	7.664.900.975,00	7.677.749.042,00
22	Dinas Perhubungan	9.433.545.083,00	9.433.545.083,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	727.666.666,00	727.666.666,00
24	Dinas Perikanan	9.260.447.575,00	9.260.447.575,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	164.097.044.268,75	98.002.016.401,75
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	705.695.000,00	705.695.000,00
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	101.157.968.292,67	95.083.446.477,67
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00	500.000.000,00
29	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	588.315.500,00	588.315.500,00
30	Bagian Umum	2.532.460.667,00	3.092.134.667,00
31	Kecamatan Lumajang (ditambah 7 Kelurahan)	22.199.200.500,00	22.199.200.500,00
32	Kecamatan Sukodono	526.666.667,00	526.666.667,00
33	Kecamatan Padang	61.600.000,00	61.600.000,00
34	Kecamatan Gucialit	291.246.667,00	291.246.667,00
35	Kecamatan Senduro	1.246.591.667,00	1.246.591.667,00
36	Kecamatan Pasrujambe	384.533.333,00	384.533.333,00
37	Kecamatan Sumbersuko	53.077.300,00	53.077.300,00
38	Kecamatan Kedungjajang	263.333.330,00	263.333.330,00
39	Kecamatan Jatiroto	325.866.000,00	325.866.000,00
40	Kecamatan Klakah	224.910.000,00	224.910.000,00
41	Kecamatan Randuagung	1.548.842.400,00	1.548.842.400,00
42	Kecamatan Ranuyoso	892.176.000,00	892.176.000,00
43	Kecamatan Tekung	19.802.667,00	19.802.667,00
44	Kecamatan Rowokangkung	78.216.667,00	78.216.667,00
45	Kecamatan Yosowilangun	521.666.667,00	521.666.667,00
46	Kecamatan Kunir	148.064.000,00	148.064.000,00

No.	Nama SKPD	Tahun 2018	Tahun 2017
47	Kecamatan Tempeh	187.493.333,00	187.493.333,00
48	Kecamatan Pasirian	336.746.667,00	336.746.667,00
49	Kecamatan Candipuro	194.866.670,00	194.866.670,00
50	Kecamatan Pronojiwo	316.000.000,00	316.000.000,00
51	Kecamatan Tempursari	137.776.000,00	137.776.000,00
	Jumlah	544.026.429.066,09	475.870.707.301,42

Nilai aset tetap tanah sebesar Rp544.026.429.066,09 tersebut terdiri dari 2.237 bidang tanah dan yang telah bersertifikat sebanyak 677 bidang tanah atau sebesar 30,26 % . Jumlah persentase bidang tanah yang telah bersertifikat di tahun 2018 turun sebesar 1,86% di banding tahun 2017 sebesar 32,18%. Penurunan % tersebut karena adanya penambahan jumlah bidang tanah dari diserah terimaknya tanah Fasum dan Fasos dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sedangkan jumlah bidang tanah yang bersertifikat tahun 2018 meningkat 2,80% dari semula 658 bidang tanah menjadi menjadi 677 bidang tanah. Perkembangan status tanah dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 149 Jumlah Perkembangan Tanah Yang Bersertifikat Per SKPD Tahun 2018

No.	Nama SKPD	Jumlah Bidang		
		Total	Bersertifikat	Belum Sertifikat
1	Bagian Umum	4	3	1
2	Bagian Tata Pemerintahan	2		2
3	RS. Dr. Haryoto	5	5	
4	RSUD Pasirian	1	1	
5	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	
6	Bakesbangpol	1	1	
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	32	21	11
8	Badan Pajak dan Resribusi Daerah	3	2	1
9	Badan Penanggulangan Bencana	1	1	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	976	40	936
11	Dinas Perhubungan	5	5	
12	Dinas Kesehatan	68	61	7
13	Dinas Pendidikan (Sekretariat)	4	4	
14	Dinas Pendidikan - Kantor UPT Pendidikan	595	340	255
15	Dinas Pendidikan - SMP Negeri	54	48	4
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	
17	Dinas Tenaga Kerja	1	1	
18	Dinas Kependudukan dan Capil	1	1	
19	Dinas Pertanian	30	18	12
20	Dinas Perikanan	9	9	
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3	3	
22	Dinas Perdagangan	29	24	5
23	Dinas Lingkungan Hidup	18	18	0
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	7	6	1
25	Dinar Sosial	5	4	1
26	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	1	1	
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	4	
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1	
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	
30	Dinas Ketahanan Pangan	1		1

31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	3	2
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	304		304
33	Kantor Kecamatan	25	20	5
34	Kantor Kelurahan	38	28	10
Jumlah		2.237	677	1.560

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2) Peralatan dan Mesin	568.743.191.658,64	495.062.229.811,57

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp568.743.191.658,64 dan Rp495.062.229.811,57. Jumlah penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp86.382.143.248,48 & pengurangan sebesar Rp12.701.181.401,41 terinci sebagai berikut :

Tabel 150 Ringkasan Perkembangan Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	
1. Saldo 31 Desember 2017		495.062.229.811,57
2. Penambahan Peralatan dan mesin:		
3. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018	73.732.913.973,07	
4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal selain peralatan dan mesin.	259.504.800,00	
5. Belanja barang menambah aset tetap peralatan dan mesin	19.786.900,00	
6. Utang belanja modal peralatan dan mesin	12.763.600,00	
7. Penerimaan hibah barang peralatan dan mesin	792.989.500,00	
8. Reklasifikasi antar golongan barang	238.755.392,00	
9. Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan barang	7.644.861.769,41	
10. Mutasi masuk peralatan dan mesin	3.680.567.314,00	
11. Jumlah Penambahan (3 s/d 10)		86.382.143.248,48
12. Pengurangan Peralatan dan mesin:		
13. Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin	463.382.000,00	
14. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain	373.890.404,00	
15. Koreksi lebih catat	550.000,00	
16. Reklasifikasi antar golongan barang	458.447.680,00	
17. Reklasifikasi dari ekstra komptabel	79.482.234,00	
18. Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan barang	7.644.861.769,41	
19. Mutasi Keluar Antar SKPD	3.680.567.314,00	
20. Jumlah Pengurangan (13 s/d 19)		12.701.181.401,41
21. Saldo 31 Desember 2018 (1+11-20)		568.743.191.658,64

Ringkasan saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin setiap bidang barang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 151 Daftar Perkembangan dan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018**

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Alat-alat besar	22.294.387.376,00	3.589.052.159,00	971.524.919,00	24.911.914.616,00
2	Alat-alat Angkutan	120.674.621.642,40	17.577.234.932,00	3.612.195.699,00	134.639.660.875,40
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	8.380.185.179,00	1.784.417.112,00	1.586.477.763,00	8.578.124.528,00
4	Alat-alat Pertanian	3.340.924.546,00	574.820.200,00	199.872.700,00	3.715.872.046,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	181.608.209.453,78	34.408.259.013,58	2.079.983.505,00	213.936.484.962,36
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	11.102.368.131,00	1.528.680.265,00	3.288.927.435,00	9.342.120.961,00
7	Alat-alat Kedokteran	122.458.276.263,06	24.006.737.785,70	29.983.653,00	146.435.030.395,76
8	Alat-alat Laboratorium	25.169.964.170,33	2.912.941.781,20	913.335.727,41	27.169.570.224,12
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	33.293.050,00		18.880.000,00	14.413.050,00
	Jumlah	495.062.229.811,57	86.382.143.248,48	12.701.181.401,41	568.743.191.658,64

a. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp86.382.143.248,48 disajikan dalam tabel-tabel berikut.

- (1) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin Rp73.732.913.973,07 dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 152 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin	74.751.188.303,37
2	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin menambah barang-barang ekstrakomtabel	291.510.530,30
3	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin menambah barang-barang selain aset tetap peralatan dan mesin	726.763.800,00
4	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin menambah aset tetap peralatan dan mesin (1-2-3)	73.732.913.973,07

**Tabel 153 Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
Per SKPD Tahun 2018**

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Menambah Barang Ekstra Komptabel	Menambah Selain Aset Tetap Peralatan dan mesin	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Sekretariat DPRD	1.771.400.000,00			1.771.400.000,00
2	Inspektorat Kabupaten	203.550.000,00			203.550.000,00

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Menambah Barang Ekstra Komptabel	Menambah Selain Aset Tetap Peralatan dan mesin	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
3	BAPPEDA	133.190.000,00			133.190.000,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	453.730.000,00			453.730.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	585.253.970,00			585.253.970,00
6	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	524.616.259,00	1.800.000,00		522.816.259,00
7	Badan Kesbangpol	176.900.000,00			176.900.000,00
8	B P B D	381.900.000,00	48.500.000,00		333.400.000,00
9	RSUD dr. Haryoto	22.113.797.313,00	19.876.995,00	637.138.000,00	21.456.782.318,00
10	RSUD Pasirian	4.927.361.256,00	2.437.076,00	14.709.000,00	4.910.215.180,00
11	Dinas Pendidikan	10.181.974.415,00	21.105.000,00	74.916.800,00	10.085.952.615,00
12	Dinas Sosial	550.120.200,00	905.000,00		549.215.200,00
13	Dinas Kependudukan dan Capil	726.507.200,00			726.507.200,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	99.275.000,00			99.275.000,00
15	Dinas Pertanian	946.952.725,00			946.952.725,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	168.922.500,00			168.922.500,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.127.950.000,00			1.127.950.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	865.993.760,00	141.000.000,00		724.993.760,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	3.126.185.397,17			3.126.185.397,17
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	227.271.500,00			227.271.500,00
21	Dinas Perdagangan	1.552.788.000,00			1.552.788.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	498.039.250,00			498.039.250,00
23	Dinas Komunikasi & Informatika	894.054.600,00			894.054.600,00
24	Dinas Tenaga Kerja	17.000.000,00			17.000.000,00
25	Dinas Kesehatan	9.339.255.772,20	16.286.459,30		9.322.969.312,90
26	Dinas Perhubungan	1.554.059.827,00			1.554.059.827,00
27	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	160.767.200,00			160.767.200,00
28	Dinas Perikanan	45.567.500,00			45.567.500,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.180.232.500,00			2.180.232.500,00
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.124.800,00			48.124.800,00
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	456.887.000,00			456.887.000,00
32	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	416.167.150,00			416.167.150,00
33	Bagian Umum	5.509.209.550,00			5.509.209.550,00
34	Bagian Layanan	10.917.273,00			10.917.273,00

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Menambah Barang Ekstra Komptabel	Menambah Selain Aset Tetap Peralatan dan mesin	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	Pengadaan Barang/Jasa				
35	Kec. Lumajang	554.371.990,00			554.371.990,00
36	Kec. Sukodono	97.850.000,00			97.850.000,00
37	Kec. Padang	35.946.900,00			35.946.900,00
38	Kec. Gucialit	219.092.500,00			219.092.500,00
39	Kec. Senduro	209.178.000,00	39.600.000,00		169.578.000,00
40	Kec. Pasrujambe	332.060.000,00			332.060.000,00
41	Kec. Sumbersuko	79.795.000,00			79.795.000,00
42	Kec. Kedungjajang	7.000.000,00			7.000.000,00
43	Kec. Jatiroto	149.714.000,00			149.714.000,00
44	Kec. Klakah	44.494.000,00			44.494.000,00
45	Kec. Randuagung	81.500.000,00			81.500.000,00
46	Kec. Ranuyoso	87.230.000,00			87.230.000,00
47	Kec. Tekung	75.500.000,00			75.500.000,00
48	Kec. Rowokangkung	19.650.000,00			19.650.000,00
49	Kec. Yosowilangun	88.525.000,00			88.525.000,00
50	Kec. Kunir	24.000.000,00			24.000.000,00
51	Kec. Tempeh	146.383.800,00			146.383.800,00
52	Kec. Pasirian	131.980.000,00			131.980.000,00
53	Kec. Candipuro	146.321.000,00			146.321.000,00
54	Kec. Pronojiwo	109.825.196,00			109.825.196,00
55	Kec. Tempursari	134.849.000,00			134.849.000,00
	Jumlah	74.751.188.303,37	291.510.530,30	726.763.800,00	73.732.913.973,07

(2) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari realisasi belanja modal selain peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp259.504.800,00, antara lain :

- Dinas Pendidikan, realisasi belanja modal aset tetap lainnya (KIB E) menambah aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp101.002.000,00
- Dinas Perhubungan, realisasi belanja modal gedung dan bangunan (KIB C) menambah aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp158.502.800,00,

(3) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp19.786.900,00, antara lain :

- Dinas Pendidikan sebesar Rp10.292.900,00 meliputi belanja barang berupa UPS Rp542.900,00 dan kursi bangku siswa dengan nilai Rp9.750.000,00
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.494.000,00 berupa 7 buah karpet @ Rp642.000,00
- Bagian Layanan Pengadaan sebesar Rp5.000.000,00 berupa 1 set LAN

- (4) Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin berupa peralatan kesehatan pada RSUD Pasirian yang belum dibayar dalam tahun 2018 sebesar Rp12.763.600,00
- (5) Hibah barang dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp792.989.500,00 berupa kendaraan mobil bioskop keliling menambah aset tetap peralatan dan mesin.
- (6) Reklasifikasi antar golongan barang menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp238.755.392,00 yaitu reklasifikasi dari KIB C KIB B berupa Jembatan Timbang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (7) Reklasifikasi antar bidang barang dalam aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp7.644.861.769,41 tetapi secara total tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin dan total aset tetap pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 154 Daftar Rincian Reklasifikasi Antar Bidang Barang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per SKPD Tahun 2018

No	Nama SKPD	Dari Gol/Bidang	Jenis Barang	Vol	Nilai (Rp)	Reklas ke Gol/Bidang Barang
1	Sekretariat DPRD	Alat Kantor & RT	Receiver Parabola dan LNB Parabola	5 Bh	5.300.000,00	Alat Studio
2	Inspektorat Kabupaten	Alat Kantor & RT	Genset	1 Bh	5.000.000,00	Alat Berat
3	B P B D	Alat Bengkel & Ukur	Gergaji Mesin	3 Bh	20.000.000,00	Alat Pertanian
4	Dinas Pendidikan	Berubah masih dlm 1 Gol Brg	Mebelair, Genset dll	1 Pt	6.020.219.529,41	Berubah masih dlm 1 Gol Brg
5	Dinas Ketahanan Pangan	Alat Studio	L C D	1 Bh	4.983.000,00	Alat Kantor RT
6	Dinas Pertanian	Berubah masih dlm 1 Gol Brg	Pompa Air, Countainer Nitrogen dl	1 Pt	212.550.000,00	Berubah masih dlm 1 Gol Brg
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Alat Kantor & RT	Penyesuaian	1 Pt	316.500,00	Alat Studio & Komunikasi
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Alat Besar	Penyesuaian		600.240,00	Alat Kantor RT
9	Dinas Kesehatan	Alat Kantor & RT Alat Kedokteran Alat Kantor & RT	Genset AC HT	4 Bh 1 Bh 5 Bh	52.880.000,00	Alat Besar Alat Kantor RT A. Komunikasi
10	Dinas Perhubungan	Alat Besar	Kendaraan Hidrolis	1 Bh	544.985.000,00	Alat Angkut
11	Dinas Perikanan	Alat Bengkel & Ukur	Penyesuaian		650.000,00	Alat Kantor RT
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Berubah masih dlm 1 Gol Brg			681.746.000,00	Berubah masih dlm 1 Gol Brg
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Alat Kantor & RT	GPS	1 Bh	28.971.000,00	Alat Bengkel & Ukur
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Alat Pertanian	Penyesuaian		1.716.500,00	Alat Studio & Komunikasi
15	Bagian Adm Energi SDA & Perekonomian	Alat Studio & Komunikasi	LCD Camera	1 Bh 1 Bh	16.900.000,00	Alat Kantor & RT
16	Bagian Umum	Alat Kantor & RT	Penyesuaian		770.000,00	Alat Studio & Komunikasi
17	Kec. Lumajang	Alat Pertanian	Komputer	10 Bh	32.075.000,00	Alat Kantor RT
18	Kec. Sumbersuko	Alat Kantor & RT	Genset	1 Bh	9.999.000,00	Alat Besar

No	Nama SKPD	Dari Gol/Bidang	Jenis Barang	Vol	Nilai (Rp)	Reklas ke Gol/Bidang Barang
19	Kec. Randuagung	Alat Kantor & RT	Pompa Air	1 Bh	2.200.000,00	Alat Besar
20	Kec. Kunir	Alat Bengkel & Ukur	Neon box	1 Bh	3.000.000,00	Alat Kantor RT
	Jumlah				7.644.861.769,41	

- (8) Mutasi masuk peralatan dan mesin antar SKPD yang tidak menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang tetapi mempengaruhi nilai aset SKPD sebesar Rp3.680.567.314,00 dengan rincian mutasi keluar-masuk antar SKPD sebagai berikut :

Tabel 155 Daftar Rincian Mutasi Keluar Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Antar SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018

No.	Mutasi Keluar		Mutasi Masuk		Ket.
	SKPD Asal	Nilai (Rp)	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	401.783.025,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	60.000.000,00	Mobil
2			Badan Pajak dan Retribusi Daerah	341.783.025,00	Mobil
3	Badan Kepegawaian Daerah	199.625.000,00	Dinas Sosial	199.625.000,00	Mobil
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	845.391.000,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	147.750.000,00	Mobil
5			Bagian Umum	254.641.000,00	Mobil & Motor
6			Dinas Tenaga Kerja	147.750.000,00	Mobil
7			Dinas Komunikasi & Informatika	147.750.000,00	Mobil
8			Dinas Kependudukan dan Capil	147.500.000,00	Mobil
9	Dinas Lingkungan Hidup	798.546.574,00	Sekretariat DPRD	359.000.000,00	Mobil
10			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	439.546.574,00	Mobil Tinja
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.000.000,00	Korden
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97.750.000,00	Dinas Perhubungan	97.750.000,00	Bis
13	Bagian Adm Pembangunan	221.152.845,00	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	221.152.845,00	Alat Kantor
14	Bagian Umum	1.112.318.870,00	Badan Kepegawaian Daerah	193.400.000,00	Mobil
15			Dinas Kependudukan dan Capil	110.000.000,00	Mobil
16			Dinas Perhubungan	446.500.000,00	Mobil
17			Bagian Administrasi Kesra	30.000.000,00	Alat Kantor
18			Bagian Hukum	31.050.000,00	Alat Kantor
19			Bagian Adm Pemerintahan	21.450.000,00	Alat Kantor
20			Bagian Humas dan Protokol	55.900.000,00	Alat Kantor
21			Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	76.668.870,00	Alat Kantor
22			Bagian Adm Energi SDA & Perekonomian	21.450.000,00	Alat Kantor
23			Bagian Keuangan & Kepegawaian	23.850.000,00	Alat Kantor
24			Bagian Adm Pembangunan	9.550.000,00	Alat Kantor
25			Bagian Organisasi	11.950.000,00	Alat Kantor
26			Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	16.400.000,00	AC
27			Diskominfo	64.150.000,00	Alat Kantor
	Jumlah	3.680.567.314,00	Jumlah	3.680.567.314,00	

b. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp12.701.181.401,41 meliputi :

- (1) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp463.382.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/276/427.12/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 156 Daftar Penghapusan Peralatan dan Mesin Per SKPD
Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018**

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	387.500.000,00	2 unit mobil dihibahkan
2	Dinas Pertanian	34.198.000,00	2 unit Sepeda Motor Hilang
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.490.000,00	1 unit Sepeda Motor Hilang
4	Bagian Humas dan Protokol	12.180.000,00	1 unit Sepeda Motor Hilang
5	Kelurahan Rogotrunan	18.014.000,00	1 unit Sepeda Motor Hilang
	Jumlah	463.382.000,00	

- (2) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain senilai Rp373.890.404,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 157 Daftar Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Per SKPD
Tahun 2018**

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	238.095.638,00	Barang Rusak Berat
2	Dinas Pertanian	1.145.000,00	Koreksi
3	Bagian Adm Energi SDA & Perekonomian	14.339.166,00	Barang Rusak Berat
4	Kec. Klakah	77.845.000,00	Barang Rusak Berat
5	Kec. Randuagung	42.465.600,00	Barang Rusak Berat
	Jumlah	373.890.404,00	

- (3) Koreksi lebih catat aset tetap peralatan dan mesin berupa 1 (satu) buah meja pada Dinas Pendidikan senilai Rp550.000,00
- (4) Reklasifikasi antar golongan barang yang mengurangi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp458.447.680,00 yaitu reklasifikasi dari KIB B ke KIB C berupa antenna sebagai berikut :
- Dinas Komunikasi & Informatika sebesar Rp65.000.000,00 ;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp393.447.680,00
- (5) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai di bawah batas minimal nilai kapitalisasi peralatan dan mesin (kurang dari Rp500.000,00) menjadi barang ekstra komptabel dengan nilai Rp79.482.234,00, meliputi :
- Barang-barang mebelair pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.557.000,00 dan

- *Software* aset tak berwujud sebesar Rp77.925.234,00 pada Dinas Perhubungan

- (6) Reklasifikasi antar bidang barang dalam satu golongan yang mengurangi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp7.644.861.769,41 tetapi tidak mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin dan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (7) Mutasi keluar aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp3.680.567.314,00 tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, tetapi berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	992.110.528.265,94	874.365.877.476,54

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp992.110.528.265,94 dan Rp874.365.877.476,54. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp138.909.410.951,40 dan pengurangan sebesar Rp21.164.760.162,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 158 Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo per 31 Desember 2017	874.365.877.476,54
2. Penambahan :	
3. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018	83.369.286.493,40
4. Reklasifikasi dari Belanja Modal selain gedung dan bangunan	225.822.000,00
5. Koreksi kurang catat	5.355.091.100,00
6. Mutasi dari Aset Lain-lain kembali ke Aset Tetap	104.800.000,00
7. Pendapatan hibah gedung dan bangunan	29.819.580.474,00
8. Reklasifikasi antar golongan barang	1.161.460.920,00
9. Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan barang	8.615.237.100,00
10. Mutasi Masuk Antar SKPD	10.258.132.864,00
11. Jumlah Penambahan (3 s/d 10)	138.909.410.951,40
12. Pengurangan :	
13. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.752.903.856,00
14. Reklasifikasi antar golongan barang	529.986.342,00
15. Reklasifikasi ke Ekstra Komptable	8.500.000,00
16. Reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan barang	8.615.237.100,00
17. Mutasi Keluar Antar SKPD	10.258.132.864,00
18. Jumlah Pengurangan (13 s/d 17)	21.164.760.162,00
17. Saldo per 31 Desember 2018 (1+11-18)	992.110.528.265,94

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bangunan Gedung dan Monumen dirinci sebagaimana tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 159 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2018

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Bangunan Gedung	857.029.056.605,54	137.300.653.251,40	12.819.548.062,00	981.510.161.794,94
2	Monumen	17.336.820.871,00	1.608.757.700,00	8.345.212.100,00	10.600.366.471,00
	Jumlah	874.365.877.476,54	138.909.410.951,40	21.164.760.162,00	992.110.528.265,94

a. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp138.909.410.951,40 terinci sebagai berikut :

- (1) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp83.369.286.493,40 dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan di laporan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp84.678.170.218,80. Dari jumlah tersebut sebesar Rp83.369.286.493,40 menambah aset tetap gedung dan bangunan, sedangkan sisanya tidak menambah aset tetap gedung dan bangunan, antara lain sebagai berikut :

- Belanja modal gedung dan bangunan menambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp158.502.800,00 (Dinas Perhubungan) ;
- Belanja modal gedung dan bangunan menambah aset tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan sebesar Rp758.026.300,00 antara lain pada RSUD Dr Haryoto sebesar Rp282.558.000,00 ; Dinas Pendidikan sebesar Rp449.028.500,00 dan Kecamatan Tempursari sebesar Rp26.439.800,00
- Belanja modal Gedung dan Bangunan yang menambah aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp222.665.800,00 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp131.745.800,00 ; Dinas Perhubungan sebesar Rp49.800.000,00 ; Dinas Pertanian sebesar Rp19.800.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp21.320.000,00
- Belanja modal Gedung dan Bangunan menambah barang ekstrakomptabel sebesar Rp22.623.000,00 pada Dinas perhubungan
- Belanja modal Gedung dan Bangunan yang membentuk pemeliharaan gedung dan taman sebesar Rp147.065.825,40 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp100.000.000,00; RSUD Pasirian sebesar Rp9.046.430,00; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp31.305.000,00; Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp2.920.333,00 dan Kecamatan Yosowilangun sebesar Rp3.794.062,00

Tabel 160 Daftar Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Nama SKPD	Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan	Menambah Peralatan dan Mesin	Menambah Jalan, Irigasi & Jaringan	Menambah KDP	Menambah Pemeliharaan	Ekstra- komptabel	Menambah Gedung dan Bangunan
1	Sekretariat DPRD	1.184.360.400,00				100.000.000,00		1.084.360.400,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	184.480.000,00						184.480.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	447.436.000,00						447.436.000,00
4	Badan Kesbangpol	203.381.221,00						203.381.221,00
5	B P B D	75.000.000,00						75.000.000,00

No	Nama SKPD	Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan	Menambah Peralatan dan Mesin	Menambah Jalan, Irigasi & Jaringan	Menambah KDP	Menambah Pemeliharaan	Ekstra-komptabel	Menambah Gedung dan Bangunan
6	RSD DR. Haryoto	5.188.890.400,00		282.558.000,00				4.906.332.400,00
7	RSUD Pasirian	309.745.000,00				9.046.430,40		300.698.569,60
8	Dinas Pendidikan	24.857.813.051,00		449.028.500,00	131.745.800,00			24.277.038.751,00
9	Dinas Sosial	466.022.000,00						466.022.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	190.716.500,00						190.716.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	19.856.000,00						19.856.000,00
12	Dinas Pertanian	1.255.240.000,00			19.800.000,00			1.235.440.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	826.271.690,52			21.320.000,00			804.951.690,52
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	427.326.250,00						427.326.250,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.540.669.500,00						2.540.669.500,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.872.243.000,00						2.872.243.000,00
17	Dinas Perdagangan	5.504.964.200,00						5.504.964.200,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.471.299.602,22						5.471.299.602,22
19	Dinas Komunikasi & Informatika	115.496.500,00						115.496.500,00
20	Dinas Tenaga Kerja	10.000.000,00						10.000.000,00
21	Dinas Kesehatan	15.554.421.947,21						15.554.421.947,21
22	Dinas Perhubungan	1.496.498.000,00	158.502.800,00		49.800.000,00		22.623.000,00	1.265.572.200,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	52.105.000,00						52.105.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.282.669.000,00				31.305.000,00		9.251.364.000,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	164.180.000,00						164.180.000,00
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90.635.000,00						90.635.000,00
27	Bagian Umum	1.582.368.916,15						1.582.368.916,15
28	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	40.045.333,00				2.920.333,00		37.125.000,00
29	Kec. Lumajang	492.585.000,00						492.585.000,00
30	Kec. Padang	71.293.950,00						71.293.950,00
31	Kec. Gucialit	154.053.000,00						154.053.000,00
32	Kec. Senduro	447.170.807,70						447.170.807,70
33	Kec. Kedungjajang	24.000.000,00						24.000.000,00
34	Kec. Jatiroto	95.590.000,00						95.590.000,00
35	Kec. Klakah	300.676.000,00						300.676.000,00
36	Kec. Randuagung	129.272.000,00						129.272.000,00
37	Kec. Ranuyoso	49.600.000,00						49.600.000,00
38	Kec. Rowokangkung	1.601.908.000,00						1.601.908.000,00
39	Kec. Yosowilangun	92.150.000,00				3.794.062,00		88.355.938,00
40	Kec. Kunir	350.677.000,00						350.677.000,00
41	Kec. Tempeh	19.937.250,00						19.937.250,00
42	Kec. Candipuro	77.000.000,00						77.000.000,00
43	Kec. Pronojiwo	165.263.000,00						165.263.000,00
44	Kec. Tempursari	192.859.700,00		26.439.800,00				166.419.900,00
	Jumlah	84.678.170.218,80	158.502.800,00	758.026.300,00	222.665.800,00	147.065.825,40	22.623.000,00	83.369.286.493,40

- (2) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (golongan barang pada KIB D) sebesar Rp225.822.000,00 pada Dinas Perikanan sebesar Rp107.992.000,00 berupa bangunan rumah jaga dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp117.830.000,00 berupa rehab bangunan kantor
- (3) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan karena koreksi kurang catat sebesar Rp5.355.091.100,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.413.331.100,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp941.760.000,00.
- (4) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari aset lain-lain berupa bangunan rusak berat yang telah di rehab pada tahun 2018 sebesar Rp104.800.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan rehab gedung sebesar Rp90.000.000,00 dan Rehab Pustu Dampar pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.800.000,00
- (5) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan Rusunawa, hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.218.269.557,00.
- (6) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sekolah, hibah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Rp4.601.310.917,00
- (7) Reklasifikasi antar golongan barang yang menambah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.161.460.920,00 dengan perincian sebagai berikut :
- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap gedung dan bangunan di Dinas Pertanian sebesar Rp24.749.490,00
 - Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap gedung dan bangunan di Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp2.925.000,00
 - Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap gedung dan bangunan di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp633.192.500,00
 - Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tetap bangunan menara di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp65.000.000,00
 - Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tetap bangunan tiang antena di Dinas Perhubungan sebesar Rp393.447.680,00
 - Reklasifikasi biaya rehab aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi ke rehab bangunan gedung rumah jaga di Dinas Perikanan sebesar Rp42.146.250,00
- (8) Reklasifikasi antar bidang barang dalam satu golongan barang yang menambah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.615.237.100,00 tetapi tidak menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD dengan perincian sebagai berikut :
- Dinas Pendidikan, reklasifikasi dari bangunan monumen ke bangunan gedung (KIB C) sebesar Rp53.590.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup, reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan (KIB C) sebesar Rp8.552.183.100,00
 - Kecamatan Lumajang reklasifikasi antar bidang dalam satu golongan (KIB C) sebesar Rp9.464.000,00

- (9) Mutasi masuk aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp10.258.132.864,00 tidak menambah total nilai aset tetap gedung dan bangunan tetapi berpengaruh terhadap nilai aset tetap gedung dan bangunan di masing-masing SKPD dengan rincian keluar dan masuk sebagai berikut :

Tabel 161 Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Antar SKPD
Tahun 2018

No	Keluar		Masuk		Keterangan
	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Nama SKPD	Nilai (Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.076.740.400,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4.076.740.400,00	AKNL
2	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	37.125.000,00	Bagian Umum	37.125.000,00	Sekat Kantor
3	Bagian Umum	5.333.888.464,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.500.706.876,00	Sudjono
4			Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.662.740.000,00	PMI Baru
5			Badan Pengelola Keuangan Daerah	170.441.588	PMI Lama
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	96.559.000,00	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	96.559.000,00	Papan Reklame
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	713.820.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	713.820.000,00	Gedung
	Jumlah	10.258.132.864,00	Jumlah	10.258.132.864,00	

b. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp21.164.760.162,00 dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain sebesar Rp1.752.903.856,00 karena gedung dibongkar untuk direhab terinci sebagai berikut :
 - Dinas Kesehatan Gedung Puskesmas dibongkar senilai Rp1.009.199.304,00,
 - Bagian Umum gedung PMI dibongkar senilai Rp538.997.580,00 dan
 - Kecamatan Rowokangkung gedung dibongkar senilai Rp204.706.972,00
- (2) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp529.986.342,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa instalasi gas metan direklas ke KIB D dan jembatan timbang direklas ke KIB B.
- (3) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan – bangunan kamar mandi ke barang ekstra komptabel sebesar Rp8.500.000,00 pada Dinas Pendidikan karena nilainya dibawah kapitalisasi Rp10.000.000,00.
- (4) Reklasifikasi antar bidang barang dalam satu golongan barang yang mengurangi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.615.237.100,00 tetapi tidak mengurangi total nilai aset tetap gedung dan bangunan dan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (5) Mutasi keluar aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp10.258.132.864,00 yang tidak menambah total nilai aset tetap gedung dan bangunan

tetapi berpengaruh terhadap nilai aset tetap gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4) Jalan, Irigasi & Jaringan	1.137.518.299.397,14	1.023.606.686.552,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.137.518.299.397,14 sebesar Rp1.023.606.686.552,00. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp114.685.670.575,14 dan pengurangan sebesar Rp774.057.730,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 162 Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan
Tahun 2018

raian	Jumlah (Rp)	
1. Saldo per 31 Desember 2017		1.023.606.686.552,00
2. Penambahan :		
3. Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	90.937.696.781,43	
4. Reklasifikasi dari belanja modal	1.395.164.300,00	
5. Koreksi Kurang Catat	14.245.481.763,71	
6. Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum	5.842.086.000,00	
7. Reklasifikasi antar golongan barang	1.930.585.150,00	
8. Mutasi masuk antar SKPD	334.656.580,00	
9. Jumlah Penambahan (3 s/d 8)		114.685.670.575,14
10. Pengurangan		
11. Reklasifikasi antar golongan barang	439.401.150,00	
12. Mutasi Keluar Antar SKPD	334.656.580,00	
13. Jumlah Pengurangan (11 s/d 12)		774.057.730,00
14. Saldo per 31 Desember 2018 (1+9-13)		1.137.518.299.397,14

Jumlah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 yang terdiri dari jalan, jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan terinci pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 163 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2018

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Jalan dan Jembatan	796.400.654.748,00	89.487.757.773,22	334.656.580,00	885.553.755.941,22
2	Bangunan Air/Irigasi	189.430.858.247,00	15.309.579.051,92	42.146.250,00	204.698.291.048,92
3	Instalasi	7.456.872.017,00	6.735.251.350,00	77.693.000,00	14.114.430.367,00
4	Jaringan	30.318.301.540,00	3.153.082.400,00	319.561.900,00	33.151.822.040,00
	Jumlah	1.023.606.686.552,00	114.685.670.575,14	774.057.730,00	1.137.518.299.397,14

a. Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp114.685.670.575,14 terdiri dari:

- (1) Penambahan dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp90.937.696.781,43 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 164 Daftar Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
Per SKPD Tahun 2018

No	Nama SKPD	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Menambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	117.830.000,00		117.830.000,00	
2	Dinas Perhubungan	2.426.161.000,00			2.426.161.000,00
3	Dinas Perikanan	310.965.000,00		107.992.000,00	202.973.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	93.285.661.289,13	7.014.741.200,00		86.270.920.089,13
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.594.095.000,00			1.594.095.000,00
6	Kec. Senduro	443.547.692,30			443.547.692,30
	Jumlah	98.178.259.981,43	7.014.741.200,00	225.822.000,00	90.937.696.781,43

Rincian realisasi belanja modal yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp90.937.696.781,43 tersebut sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 165 Daftar Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Jalan Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Nama SKPD	Jalan	Jembatan	Bangunan Air/Irigasi	Instalasi	Jaringan
1	Dinas Perhubungan					2.426.161.000,00
2	Dinas Perikanan			202.973.000,00		
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57.885.564.414,13	15.148.049.425,00	13.237.306.250,00		
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.311.722.500,00			282.372.500,00	
5	Kec. Senduro	443.547.692,30				
	Jumlah	59.640.834.606,43	15.148.049.425,00	13.440.279.250,00	282.372.500,00	2.426.161.000,00

- (2) Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.395.164.300,00 berasal dari reklasifikasi selain belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 166 Daftar Reklasifikasi Selain Belanja Modal JIJ yang menambah Aset tetap Jalan Irigasi, dan Jaringan Per SKPD Tahun 2018

No	Nama SKPD	Asal KIB B/C/F	Ke KIB D	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	449.028.500,00	449.028.500,00	Pembangunan Plengsengan
2.	Kecamatan Tempursari	26.439.800,00	26.439.800,00	Pembangunan Plengsengan
3.	RSUD DR. Haryoto	919.696.000,00	637.138.000,00	Jaringan Instalasi Gas
			282.558.000,00	Jembatan
	Jumlah	1.395.164.300,00	1.395.164.300,00	

- (3) Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan karena koreksi kurang catat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas hasil validasi dan penilaian barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp14.245.481.763,71
- (4) Penerimaan hibah barang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.842.086.000,00 menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Instalasi Limbah Domestik
- (5) Reklasifikasi antar golongan yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.930.585.150,00 meliputi :
 - RSUD DR. Haryoto sebesar Rp12.090.400,00 berupa penyelesaian instalasi gas,
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp291.230.950,00 berupa instalasi gas methan,
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.230.008.900,00 berupa penyelesaian bangunan jalan dan jembatan ;
 - Bagian Umum sebesar Rp397.254.900,00 berupa instalasi dan listrik.
- (6) Mutasi masuk antar SKPD aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp334.656.580,00 yang tidak menambah nilai jalan, irigasi dan jaringan tetapi berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD yaitu mutasi menambah aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mutasi mengurangi aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dimutasi berupa jalan lingkungan

b. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.

Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp774.057.730,00 dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Reklasifikasi antar golongan barang yang mengurangi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp439.401.150,00 meliputi Dinas Perikanan sebesar Rp42.146.250,00 berupa rehab rumah jaga, di reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan (KIB C), dan Bagian Umum senilai Rp397.254.900,00 berupa instalasi dan listrik
- (2) Mutasi keluar antar SKPD Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan yang tidak menambah aset tetap sebesar Rp334.656.580,00 namun berpengaruh terhadap nilai aset tetap pada masing-masing SKPD yaitu mutasi mengurangi Aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan mutasi menambah Aset ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupa jalan lingkungan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	94.248.930.396,00	76.580.640.642,00

Saldo aset tetap lainnya Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp94.248.930.396,00 dan Rp76.580.640.642,00. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp18.808.401.805,00 dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.140.112.051,00.

Tabel 167 Ringkasan Perkembangan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018

1. Saldo per 31 Desember 2017		76.580.640.642,00
2. Penambahan :		
3. Penambahan realisasi dari Belanja Modal tahun 2018	17.654.762.954,00	
4. Reklasifikasi dari Belanja Modal	73.916.800,00	
5. Reklas antar bidang dalam satu golongan barang	1.079.722.051,00	
6. Jumlah Penambahan		18.808.401.805,00
7. Pengurangan		
8. Penghapusan barang	60.390.000,00	
9. Reklas antar bidang dalam satu golongan barang	1.079.722.051,00	
10. Jumlah Pengurangan		1.140.112.051,00
11. Saldo per 31 Desember 2018		94.248.930.396,00

Jumlah aset tetap lainnya terdiri dari Buku dan Pepustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, Hewan, Ternak dan Tanaman, terinci pada tabel tersebut dibawah :

Tabel 168 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2018

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
1	Buku dan Pepustakaan	68.224.068.613,30	18.611.877.845,00	15.187.960,00	86.820.758.498,30
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	8.232.733.278,70	196.523.960,00	1.064.534.091,00	7.364.723.147,70
3	Hewan, Ternak dan Tanaman	123.838.750,00	-	60.390.000,00	63.448.750,00
	Jumlah	76.580.640.642,00	18.808.401.805,00	1.140.112.051,00	94.248.930.396,00

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp 18.808.401.805,00 berasal dari transaksi sebagai berikut :

- (1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar Rp17.654.762.954,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp17.757.264.954,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp17.654.762.954,00 menambah aset tetap lainnya. Sedangkan sisanya sebesar Rp102.502.000,00 menambah bahan habis pakai.

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang menambah aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 169 Daftar Realisasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2018

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Menambah Barang Pakai Habis	Belanja Modal Aset Menambah Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	11.126.000,00		11.126.000,00
2	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	741.000,00		741.000,00
3	RSUD DR. Haryoto	1.996.500,00		1.996.500,00
4	Dinas Pendidikan	17.391.133.054,00	101.002.000,00 1.500.000,00	17.288.631.054,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	199.746.400,00		199.746.400,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	146.522.000,00		146.522.000,00
7	Dinas Kesehatan	6.000.000,00		6.000.000,00
	Jumlah	17.757.264.954,00	102.502.000,00	17.654.762.954,00

- (2) Penambahan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp73.916.800,00 berasal dari reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin.
- (3) Reklasifikasi antar bidang barang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.079.722.051,00 sebagai berikut :
- Reklasifikasi dari bidang barang bercorak kebudayaan ke buku dan perpustakaan sebesar Rp1.064.534.091,00
 - Reklasifikasi buku dan perpustakaan ke barang bercorak kebudayaan sebesar Rp15.187.960,00

b. Pengurangan aset tetap lainnya.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp1.140.112.051,00 berasal dari transaksi sebagai berikut :

- (1) Penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp60.390.000,00 pada Dinas Perikanan berupa penghapusan indukan ikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/183/427.12/2016.
- (2) Reklasifikasi antar bidang barang yang mengurangi aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.079.722.051,00 meliputi :
- Reklasifikasi dari bidang barang bercorak kebudayaan ke buku dan perpustakaan sebesar Rp1.064.534.091,00
 - Reklasifikasi buku dan perpustakaan ke barang bercorak kebudayaan sebesar Rp15.187.960,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.166.286.046,00	4.831.845.336,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp10.166.286.046,00 dan Rp4.831.845.336,00.

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.292.510.000,00 dan pengurangan sebesar Rp1.958.069.290,00 sebagai berikut :

Tabel 170 Ringkasan Perkembangan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	
1. Saldo 31 Desember 2017		4.831.845.336,00
2. Penambahan :		
3. Penambahan Reklasifikasi dari belanja modal Tahun 2018	7.237.407.000,00	
4. Mutasi masuk antar SKPD	55.103.000,00	
5. Jumlah Penambahan (3+4)		7.292.510.000,00
6. Reklasifikasi antar golongan barang	1.902.966.290,00	
7. Mutasi keluar antar SKPD	55.103.000,00	
8. Jumlah Pengurangan (6+7)		1.958.069.290,00
9. Saldo 31 Desember 2018		10.166.286.046,00

a. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (1) Penambahan sebesar Rp7.237.407.000,00 berasal dari realisasi belanja modal edung dan bangunan dan belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018. Belanja modal tersebut belum menambah aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena belum selesai pembangunannya dan sebagian masih merupakan biaya perencanaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 171 Daftar Realisasi Belanja Modal Menambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Paket Pekerjaan	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	131.745.800,00	Pekerjaan Urukan SMPN Satu Atap Ranu Pane	Putus Kontak
2	Dinas Pertanian	19.800.000,00	Perencanaan Bangunan Gedung	
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.320.000,00	Perencanaan Depo Arsip	
4	Dinas Perhubungan	49.800.000,00	Perencanaan Bangunan Gedung	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	794.855.000,00	Perencanaan Jalan Dan Jembatan	
		6.219.886.200,00	Jembatan Rowo Pandan Yang belum selesai di tahun 2018	Fisik Belum 100%
	Jumlah	7.237.407.000,00		

- (2) Mutasi masuk aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp55.103.000 diterima Badan Pajak dan Retribusi Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

b. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- (1) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan atas penyelesaian pembangunan fisik sebesar Rp 1.902.966.290,00 terinci sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 172 Daftar Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Ke Aset Tetap
Tahun 2018

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Paket Pekerjaan	Keterangan
1	RSD DR. Haryoto	12.090.400,00	Penyelesaian Pembangunan Instalasi Gas	Fisik 100%
2	Dinas Pertanian	24.749.490,00	Penyelesaian Bangunan Kantor UPT Pertanian	Fisik 100%
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	2.925.000,00	Penyelesaian Bangunan Kantor UPT	Fisik 100%
4	Dinas Lingkungan Hidup	633.192.500,00	Penyelesaian Pembangunan Alun-alun	Fisik 100%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.230.008.900,00	Penyelesaian Bangunan Jalan Dan Jembatan	Fisik 100%
	Jumlah	1.902.966.290,00		

- (2) Mutasi keluar aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp55.103.000 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7) Akumulasi Penyusutan	(1.383.222.107.719,22)	(961.413.790.500,59)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (1.383.222.107.719,22) dan (Rp.961.413.790.500,59) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 173 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2018

KIB	Uraian	31-12-2017	Koreksi Saldo Awal	Mutasi & Reklas	Beban penyusutan 2018	31-12-2018
B	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(333.505.022.565,52)	12.185.387.969,57	842.657.364,45	(67.857.332.343,70)	(388.334.309.575,20)
C	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(186.295.593.280,06)	(24.351.055.734,21)	(1.875.555.793,88)	(20.769.500.507,71)	(233.291.705.315,86)
D	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi & jaringan	(441.167.704.655,01)	(273.453.521.013,96)	(12.475.412.686,67)	(34.499.454.472,53)	(761.596.092.828,17)
E	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(445.470.000,00)	445.470.000,00	-	-	-
	Jumlah	(961.413.790.500,59)	(285.173.718.778,59)	(13.508.311.116,11)	(123.126.287.323,93)	(1.383.222.107.719,22)

Tabel 174 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset tetap Per SKPD Tahun 2018

No	SKPD	Saldo 31-12-2017 (Audited)	Koreksi Tahun Berjalan	Mutasi / Reklasifikasi	Beban Penyusutan 2018	Saldo 31-12-2018 (Audited)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(4.779.771.624,71)	46.189.857,73	151.275.000,00	(927.822.452,59)	(5.510.129.219,58)
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(1.513.816.989,99)	(4.127.509,79)	-	(150.671.139,50)	(1.668.615.639,29)
3	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(3.228.627.005,82)	71.921.898,68	(139.799.539,84)	(583.146.349,01)	(3.879.650.996,00)
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(1.659.292.330,50)	(1.178.235.275,62)	-	(987.750.882,38)	(3.825.278.488,50)
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(5.757.536.495,49)	(725.330.002,03)	929.982.451,00	(940.584.037,47)	(6.493.468.083,99)
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(2.452.599.727,02)	(13.710.551,02)	-	(273.681.752,54)	(2.739.992.030,58)
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(2.368.154.403,02)	62.651.256,50	-	(565.470.787,74)	(2.870.973.934,26)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.915.392.457,44)	(348.164.168,36)	(257.500.000,00)	(466.845.808,83)	(3.987.902.434,63)
9	DINAS KESEHATAN - SEKRETARIAT	(7.092.826.197,79)	(695.676.523,97)	(733.738.350,00)	(1.995.969.741,32)	(10.518.210.813,08)
10	DINAS KESEHATAN - AKADEMI KEPERAWATAN	(542.496.466,56)	542.496.466,56	-	-	0,00
11	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	(886.971.696,00)	293.346.255,86	-	(175.280.249,86)	(768.905.690,00)
12	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	(1.092.986.132,36)	(85.945.966,60)	2.250.000,00	(164.666.114,75)	(1.341.348.213,71)
13	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(777.985.108,00)	(57.229.228,66)	211.863.350,00	(163.481.129,47)	(786.832.116,14)
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	(1.275.413.678,19)	(248.222.746,80)	(112.860.365,00)	(312.914.830,18)	(1.949.411.620,17)
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	(1.914.210.963,05)	(167.601.308,55)	-	(373.114.349,27)	(2.454.926.620,87)
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GESANG	(1.060.620.070,90)	(239.531.509,08)	-	(253.681.372,54)	(1.553.832.952,52)
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	(1.905.573.828,19)	(215.067.385,40)	231.969.872,96	(380.782.926,90)	(2.269.454.267,52)
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	(1.817.683.783,93)	(180.621.832,07)	-	(432.555.629,80)	(2.430.861.245,80)
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	(1.680.868.877,18)	(67.368.459,56)	-	(367.018.465,23)	(2.115.255.801,97)
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	(2.006.594.640,69)	49.101.519,72	115.000.000,00	(481.109.513,82)	(2.323.602.634,78)
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	(1.513.866.892,22)	(173.067.238,82)	-	(411.009.065,36)	(2.097.943.196,40)
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	(1.428.321.312,71)	(396.149.533,90)	-	(371.250.173,28)	(2.195.721.019,89)
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	(1.281.512.063,78)	(145.740.680,36)	16.076.000,00	(394.325.072,42)	(1.805.501.816,56)
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	(6.226.483.089,07)	(60.756.406,58)	385.828.365,00	(619.974.444,16)	(6.521.385.574,75)
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	(1.192.246.080,00)	(224.959.099,62)	182.500.000,00	(291.594.454,31)	(1.526.299.633,93)
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	(1.230.921.969,17)	(331.663.814,77)	-	(338.861.815,65)	(1.901.447.599,60)
27	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	(2.111.210.790,99)	(67.001.101,01)	-	(371.793.193,75)	(2.550.005.085,75)
28	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	(1.132.448.126,17)	(245.844.033,10)	-	(333.631.108,15)	(1.711.923.267,42)
29	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	(2.500.592.229,05)	(110.978.793,14)	-	(521.368.363,99)	(3.132.939.386,18)
30	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUMAN	(1.752.940.876,44)	(351.638.899,22)	-	(670.745.339,65)	(2.775.325.115,31)
31	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	(2.704.002.880,16)	683.789.790,75	-	(491.794.473,37)	(2.512.007.562,78)
32	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	(1.585.661.133,43)	35.357.039,02	-	(428.702.057,88)	(1.979.006.152,29)
33	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS	(1.283.236.788,82)	(173.136.814,55)	-	(327.063.683,81)	(1.783.437.287,18)

No	SKPD	Saldo 31-12-2017 (Audited)	Koreksi Tahun Berjalan	Mutasi / Reklasifikasi	Beban Penyusutan 2018	Saldo 31-12-2018 (Audited)
	SUMBERSARI					
34	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	(1.114.638.600,19)	(84.002.508,02)	61.504.871,40	(233.626.519,21)	(1.370.762.756,01)
35	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	(1.683.204.658,23)	(127.175.485,86)	(167.625.000,00)	(625.906.719,88)	(2.603.911.863,97)
36	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	(2.228.119.807,85)	(771.468.985,76)	-	(453.570.142,05)	(3.453.158.935,67)
37	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	(1.214.111.310,44)	53.447.869,65	-	(211.937.811,49)	(1.372.601.252,29)
38	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	(2.136.124.301,64)	(546.691.127,67)	-	(514.938.883,79)	(3.197.754.313,10)
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	(480.369.046,00)	(175.536.118,00)	-	(143.505.965,10)	(799.411.129,10)
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(3.610.574.500,85)	(39.261.295,38)	48.088.250,00	(1.124.467.142,13)	(4.726.214.689,36)
41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	(9.117.830.600,17)	8.124.597.385,42	-	(271.046.438,54)	(1.264.279.653,28)
42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(11.397.807.577,07)	(113.930.375,21)	72.494.365,89	(3.363.481.098,68)	(14.822.724.685,07)
43	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	(8.017.745.449,45)	(895.285.409,12)	(236.277.312,50)	(2.051.868.109,19)	(11.201.176.280,26)
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(427.770.812.315,83)	(289.831.598.953,49)	(12.379.785.719,48)	(34.482.001.381,95)	(764.464.198.370,75)
45	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1.199.476.121,12)	(171.633.449,00)	-	(170.294.493,82)	(1.541.404.063,94)
46	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	(5.041.642.421,94)	(367.466.746,38)	11.490.000,00	(784.820.019,07)	(6.182.439.187,39)
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(1.909.600.626,21)	19.273.013,52	-	(262.309.796,18)	(2.152.637.408,87)
48	DINAS PENDIDIKAN	(169.598.953.189,59)	(14.267.155.968,33)	(212.235.947,30)	(21.858.184.074,02)	(205.936.529.179,23)
49	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(5.178.032.080,20)	(89.884.802,30)	(3.280.000,00)	(571.843.351,41)	(5.843.040.233,91)
50	DINAS PERDAGANGAN	(24.044.747.137,65)	5.938.953.954,78	-	(2.001.211.156,26)	(20.107.004.339,13)
51	DINAS PERHUBUNGAN	(16.857.558.224,13)	5.823.055.664,66	(435.340.787,50)	(2.301.392.921,20)	(13.771.236.268,17)
52	DINAS PERIKANAN	(8.375.429.746,68)	(282.656.218,41)	(1.475.118,75)	(827.063.724,05)	(9.486.624.807,89)
53	DINAS PERTANIAN	(14.905.273.867,59)	(313.494.218,38)	6.510.750,00	(1.761.297.877,52)	(16.973.555.213,49)
54	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(2.261.672.101,75)	1.076.024.334,70	(3.378.518.863,43)	(858.497.353,31)	(5.422.663.983,79)
55	DINAS SOSIAL	(1.402.953.225,17)	(955.886.341,00)	(199.625.000,00)	(367.339.775,17)	(2.925.804.341,34)
56	DINAS TENAGA KERJA	(725.320.337,04)	(113.661.738,96)	(147.750.000,00)	(85.790.629,17)	(1.072.522.705,17)
57	Ex. BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	(430.612.793,38)	430.612.793,38	-	-	-
58	Ex. DINAS PASAR	(1.221.484.413,50)	1.221.484.413,50	-	-	-
59	Ex. DINAS PERKEBUNAN	(1.091.452.400,00)	1.091.452.400,00	-	-	-
60	Ex. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	(1.636.081.907,58)	1.636.081.907,58	-	-	-
61	Ex. KANTOR PETERNAKAN	(1.031.201.342,40)	1.031.201.342,40	-	-	-
62	Ex. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-
63	Ex. BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL	(5.166.157.917,54)	5.166.157.917,54	-	-	-
64	Ex. DINAS KEHUTANAN	(1.719.613.724,00)	1.719.613.724,00	-	-	-
65	INSPEKTORAT KABUPATEN	(1.607.835.670,00)	163.017.050,00	-	(275.009.857,50)	(1.719.828.477,50)
66	KECAMATAN CANDIPURO	(640.855.166,99)	(255.834.522,01)	-	(106.702.946,32)	(1.003.392.635,32)
67	KECAMATAN GUCIALIT	(551.782.233,52)	(155.529.468,21)	-	(117.198.396,94)	(824.510.098,67)
68	KECAMATAN JATIROTO	(639.540.184,74)	(44.391.233,70)	-	(123.278.773,94)	(807.210.192,39)

No	SKPD	Saldo 31-12-2017 (Audited)	Koreksi Tahun Berjalan	Mutasi / Reklasifikasi	Beban Penyusutan 2018	Saldo 31-12-2018 (Audited)
69	KECAMATAN KEDUNGAJANG	(754.065.258,80)	23.659.855,98	-	(66.671.911,32)	(797.077.314,14)
70	KECAMATAN KLAKAH	(550.232.600,24)	(69.310.424,76)	72.132.500,00	(108.108.500,33)	(655.519.025,33)
71	KECAMATAN KUNIR	(515.121.951,21)	(142.071.160,18)	-	(107.165.255,01)	(764.358.366,40)
72	KECAMATAN LUMAJANG	(763.430.801,14)	(40.928.675,24)	-	(168.030.892,70)	(972.390.369,08)
73	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	(408.084.949,29)	(2.487.499,81)	-	(42.479.616,60)	(453.052.065,70)
74	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	(206.285.250,00)	(211.432.166,67)	-	(43.194.616,67)	(460.912.033,33)
75	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	(405.369.297,59)	(4.020.500,00)	-	(36.606.386,84)	(445.996.184,43)
76	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	(175.082.678,00)	(78.458.472,00)	-	(35.012.035,00)	(288.553.185,00)
77	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	(360.002.820,00)	(5.786.600,00)	-	(45.011.086,10)	(410.800.506,10)
78	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	(416.214.726,75)	54.126.400,35	18.014.000,00	(60.145.343,20)	(404.219.669,60)
79	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	(307.485.571,74)	(90.501.304,35)	-	(56.420.796,74)	(454.407.672,83)
80	KECAMATAN PADANG	(554.046.529,04)	(132.518.899,91)	-	(110.557.718,95)	(797.123.147,90)
81	KECAMATAN PASIRIAN	(568.559.447,36)	(140.913.752,63)	-	(137.313.766,66)	(846.786.956,65)
82	KECAMATAN PASRUJAMBE	(675.758.962,46)	(237.574.127,62)	-	(160.740.849,90)	(1.074.073.939,98)
83	KECAMATAN PRONOJIWO	(654.420.549,28)	(9.979.999,39)	-	(88.780.960,68)	(753.181.509,34)
84	KECAMATAN RANDUAGUNG	(580.673.267,13)	(38.352.507,50)	41.626.080,00	(105.653.040,28)	(683.052.734,91)
85	KECAMATAN RANUYOSO	(653.492.059,66)	(29.514.856,52)	-	(94.821.029,07)	(777.827.945,25)
86	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	(574.667.566,64)	(28.096.676,99)	45.501.570,85	(82.314.782,36)	(639.577.455,14)
87	KECAMATAN SENDURO	(591.820.782,49)	(72.374.500,01)	-	(178.448.048,91)	(842.643.331,41)
88	KECAMATAN SUKODONO	(639.769.280,97)	(16.647.208,04)	-	(90.299.752,84)	(746.716.241,85)
89	KECAMATAN SUMBERSUKO	(482.390.396,83)	(99.321.510,52)	-	(86.438.645,01)	(668.150.552,36)
90	KECAMATAN TEKUNG	(723.169.660,24)	33.120.680,24	-	(97.697.187,00)	(787.746.167,00)
91	KECAMATAN TEMPEH	(541.368.747,98)	(358.206.732,58)	-	(93.905.115,08)	(993.480.595,64)
92	KECAMATAN TEMPURSARI	(685.609.975,41)	(50.822.097,46)	-	(111.276.460,12)	(847.708.532,99)
93	KECAMATAN YOSOWILANGUN	(641.951.376,58)	(39.012.206,23)	-	(108.875.851,71)	(789.839.436,52)
94	RSUD dr. HARYOTO	(86.516.562.937,15)	(4.718.526.654,73)	-	(18.676.270.022,59)	(109.911.359.614,47)
95	RSUD PASIRIAN	(8.451.645.962,72)	(1.427.438.733,62)	-	(4.845.763.849,47)	(14.724.848.545,81)
96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(2.818.474.402,72)	219.890.165,11	-	(601.328.725,65)	(3.199.912.963,26)
97	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	(633.376.922,67)	(12.358.078,42)	14.339.166,00	(43.586.144,93)	(674.981.980,02)
98	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	(582.219.018,38)	34.951.150,88	(2.870.000,00)	(48.065.912,50)	(598.203.780,00)
99	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	(716.742.381,50)	(12.335.754,00)	174.839.745,00	(24.514.704,00)	(578.753.094,50)
100	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	(674.824.378,43)	(8.819.605,95)	-	(67.195.500,88)	(750.839.485,25)
101	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN	(3.514.587.569,16)	2.496.956.075,66	12.180.000,00	(134.770.045,38)	(1.140.221.538,88)

No	SKPD	Saldo 31-12-2017 (Audited)	Koreksi Tahun Berjalan	Mutasi / Reklasifikasi	Beban Penyusutan 2018	Saldo 31-12-2018 (Audited)
	PROTOKOL					
102	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	(530.007.391,00)	(2.469.999,50)	-	(44.442.066,50)	(576.919.457,00)
103	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	(366.155.837,50)	(52.046.433,00)	-	(57.933.254,00)	(476.135.524,50)
104	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	(3.356.192.766,08)	2.823.530.383,58	-	(50.017.562,50)	(582.679.945,00)
105	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(23.609.035.164,11)	(2.259.292.022,70)	1.950.399.121,75	(3.380.942.588,09)	(27.298.870.653,15)
106	SEKRETARIAT DPRD	(7.533.409.551,12)	362.151.662,75	144.505.427,84	(1.298.241.161,49)	(8.324.993.622,02)
	JUMLAH	(961.413.790.500,59)	(285.173.718.778,60)	(13.508.311.116,11)	(123.126.287.323,93)	(1.383.222.107.719,22)

D. DANA CADANGAN

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Dana Cadangan	0,00	39.338.270.790,56

Saldo dana cadangan Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing Rp0,00 dan Rp39.338.270,56. Pembentukan Dana cadangan tersebut pada tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan yang tujuan pembentukannya untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Lumajang tahun 2018. Rincian saldo dana cadangan tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 175 Dana Cadangan

No	Keterangan	2018	2017
1	Saldo awal	39.338.270.790,56	33.890.911.468,69
2	Tambahan / pembentukan Dana Cadangan		3.366.000.000,00
3	Bunga Dana Cadangan	1.152.094.349,93	2.081.359.321,87
4	Pencairan Dana Cadangan	40.490.365.140,49	0,00
5	Saldo akhir (1+2+3-4)	0,00	39.338.270.790,56

Pencairan dana cadangan sebesar Rp40.490.365.140,49 merupakan penerimaan pembiayaan di laporan realisasi anggaran.

E. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap, meliputi tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud dan aset lain-lain serta kas yang dibatasi penggunaannya.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Aset Lainnya	114.651.847.084,04	111.732.438.254,12

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 sebesar Rp114.651.847.084,04 dan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp111.732.438.254,12 terinci sebagai berikut.

Tabel 176 Saldo Aset Lainnya Tahun 2018

No	Uraian	2018	2017
1	Saldo awal	111.732.438.254,12	115.634.214.251,65
2	Koreksi saldo awal	(579.555.105,20)	-
3	Mutasi/reklas saldo awal	(15.585.046,80)	-
4	Saldo setelah koreksi/mutasi (1+2+3)	111.137.298.102,12	115.634.214.251,65
5	Penambahan	3.461.587.339,01	7.695.780.540,66
6	Pengurangan	52.961.642,91	(11.597.556.538,19)
7	Saldo akhir	114.651.847.084,04	111.732.438.254,12

Rincian per jenis aset lainnya sebagaimana di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 177 Daftar Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Jenis	31 Desember 2017 (Rp)	Koreksi	Mutasi / reklas	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	9.872.901,00					9.872.901,00
2	Aset Tak Berwujud	19.406.328.444,00			5.909.515.734,00		25.315.844.178,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.629.237.079,80)	(579.555.105,20)	(15.585.046,80)	(4.161.176.517,80)		(15.385.553.749,60)
4	Aset Lain lain	102.945.473.988,92			2.158.149.260,30	(2.208.440.255,00)	102.895.182.994,22
	Akumulasi penyusutan aset lain-lain				(701.356.110,49)	2.261.401.897,91	1.560.045.787,42
5	Aset yang dibatasi penggunaannya				256.454.973,00		256.454.973,00
	Jumlah	111.732.438.254,12	(579.555.105,20)	(15.585.046,80)	3.461.587.339,01	52.961.642,91	114.651.847.084,04

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a. Tuntutan Ganti Rugi	9.872.901,00	9.872.901,00

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan tuntutan ganti rugi kepada bukan bendahara dan pegawai yang telah menghilangkan kendaraan dinas roda 2 (dua)/sepeda motor. Saldo tuntutan ganti rugi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.872.901,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.872.901,00.

f

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b. Aset Tak Berwujud (ATB)	25.315.844.178,00	19.406.328.444,00

Aset Tak Berwujud adalah aset berupa perangkat lunak (*software*) komputer dan kajian yang dilakukan oleh SKPD. Saldo Aset tak berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.315.844.178,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.406.328.444,00. Pada tahun 2018 terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.909.515.734,00 dan ada pengurangan, terinci sebagai berikut :

Tabel 178 Perkembangan Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Jumlah (Rp)	
1. Saldo awal aset tak berwujud		19.406.328.444,00
2. Penambahan :		
3. Realisasi Belanja Aset Tak berwujud tahun 2018	5.815.090.500,00	
4. Reklasifikasi dari KIB B	77.925.234,00	
5. Reklasifikasi dari Belanja modal KIB C	16.500.000,00	
6. Jumlah penambahan (3+4+5)		5.909.515.734,00
7. Pengurangan		-
8. Sado akhir (1+6-7)		25.315.844.178,00

- (1) Penambahn aset tak berwujud sebesar Rp5.815.090.500,00 berasal dari realisasi belanja modal aset lainnya – aset tak berwujud tahun 2018 yang menambah Aset Tak Berwujud dengan rincian per SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 179 Daftar RealisasiAset Tak Berwujud Per SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Nama SKPD	Software	Hasil Kajian/ Perencanaan	Jumlah
1	Bappeda.	239.948.500,00	2.634.402.200,00	2.874.350.700,00
2	Badan Kepegawaian Daerah	150.000.000,00		150.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	222.625.000,00		222.625.000,00
4	RSUD. Dr. Haryoto	813.799.000,00		813.799.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Capil	119.150.000,00		119.150.000,00
6	Dinas Pertanian	29.975.000,00		29.975.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	49.250.000,00		49.250.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.940.000,00		49.940.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	74.200.000,00		74.200.000,00
10	Dinas Kesehatan		48.660.500,00	48.660.500,00
11	Dinas Perhubungan		58.920.000,00	58.920.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	159.500.000,00	926.008.400,00	1.085.508.400,00

No	Nama SKPD	Software	Hasil Kajian/ Perencanaan	Jumlah
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		114.939.900,00	114.939.900,00
14	Bagian Hukum		99.022.000,00	99.022.000,00
15	Bagian Pembangunan	24.750.000,00		24.750.000,00
	Jumlah	1.933.137.500,00	3.881.953.000,00	5.815.090.500,00

- (2) Reklasifikasi penambahan Aset tak berwujud sebesar Rp77.925.234,00 berupa Aplikasi ATCS pada Dinas Perhubungan sebesar Rp77.925.234,00 yang berasal dari Reklasifikasi KIB B (peralatan dan mesin).
- (3) Reklasifikasi penambahan Aset tak berwujud berupa Aplikasi ATCS pada Dinas Perhubungan sebesar Rp16.500.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi belanja modal KIB C (gedung dan bangunan)

Rincian perkembangan Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 180 Daftar Rincian Aset Tak Berwujud Per SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Nama SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	24.200.000,00			24.200.000,00
2	Inspektorat Kabupaten	202.911.000,00			202.911.000,00
3	BAPPEDA	8.284.506.114,00	2.874.350.700,00		11.158.856.814,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	225.680.000,00	150.000.000,00		375.680.000,00
6	B P K A D	1.502.535.000,00	222.625.000,00		1.725.160.000,00
7	B P R D	678.260.000,00			678.260.000,00
8	RSD DR. Haryoto	30.267.000,00	813.799.000,00		844.066.000,00
9	RSUD Pasirian	177.900.000,00			177.900.000,00
10	Dinas Pendidikan	54.135.650,00			54.135.650,00
11	Dispenduk Capil	236.900.000,00	119.150.000,00		356.050.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	28.820.000,00			28.820.000,00
13	Dinas Pertanian	95.199.500,00	29.975.000,00		125.174.500,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	224.422.500,00			224.422.500,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	398.023.500,00	49.250.000,00		447.273.500,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.606.502.000,00			2.606.502.000,00
17	Dinas Perdagangan	52.000.000,00			52.000.000,00
18	Dinas Kominfo	71.147.500,00	49.940.000,00		121.087.500,00
19	Dinas Tenaga Kerja		74.200.000,00		74.200.000,00
20	Dinas Kesehatan	265.608.480,00	48.660.500,00		314.268.980,00
21	Dinas Perhubungan	488.342.300,00	153.345.234,00		641.687.534,00

No	Nama SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
22	Dinas Pekerjaan Umum dan TR	2.396.039.000,00	1.085.508.400,00		3.481.547.400,00
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		114.939.900,00		114.939.900,00
24	Dinas Penanaman Modal PT ST	422.604.950,00			422.604.950,00
25	Dinas Pemb. Masyarakat	17.899.000,00			17.899.000,00
26	Bagian Tata Pemerintahan	236.150.000,00			236.150.000,00
27	Bagian Hukum	285.598.500,00	99.022.000,00		384.620.500,00
28	Bagian Ekonomi	147.658.000,00			147.658.000,00
29	Bagian Pembangunan	109.120.000,00	24.750.000,00		133.870.000,00
30	Bagian Organisasi	98.898.450,00			98.898.450,00
31	Bagian Humas dan Protokol	44.500.000,00			44.500.000,00
32	Kec. Tempursari	500.000,00			500.000,00
	Jumlah	19.406.328.444,00	5.909.515.734,00	-	25.315.844.178,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
c. Akumulasi Amortisasi ATB	(15.385.553.749,60)	(10.629.237.079,80)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp 15.385.553.749,60) dan (Rp 10.629.237.079,80) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 181 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo awal	(10.629.237.079,80)
2	Koreksi saldo awal	(579.555.105,20)
3	Mutasi / Reklas	(15.585.046,80)
4	Jumlah setelah koreksi (1+2+3)	(11.224.377.231,80)
5	Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2018	(4.161.176.517,80)
6	Saldo akhir (4+5)	(15.385.553.749,60)

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per SKPD sebagai berikut :

Tabel 182 Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Per SKPD Tahun 2018

No.	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 - 12 - 2017	Koreksi	Reklas	BEBAN AMORISASI 2018	Akumulasi Amortisasi 31 - 12 - 2018
1	Sekretariat DPRD	24.200.000,00	-		-	24.200.000,00
2	Inspektorat	84.778.600,00	-		40.022.200,00	124.800.800,00
3	Bappeda.	4.616.653.678,80	0,20		1.918.546.755,00	6.535.200.434,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	45.136.000,00	33.948.000,00		75.136.000,00	154.220.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.195.277.800,00	-		168.286.800,00	1.363.564.600,00
6	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	444.260.000,00	-		115.800.000,00	560.060.000,00
7	RSUD. Dr. Haryoto	30.267.000,00	-		162.759.800,00	193.026.800,00
8	RSUD Pasirian	71.160.000,00	-		35.580.000,00	106.740.000,00
9	Dinas Pendidikan	33.075.650,00	-		7.530.000,00	40.605.650,00
10	Dinas Kependudukan dan Sipil	185.080.000,00	20.340.000,00		50.870.000,00	256.290.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.764.000,00	-		5.764.000,00	11.528.000,00
12	Dinas Pertanian	31.482.275,00	2.488.475,00		25.034.900,00	54.028.700,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.380.000,00	102.122.500,00		24.460.000,00	158.962.500,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	151.445.700,00	-		89.454.700,00	240.900.400,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.107.373.400,00	-		513.506.400,00	1.620.879.800,00
16	Dinas Perdagangan	23.600.000,00	25.700.000,00		900.000,00	50.200.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.229.500,00	-		24.217.500,00	38.447.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja	-	-		14.840.000,00	14.840.000,00
19	Dinas Kesehatan	88.122.296,00	1.918.600,00		55.743.796,00	141.947.492,00
20	Dinas Kesehatan - Puskesmas Candipuro	1.060.000,00	-		1.060.000,00	2.120.000,00
21	Akademi Keperawatan	1.800.000,00	1.800.000,00			-
22	Dinas Perhubungan	321.419.260,00		15.585.046,80	118.762.006,80	455.766.313,60
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.157.020.680,00	441.539.680,00		522.160.100,00	2.120.720.460,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.319.200,00	-		3.579.800,00	17.899.000,00
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-		22.987.980,00	22.987.980,00
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	279.280.960,00	-		48.280.990,00	327.561.950,00
27	Bagian Tata Pemerintahan	283.380.000,00	47.230.000,00		-	236.150.000,00
28	Bagian Hukum	87.699.700,00	-		69.279.100,00	156.978.800,00
29	Bagian Ekonomi	137.658.000,00	-		10.000.000,00	147.658.000,00
30	Bagian Pembangunan	50.534.000,00	5.742.000,00		26.774.000,00	83.050.000,00
31	Bagian Organisasi	69.379.380,00	-		9.839.690,00	79.219.070,00
32	Bagian Humas	44.500.000,00	-		-	44.500.000,00

No.	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 - 12 - 2017	Koreksi	Reklas	BEBAN AMORTISASI 2018	Akumulasi Amortisasi 31 - 12 - 2018
33	Kecamatan Tempursari	500.000,00	-		-	500.000,00
	Jumlah	10.629.237.079,80	579.555.105,20	15.585.046,80	4.161.176.517,80	15.385.553.749,60

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
d. Aset Lain-lain	104.455.228.781,64	102.945.473.988,92

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.455.228.781, dan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp102.945.473.988,92 Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp1.456.793.149,81 dan pengurangan Aset Lain-lain sebesar (Rp52.961.642,91) sebagai berikut :

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017	Rp	102.945.473.988,92
Penambahan Aset Lain-lain Tahun 2018	Rp	1.456.793.149,81
Jumlah	Rp	104.402.267.138,73
Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2018	Rp	(Rp52.961.642,91)
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018	Rp	104.455.228.781,64

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp1.456.793.149,81 antara lain meliputi :

- (1) Koreksi/reklas atas barang-barang yang bukan milik pemda ke aset lain-lain Rp31.355.000,00 terdiri dari Rp50.000,00 tanah Puskesmas Kunir dan RpRp31.305.000,00 atas biaya rehab yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- (2) Gedung dan bangunan yang akan di hapus Rp1.752.903.856,30 berupa 4 bangunan Puskesmas yang asetnya tercatat di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.009.199.304,30, 1 bangunan Gedung PMI yang asetnya tercatat Di bagian Umum sebesar Rp538.997.580,00 dan 1 bangunan kantor Kecamatan Rowokangkung sebesar Rp204.706.972,00 .
- (3) Barang-barang rusak berat di reklas ke aset lain-lain Rp373.890.404,00 di beberapa SKPD sebagai berikut :
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp238.095.638,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp1.145.000,00
 - Bagian Administrasi SDA dan Perikanan Rp14.339.166,00
 - Kecamatan Klakah Rp77.845.000,00
 - Kecamatan randuagung Rp42.465.600,00
- (4) Akumulasi penyusutan aset tetap di reklas ke akumulasi aset lain-lain (Rp701.356.110,49)

Sedangkan pengurangan aset lain-lain sebesar Rp52.961.642,91 meliputi :

- (1) Penghapusan aset lain-lain tahun 2018 sebesar Rp2.103.640.255,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor:188.45/276/427.12/2018 tanggal 23Agustus2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Bangunan TPI yan terkena Bencana Alam Rp463.071.000,00
- Dinas kesehatan, bangunan yang dibongkar Rp1.640.569.255,00
- (2) Aset lain- barang rusak berat yang di rehab kembali dan di reklas ke aset tetap sebesar Rp104.800.000,00 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp90.000.000,00 dan Dinas Kesehatan Sebesar Rp.14.800.000,00
- (3) Pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya akibat penghapusan (Rp2.261.401.897,91) di Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar (Rp23.524.020,00), dan Dinas Kesehatan sebesar (Rp2.237.877.877,91)

Rincian saldo aset lain-lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 183 Daftar Perkembangan Aset Lain-Lain
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2017	Mutasi		Saldo 31 Des 2018
			Bertambah	Berkurang	
1	Sisa Kendaraan Roda 2 Yang Balum Terjual	19.500.000,00			19.500.000,00
2	Peralatan & Mesin. Buku yang akan dihibahkan	82.254.500,00			82.254.500,00
3	Uang Persediaan yg blm di SPJ Kan	47.979.750,00			47.979.750,00
4	Sisa Kendaraan Roda 2 yang belum terjual	807.176.100,00			807.176.100,00
5	Aset Tetap Rusak Berat & Tdk Ditemukan	101.387.402.638,92	1.456.793.149,81	(52.961.642,91)	102.791.234.145,82
6	Barang SMAN/SMKN yang belum diserahkan Ke Propinsi Jawa Timur	601.161.000,00			601.161.000,00
	Jumlah	102.945.473.988,92	1.456.793.149,81	(52.961.642,91)	104.455.228.781,64

Keterangan :

1. Sisa kendaraan roda 2 (dua) hasil penghapusan yang belum terjual sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/313/427.12/2007, sebanyak 16 unit dengan nilai harga perolehan sebesar Rp19.500.000,00
2. Aset lain-lain berupa peralatan dan mesin serta buku di Dinas Pendidikan sebesar Rp82.254.500,00 yang akan dihibahkan kepada lembaga sekolah swasta yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya akan di lakukan proses penghapusan.
3. Aset lain-lain berupa pertanggungjawab atas Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Satpol PP sebesar Rp47.979.750,00 yang merupakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2010 yang belum dipertanggungjawabkan. Dari total TUP tahun 2010 sebesar Rp158.379.750,00 sebesar Rp110.400.000,00 telah dibuatkan pengesahan SPJ Nomor 79 tanggal 26 Juni 2012 sehingga sisanya sebesar Rp47.979.750,00 masih belum dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan proses penghapusan.
4. Sisa kendaraan roda dua yang belum terjual sebesar Rp807.176.100,00 dari hasil penghapusan Kendaraan Dinas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang selaku Pengelola Barang Daerah nomor: 188/481/427.12/2013.



5. Aset Tetap Rusak Berat dan Tidak Ditemukan Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp102.897.157.431,64 sedangkan saldo Per 31 Desember 2017 sebesar Rp101.387.402.638,92. Jumlah penambahan sebesar Rp1.456.793.149,81 dan pengurangan sebesar (Rp52.961.642,91) sebagaimana telah di uraikan di atas.
6. Barang hasil pengadaan mebeulair tahun 2017 pada Dinas Pendidikan yang dimanfaatkan SMAN/SMKN yang belum diserahkan Ke Propinsi Jawa Timur sebesar Rp601.161.000,00 karena masih dalam proses penyelesaian administrasi.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
e. Aset Yang dibatasi Penggunaanya	256.454.973,00	0,00

Aset yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp256.454.973,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan kas milik pihak ke tiga sebagai jaminan pembongkaran bangunan papan reklame yang telah di ikat dengan perjanjian bersama antara pihak ke tiga dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu. Kas tersebut akan dapat di cairkan oleh pihak ketiga jika kewajiban pembongkaran papan reklame yang sudah habis ijinnya telah dilaksanakan. Sedangkan kas tersebut akan menjadi milik pemerintah jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	30.134.238.578,00	18.166.590.499,77

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek pemerintah daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp30.134.238.578,00 dan Rp18.166.590.499,77. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(a) Utang PFK	0,00	0,00

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan - potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 utang PFK masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini mencerminkan seluruh potongan SP2D seperti potongan taspen, taperum, PPh21, PPh22, PPN dan potongan-potongan SP2D lainnya telah distorkan ke rekening Kas Negara atau ke rekening pihak ke tiga. Jumlah potongan SP2D yang diterima dan disetorkan ke rekening kas negara/rekening pihak ke tiga pada tahun 2018 sebesar Rp39.533.385.894,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	4.465.183.977,54	4.223.091.696,77

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2018 dan 2017 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp4.465.183.977,54 dan Rp4.223.091.696,77 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel 184 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018

No	Nama SKPD	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	2.333.333,35 ✓
2	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	1.750.000,00 ✓
3	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	2.333.333,35 ✓
4	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	2.500.000,00 ✓
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	2.333.333,35 ✓
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	2.500.000,00 ✓
7	RSUD dr. HARYOTO	99.825.000,00 ✓
8	RSUD PASIRIAN	4.375.000,00 ✓
9	DINAS PERHUBUNGAN	2.384.101.041,67 ✓
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	17.743.125,00 ✓
11	DINAS PERTANIAN	72.133.333,33 ✓
12	DINAS PERDAGANGAN	915.418.614,42 ✓
13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	13.666.666,66 ✓
14	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	941.755.202,41 ✓
15	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2.415.994,00
	TOTAL	4.465.183.977,54

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	2.822.526.626,00	2.367.468.108,00

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp1.696.484.854,00, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2018 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.

- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp639.268.199,00 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2018 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang Dana Desa sebesar Rp230.318.600,00, merupakan Dana Desa tahun 2018 yang belum disalurkan ke Desa.
- Utang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas penerimaan jaminan Jasa Bongkar untuk 14 Reklame sebesar Rp96.990.800,00 dan menara 19 Telekomunikasi sebesar Rp159.464.173,00 = Rp256.454.994,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(d) Utang Belanja	22.846.527.974,46	11.576.030.695,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp22.846.527.974,46 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp7.799.656.940,00, utang belanja jasa Rp11.834.450.767,46, utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp12.763.600,00, utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp39.806.250,00 dan utang belanja bantuan sebesar Rp146.655.763,00 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 185 Rincian Utang Belanja Tahun 2018

No	Jenis Utang	31 Des 2017	Penambahan 2018	Pengurangan 2018	31 Des 2018
1	Utang Belanja Pegawai	7.773.966.811,00	7.799.656.940,00	7.773.966.811,00	7.799.656.940,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.787.354.884,00	14.847.645.421,46	3.787.354.884,00	11.834.450.767,46
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.709.000,00	12.763.600,00	14.709.000,00	12.763.600,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	-	39.806.250,00	-	39.806.250,00
5	Utang Belanja Bantuan	-	146.655.763,00	-	146.655.763,00
	Jumlah	11.576.030.695,00	22.846.527.974,46	11.576.030.695,00	22.846.527.974,46

(e) Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.799.656.940,00 merupakan kewajiban atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan non medis PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi di entitas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti RSUD dr. Haryoto dan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, serta kekurangan tambahan penghasilan pegawai yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2018.

Tabel 186 Rekap Utang Belanja Pegawai Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji dan Tunjangan	117.300.955,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	4.468.400.840,00
3	Honorarium pelayanan kesehatan (PNS)	2.531.313.624,00
4	Insentif Pemungutan Pajak	674.591.021,00
5	Lembur PNS	8.050.500,00
Jumlah		7.799.656.940,00

Tabel 187 Rincian Utang Gaji dan Tunjangan 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	75.412.124,00
2	Tunjangan keluarga	7.469.986,00
3	Tunjangan jabatan	6.095.000,00
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	5.765.239,00
5	Pembulatan gaji	9.564,00
6	Tunjangan fungsional	20.640.000,00
7	Tunjangan fungsional umum	1.360.000,00
8	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	114.522,00
9	Tunjangan beras	434.520,00
Jumlah		117.300.955,00

Tabel 188 Rincian Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2018

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	59.042.500,00
2	INSPEKTORAT KABUPATEN	90.436.669,00
3	KECAMATAN KILAKAH	30.758.293,00
4	DINAS PERDAGANGAN	130.808.398,00
5	DINAS SOSIAL	49.976.471,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	88.853.500,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	66.554.631,00
8	KECAMATAN SENDURO	34.182.970,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	73.097.014,00
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63.867.550,00
11	KECAMATAN PASRUJAMBE	36.708.000,00
12	KECAMATAN JATIROTO	24.301.000,00
13	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	34.416.315,00
14	KECAMATAN TEMPEH	29.840.450,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	192.650.904,00
16	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	262.658.804,00

No	Nama SKPD	Jumlah
17	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	75.337.375,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	61.457.875,00
19	DINAS PENDIDIKAN	596.562.588,00
20	KECAMATAN PRONOJIWO	30.362.000,00
21	DINAS PERIKANAN	57.548.625,00
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	264.569.466,00
23	DINAS KESEHATAN	184.524.629,00
24	DINAS KESEHATAN	26.888.179,00
25	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	56.792.150,00
26	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45.909.605,00
27	KECAMATAN TEKUNG	30.589.573,00
28	DINAS KETAHANAN PANGAN	52.663.435,00
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	152.186.730,00
30	KECAMATAN CANDIPURO	32.487.815,00
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62.989.337,00
32	KECAMATAN KUNIR	22.784.706,00
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	97.439.244,00
34	KECAMATAN PASIRIAN	37.239.525,00
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.648.773,00
36	SEKRETARIAT DPRD	60.124.275,00
37	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	32.768.635,00
38	KECAMATAN GUCIALIT	42.797.690,00
39	KECAMATAN LUMAJANG	117.097.238,00
40	KECAMATAN SUKODONO	30.153.000,00
41	KECAMATAN SUMBERSUKO	25.385.900,00
42	KECAMATAN TEMPURSARI	30.305.000,00
43	KECAMATAN RANUYOSO	28.585.500,00
44	KECAMATAN RANDUAGUNG	27.818.043,00
45	DINAS TENAGA KERJA	72.586.348,00
46	DINAS PERHUBUNGAN	164.345.036,00
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	104.167.500,00
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	41.248.525,00
49	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	81.112.520,00
50	DINAS PERTANIAN	308.143.306,00
51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	46.144.619,00
52	KECAMATAN YOSOWILANGUN	28.437.461,00
53	KECAMATAN PADANG	31.045.145,00
Total		4.468.400.840,00

f

Tabel 189 Rincian Utang Honorarium pelayanan kesehatan 2018

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	65.206.971,00
2	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	39.875.322,00
3	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	53.637.028,00
4	RSUD PASIRIAN	531.797.892,00
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	69.493.630,00
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	72.616.534,00
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	52.860.893,00
8	DINAS KESEHATAN	127.050.000,00
9	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	191.539.080,00
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	30.647.219,00
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	58.573.359,00
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	71.471.922,00
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	130.721.842,00
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	138.519.350,00
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	97.206.980,00
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	61.902.287,00
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	125.918.628,00
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	78.103.737,00
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	78.282.224,00
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	150.115.949,00
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	54.859.363,00
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	63.726.060,00
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	23.280.522,00
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	56.051.768,00
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	53.984.364,00
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	53.870.700,00
Total		2.531.313.624

Tabel 190 Rincian Utang Insentif Pemungutan Pajak 2018

No	Uraian	Jumlah
1	BPRD - Insentif pemungutan pajak hotel	10.567.826,00
2	BPRD - Insentif pemungutan pajak restoran	32.895.529,00
3	BPRD - Insentif pemungutan pajak hiburan	1.211.778,00
4	BPRD - Insentif pemungutan pajak reklame	11.261.060,00
5	BPRD - Insentif pemungutan pajak penerangan jalan	297.413.751,00
6	BPRD - Insentif pemungutan pajak air tanah	613.116,00
7	BPRD - Insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	64.943.365,00
8	BPRD - Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	143.297.124,00
9	BPRD - Insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	112.387.472,00
Total		674.591.021,00

Tabel 191 Rincian Utang Lembur 2018

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	8.050.500,00
	Total	8.050.500,00

(f) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.847.395.421,46 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima oleh entitas di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Tabel 192 Rekap Utang Barang dan Jasa Tahun 2018

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Utang belanja listrik	1.949.620.877,00
2	Utang belanja telepon	44.817.930,00
3	Utang belanja air	52.711.765,00
4	Utang belanja surat kabar/majalah	3.659.000,00
5	Utang belanja kawat/faksimili/internet	214.982.010,00
6	Utang belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	724.804.820,76
7	Utang belanja bahan obat-obatan	944.750.823,70
8	Utang belanja jasa pengolahan limbah medis	179.564.000,00
9	Utang belanja retribusi pelayanan persampahan	50.000,00
10	Utang belanja makanan dan minuman rapat	4.665.000,00
11	Utang belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.425.000,00
12	Utang belanja perjalanan dinas luar daerah	176.469.870,00
13	Utang belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	525.000,00
14	Utang belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	1.118.882,00
15	Utang belanja premi asuransi ketenagakerjaan	57.377,00
16	Utang belanja bahan bakar minyak dan pelumas	1.402.334,00
17	Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.241.536.677,00
18	Utang belanja STNK kendaraan dinas/operasional	7.456.500,00
19	Utang belanja jasa konsultasi pengawasan	49.802.000,00
20	Utang belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	41.191.650,00
21	Utang belanja Penggantian Pengolahan Darah	16.200.000,00
22	Utang belanja pengisian tabung gas	75.625.000,00
23	Utang belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	875.000,00
24	Utang belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	41.410,00
25	Utang belanja pajak air tanah	323.595,00
26	utang belanja pemeliharaan alat kedokteran umum	800.000,00
27	Utang belanja makanan dan minuman pasien	83.638.000,00
28	Utang Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	26.280.900,00
	Total	14.847.395.421,46

Tabel 193 Utang Belanja Listrik

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.949.332,00
2	DINAS PERDAGANGAN	18.371.682,00
3	DINAS SOSIAL	3.945.902,00
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.746.500,00
5	KECAMATAN KLAKAH	653.752,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.016.044,00

No	Nama SKPD	Jumlah
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.120.222,00
8	KECAMATAN JATIROTO	2.789.496,00
9	KECAMATAN PASRUJAMBE	672.145,00
10	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	266.390,00
11	KECAMATAN TEMPEH	2.536.623,00
12	KECAMATAN CANDIPURO	57.753,00
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	1.786.814,00
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	465.288,00
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	1.990.362,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.655.665,00
17	DINAS PERIKANAN	6.917.311,00
18	DINAS KESEHATAN	16.410.401,00
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3.774.964,00
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	1.077.452,00
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.943.103,00
22	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	8.694.700,00
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	4.882.329,00
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.217.743,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12.854.466,00
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	779.447,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.869.681,00
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	12.328.283,00
29	RSUD PASIRIAN	30.982.723,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.926.500,00
31	DINAS PENDIDIKAN	13.391.437,00
32	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	7.225.520,00
33	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	1.208.478,00
34	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	3.686.038,00
35	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLARAGA	1.013.984,00
36	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.474.129,00
37	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	16.000,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.263.388,00
39	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	11.526.073,00
40	KECAMATAN KUNIR	1.978.385,00
41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.176.286,00
42	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	620.396,00
43	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	742.204,00
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.020.400,00
45	SEKRETARIAT DPRD	9.951.289,00
46	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	394.440,00
47	KECAMATAN GUCIALIT	734.451,00
48	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	2.065.300,00
49	KECAMATAN SUKODONO	987.540,00
50	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	5.393.904,00
51	KECAMATAN SUMBERSUKO	988.746,00
52	KECAMATAN TEMPURSARI	896.659,00
53	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	73.275.313,00
54	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	194.160,00
55	KECAMATAN RANUYOSO	1.085.567,00
56	KECAMATAN RANDUAGUNG	1.309.977,00
57	DINAS TENAGA KERJA	1.664.833,00
58	DINAS PERHUBUNGAN	1.338.660.234,00
59	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	2.049.810,00
60	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	1.180.894,00

No	Nama SKPD	Jumlah
61	RSUD dr. HARYOTO	168.535.800,00
62	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	37.805.416,00
63	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.978.250,00
64	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	1.218.940,00
65	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	237.089,00
66	KECAMATAN YOSOWILANGUN	1.452.630,00
67	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	1.201.085,00
68	KECAMATAN PADANG	1.806.589,00
69	KECAMATAN SENDURO	495.993,00
70	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	660.600,00
71	DINAS PERTANIAN	15.519.480,00
72	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	3.534.531,00
73	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	1.315.566,00
Total		1.949.620.877,00

Tabel 194 Utang Bahan Obat-obatan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	110.473.133,00
2	RSUD dr. HARYOTO	834.277.690,70
Total		944.750.823,70

Tabel 195 Utang Telepon

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150.375,00
2	INSPEKTORAT KABUPATEN	492.185,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.653.484,00
4	DINAS PERDAGANGAN	97.950,00
5	DINAS SOSIAL	148.516,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	558.400,00
7	KECAMATAN KLAKAH	42.160,00
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	308.757,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	114.485,00
10	KECAMATAN JATIROTO	31.985,00
11	KECAMATAN PASRUJAMBE	51.994,00
12	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	47.160,00
13	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	90.752,00
14	KECAMATAN CANDIPURO	31.160,00
15	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	289.360,00
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	513.672,00
17	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	543.092,00
18	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	38.475,00
19	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	154.800,00
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	47.160,00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71.320,00
22	DINAS PERIKANAN	134.650,00
23	DINAS KESEHATAN	904.843,00
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	151.523,00
25	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	47.660,00
26	KECAMATAN PRONOJIWO	73.335,00
27	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	86.164,00
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	74.280,00
29	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	308.790,00
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	314.635,00

No	Nama SKPD	Jumlah
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	450.000,00
32	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	307.118,00
33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.283.041,00
34	RSUD PASIRIAN	2.327.694,00
35	DINAS PENDIDIKAN	545.897,00
36	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	58.000,00
37	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	46.940,00
38	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	388.659,00
39	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAH RAGA	72.025,00
40	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	154.133,00
41	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75.269,00
42	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	54.972,00
43	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	31.160,00
44	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	97.755,00
45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	213.168,00
46	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	63.356,00
47	KECAMATAN PASIRIAN	234.913,00
48	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	33.030,00
49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	929.550,00
50	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	97.533,00
51	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	30.160,00
52	KECAMATAN GUCIALIT	50.608,00
53	KECAMATAN LUMAJANG	165.000,00
54	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	13.000,00
55	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	1.110.180,00
56	KECAMATAN SUMBERSUKO	72.103,00
57	KECAMATAN TEMPURSARI	561.660,00
58	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	130.610,00
59	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	18.733.136,00
60	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	72.453,00
61	KECAMATAN RANUYOSO	206.698,00
62	DINAS TENAGA KERJA	36.160,00
63	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	76.741,00
64	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	61.925,00
65	RSUD dr. HARYOTO	2.872.699,00
66	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	904.754,00
67	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.907.400,00
68	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	31.160,00
69	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	58.605,00
70	KECAMATAN YOSOWILANGUN	163.064,00
71	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	361.044,00
72	KECAMATAN PADANG	350.000,00
73	KECAMATAN SENDURO	30.935,00
74	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	94.300,00
75	DINAS PERTANIAN	476.445,00
76	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	477.204,00
77	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	25.660,00
78	SEKRETARIAT DPRD	298.930,00
79	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	246.277,00
80	DINAS PERHUBUNGAN	312.059,00
Total		44.968.305,00

No	Nama SKPD	Jumlah
42	DINAS PENDIDIKAN	5.510.087,00
43	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	435.000,00
44	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	594.000,00
45	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	275.000,00
46	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	465.800,00
47	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.416.300,00
48	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	360.000,00
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.105.000,00
50	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	572.000,00
51	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	1.118.512,00
52	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.964.250,00
53	KECAMATAN KUNIR	541.505,00
54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.066.000,00
55	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	703.421,00
56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	661.000,00
57	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	704.000,00
58	KECAMATAN PASIRIAN	487.871,00
59	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	721.500,00
60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.046.750,00
61	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	767.800,00
62	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	750.000,00
63	KECAMATAN GUCIALIT	1.370.800,00
64	KECAMATAN LUMAJANG	1.852.906,00
65	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	574.750,00
66	KECAMATAN SUKODONO	759.935,00
67	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	1.145.700,00
68	KECAMATAN SUMBERSUKO	1.210.000,00
69	KECAMATAN TEMPURSARI	572.000,00
70	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	998.500,00
71	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	535.745,00
72	KECAMATAN RANUYOSO	1.553.000,00
73	KECAMATAN RANDUAGUNG	842.948,00
74	DINAS TENAGA KERJA	894.748,00
75	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	1.035.800,00
76	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	577.739,00
77	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	503.000,00
78	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	548.300,00
79	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	578.168,00
80	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.158.999,00
81	KECAMATAN YOSOWILANGUN	1.383.986,00
82	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	1.075.800,00
83	KECAMATAN PADANG	2.017.250,00
84	KECAMATAN SENDURO	1.306.800,00
85	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	313.500,00
86	DINAS PERTANIAN	14.604.950,00
87	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	457.000,00
88	SEKRETARIAT DPRD	1.086.000,00
89	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	780.000,00
90	DINAS PERHUBUNGAN	2.987.443,00
91	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7.680.820,00
92	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.328.500,00
Total		214.982.010,00

Tabel 199 Utang Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	183.986.530,00
2	RSUD dr. HARYOTO	540.818.290,76
Total		724.804.820,76

Tabel 200 Utang belanja jasa pengolahan limbah medis

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	179.564.000,00
Total		179.564.000,00

Tabel 201 Utang retribusi pelayanan persampahan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	50.000,00
Total		50.000,00

Tabel 202 Utang belanja makanan dan minuman rapat

No	Nama SKPD	Jumlah
1	KECAMATAN CANDIPURO	2.000.000,00
2	RSUD dr. HARYOTO	2.665.000,00
Total		4.665.000,00

Tabel 203 Utang perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	600.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	1.100.000,00
3	RSUD dr. HARYOTO	2.100.000,00
4	DINAS KESEHATAN	625.000,00
Total		4.425.000,00

Tabel 204 Utang perjalanan dinas luar daerah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.701.000,00
2	KECAMATAN CANDIPURO	700.000,00
3	RSUD PASIRIAN	20.518.816,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.695.354,00
5	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	89.184.300,00
6	RSUD dr. HARYOTO	5.965.500,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	19.654.900,00
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.050.000,00
Total		176.469.870,00

Tabel 205 Utang belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	525.000,00
Total		525.000,00

Tabel 206 Utang belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	1.118.882,00
Total		1.118.882,00

Tabel 207 Utang belanja premi asuransi ketenagakerjaan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	57.377,00
Total		57.377,00

Tabel 208 Utang belanja bahan bakar minyak dan pelumas

No	Nama SKPD	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	1.402.334,00
	Total	1.402.334,00

Tabel 209 Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	77.887.119,00
2	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	65.180.966,00
3	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	91.159.074,00
4	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	70.707.423,00
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	52.022.647,00
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	133.619.370,00
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	74.984.588,00
8	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	62.445.858,00
9	RSUD PASIRIAN	1.891.542.725,00
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	59.238.621,00
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	244.295.982,00
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	117.974.650,00
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	70.229.410,00
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	40.448.473,00
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	126.579.132,00
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	101.663.958,00
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	68.585.251,00
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	61.193.117,00
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	96.450.930,00
20	RSUD dr. HARYOTO	3.284.624.061,00
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	41.171.001,00
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	40.662.345,00
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	42.739.590,00
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	113.003.073,00
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	146.270.065,00
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	53.912.594,00
27	RSUD dr. HARYOTO	3.012.944.654,00
	Total	10.241.536.677,00

Tabel 210 Utang belanja STNK kendaraan dinas/operasional

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS SOSIAL	897.000,00
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	6.559.500,00
	Total	7.456.500,00

Tabel 211 Utang belanja jasa konsultasi pengawasan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.802.000,00
	Total	49.802.000,00

Tabel 212 Utang belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS PERHUBUNGAN	41.191.650,00
	Total	41.191.650,00

Tabel 213 Utang belanja Penggantian Pengolahan Darah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	16.200.000,00
	Total	16.200.000,00

Tabel 214 Utang belanja pengisian tabung gas

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	75.625.000,00
	Total	75.625.000,00

Tabel 215 Utang belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD PASIRIAN	875.000,00
	Total	875.000,00

Tabel 216 Utang belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD Haryoto	41.410,00
	Total	41.410,00

Tabel 217 Utang belanja pajak air tanah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD Haryoto	323.595,00
	Total	323.595,00

Tabel 218 Utang belanja pemeliharaan alat kedokteran umum

No	Nama SKPD	Jumlah
1	RSUD dr. HARYOTO	800.000,00
	Total	800.000,00

Tabel 219 Utang belanja makanan dan minuman pasien

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	3.213.000,00
2	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	15.048.000,00
3	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGAJANG	4.680.000,00
4	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	11.880.000,00
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	8.455.000,00
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	4.036.500,00
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	4.902.000,00
8	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	2.760.000,00
9	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	4.270.500,00
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	10.998.000,00
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	4.260.000,00
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	9.135.000,00
	Total	83.638.000,00

Tabel 220 Utang belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN	26.280.900,00
	Total	26.280.900,00
	TOTAL (KESELURUHAN)	14.847.395.421,46

(g) Utang Belanja Modal

Saldo utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.763.600,00 merupakan utang belanja modal alat-alat kedokteran umum (RSUD Pasirian) tahun 2018 yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi dan utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.806.250,00.

(h) **Utang Belanja Bantuan**

Saldo utang belanja bantuan sebesar Rp146.655.763,00 merupakan tagihan Jamkesda TA 2018 yang belum terbayar namun belum disajikan sebagai hutang.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemerintah kabupaten Lumajang tidak memiliki kewajiban/utang jangka panjang.

1) **EKUITAS**

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Ekuitas	2.355.220.862.873,40	2.412.426.669.702,81

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 221 Daftar Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Jumlah Aset	2.385.355.101.451,40	2.430.593.260.202,58
2	Jumlah Kewajiban	30.134.238.578,00	18.166.590.499,77
3	Ekuitas (1-2)	2.355.220.862.873,40	2.412.426.669.702,81

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 222 Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Ekuitas Awal	2.412.426.669.702,81	2.179.631.572.503,94
2	Surplus (Defisit) LO	163.490.200.401,63	82.367.632.051,15
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	(220.696.007.231,04)	150.427.465.147,72
4	EKUITAS AKHIR	2.355.220.862.873,40	2.412.426.669.702,81

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

A. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali. Pendapatan LO meliputi Pendapatan Asli Daerah LO ; Pendapatan Transfer LO dan Lain-lain pendapatan yang sah LO.

	31 Desember 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	287.430.678.007,40	252.388.310.062,15
PAD - LO terdiri dari :		
- Pajak Daerah	69.390.391.576,00	56.550.143.302,00
- Retribusi Daerah	48.436.237.446,05	33.902.138.964,23
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.154.457.009,40	7.167.324.970,78
- Lain-lain PAD yang sah	163.449.591.975,95	154.768.702.825,14
Jumlah PAD - LO	287.430.678.007,40	252.388.310.062,15

Pendapatan Asli Daerah LO terinci sebagai berikut :

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.1 Pendapatan Pajak Daerah LO	69.390.391.576,00	56.550.143.302,00

Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut.

Tabel 223 Daftar Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Pajak Daerah	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1	Pajak Hotel	824.407.778,00	650.826.073,00
2	Pajak Restoran	4.680.983.446,00	2.200.676.368,00
3	Pajak Hiburan	91.451.350,00	62.455.000,00
4	Pajak Reklame	1.641.943.305,00	797.405.361,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.796.510.887,00	18.925.372.352,00
6	Pajak Parkir	168.494.200,00	168.690.400,00
7	Pajak Air Tanah	98.222.257,00	31.960.106,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.482.562.500,00	6.661.368.400,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.792.168.494,00	13.249.530.485,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.813.647.359,00	6.168.593.970,00
	Jumlah	69.390.391.576,00	48.916.878.515,00

Tabel 224 Daftar Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Per 31 Desember 2018

No	Pajak Daerah	Pendapatan Pajak LRA	Pajak 2018 Belum Diterima	Pendapatan Pajak Diterima di muka	Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu	Pendapatan LO
1	2	3	4		5	6=3+4-5
1	Pajak Hotel	824.407.778,00				824.407.778,00
2	Pajak Restoran	4.680.983.446,00				4.680.983.446,00
3	Pajak Hiburan	91.451.350,00				91.451.350,00
4	Pajak Reklame	1.611.428.122,00	42.262.713,00		(11.747.530,00)	1.641.943.305,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.658.935.797,00	2.258.052.320,00		(2.120.477.230,00)	25.796.510.887,00
6	Pajak Parkir	168.494.200,00				168.494.200,00
7	Pajak Air Tanah	95.584.180,00	2.638.448,00		(371,00)	98.222.257,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.482.562.500,00				9.482.562.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.310.838.058,00	2.915.826.256,00	(2.415.994,00)	(432.079.826,00)	13.792.168.494,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.813.647.359,00				12.813.647.359,00
	Jumlah	66.738.332.790,00	5.218.779.737,00	(2.415.994,00)	(2.564.304.957,00)	69.390.391.576,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah LO	48.436.237.446,05	33.902.138.964,23

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 terinci sebagai berikut.

Tabel 225 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2017 dan 2016

No	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO	2018	2017
1	Retribusi Jasa Umum	42.313.095.403,80	26.150.321.604,45
	Retribusi pelayanan kesehatan	28.182.469.394,00	12.728.984.570,00
	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	796.175.000,00	944.400.000,00
	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	4.839.808.791,71	4.763.072.333,29
	Retribusi pelayanan pasar	7.122.453.476,42	6.442.693.701,16
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	1.282.222.500,00	1.218.470.000,00
	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	0,00	52.701.000,00
	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	89.966.241,67	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.203.798.689,25	4.109.695.482,53
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	665.496.789,25	665.738.882,53
	Retribusi terminal	112.678.900,00	113.110.600,00
	Retribusi tempat khusus parkir	25.190.000,00	24.015.000,00
	Retribusi rumah potong hewan	268.125.000,00	228.770.000,00

No	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LO	2018	2017
	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	3.132.308.000,00	3.078.061.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.919.343.353,00	3.642.121.877,25
	Retribusi ijin mendirikan bangunan	1.905.703.353,00	2.168.470.911,25
	Retribusi ijin gangguan/keramaian	0,00	1.461.330.966,00
	Retribusi ijin trayek	13.640.000,00	12.320.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah LO	48.436.237.446,05	33.902.138.964,23

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	28.182.469.394,00	12.728.984.570,00

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 (Dinas Kesehatan), terincian sebagai berikut.

Jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LRA 24.248.843.717,00

Dikurangi :

- Penerimaan klaim dana JKN Non Kapitasi kepada BPJS tahun 2017 (865.839.676,00) yang diterima di tahun 2018 (penerimaan piutang)
- Piutang Non Kapitasi (klaim BPJS) pada RSUD Pasirian sebesar (16.466.100,00) Rp16.466.100,00 sudah di terima di tahun 2018

Ditambah :

- Klaim Dana JKN Non Kapitasi kepada BPJS tahun 2018 yang sudah 3.853.866.453,00 mendapatkan umpan balik tetapi s/d 31 Desember 2018 belum diterima
- Piutang Non Kapitasi (klaim BPJS) pada Puskesmas kurang catat 962.065.000,00 sebesar Rp962.065.000

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO 28.182.469.394,00

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan LO sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 226 Daftar Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan LO
Tahun 2018 dan 2017**

No	SKPD	Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA 31 Des. 2018	Retribusi Pelayanan Kesehatan 2018 Belum Diterima	Penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan LO 31 Des. 2018	Retribusi Pelayanan Kesehatan LO '31 Desember 2017
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7
1	PUSKESMAS TEMPURSARI	347.504.150,00	395.000,00	0,00	347.899.150,00	367.860.200,00
2	PUSKESMAS PRONOJIWO	238.056.800,00	12.839.500,00	1.399.800,00	249.496.500,00	320.207.900,00
3	PUSKESMAS CANDIPURO	135.298.550,00	34.347.300,00	3.624.400,00	166.021.450,00	233.131.200,00
4	PUSKESMAS PENANGGAL	122.392.500,00	4.319.900,00	2.799.700,00	123.912.700,00	130.536.500,00

No	SKPD	Retribusi Pelayanan Kesehatan LRA 31 Des. 2018	Retribusi Pelayanan Kesehatan 2018 Belum Diterima	Penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan LO 31 Des. 2018	Retribusi Pelayanan Kesehatan LO '31 Desember 2017
5	PUSKESMAS PASIRIAN	451.772.850,00	43.105.700,00	12.222.050,00	482.656.500,00	592.231.950,00
6	PUSKESMAS BADES	165.641.450,00	18.158.600,00	542.900,00	183.257.150,00	194.146.300,00
7	PUSKESMAS TEMPEH	364.649.900,00	57.537.600,00	26.003.450,00	396.184.050,00	429.495.000,00
8	PUSKESMAS GESANG	249.072.400,00	20.218.500,00	2.799.700,00	266.491.200,00	238.939.350,00
9	PUSKESMAS ROGOTRUMAN	272.800.500,00	39.951.900,00	12.377.600,00	300.374.800,00	313.717.400,00
10	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	234.311.300,00	33.558.000,00	14.110.700,00	253.758.600,00	282.067.000,00
11	PUSKESMAS TEKUNG	153.479.850,00	25.949.300,00	5.145.550,00	174.283.600,00	240.546.450,00
12	PUSKESMAS KUNIR	503.759.000,00	83.819.800,00	51.808.900,00	535.769.900,00	513.366.700,00
13	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	436.706.600,00	49.547.400,00	10.898.700,00	475.355.300,00	420.692.200,00
14	PUSKESMAS SUMBERSARI	308.737.350,00	49.426.200,00	8.459.100,00	349.704.450,00	397.293.200,00
15	PUSKESMAS JATIROTO	522.660.550,00	27.377.400,00	26.886.700,00	523.151.250,00	578.890.900,00
16	PUSKESMAS RANDUAGUNG	238.032.000,00	13.239.600,00	5.599.300,00	245.672.300,00	253.464.600,00
17	PUSKESMAS SUKODONO	332.074.600,00	62.371.500,00	5.335.200,00	389.110.900,00	448.470.000,00
18	PUSKESMAS PADANG	200.059.450,00	17.849.100,00	10.855.800,00	207.052.750,00	286.165.450,00
19	PUSKESMAS PASRUJAMBE	133.233.300,00	18.112.600,00	7.121.600,00	144.224.300,00	203.247.100,00
20	PUSKESMAS SENDURO	255.273.000,00	21.718.300,00	699.900,00	276.291.400,00	256.763.400,00
21	PUSKESMAS GUCIALIT	208.987.700,00	21.403.700,00	1.399.800,00	228.991.600,00	249.921.200,00
22	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	206.911.400,00	20.486.900,00	20.297.800,00	207.100.500,00	234.962.500,00
23	PUSKESMAS KLAKAH	458.458.850,00	3.769.700,00	40.241.100,00	421.987.450,00	529.942.700,00
24	PUSKESMAS RANUYOSO	277.334.900,00	50.040.400,00	13.598.500,00	313.776.800,00	377.964.400,00
25	PUSKESMAS TUNJUNG	203.689.250,00	27.972.800,00	6.999.000,00	224.663.050,00	254.550.900,00
26	LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	284.161.550,00	48.396.300,00		332.557.850,00	338.198.300,00
27	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	4.805.000,00			4.805.000,00	5.270.000,00
28	RSUD PASIRIAN	16.938.978.967,00	3.031.487.353,00	574.612.426,00	19.395.853.894,00	4.036.941.770,00
29	Piutang Non Kapitasi (klaim BPJS) pada Puskesmas kurang catat sebesar Rp962.065.000		962.065.000,00		962.065.000,00	
		24.248.843.717,00	4.799.465.353,00	865.839.676,00	28.182.469.394,00	12.728.984.570,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan LO	796.175.000,00	944.400.000,00

Pendapatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Lingkungan Hidup) masing-masing sebesar Rp796.175.000,00 dan Rp944.400.000,00. Pada akhir periode tidak ada hak atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang belum diterima atau diterima di muka.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	4.839.808.791,71	4.763.072.333,33

Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Perhubungan), terinci sebagai berikut.

Tabel 227 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017
Jumlah pendapatan retribusi Parkir di tepi jalan umum LRA	4.943.266.500,00	4.807.396.500,00
Dikurangi :		
Retribusi Parkir di tepi jalan umum berlangganan tahun berjalan yang belum menjadi hak (diterima di muka)	(2.384.101.041,67)	(2.280.643.333,34)
Ditambah :		
Saldo awal Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum berlangganan diterima di muka yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan	2.280.643.333,38	2.236.319.166,67
Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	4.839.808.791,71	4.763.072.333,33

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan Pasar LO	7.122.453.476,42	6.442.693.701,16

Pendapatan retribusi pelayanan Pasar LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Pasar), sebagai berikut.

Tabel 228 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA	7.315.318.533,75	6.969.885.232,50
Ditambah :		
1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2018 yang belum diterima	48.193.100,00	75.393.816,50
2. Pendapatan diterima di muka tahun lalu yang sudah menjadi pendapatan	173.753.012,92	
Dikurangi :		
1. Penerimaan Piutang Tahun lalu di tahun 2018	(300.250,00)	(7.542.959,50)
2. Pendapatan tahun berjalan diterima di muka	(414.510.920,25)	(595.042.388,34)
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO	7.122.453.476,42	6.442.693.701,16

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO	1.282.222.500,00	1.218.470.000,00

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang telah diterima dan menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Perhubungan) masing-masing Rp1.282.222.500,00 dan Rp1.218.470.000,00. Pada akhir tahun 2018 tidak ada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di terima di muka atau yang masih harus diterima.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi LO	00,00	52.701.000,00

Pada tahun 2018 retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dipungut, sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp52.701.000,00. Retribusi tersebut merupakan jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang sejak tahun 2017. Retribusi pengendalian menara di atur di dalam Perda Kabupaten Lumajang Nomor 01 tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi. Pada tahun 2018 pemungutan retribusi tersebut dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tetapi pemungutan belum dilaksanakan karena Perda belum dilakukan perubahan.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(7) Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang LO	89.966.241,67	0,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp89.966.241,67 dan Rp0,00. Retribusi tersebut merupakan jenis retribusi baru yang di pungut oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sejak tahun 2017 yang merupakan pelimpahan kewenangan jenis retribusi dari Pemerintah Propinsi.

Tabel 229 Rincian Pelayanan Tera / Tera Ulang LO Tahun 2018 dan 2017

Uraian	2018	2017
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LRA	161.997.200,00	20.184.600,00
<u>Ditambah :</u>		
Pendapatan diterima di muka tahun lalu yang sudah menjadi pendapatan	20.184.600,00	
<u>Dikurangi :</u>		
Pendapatan tahun berjalan diterima di muka	(92.215.558,33)	(20.184.600,00)
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar – LO	89.966.241,67	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	665.496.789,25	665.738.882,53

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut.

Tabel 230 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 dan 2017

No	SKPD	2018	2017
1	DINAS KESEHATAN		9.350.000,00
2	PUSKESMAS TEMPURSARI	324.000,00	324.000,00
3	PUSKESMAS PRONOJIWO	4.252.000,00	1.918.666,65

No	SKPD	2018	2017
4	PUSKESMAS CANDIPURO	356.000,00	356.000,00
5	PUSKESMAS PENANGGAL	72.000,00	72.000,00
6	PUSKESMAS PASIRIAN	234.000,00	234.000,00
7	PUSKESMAS BADES	0,00	90.000,00
8	PUSKESMAS TEMPEH	3.200.000,00	3.141.666,67
9	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	160.000,00	160.000,00
10	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	144.000,00	144.000,00
11	PUSKESMAS TEKUNG	288.000,00	288.000,00
12	PUSKESMAS KUNIR	4.108.000,00	1.774.666,65
13	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	3.708.000,00	3.624.666,66
14	PUSKESMAS SUMBERSARI	144.000,00	144.000,00
15	PUSKESMAS JATIROTO	360.000,00	270.000,00
16	PUSKESMAS RANDUAGUNG	4.000.000,00	1.766.666,65
17	PUSKESMAS SUKODONO	144.000,00	144.000,00
18	PUSKESMAS PADANG	216.000,00	216.000,00
19	PUSKESMAS PASRUJAMBE	144.000,00	144.000,00
20	PUSKESMAS SENDURO	336.000,00	336.000,00
21	PUSKESMAS GUCIALIT	822.000,00	822.000,00
22	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	224.000,00	224.000,00
23	PUSKESMAS KLAKAH	306.000,00	306.000,00
24	PUSKESMAS RANUYOSO	6.360.000,00	10.166.000,00
25	PUSKESMAS TUNJUNG	90.000,00	90.000,00
26	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	87.579.000,00	82.417.000,00
27	RSUD PASIRIAN	7.875.000,00	0,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	539.294.229,25	546.781.549,25
29	DINAS PERTANIAN	756.560,00	434.000,00
	Jumlah	665.496.789,25	665.738.882,53

Tabel 231 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah LRA dan LO

No	SKPD	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA	Sewa tanah tahun 2018 belum diterima	Pendapatan diterima di muka Tahun Lalu	Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Pendapatan Diterima dimuka Tahun Berjalan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5-6
1	PUSKESMAS TEMPURSARI	324.000,00					324.000,00
2	PUSKESMAS PRONOJIWO	4.252.000,00		2.333.333,35		(2.333.333,35)	4.252.000,00
3	PUSKESMAS CANDIPURO	356.000,00					356.000,00
4	PUSKESMAS PENANGGAL	72.000,00					72.000,00
5	PUSKESMAS PASIRIAN	234.000,00					234.000,00
6	PUSKESMAS BADES	0,00					0,00
7	PUSKESMAS TEMPEH	200.000,00		4.750.000,00		(1.750.000,00)	3.200.000,00
8	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	160.000,00					160.000,00
9	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	144.000,00					144.000,00
10	PUSKESMAS TEKUNG	288.000,00					288.000,00

No	SKPD	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA	Sewa tanah tahun 2018 belum diterima	Pendapatan diterima di muka Tahun Lalu	Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Pendapatan Diterima dimuka Tahun Berjalan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5-6
11	PUSKESMAS KUNIR	4.108.000,00		2.333.333,35		(2.333.333,35)	4.108.000,00
12	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	708.000,00		5.500.000,00		(2.500.000,00)	3.708.000,00
13	PUSKESMAS SUMBERSARI	144.000,00					144.000,00
14	PUSKESMAS JATIROTO	360.000,00					360.000,00
15	PUSKESMAS RANDUAGUNG	4.000.000,00		2.333.333,35		(2.333.333,35)	4.000.000,00
16	PUSKESMAS SUKODONO	144.000,00					144.000,00
17	PUSKESMAS PADANG	216.000,00					216.000,00
18	PUSKESMAS PASRUJAMBE	144.000,00					144.000,00
19	PUSKESMAS SENDURO	336.000,00					336.000,00
20	PUSKESMAS GUCIALIT	822.000,00					822.000,00
21	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	376.000,00				(152.000,00)	224.000,00
22	PUSKESMAS KLAKAH	306.000,00					306.000,00
23	PUSKESMAS RANUYOSO	360.000,00		8.500.000,00		(2.500.000,00)	6.360.000,00
24	PUSKESMAS TUNJUNG	90.000,00					90.000,00
25	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	87.579.000,00					87.579.000,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	465.417.438,00	202.818.879,25		(128.942.088,00)		539.294.229,25
27	DINAS PERTANIAN	756.560,00					756.560,00
28	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	180.000,00			(180.000,00)		0,00
	RSUD PASIRIAN			7.875.000,00			7.875.000,00
	Jumlah	572.076.998,00	202.818.879,25	33.625.000,05	(129.122.088,00)	(13.902.000,05)	665.496.789,25

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(9) Retribusi Terminal LO	112.678.900,00	113.110.600,00

Pendapatan retribusi terminal LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Perhubungan), masing-masing sebesar Rp112.678.900,00 dan Rp113.110.600,00. Pada akhir tahun 2018 dan 2017 tidak ada retribusi terminal diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(10) Retribusi Tempat Khusus Parkir LO	25.190.000,00	24.015.000,00

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Perhubungan) masing-masing sebesar Rp25.190.000,00 dan Rp24.015.000,00

Tidak ada perbedaan antara Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA dan LO tahun 2018 dan 2017

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(11) Retribusi rumah potong hewan LO	268.125.000,00	228.770.000,00

Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Pertanian), masing sebesar Rp268.125.000,00 dan Rp228.770.000,00.

Tidak ada perbedaan antara pendapatan retribusi rumah potong hewan LRA dan LO tahun 2018 dan 2017.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(12) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO	3.132.308.000,00	3.078.061.000,00

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut.

**Tabel 232 Daftar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga LO
per 31 Desember 2018 dan 2017**

No	SKPD	2018	2017
1	Pemandian alam Selokambang	1.757.609.000,00	1.612.789.000,00
2	Kawasan Wonorejo Terpadu/KWT	784.440.000,00	743.050.000,00
3	Segitiga Ranu	150.336.000,00	145.080.000,00
4	Pantai bambang	0,00	24.000.000,00
5	Pantai Wot Galih	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Pantai Tempursari	8.316.000,00	35.225.000,00
7	Goa Tetes	4.875.000,00	9.395.000,00
8	Tumpak Sewu	5.000.000,00	0,00
9	B 29	16.555.000,00	10.000.000,00
10	Watu Pecak	0,00	0,00
11	Pantai Dampar	0,00	0,00
12	Kolam Renang Veteran	99.934.000,00	97.988.000,00
13	Stadion Semeru	64.683.000,00	140.609.000,00
14	Sewa GOR Wira Bakti	71.060.000,00	69.925.000,00
15	Sewa Gedung	159.500.000,00	180.000.000,00
	Jumlah	3.132.308.000,00	3.078.061.000,00

Pada akhir tahun 2018 dan 2017 tidak ada retribusi tempat rekreasi dan olah raga diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)- LO	1.905.703.353,00	2.168.470.911,25

Pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.905.703.353,00 dan Rp2.168.470.911,25.

Tabel 233 Daftar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan LO Per 31 Desember 2018 dan 2017

Keterangan	2018	2017
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – LRA	1.905.703.353,00	2.342.448.198,00
Ditambah : SKRD tahun berjalan yang belum diterima	0,00	0,00
Dikurangi :		
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	0,00	(173.977.286,75)
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – LO	1.905.703.353,00	2.168.470.911,25

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Gangguan LO	0,00	1.461.330.966,00

Mulai tahun 2018 Pemerintah Daerah tidak memungut retribusi ijin gangguan karena tidak diperkenankan peraturan perundang-undangan. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp1.461.330.966,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 234 Daftar Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian LO Per 31 Desember 2018 dan 2017

Keterangan	2018	2017
Retribusi Ijin Gangguan – LRA	0,00	1.222.185.853,00
Ditambah : SKRD tahun berjalan yang belum diterima	0,00	242.387.455,00
Dikurangi :		
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	0,00	(3.242.342,00)
Retribusi Ijin Gangguan – LO	0,00	1.461.330.966,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(15) Retribusi Ijin Trayek LO	13.640.000,00	12.320.000,00

Pendapatan retribusi ijin trayek LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dinas Perhubungan) masing-masing sebesar Rp13.640.000,00 dan Rp12.320.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2018 dan 2017 tidak ada pendapatan ijin trayek yang belum di terima atau diterima di muka.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.154.457.009,40	7.167.324.970,78

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut.

Tabel 235 Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Penerimaan Dividen PT. Bank Jatim	2.963.786.584,50	2.932.871.803,80
2	Penerimaan Dividen PT. BPR Jatim	56.603.000,00	50.483.000,00
3	Penerimaan Bagian Laba PD. BPR Bank Pasar	0,00	0,00
4	Penerimaan Bagian Laba PDAM	2.735.751.911,93	0,00
5	Penerimaan Bagian Laba PD. Semeru	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan - LRA	5.756.141.496,43	2.983.354.803,80
6	Laba (Rugi) PD. BPR Bank Pasar	511.127.423,00	553.563.629,00
7	Laba (Rugi) PDAM	3.158.145.780,03	3.913.998.830,80
8	Laba (Rugi) PD. SEMERU	(535.205.778,13)	(283.562.292,82)
9	Penerimaan Bagian Laba PDAM	(2.735.751.911,93)	
	Jumlah Pendapatan - LO	6.154.457.009,40	7.167.354.970,78

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	163.449.591.975,95	154.768.702.825,14

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut.

Tabel 236 Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2018	2017
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	284.580.000,00	292.026.000,00
	Penjualan drum bekas	45.810.000,00	34.140.000,00
	Penjualan hasil pertanian	54.480.000,00	95.181.000,00
	Penjualan hasil perkebunan	60.140.000,00	52.805.000,00
	Penjualan hasil perikanan	124.150.000,00	109.900.000,00
	Penerimaan Jasa Giro	2.584.705.300,61	3.195.579.844,53
	Jasa giro kas daerah	2.334.306.560,87	2.890.409.490,80
	Jasa giro bendahara pengeluaran	90.262.324,45	92.177.999,53
	Jasa giro pengeluaran daerah	121.078.736,36	159.143.945,56
	Jasa giro penerimaan daerah	233.075,48	2.063.744,19
	Jasa Giro Dana Cadangan	38.824.603,45	51.784.664,45
2	Pendapatan Bunga Deposito	8.231.701.337,69	11.952.547.537,92

No	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2018	2017
	Rekening deposito pada Bank Jatim	4.110.445.205,37	5.225.171.232,72
	Rekening deposito pada Bank BRI	2.771.685.016,00	2.699.418.078,00
	Rekening deposito pada Bank BNI	0,00	1.716.301.378,00
	Rekening deposito pada Bank Mandiri	236.301.369,84	282.082.191,78
	Deposito Dana Cadangan	1.113.269.746,48	2.029.574.657,42
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.493.000,00	14.945.000,00
	Kerugian barang daerah	30.493.000,00	14.945.000,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	410.133.618,00	289.622.782,00
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	410.133.618,00	289.622.782,00
5	Pendapatan Denda Pajak	183.957.597,00	134.918.240,00
	Pendapatan denda pajak hotel	35.810,00	330.920,00
	Pendapatan denda pajak restoran	31.854.701,00	17.263.638,00
	Pendapatan denda pajak hiburan	6.000,00	
	Pendapatan denda pajak reklame	499.148,00	4.321.779,00
	Pendapatan denda pajak parkir	133.320,00	36.088,00
	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	188.367,00	37.824,00
	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan	6.429.025,00	
	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan	104.397.798,00	112.927.991,00
	Pendapatan denda BPHTB	40.413.428,00	
6	Pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan	99.850.000,00	67.629.750,00
	Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan-LO	99.850.000,00	67.629.750,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.042.584.535,26	3.043.308.961,84
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	969.047,00	
	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun lalu	1.041.615.488,26	3.043.308.961,84
8	Pendapatan dari BLUD	110.110.106.058,71	98.637.639.430,00
	Pendapatan dari BLUD RSUD dr. Haryoto	110.110.106.058,71	94.928.379.110,00
	Pendapatan dari BLUD Akper Pemkab Lumajang	0,00	3.709.260.320,00
9	Pendapatan Sewa	1.430.935.014,26	1.167.775.344,56
	Pendapatan Sewa Tanah	1.187.216.214,26	993.935.644,56
	Pendapatan Sewa Bangunan	243.718.800,00	173.839.700,00
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.923.924.375,00	33.954.927.800,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempursari	761.014.675,00	792.244.900,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pronojiwo	1.139.132.700,00	1.085.001.150,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Candipuro	1.449.694.350,00	1.161.734.400,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penanggal	747.268.000,00	634.676.250,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasirian	1.903.043.550,00	1.677.399.600,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bades	998.482.750,00	1.086.690.500,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempeh	2.184.861.450,00	2.028.701.550,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gesang	910.318.700,00	1.049.745.200,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rogotrunan	2.428.290.000,00	2.376.450.600,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Labruk Kidul	981.528.300,00	857.332.500,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tekung	851.307.650,00	736.302.000,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kunir	2.139.072.000,00	1.873.678.200,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Yosowilangun	1.841.187.650,00	1.737.065.400,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Summersari	1.451.534.700,00	1.384.157.300,00

No	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2018	2017
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiroto	1.982.410.800,00	1.843.191.300,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Randuagung	1.753.272.300,00	1.450.640.400,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukodono	1.633.428.600,00	1.571.998.800,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Padang	1.195.446.975,00	1.147.959.900,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasrujambe	780.434.500,00	616.694.000,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Senduro	1.402.053.150,00	1.346.950.650,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gucialit	1.066.777.650,00	949.518.150,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedungjajang	1.881.868.200,00	1.802.109.150,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Klakah	2.416.322.950,00	1.995.560.850,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranuyoso	2.219.402.475,00	1.976.837.850,00
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tunjung	802.679.850,00	772.287.200,00
	Pendapatan Denda Sewa	2.623.800,00	2.110.000,00
	Pendapatan denda sewa bangunan	2.623.800,00	2.110.000,00
	Kklaim BPJS Puskesmas (pendapatan lain-lain PAD yang sah) 2018, diterima Februari 2019	3.090.450,00	
11	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	2.073.367.874,00	1.966.890.350,00
	Penerimaan lain-lain	2.073.367.874,00	1.966.890.350,00
12	Pendapatan Bunga BOS - LO	40.629.465,42	48.781.784,29
	Pendapatan Bunga BOS - LO	40.629.465,42	48.781.784,29
	JUMLAH Lain-laij PAD Yang Sah LO	163.449.591.975,95	154.768.702.825,14

Tabel 237 Lain-lain PAD yang sah LRA dan LO tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah LRA	152.867.850.896,05
DITAMBAH :	
1. Jasa giro dana cadangan	38.824.603,45
2. Deposito Dana Cadangan	1.113.269.746,48
3. Pendapatan BLUD diterima dimuka tahun 2017	142.550.000,00
4. Pendapatan BLUD 2018 belum diterima	20.018.670.154,71
5. Sewa tanah diterima di muka tahun 2017 :	
- Bagian Administrasi Pemerintahan	1.019.103.250,00
- Dinas Perdagangan	18.000.000,00
- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	21.743.125,00
- Dinas Pertanian	73.200.000,00
- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	6.992.500,00
- Dinas Pertanian	36.066.666,67
- BPKD	17.666.666,66
6. Kklaim BPJS Puskesmas (pendapatan lain-lain PAD yang sah) 2018, diterima Februari 2019	3.090.450,00
Jumlah Penambahan	22.509.177.162,97
DIKURANGI :	
1. Penerimaan Piutang BLUD tahun lalu (2017)	(10.720.878.589,00)
2. Pendapatan BLUD 2018 diterima dimuka	(99.825.000,00)
3. Sewa tanah 2018 diterima di muka :	
- Badan Pengelola Keuangan Daerah	(13.666.666,66)
- Bagian Administrasi Pemerintahan	(941.755.202,41)

Uraian	Jumlah (Rp)	
- Dinas Perdagangan	(14.000.000,00)	
- RSUD Pasirian	(4.375.000,00)	
- Dinas Pariwisata & Kebudayaan	(24.735.625,00)	
- Dinas Pertanian	(108.200.000,00)	
Jumlah Pengurangan		(11.927.436.083,07)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO		163.449.591.975,95

2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya.
- Pendapatan transfer Pemerintah Propinsi.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.394.987.991.826,00	1.336.910.334.683,00

Tabel 238 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LO
Tahun 2018 dan 2017

No	Dana Perimbangan	2018	2017
1	Bagi hasil pajak	46.307.043.974,00	41.171.585.576,00
2	Bagi hasil SDA	69.166.247.200,00	38.274.802.225,00
3	Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	306.661.771.652,00	284.611.017.882,00
	Jumlah	1.394.987.991.826,00	1.336.910.334.683,00

Tabel 239 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan LO

NO	Nama Akun	Pendapatan LRA 31 Desember 2018	Pendapatan Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun lalu	Pendapatan LO 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.390.713.615.483,00			1.394.970.085.795,00
1.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	111.198.914.831,00			115.455.385.143,00
1.1.1	Bagi Hasil Pajak	46.307.043.974,00			46.307.043.974,00
	Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	10.416.893.615,00	2.908.868.098,00		13.325.761.713,00
	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 21	13.058.711.641,00	957.488.415,00		14.016.200.056,00
	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, 29	2.104.157.174,00			2.104.157.174,00

NO	Nama Akun	Pendapatan LRA 31 Desember 2018	Pendapatan Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun lalu	Pendapatan LO 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	Bagi hasil cukai hasil tembakau	16.843.019.000,00			16.843.019.000,00
1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	68.776.133.401,00			69.166.247.200,00
	Bagi hasil sumber daya alam minyak bumi	62.568.101.586,00	4.758.355.924,00	(5.303.584.198,00)	62.022.873.312,00
	Bagi hasil sumber daya alam gas bumi	3.099.167.031,00	545.228.556,00		3.644.395.587,00
	Bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara	1.927.030.345,00	146.363.824,00	(135.913.870,00)	1.937.480.299,00
	Bagi hasil sumber daya alam kehutanan	449.395.854,00	280.478.892,00		729.874.746,00
	Bagi hasil sumber daya alam perikanan	701.234.591,00	99.184.671,00		800.419.262,00
	Bagi hasil sumber daya alam panas bumi	31.203.994,00			31.203.994,00
1.2	Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00			972.852.929.000,00
1.2.1	Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00			972.852.929.000,00
1.2.1.1	Dana alokasi umum	972.852.929.000,00			972.852.929.000,00
1.3	Dana Alokasi Khusus	306.661.771.652,00			306.661.771.652,00
1.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	43.795.352.405,00			43.795.352.405,00
1.3.1.1	DAK fisik reguler bidang pendidikan	10.019.451.300,00			10.019.451.300,00
1.3.1.2	DAK fisik reguler bidang kesehatan	15.309.007.905,00			15.309.007.905,00
1.3.1.4	DAK fisik reguler bidang perumahan dan permukiman	4.941.455.000,00			4.941.455.000,00
1.3.1.5	DAK fisik reguler bidang pertanian	4.013.623.000,00			4.013.623.000,00
	DAK fisik reguler bidang kelautan dan perikanan	1.125.403.500,00			1.125.403.500,00
1.3.1.6	DAK fisik reguler bidang pariwisata	2.872.243.000,00			2.872.243.000,00
	DAK fisik reguler bidang air minum	1.438.818.000,00			1.438.818.000,00
	DAK fisik reguler bidang sanitasi	1.624.350.000,00			1.624.350.000,00
	DAK fisik reguler bidang pasar	2.451.000.700,00			2.451.000.700,00
1.3.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	36.075.805.517,00			36.075.805.517,00
1.3.2.2	DAK fisik penugasan bidang air minum	5.782.154.000,00			5.782.154.000,00
1.3.2.3	DAK fisik penugasan bidang sanitasi	3.920.000.000,00			3.920.000.000,00

NO	Nama Akun	Pendapatan LRA 31 Desember 2018	Pendapatan Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun lalu	Pendapatan LO 31 Desember 2018
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1.3.2.4	DAK fisik penugasan bidang jalan	17.119.229.000,00			17.119.229.000,00
1.3.2.5	DAK fisik penugasan bidang pasar	3.101.441.600,00			3.101.441.600,00
1.3.2.6	DAK fisik penugasan bidang irigasi	4.649.465.000,00			4.649.465.000,00
	DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup & kehutanan	1.503.515.917,00			1.503.515.917,00
1.3.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	226.790.613.730,00			226.790.613.730,00
1.3.3.1	DAK non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD	21.241.464.225,00			21.241.464.225,00
1.3.3.2	DAK non fisik tunjangan profesi guru	180.551.378.800,00			180.551.378.800,00
1.3.3.3	DAK non fisik tambahan penghasilan guru	757.350.000,00			757.350.000,00
1.3.3.4	DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB	22.330.202.385,00			22.330.202.385,00
1.3.3.5	DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan	1.910.218.320,00			1.910.218.320,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Pwimbangan		1.390.713.615.483,00	9.695.968.380,00	(5.439.498.068,00)	1.394.970.085.795,00

Pendapatan transfer dana perimbangan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2018 yang belum diterima sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 dan nomor 153/PMK.07/2018 untuk Kabupaten Lumajang dengan total Rp9.695.968.380,00.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	35.000.000.000,00	7.500.000.000,00

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya meliputi dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Dana transfer Pemerintah Pusat lainnya yang diterima Pemerintah kabupaten Lumajang meliputi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan melalui APBN kepada Pemerintahan Desa, yang penyalurannya melalui rekening kas umum daerah. Dengan demikian DD bagi pemerintah daerah bukan merupakan pendapatan, karena DD yang diterima merupakan hak Pemerintah Desa, sehingga di dalam Laporan Operasional DD di reklasifikasi sebagai utang / kewajiban pemerintah daerah.

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya sebagai berikut :

Tabel 240 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian LO
Tahun 2018 dan 2017

No	Dana Penyesuaian	2018	2017
1	Dana Desa (DD)	163.206.258.000,00	165.136.155.000,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	35.000.000.000,00	7.500.000.000,00
3	Jumlah Pendapatan LRA (1+2)	198.206.258.000,00	172.636.155.000,00
4	Reklasifikasi Dana Desa ke utang	(163.206.258.000,00)	(165.136.155.000,00)
5	Jumlah Pendapatan LO	35.000.000.000,00	7.500.000.000,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi - LO	112.728.821.984,00	137.149.050.901,00

Pendapatan transfer Pemerintah Propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor; bagi hasil dari pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok.

Tabel 241 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
Tahun 2018 dan 2017

No	Bagi Hasil Pajak Propinsi	2018	2017
1	2	3	4
1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	25.638.807.476,00	29.450.627.369,00
2	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	13.530.985.745,00	16.649.046.229,00
3	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	26.871.804.756,00	32.152.909.768,00
4	Bagi hasil dari pajak air permukaan	401.886.474,00	476.586.072,00
5	Bagi hasil dari pajak rokok	46.285.337.533,00	58.419.881.463,00
	Jumlah	112.728.821.984,00	137.149.050.901,00

Pendapatan bagi hasil pajak Pemerintah Propinsi tahun 2018 yang telah diterima di rekening kas umum daerah, termasuk diantaranya penerimaan piutang atas pendapatan bagi hasil pajak tahun 2017 sebesar Rp 22.605.286.512,00 sehingga pada tahun 2018 tidak diperhitungkan sebagai pendapatan LO karena hak atas pendapatan tersebut telah di akui pada tahun 2017.

Pendapatan belum diterima sebesar Rp9.006.415.747,00 merupakan bagi hasil pajak rokok dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur tribulan IV yang belum diterima dan telah di tetapkan dengan SK Gubernur Nomor 188/788 /KPTS/01/2018.

Tabel 242 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA dan LO Tahun 2018

NO	Nama Akun	Pendapatan LRA 31 Des. 2018	Pendapatan Di potong Untuk BPJS	Pendapatan Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun lalu	Reklas Bantuan Keuangan Ke Pendapatan Lain- lain	Pendapatan LO 31 Des. 2018	Pendapatan LO 31 Des. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5-6-7	9
1	DANA BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	126.086.399.749,00					103.481.113.237,00	
1.1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	31.216.741.076,00			(5.577.933.600,00)		25.638.807.476,00	29.450.627.369,00
1.2	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	16.611.149.913,00			(3.080.164.168,00)		13.530.985.745,00	16.649.046.229,00
1.3	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	32.687.973.544,00			(5.816.168.788,00)		26.871.804.756,00	32.152.909.768,00
1.4	Bagi hasil dari pajak air permukaan	486.249.569,00			(84.363.095,00)		401.886.474,00	476.586.072,00
1.5	Bagi hasil dari pajak rokok	45.084.285.647,00	241.293.000,00	9.006.415.747,00	(8.046.656.861,00)		46.285.337.533,00	58.419.881.463,00
2	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	7.892.300.000,00					0,00	
2.1	Bantuan keuangan peningkatan pendidikan	5.127.500.000,00				(5.127.500.000,00)	0,00	
2.2	Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan	2.514.800.000,00				(2.514.800.000,00)	0,00	
2.3	Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur	50.000.000,00				(50.000.000,00)	0,00	
2.4	Bantuan keuangan program JALIN MATRA	50.000.000,00				(50.000.000,00)	0,00	
2.5	Bantuan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	150.000.000,00				(150.000.000,00)	0,00	
	Jumlah	133.978.699.749,00	241.293.000,00	9.006.415.747,00	(22.605.286.512,00)	(7.892.300.000,00)	112.728.821.984,00	137.149.050.901,00

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, diantaranya adalah pendapatan hibah uang dan/atau barang baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau dari pihak lainnya serta pendapatan lainnya seperti bantuan keuangan.

Tabel 243 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2018	2017
1	Pendapatan Hibah	140.746.796.258,60	196.766.739.764,15
2	Pendapatan lainnya	8.310.338.586,00	7.722.396.925,09
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (1+2)	149.057.134.844,60	204.489.136.689,24

Tabel 242 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA dan LO Tahun 2018

NO	Nama Akun	Pendapatan LRA 31 Des. 2018	Pendapatan Di potong Untuk BPJS	Pendapatan Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun lalu	Reklas Bantuan Keuangan Ke Pendapatan Lain- lain	Pendapatan LO 31 Des. 2018	Pendapatan LO 31 Des. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5-6-7	9
1	DANA BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	126.086.399.749,00					103.481.113.237,00	
1.1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	31.216.741.076,00			(5.577.933.600,00)		25.638.807.476,00	29.450.627.369,00
1.2	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	16.611.149.913,00			(3.080.164.168,00)		13.530.985.745,00	16.649.046.229,00
1.3	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	32.687.973.544,00			(5.816.168.788,00)		26.871.804.756,00	32.152.909.758,00
1.4	Bagi hasil dari pajak air permukaan	486.249.569,00			(84.363.095,00)		401.886.474,00	476.586.072,00
1.5	Bagi hasil dari pajak rokok	45.084.285.647,00	241.293.000,00	9.006.415.747,00	(8.046.656.861,00)		46.285.337.533,00	58.419.881.463,00
2	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	7.892.300.000,00					0,00	
2.1	Bantuan keuangan peningkatan pendidikan	5.127.500.000,00				(5.127.500.000,00)	0,00	
2.2	Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan	2.514.800.000,00				(2.514.800.000,00)	0,00	
2.3	Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur	50.000.000,00				(50.000.000,00)	0,00	
2.4	Bantuan keuangan program JALIN MATRA	50.000.000,00				(50.000.000,00)	0,00	
2.5	Bantuan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	150.000.000,00				(150.000.000,00)	0,00	
	Jumlah	133.978.699.749,00	241.293.000,00	9.006.415.747,00	(22.605.286.512,00)	(7.892.300.000,00)	112.728.821.984,00	137.149.050.901,00

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, diantaranya adalah pendapatan hibah uang dan/atau barang baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau dari pihak lainnya serta pendapatan lainnya seperti bantuan keuangan.

Tabel 243 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2018	2017
1	Pendapatan Hibah	140.746.796.258,60	196.766.739.764,15
2	Pendapatan lainnya	8.310.338.586,00	7.722.396.925,09
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (1+2)	149.057.134.844,60	204.489.136.689,24

3.1 Pendapatan Hibah - LO

31 Desember 2018
(Rp)

140.746.796.258,60

31 Desember 2017
(Rp)

196.766.739.764,15

Pendapatan hibah LO meliputi pendapatan hibah uang dan hibah barang terinci sebagai berikut :

Tabel 244 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

No	Pendapatan Hibah	2018	2017
1	Pendapatan Hibah Uang Dari Pemerintah Pusat	6.663.733.702,00	4.141.000.000,00
	- Hibah untuk air minum perkotaan	4.500.000.000,00	3.449.000.000,00
	- Hibah untuk air minum perdesaan	1.704.000.000,00	692.000.000,00
	- Dana hibah IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program)	459.733.702,00	0,00
2	Pendapatan Hibah BOS dari Propinsi	77.275.840.000,00	0,00
3	Jumlah Pendapatan Hibah Uang (1+2)	83.939.573.702,00	4.141.000.000,00
4	Pendapatan Hibah Barang	56.807.222.556,60	192.625.739.764,15
	- Hibah dari pemerintah pusat	36.337.878.506,50	3.669.942.585,00
	- Hibah barang dari pemerintah propinsi	14.394.822.235,10	92.411.767.701,48
	- Hibah barang dari lembaga / organisasi swasta	6.074.521.815,00	95.083.446.477,67
	- Hibah barang dari kelompok masyarakat / perorangan	0,00	1.460.583.000,00
5	Jumlah Pendapatan Hibah LO (3+4)	140.746.796.258,60	196.766.739.764,15

Pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat sebesar Rp36.337.878.506,50 meliputi hibah barang berupa aset tetap dan hibah barang persediaan, terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 245 Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat Tahun 2018

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	495.618.437,50	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mobil Unit Produksi Film (Bioskop Keliling) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Pendidikan	4.601.310.917,00	Hibah aset tetap bangunan dari pemerintah pusat
3	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	25.218.269.557,00	Hibah aset tetap gedung dan bangunan Rusunawa dari Kementerian PUPR
4	Dinas Pekerjaan Umum & tata Ruang	5.842.086.000,00	Hibah Instalasi air buangan domestik kapasitas besar dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Dinas Kesehatan	46.827.600,00	Hibah barang cetakan buku KIA dari kemenkes
6	Puskesmas padang	50.193.715,00	Hibah dari barang PMT Kemenkes RI
7	Puskesmas Pasrujameb	58.608.825,00	Hibah dari barang PMT Kemenkes RI
8	Puskesmas Gucialit	24.963.455,00	Hibah dari barang PMT Kemenkes RI
	Jumlah	36.337.878.506,50	

Pendapatan hibah barang dari Pemerintah Propinsi sebesar Rp14.394.822.235,10 meliputi hibah barang berupa barang untuk pemberian makanan tambahan (PMT), obat, vaksin dan alat-alat kontrasepsi, terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 246 Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Tahun 2018

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas Gesang	35.208.305,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
2	Puskesmas Tempeh	155.612.862,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
3	Puskesmas Ranuyoso	89.541.888,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
4	Puskesmas Senduro	46.221.340,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
5	Puskesmas Kedungjajang	130.525.546,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
5	Puskesmas Randuagung	86.600.486,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
7	Puskesmas Pronojiwo	20.184.450,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
8	Puskesmas Tunjung	53.104.810,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
9	Puskesmas Sumbersari	35.140.105,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
11	Puskesmas Labruk Kidul	19.011.883,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
12	Puskesmas Klakah	61.755.760,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
13	Puskesmas Sukodono	59.817.377,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
14	Puskesmas Jatiroto	35.625.865,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
15	Puskesmas Pasirian	86.151.573,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
16	Puskesmas Kunir	43.918.985,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
17	Puskesmas Penanggal	40.397.715,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
18	Puskesmas Candipuro	121.628.233,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
19	Puskesmas Tekung	26.612.410,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
20	Puskesmas Tempursari	41.253.978,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
21	Puskesmas Yosowilangun	100.917.216,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
22	Puskesmas Pasrujameb	24.091.830,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
23	Puskesmas bades	50.962.670,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
24	Puskesmas Rogotrunan	85.172.395,00	Hibah PMT dari Dinkes Propinsi Jawa Timur
25	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Permebrdayaan Perempuan	1.469.805.060,00	Hibah Alkon dari BKKBN Propinsi Jawa Timur
26	Dinas Kesehatan	6.826.092.020,00	Hibah vaksin dari dinkes propinsi
27	Instalasi Perbekalan Farmasi Dinkes.	4.649.467.473,10	Hibah persediaan obat dari Dinkes Propinsi
	Jumlah	14.394.822.235,10	

Sedangkan hibah barang dari lembaga / organisasi swasta sebesar Rp6.074.521.815,00 merupakan pendapatan hibah berupa tanah fasilitas umum dari Developer di 64 Perumahan di Kabupaten Lumajang yang telah di dukung dengan berita acara penyerahan barang.

Tabel 247 Pendapataan Hibah Tanah Fasilitas Umum dari Lembaga / Organisasi Swasta
Tahun 2018

No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai (Rp)
1	Tanah Jalan dan Draenase Kavling / Jalan Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	302,40	Jl. Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	26.006.400,00

No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai (Rp)
2	Tanah Taman Kavling / Jalan Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	100,70	Jl. Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	8.660.200,00
3	Tanah TPS Kavling / Jalan Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	83,30	Jl. Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	7.163.800,00
4	Tanah Musholla Kavling / Jalan Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	115,30	Jl. Dusun/ Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	9.915.800,00
5	Tanah Jalan dan Draenase Kavling Bumi Sukodono	1.271,00	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	109.306.000,00
6	Tanah TPS Kavling Bumi Sukodono	36,00	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	3.096.000,00
7	Tanah Jalan dan Draenase Kavling Villa Asri Senduro	1.107,00	Desa Senduro Kecamatan Senduro	55.350.000,00
8	Tanah TPS Kavling Villa Asri Senduro	25,00	Desa Senduro Kecamatan Senduro	1.250.000,00
9	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Grand Adyatma Residence	1.336,60	Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono	114.947.600,00
10	Tanah Taman Perumahan Grand Adyatma Residence	261,10	Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono	22.454.600,00
11	Tanah TPS Perumahan Grand Adyatma Residence	20,50	Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono	1.763.000,00
12	Tanah Musholla Perumahan Grand Adyatma Residence	144,60	Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono	12.435.600,00
13	Tanah Jalan dan Draenase Kavling Permata Indah I	940,50	Desa Tukum Kecamatan Tekung	282.150.000,00
14	Tanah Taman Kavling Permata Indah I	40,00	Desa Tukum Kecamatan Tekung	12.000.000,00
15	Tanah TPS Kavling Permata Indah I	15,00	Desa Tukum Kecamatan Tekung	4.500.000,00
16	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Graha Adhi Tahap 1	4.505,00	Desa Denok Kecamatan Lumajang	225.250.000,00
17	Tanah Masjid Perumahan Graha Adhi Tahap 1	203,00	Desa Denok Kecamatan Lumajang	10.150.000,00
18	Tanah TPS Perumahan Graha Adhi Tahap 1	15,00	Desa Denok Kecamatan Lumajang	750.000,00
19	Tanah Pos Satpam Perumahan Graha Adhi Tahap 1	63,00	Desa Denok Kecamatan Lumajang	3.150.000,00
20	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Hasanah View Residence	5.864,00	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	504.304.000,00
21	Tanah Taman Perumahan Hasanah View Residence	1.402,40	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	120.606.400,00
22	Tanah TPS Perumahan Hasanah View Residence	48,00	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	4.128.000,00
23	Tanah Musholla Perumahan Hasanah View Residence	150,00	Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono	12.900.000,00
24	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Grand Zamzam Toga Town House 2	2.997,00	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	597.901.500,00
25	Tanah Taman Perumahan Grand Zamzam Toga Town House 2	123,00	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	24.538.500,00
26	Tanah TPS Perumahan Grand Zamzam Toga Town House 2	139,00	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	27.730.500,00

No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai (Rp)
27	Tanah Play Ground Perumahan Grand Zamzam Toga Town House 2	48,00	Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang	9.576.000,00
28	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Mutiara Kunir Residence	4.633,00	Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir	782.977.000,00
29	Tanah Taman Perumahan Mutiara Kunir Residence	985,00	Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir	166.465.000,00
30	Tanah TPS Perumahan Mutiara Kunir Residence	20,00	Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir	3.380.000,00
31	Tanah Musholla Perumahan Mutiara Kunir Residence	65,00	Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir	10.985.000,00
32	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Griya Mandiri Tekung	3.604,30	Jl. Raya Tekung/ Desa Tekung Kecamatan Tekung	252.301.000,00
33	Tanah Taman Perumahan Griya Mandiri Tekung	1.236,00	Jl. Raya Tekung/ Desa Tekung Kecamatan Tekung	86.520.000,00
34	Tanah TPS Perumahan Griya Mandiri Tekung	19,00	Jl. Raya Tekung/ Desa Tekung Kecamatan Tekung	1.330.000,00
35	Tanah Musholla Perumahan Griya Mandiri Tekung	101,00	Jl. Raya Tekung/ Desa Tekung Kecamatan Tekung	7.070.000,00
36	Tanah Jalan dan Draenase Kavling JLT	2.752,00	Desa Boreng Kecamatan Lumajang	56.416.000,00
37	Tanah Taman Kavling JLT	1.314,00	Desa Boreng Kecamatan Lumajang	26.937.000,00
38	Tanah TPS Kavling JLT	20,00	Desa Boreng Kecamatan Lumajang	410.000,00
39	Tanah Musholla Kavling JLT	120,00	Desa Boreng Kecamatan Lumajang	2.460.000,00
40	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Kelapa Gading Residence	839,99	Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	419.995.000,00
41	Tanah Taman Perumahan Kelapa Gading Residence	259,09	Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	129.545.000,00
42	Tanah Taman 2 + TPS Perumahan Kelapa Gading Residence	198,15	Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang	99.075.000,00
43	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Graha Adhi Tahap 2	5.177,57	Desa Wonokerto Kecamatan Tekung	256.289.715,00
44	Tanah Taman Perumahan Graha Adhi Tahap 2	2.445,60	Desa Wonokerto Kecamatan Tekung	121.057.200,00
45	Tanah TPS Perumahan Graha Adhi Tahap 2	64,85	Desa Wonokerto Kecamatan Tekung	3.210.075,00
46	Tanah Masjid Perumahan Graha Adhi Tahap 2	240,18	Desa Wonokerto Kecamatan Tekung	11.888.910,00
47	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan The Hasanah Residence	3.580,50	Desa Dorgowok Kecamatan Kunir	214.830.000,00
48	Tanah Taman Perumahan The Hasanah Residence	1.708,97	Desa Dorgowok Kecamatan Kunir	102.538.200,00
49	Tanah TPS Perumahan The Hasanah Residence	33,60	Desa Dorgowok Kecamatan Kunir	2.016.000,00
50	Tanah Musholla Perumahan The Hasanah Residence	104,00	Desa Dorgowok Kecamatan Kunir	6.240.000,00
51	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Rangka Regency Tahap II	1.949,00	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	128.634.000,00
52	Tanah Taman Perumahan Rangka Regency Tahap II	381,00	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	25.146.000,00
53	Tanah TPS Perumahan Rangka Regency Tahap II	20,00	Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono	1.320.000,00

No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai (Rp)
54	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Rangka Permai	517,75	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang	76.627.000,00
55	Tahan Taman Perumahan Rangka Permai	240,55	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang	35.601.400,00
56	Tanah TPS Perumahan Rangka Permai	10,00	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang	1.480.000,00
57	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Mahameru Residence	5.435,00	Jl. Nusa Indah Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	277.185.000,00
58	Tanah Taman Perumahan Mahameru Residence	2.125,00	Jl. Nusa Indah Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	108.375.000,00
59	Tanah TPS Perumahan Mahameru Residence	40,00	Jl. Nusa Indah Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	2.040.000,00
60	Tanah Pos satpam Perumahan Mahameru Residence	10,00	Jl. Nusa Indah Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	510.000,00
61	Tanah Balai RW Perumahan Mahameru Residence	50,00	Jl. Nusa Indah Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	2.550.000,00
62	Tanah Jalan dan Draenase Perumahan Grand Hilton Residence	2.181,00	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	328.240.500,00
63	Tanah Taman Perumahan Grand Hilton Residence	716,83	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	107.882.915,00
64	Tanah TPS Perumahan Grand Hilton Residence	20,00	Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang	3.010.000,00
Jumlah				6.074.521.815,00

3.2 Pendapatan Lainnya - LO

31 Desember 2018
(Rp)

8.310.338.586,00

31 Desember 2017
(Rp)

7.722.396.925,09

Pendapatan lainnya meliputi bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan pendapatan lain-lain, terinci sebagai berikut.

Tabel 248 Rincian Pendapatan Lainnya LO Tahun 2018 dan 2017

No	Pendapatan lainnya	2018	2017
1	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Jawa Timur	7.892.300.000,00	7.351.786.500,00
	- Bantuan keuangan peningkatan pendidikan	5.127.500.000,00	4.547.500.000,00
	- Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan	2.514.800.000,00	2.679.286.500,00
	- Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00
	- Bantuan keuangan program JALIN MATRA	50.000.000,00	75.000.000,00
	- Bantuan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa TMMD	150.000.000,00	
2	Pendapatan Lain-lain	418.038.586,00	370.610.425,09

No	Pendapatan lainnya	2018	2017
	- Sumbangan pihak ke III dari petani Tebu	116.921.365,00	157.929.040,00
	- Pendapatan dari Tim Lelang Gula PTR	94.344.500,00	
	- Penerimaan dari PG. Padjarajan	21.597.300,00	
	- Penerimaan dari PG. Gending	23.310.000,00	
	- Penerimaan lain-lain	161.865.421,00	212.681.385,09
3	Jumlah Pendapatan Lainnya (1+2)	8.310.338.586,00	7.722.396.925,09

Penerimaan lain-lain sebesar Rp161.865.421,00 merupakan penerimaan daerah yang tidak dapat di indentifikasi sebagai penerimaan PAD, pendapatan transfer maupun pendapatan lainnya karena pada dokumen sumber tidak terdapat keterangan / informasi yang jelas mengenai jenis setorannya.

B. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan, beban penyihan piutang, beban transfer dan beban lain-lain.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Beban Pegawai-LO	757.350.136.975,00	859.673.249.124,00

Beban pegawai meliputi beban gaji dan tunjangan pegawai, honorarium dan uang lembur. Rincian beban pegawai tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 249 Beban Pegawai Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Pegawai	2018	2017
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	380.381.263.013,00	402.720.106.485,00
2	Tunjangan keluarga	35.694.442.104,00	35.271.194.496,00
3	Tunjangan jabatan	9.496.566.322,00	9.495.115.750,00
4	Tunjangan fungsional	27.796.712.000,00	26.958.402.000,00
5	Tunjangan fungsional umum	4.405.635.000,00	4.367.345.000,00
6	Tunjangan beras	18.364.408.392,00	19.582.387.932,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	351.073.421,00	311.833.244,00
8	Pembulatan gaji	5.114.668,00	5.250.341,00
9	Iuran BPJS Kesehatan	10.738.346.971,00	11.372.107.500,00
10	Uang paket	111.426.000,00	94.878.000,00
11	Tunjangan badan musyawarah	35.352.450,00	30.510.900,00
12	Tunjangan komisi	71.192.100,00	60.839.100,00

No	Beban Pegawai	2018	2017
13	Tunjangan badan anggaran	37.910.250,00	32.246.550,00
14	Tunjangan badan kehormatan	9.165.450,00	7.856.100,00
15	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	8.860.950,00	5.430.000.000,00
16	Tunjangan perumahan	5.466.000.000,00	3.150.000,00
17	Beban penunjang operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	346.080.000,00
18	Tunjangan badan legislasi	19.579.350,00	16.991.100,00
19	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	3.821.446.185,00	1.846.685.453,00
20	Tunjangan bahaya radiasi	119.400.000,00	119.400.000,00
21	Tambahan penghasilan guru	497.250.000,00	2.657.500.000,00
22	Tunjangan profesi guru	175.130.471.425,00	219.583.527.700,00
23	Tunjangan Transportasi	4.416.000.000,00	1.816.000.000,00
24	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	12.463.732.904,00	
25	Tunjangan uang makan	14.988.273.842,00	16.712.842.515,00
26	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	4.792.200.000,00
27	Beban penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati	400.000.000,00	1.200.000.000,00
28	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	514.500.000,00
29	Biaya pemungutan PBB	0,00	0,00
30	Beban insentif pemungutan pajak hotel	45.970.837,00	23.186.948,00
31	Beban insentif pemungutan pajak restoran	151.444.546,00	99.418.015,00
32	Beban insentif pemungutan pajak hiburan	4.516.308,00	3.122.750,00
33	Beban insentif pemungutan pajak reklame	52.503.314,00	38.770.166,00
34	Beban insentif pemungutan pajak penerangan jalan	1.357.462.028,00	909.377.355,00
35	Beban insentif pemungutan pajak parkir	8.778.544,00	8.434.520,00
36	Beban insentif pemungutan pajak air tanah	2.645.964,00	4.586.742,00
37	Beban insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	268.869.039,00	83.267.105,00
38	Beban insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	411.422.100,00	562.557.621,00
39	Beban insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	508.108.919,00	308.429.698,00
40	Beban insentif pemungutan retribusi jasa usaha	151.037.282,00	175.989.775,00
41	Beban insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	21.089.152,00	119.690.936,00
42	Beban insentif pemungutan retribusi jasa umum	569.283.239,00	845.297.373,00
43	Honorarium tim teknis kegiatan	2.459.825.000,00	3.094.395.000,00
44	Honorarium pengadaan barang/jasa	1.115.380.800,00	972.248.000,00
45	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	7.426.851.440,00	7.708.726.800,00

No	Beban Pegawai	2018	2017
46	Honorarium penyimpanan dan pengurus barang	1.922.805.000,00	1.895.200.000,00
47	Honorarium penerima hasil pekerjaan	332.795.200,00	284.934.000,00
48	Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	414.250.000,00	557.000.000,00
49	Honorarium tim penyusun LKPJ	10.850.000,00	8.150.000,00
50	Honorarium tim baperjakat		64.350.000,00
51	Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah		5.100.000,00
52	Honorarium tim pengelola website	83.550.000,00	16.200.000,00
53	Honorarium tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)	18.400.000,00	42.900.000,00
54	Honorarium tim peneliti RKA-SKPD	38.750.000,00	28.250.000,00
55	Honorarium pelayanan kesehatan	10.093.502.943,00	46.695.468.447,00
56	Honorarium penyelenggara ujian	495.971.550,00	382.179.150,00
57	Honorarium petugas SIAK	246.975.000,00	240.645.000,00
58	Honorarium perencanaan pekerjaan	103.288.750,00	61.840.000,00
59	Honorarium pengawas pekerjaan	12.870.350,00	17.300.000,00
60	Honorarium tim otonomi daerah		7.100.000,00
61	Honorarium pengelola sekolah	1.143.703.000,00	1.054.020.000,00
62	Honorarium tim akuisisi arsip	27.750.000,00	
63	Honorarium tim pemeriksa kasus (Inspektorat)	133.850.000,00	
64	Honorarium tim pengelola aplikasi	30.600.000,00	31.800.000,00
65	Honorarium verifikator jampersal	16.560.000,00	4.800.000,00
66	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	774.140.000,00	
67	Honorarium tim verifikasi APBDesa	202.375.000,00	
68	Honorarium pejabat pengelola informasi daerah	136.400.000,00	
69	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	27.600.000,00	
70	Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah	30.795.000,00	34.000.000,00
71	Honorarium tim teknis kegiatan	171.796.000,00	458.125.000,00
72	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	480.250.000,00	5.869.360.760,00
73	Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah	6.800.000,00	0,00
74	Honorarium tim pengelola website		27.750.000,00
75	Honorarium tim FLS	15.550.000,00	15.800.000,00
76	Honorarium pelayanan kesehatan	0,00	11.063.998.096,00
77	Honorarium penyelenggara ujian		44.112.500,00
78	Honorarium komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	72.000.000,00	
79	Uang lembur PNS	8.767.239.873,00	8.454.722.201,00
80	Uang lembur non PNS	59.700.000,00	129.068.000,00
81	Uang lembur PNS kegiatan khusus	676.088.000,00	

No	Beban Pegawai	2018	2017
82	Beban pegawai pada BLUD	0,00	
	Beban Pegawai pada BOS		1.872.627.000,00
	Jumlah	757.350.136.975,00	859.673.249.124,00

Hubungan beban pegawai pada laporan operasional dengan belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 250 Hubungan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2018

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai LRA	757.321.746.846,00
Ditambah :	
1. Utang belanja pegawai tahun 2018	
- Kekurangan gaji pegawai 2018	117.300.955,00
- Tunjangan perbaikan penghasilan bulan Des. 2018 belum dibayar	4.468.400.840,00
- Insentif pajak daerah belum di bayar	674.591.021,00
- Uang lembur Non PNS belum di bayar pada RSUD dr. Haryoto	8.050.500,00
- Honorarium pelayanan kesehatan belum dibayar	2.531.313.624,00
Jumlah utang belanja pegawai tahun 2018	7.799.656.940,00
2. Koreksi belanja uang lembur PNS (Inspektorat) menjadi belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan tidak diikuti dengan koreksi beban pegawai (MP/BELANJA/INSPEKTORAT 001)	2.700.000,00
3. Dikurangi Utang belanja pegawai tahun lalu	(7.773.966.811,00)
Beban Pegawai LO	757.350.136.975,00

Rincian jumlah utang belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp7.799.656.940,00 sebagaimana disajikan pada penjelasan kewajiban di neraca.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa-LO	537.315.283.669,50	426.274.849.055,95

Beban barang dan meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 251 Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Persediaan	189.754.343.399,71	173.811.424.508,98
2	Beban Jasa	252.729.047.915,79	160.564.292.915,97
3	Beban Pemeliharaan	43.703.085.847,00	46.369.743.124,00

4	Beban Perjalanan Dinas	43.279.669.117,00	37.680.251.117,00
5	Beban Lainnya	7.849.137.390,00	7.849.137.390,00
	Jumlah	537.315.283.669,50	426.274.849.055,95

2.1 Beban Persediaan

31 Desember 2018
(Rp)

189.754.343.399,71

31 Desember 2017
(Rp)

173.811.424.508,98

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2018 dan 2017, terinci sebagai berikut.

Tabel 252 Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Persediaan	2018	2017
1	Beban Bahan Pakai habis	46.113.641.830,60	42.513.602.289,10
2	Beban Bahan / Material	55.591.727.008,26	53.386.692.233,88
3	Beban Cetak dan Penggandaan	28.093.626.285,85	28.424.835.638,00
4	Beban Makanan dan Minuman	42.007.512.684,00	36.845.148.532,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	618.812.500,00	642.266.000,00
6	Beban Pakaian Kerja	831.675.450,00	919.783.900,00
7	Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	6.313.073.100,00	4.192.008.275,00
8	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.161.779.541,00	6.876.982.641,00
9	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.495.000,00	10.105.000,00
	Jumlah	189.754.343.399,71	173.811.424.508,98

Hubungan beban persediaan pada laporan operasional dengan belanja persediaan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 253 Hubungan Beban persediaan dengan Belanja belanja persediaan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Belanja Persediaan (APBD) 2018 (termasuk BLUD)	146.378.035.287,00	
2	Belanja Persediaan Dana BOS 2018	31.847.410.588,00	
3	Jumlah Belanja Persediaan - LRA (1+2)		178.225.445.875,00
4	Ditambah :		
5	Persediaan awal per 1 Januari 2018	38.170.106.940,42	
6	Koreksi Persediaan pada tahun berjalan	731.071.743,70	
7	Hibah brosur KIA / Barang-barang cetakan dari Kemenkes R.I	46.827.600,00	

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
8	Hibah PMT dari Kemenkes R.I		1.583.223.677,00	
9	Hibah Alkon dari Badan KB Prop Jatim		1.469.805.060,00	
10	Hibah obat dari Dinkes Prop Jatim		4.649.467.473,10	
11	Hibah Vaksin dari Dinkes Prop Jatim		6.826.092.020,00	
12	Belanja persediaan tahun 2018 belum di bayar (utang belanja)		1.833.525.054,46	
13	Reklas dari Beban jasa promosi/publikasi/advertising (Dinas Pariwisata)	40.502.000,00		
14	Dindik, reklas belanja modal tidak menambah aset tetap	23.605.000,00		
15	Reklas dari belanja alat dapur menambah persediaan akhir persediaan kebutuhan alat rumah tangga lainnya (Dinas Kesehatan)	11.419.500,00		
16	Reklas dari beban pemeliharaan bangunan pembawa irigasi pada Dinas PUTR yang memnambah persediaan barang yg akan di serahkan kpd masyarakat/pihak3	199.170.000,00		
17	Reklas Dari Belanja Pemeliharaan Beban jasa servis dan penggantian suku cadang menambah persediaan Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas 1. Dinas Pariwisata 2. RSUD Pasirian	14.500.000,00 34.650.000,00		
18	Pembebanan Persediaan awal suku cadang di MP di debet ke akun Belanja jasa servis dan penggnatian suku cadang, seharusnya ke beban persediaan (RSU Pasirian)	(29.644.000,00)		
19	Jumlah 13 s/d 18		294.202.500,00	
20	Jumlah Penambahan Persediaan (5+6+7+8+9+10+11+12+19)			55.604.322.068,68
21	Jumlah Persediaan (3+20)			233.829.767.943,68
22	Dikurangi :			
23	Hibah Persediaan kepada Pihak Lain :			
24	Hibah Alkon Ke Detasemen Polkes dan Klinik Nahada, Klinik Hakim Medika, Klinik Pratama Jatiroto, Klinik RSI Sumbersuko	(83.793.790,00)		
25	Hibah Alkon Ke RS Bhayangkara dan RS Wijaya Kusuma	(25.384.886,00)		
26	Hibah Obat dan Alkes Ke RS	(57.968.564,00)		

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
	Swasta			
27	Hibah Obat dan Alkes Ke BPOM , Poli Pemkab, Batalyon	(28.676.095,60)		
28	Hibah buku kia dan vaksin ke rumah sakit dan klinik swasta	(94.381.520,00)		
29	Hibah Obat dan Alkes Ke Prop NTB	(162.116.458,10)		
30	Persediaan Expired	(1.080.651.222,79)		
31	Pembayaran Utang Belanja tahun lalu	(1.457.501.497,00)		
32	Pelimpahan barang persediaan milik Akper ke Unej	(243.008.485,00)		
33	Jumlah Pengurangan (jml 23 s/d 32)			(3.233.482.518,49)
34	Jumlah persediaan tersedia untuk digunakan (21-33)			230.596.285.425,19
35	Persediaan akhir			(40.847.087.025,48)
36	Salah catat barang ekstrakomtebal (home use) di catat sebagai persediaan akhir (Dinas Kesehatan)			5.145.000,00
37	Beban Persediaan LO 34+35+36			189.754.343.399,71

2.2 Beban Jasa	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	252.729.047.915,79	160.564.292.915,97

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp252.729.047.915,79 dan Rp160.564.292.915,97.

Tabel 254 Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2017 dan 2016

No	Beban Jasa	2018	2017
1	Beban Jasa Kantor	141.935.987.266,00	74.791.107.138,97
2	Beban Premi Asuransi	1.422.648.177,79	44.967.610,00
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	1.913.665.115,00	2.464.003.503,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.286.999.045,00	1.132.558.227,00
5	Beban Sewa Alat Berat	102.152.000,00	145.850.000,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan	2.177.651.000,00	2.345.004.700,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	68.560.000,00
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.819.668.500,00	2.196.158.062,00
9	Beban Jasa Konsultasi	2.253.103.332,00	1.983.790.300,00
10	Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja	97.621.343.480,00	72.838.107.475,00
11	Beban Operasional Pemeriksaan Internal	800.000.000,00	527.100.000,00

No	Beban Jasa	2018	2017
12	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	1.395.830.000,00	2.027.085.900,00
	Jumlah	252.729.047.915,79	160.564.292.915,97

Hubungan beban jasa pada laporan operasional dengan belanja jasa pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 255 Hubungan Beban jasa dengan Belanja belanja jasa Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Belanja Jasa - LRA		242.226.929.205,79
2	Ditambah :		
3	Utang belanja jasa tahun 2018		12.822.197.781,00
4	Dikurangi :		
5	Beban jasa promosi/publikasi/advertising di rekla ke belanja persediaan karena menghasilkan persediaan barang cetakan (brosur) pada Dinas Pariwisata	(40.502.000,00)	
6	Koreksi reklasifikasi belanja tambahan upah dari belanja uang lembur belum diikuti dengan koreksi beban tambahan upah (Inspektorat)	(2.700.000,00)	
7	Pembayaran utang belanja jasa tahun lalu	(2.276.877.071,00)	
8	Jumlah pengurangan (5+6+7)		(2.320.079.071,00)
9	Beban Jasa - LO (1+3+8)		252.729.047.915,79

Rincian utang belanja jasa tahun 2018 sebesar Rp12.822.197.781,00 sebagaimana di sajikan pada penjelasan kewajiban di neraca.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.3 Beban Pemeliharaan	43.703.085.847,00	46.369.743.124,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.43.703.085.847,00 dan Rp46.369.743.124,00

Tabel 256 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016

No	Beban Pemeliharaan	2018	2017
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	11.944.904.629,00	11.043.856.857,00
2	Beban Pemeliharaan Alat -Alat Besar Darat	469.574.000,00	383.801.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat-Alat Bantu	577.754.486,00	230.308.564,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	205.738.402,00	267.807.303,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	52.567.520,00	72.655.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor	41.200.000,00	29.750.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	36.000.000,00	29.500.000,00

No	Beban Pemeliharaan	2018	2017
8	Beban Pemeliharaan Alat Ukur	582.305.500,00	316.655.500,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan	21.978.500,00	750.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	30.000,00	1.740.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	290.415.913,00	251.217.300,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	2.472.596.500,00	2.744.157.730,00
13	Beban Pemeliharaan Komputer	3.052.369.878,00	3.227.995.868,00
14	Beban Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.650.000,00	9.105.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Studio	10.800.000,00	29.841.100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	59.256.000,00	25.760.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	973.065.671,00	1.587.822.500,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan	3.993.000,00	19.600.000,00
19	Beban Pemeliharaan Unit Unit Laboratorium	75.255.680,00	30.750.000,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.500.000,00	2.500.000,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	216.096.500,00	700.000,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.069.992.989,00	14.419.116.377,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	320.197.000,00	246.299.900,00
24	Beban Pemeliharaan Monumen/Bangunan Bersejarah	231.342.000,00	115.670.000,00
	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti		270.282.000,00
25	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	60.525.000,00	197.440.000,00
26	Beban Pemeliharaan Jalan	6.362.536.000,00	5.359.141.000,00
27	Beban Pemeliharaan Jembatan	427.950.000,00	371.684.000,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	2.062.031.500,00	1.392.709.000,00
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	(199.170.000,00)	0,00
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Kotor	41.199.000,00	53.912.500,00
31	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih	23.059.000,00	63.745.300,00
32	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	77.861.000,00	73.120.400,00
33	Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah	644.950.900,00	441.123.500,00
34	Beban Pemeliharaan Instalasi Gardu Listrik	143.430.500,00	50.267.500,00
35	Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.652.433.260,00	1.966.781.300,00
36	Beban Pemeliharaan Jaringan Telepon	15.457.650,00	8.220.000,00
37	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	387.033.730,00	696.803.975,00
38	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	158.038.000,00	120.276.000,00
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	124.166.139,00	216.876.650,00
	Jumlah	43.703.085.847,00	46.369.743.124,00

Hubungan beban pemeliharaan pada laporan operasional dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 257 Hubungan Beban pemeliharaan dengan Belanja belanja pemeliharaan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
	Belanja Pemeliharaan LRA		43.882.391.155,00
	Ditambah :		
1	Utang belanja pemeliharaan 2018		
	1. Bagian organisasi	1.402.334,00	
	2. Dinas Sosial	897.000,00	
	3. BPKD	6.559.500,00	
	4. RSUD Dr. Haryoto	1.918.882,00	
	Jumlah Utang belanja pemeliharaan tahun 2018		10.777.716,00
2	Penggunaan persediaan awal suku cadang dibebankan ke beban pemeliharaan (RSUD Pasirian)		29.644.000,00
3	Reklasifikasi dari belanja modal yang merupakan belanja pemeliharaan pada Sekretariat DPRD (tidak menambah aset tetap)		100.000.000,00
	Dikurangi :		
4	Persediaan akhir suku cadang yang diperoleh dari belanja pemeliharaan		
	1. Dinas Pariwisata	(14.500.000,00)	
	2. RS. Pasirian	(34.650.000,00)	
5	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik di catat ke beban lainnya - beban instalasi pengolahan sampah organik (RSUD dr. Haryoto)	(69.401.000,00)	
6	Persediaan akhir barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga dari belanja pemeliharaan (Dinas PUTR)	(199.170.000,00)	
7	Pembayaran utang belanja pemeliharaan tahun 2017 RSUD dr. Haryoto	(2.006.024,00)	
	Jumlah pengurangan (4 s/d 7)		(319.727.024,00)
	Beban Pemeliharaan LO		43.703.085.847,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2.4 Beban Perjalanan Dinas	43.279.669.117,00	37.680.251.117,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 258 Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Perjalanan Dinas	2017	2017
1	Beban Perjalanan Dinas		0,00
2	Beban perjalanan dinas dalam daerah	15.311.300.388,00	13.544.800.088,00
3	Beban perjalanan dinas luar daerah	27.968.368.729,00	24.135.451.029,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	43.279.669.117,00	37.680.251.117,00

Hubungan beban perjalanan dinas pada laporan operasional dengan belanja perjalanan dinas pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 260. Hubungan Beban perjalanan dinas dengan Belanja belanja perjalanan dinas
Tahun 2018

No	Uraian			Jumlah (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas LRA			43.121.717.221,00
2	Ditambah :			
3	Utang belanja perjalanan dinas 2018 :	Dalam Daerah	Luar Daerah	
4	RSUD Pasirian	600.000,00	20.518.816,00	
5	RSUD dr. Haryoto	2.100.000,00	5.965.500,00	
6	Bagian Organisasi	1.100.000,00	0,00	
7	Dinas Kesehatan	625.000,00	0,00	
8	Dispenduk Capil	0,00	14.701.000,00	
9	DPM	0,00	24.695.354,00	
10	Bagian Umum	0,00	89.184.300,00	
11	Kecamatan Candipuro	0,00	700.000,00	
12	Dinas Perhubungan	0,00	19.654.900,00	
13	Dinas Pariwisata	0,00	1.050.000,00	
14	Jumlah utang belanja perjalanan dinas 2018 (4 s/d 13)	4.425.000,00	176.469.870,00	180.894.870,00
15	Pembayaran Utang Belanja tahun 2017			
16	RSUD dr. Haryoto	(2.460.000,00)	(10.142.974,00)	
17	Kecamatan Tempeh	(2.950.000,00)	(7.390.000,00)	
18	Jumlah pembayaran utang belanja tahun lalu (16+17)	(5.410.000,00)	(17.532.974,00)	(22.942.974,00)
19	Beban Perjalanan Dinas LO			43.279.669.117,00

2.5 Beban Lainnya

31 Desember 2018
(Rp)

7.849.137.390,00

31 Desember 2017
(Rp)

7.849.137.390,00

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.849.137.390,00 dan Rp7.849.137.390,00, sebagai berikut.

Tabel 261. Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel) Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Lainnya	2018	2017
1	Beban Alat (Alat Besar Darat	3.850.000,00	3.850.000,00
2	Beban Alat-alat Bantu	960.000,00	960.000,00
3	Beban Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Beban Alat Bengkel Bermesin	87.910.000,00	87.910.000,00
5	Beban Alat Bengkel Tak Bermesin	10.625.000,00	10.625.000,00
6	Beban Alat Ukur	30.677.875,00	30.677.875,00

No	Beban Lainnya	2018	2017
7	Beban Alat Pengolahan	61.715.000,00	61.715.000,00
8	Beban Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	39.710.000,00	39.710.000,00
9	Beban Alat Kantor	239.564.949,00	239.564.949,00
10	Beban Alat Rumah Tangga	2.899.212.660,00	2.899.212.660,00
11	Beban Komputer	110.722.400,00	110.722.400,00
12	Beban Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.866.000,00	53.866.000,00
13	Beban Alat Studio	5.200.000,00	5.200.000,00
14	Beban Alat Komunikasi	5.822.000,00	5.822.000,00
15	Beban Peralatan Pemancar		
16	Beban Alat Kedokteran	361.374.536,00	361.374.536,00
17	Beban Alat Kesehatan		
18	Beban Unit Unit Laboratorium	28.860.000,00	28.860.000,00
19	Beban Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.685.479.970,00	1.685.479.970,00
20	Beban Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
21	Beban Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
22	Beban Persenjataan Non Senjata Api	4.500.000,00	4.500.000,00
23	Beban Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.488.000,00	120.488.000,00
24	Beban Bangunan Menara	24.825.000,00	24.825.000,00
25	Beban Tugu Titik Kontrol/Pasti	145.800.000,00	145.800.000,00
26	Beban Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat	1.862.749.000,00	1.862.749.000,00
27	Beban Bangunan Air Kotor		
28	Beban Buku	12.598.000,00	12.598.000,00
29	Beban Terbitan Berkala	150.000,00	150.000,00
30	Beban Barang-barang Perpustakaan		
31	Beban Barang Bercorak Kebudayaan	18.477.000,00	18.477.000,00
32	Beban Alat Olah Raga Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00
33	Beban Hewan	19.250.000,00	19.250.000,00
34	Beban Tanaman		
35	Beban Barang dan Jasa dana BOS		
	Jumlah	7.849.137.390,00	7.849.137.390,00

Hubungan beban lainnya pada laporan operasional dengan belanja lainnya pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 262. Hubungan Beban lainnya dengan Belanja belanja lainnya Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Belanja Lainnya LRA		5.764.546.944,00
	Ditambah :		
2	RSUD DR HARYOTO Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengeolahan Sampah Organik dibukukan sebagai Beban Instalasi Pengolahan Sampah Organik	69.401.000,00	

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
3	Belanja Modal tidak menambah aset tetap di reklas ke belanja lainnya :			
a	Reklas Aset Tetap Roll Standing Banner 300 Buah Menjadi barang Ekstrakomtable (Dinas Pengendalian Penduduk & KB)	141.000.000,00		
b	Reklas aset tetap kursi rapat 100 buah @ 485.000,- menjadi barang Ekstakomtable tahun 2018 (BPBD)	48.500.000,00		
c	Reklas aset tetap kursi menjadi barang ekstrakomtable tahun 2018 (BPRD)	1.800.000,00		
d	Reklasifikasi dari belanja modal Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner tdk menambah aset tetap menjadi beban lainnya (ekstrakomtable) RSUD dr. Haryoto	6.900.300,00		
e	Reklas dari belanja modal Alat-alat Kedokteran Umum menjadi beban alat kedokteran umum krn tdk menambah aset tetap. - RSUD Pasirian - Dinas kesehatan - RSUD dr. Haryoto	2.437.076,00 15.296.459,30 12.976.695,00		
f	Belanja Modal Gedung tidak menambah aset tetap Rp.9.046.430,00 (RSUD Pasirian)	9.046.430,00		
g	Reklas aset tetap peralatan dan mesin (pembangunan kanopi dan upgreding ATB) ke ATB 2018 Rp.6.123.000 (Dinas Perhubungan)	6.123.000,00		
h	Reklas dari belanja modal Alat-alat ruang gawat darurat menjadi beban alat kedokteran gawat darurat krn tdk menambah aset tetap. Rp.990.000 (puskesmas Tempeh)	990.000,00		
i	Reklasifikasi bangunan gedung kantor ke ekstrakomtable dan akumulasinya Rp6.630.000 (Dinas Pendidikan)	6.630.000,00		
j	Reklas Aset Tetap belanja instalasi listrik bangunan gedung kantor menjadi barang ekstrakomtable tahun 2018 (Kec. Yosowilangun)	3.794.062,00		
	Jumlah reklas dari belanja modal ke belanja lainnya		255.494.022,30	
3	Reklas dari Beban Persediaan (RSUD dr. Haryoto) No. MP/BP/RSUD/005 Beban peralatan rumah tangga lainnya dari pembebanan persediaan awal Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya sebesar Rp.80.789.600,00 telah dilakukan		80.789.600,00	

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
	pembetulan di SIPKD menjadi beban lainnya (beban home use) sebesar Rp.80.789.600,00			
	Jumlah Penambahan 1+2+3			405.684.622,30
	Pengurangan :			
1	Salah catat, beban surat kabar/majalah di catat ke beban lainnya (beban koran/majalah) (Kel. Tompokersan)		(150.000,00)	
2	MP No. MP/PERSEDIAAN AKHIR/RSUD/012 mencatat persediaan akhir persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya Rp.192.343.550,00 (debit) dan salah di kredit ke akun Beban peralatan rumah tangga lainnya sebesar Rp.192.343.550,00 yang seharusnya di kredit ke akun beban home use . Kesalahan tersebut telah di perbaiki di SIPKD dengan menghapus akun beban peralatan rumah tangga lainnya dan di ganti dengan akun yang benar beban lainnya (beban home use)		(192.343.550,00)	
3	Belanja lainnya menambah aset tetap			
a	Dinas Perumahan & Permukiman Belanja Barang menambah aset tetap	(4.494.000,00)		
b	DINAS PENDIDIKAN Belanja barang & jasa (belanja peralatan jaringan komputer) menambah aset tetap, sudah di MP mengurangi beban personal komputer tetapi belanja belum disesuaikan	(542.900,00)		
c	DINAS PENDIDIKAN Belanja barang & jasa (belanja meja kerja) menambah aset tetap, sudah di MP mengurangi beban tetapi belanja belum disesuaikan	(9.750.000,00)		
d	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG Reklas Belanja Peralatan Jaringan menjadi aset Tetap Peralatan jaringan komputer tahun 2018	(5.000.000,00)		
f	KEC. PADANG Backdrop besi, di reklas ke belanja modal karena menambah aset tetap	(19.998.000,00)		
	Jumlah Belanja Lainnya menambah aset tetap (a s/d f)		(39.784.900,00)	
3	Reklasi ke belanja persediaan			
	DINAS KESEHATAN Reklas dari belanja alat dapur menambah persediaan akhir persediaan kebutuhan alat rumah tangga lainnya	(11.419.500,00)		

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
	DINAS KESEHATAN Reklas beban home use ke belanja persediaan Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	(5.145.000,00)		
	Jumlah reklas belanja lainnya menambah persediaan		(16.564.500,00)	
	Jumlah Pengurangan 1+2+3			(248.842.950,00)
	Beban Lainnya - LO			5.921.388.616,30
	Lebih catat belanja lainnya			1.927.748.773,70
	Beban lainnya LO			7.849.137.390,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3. Beban Hibah	129.394.783.345,70	84.866.591.957,00

Beban hibah dapat berupa hibah uang dan hibah barang. Untuk hibah uang anggaran dan realisasinya melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedangkan untuk hibah barang direalisasikan melalui kegiatan beberapa SKPD. Beban hibah tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 362 Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Hibah	2018	2017
1	Beban Hibah		
	Beban hibah pada PPKD	111.480.797.482,00	70.393.340.000,00
2	Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
	Beban hibah peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	2.882.288.500,00	1.797.969.000,00
	Beban hibah gedung dan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	72.946.000,00	320.211.100,00
	Beban hibah jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	11.712.737.550,00	9.842.760.150,00
	Beban hibah aset tetap lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	820.495.000,00	690.402.100,00
	Beban hibah barang/jasa lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	2.110.095.813,70	1.821.909.607,00
	Beban hibah aset lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD	315.423.000,00	0,00
	Jumlah	129.394.783.345,70	84.866.591.957,00

Hubungan beban hibah pada laporan operasional dengan belanja hibah pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 263 Hubungan Beban hibah dengan Belanja belanja hibah Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Belanja Hibah - LRA		128.942.462.032,00
2	Ditambah :		
	1. Hibah aset tetap kendaraan roda 4 kepada BAZ	193.750.000,00	
	Harga Perolehan kendaraan	(193.750.000,00)	
	Akumulasi penyusutan kendaraan		
	2. Hibah aset tetap kendaraan roda 4 kepada MUI		
	Harga Perolehan kendaraan	193.750.000,00	
	Akumulasi penyusutan kendaraan	(193.750.000,00)	
	3. Hibah barang-barang cetakan berupa buku kiake rumah sakit dan klinik swasta	2.081.800,00	
	4. Hibah vaksin ke rumah sakit dan klinik swasta	92.299.720,00	
	5. Obat dan Alkes Ke Prop NTB	162.116.458,10	
	6. Hibah Obat dan Alkes Ke BPOM , Poli Pemkab , Batalyon	28.676.095,60	
	7. Hibah Obat dan Alkes Ke RS Wijaya Kusuma, RS Bhayangkara, RS. Jatiroto	57.968.564,00	
	8. Hibah Alkon Ke RS Bhayangkara dan RS Wijaya Kusuma	25.384.886,00	
	9. Hibah Alkon Ke Detasemen Polkes dan Klinik Nahada, Klinik Hakim Medika, Klinik Pratama Jatiroto, Klinik RSI Sumbersuko	83.793.790,00	
	Jumlah Penambahan		452.321.313,70
	Beban Hibah - LO		129.394.783.345,70

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4. Beban Bantuan Sosial	47.666.362.980,00	31.181.675.232,00

Beban bantuan sosial yang menjadi beban Pemerintah Daerah tahun 2018 dan 2017, sebagai berikut.

Tabel 264 Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017

No	Bantuan Sosial	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Bansos uang pada PPKD	47.027.414.217,00	30.940.675.232,00
2	Bansos barang	251.000.000,00	241.000.000,00
3	Jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA (1+2)	47.278.414.217,00	31.181.675.232,00
4	Tagihan Jamkesda tahun 2018 belum dibayar	146.655.763,00	
5	Pemotongan pendapatan pajak rokok untuk tagihan premi BPJS belum di catat sebagai beban bantuan sosial	241.293.000,00	
6	Jumlah Beban Bansos (3+4+5)	47.666.362.980,00	31.181.675.232,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
5. Beban Bantuan Keuangan	0,00	1.026.538.956,16

Beban bantuan keuangan tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.026.538.956,16. Penurunan beban bantuan keuangan pada tahun 2018 di banding 2017 karena realisasi beban bantuan keuangan 2018 di reklasifikasi ke beban transfer. Sedangkan realisasi tahun 2017 merupakan bantuan keuangan kepada 10 (sepuluh) partai politik di kabupaten Lumajang.

Tabel 265 Daftar Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2018 dan 2017

No	Jenis Bantuan Keuangan	2018	2017
1	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	1.026.538.956,16
	Jumlah	0,00	1.026.538.956,16

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.450.815.936,18	91.565.786.423,77

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp127.450.815.936,18 dan Rp91.565.786.423,77 sebagai berikut.

Tabel 266 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

No	Beban Penyusutan	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.903.160.347,38	43.096.212.580,91
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.903.685.234,19	16.725.740.135,79
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	34.482.793.836,81	28.520.659.236,07
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	123.289.639.418,38	88.342.611.952,77
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.161.176.517,80	3.223.174.471,00
	Jumlah	127.450.815.936,18	91.565.786.423,77

Tabel 267 Hubungan Akumulasi Penyusutan / Amortisasi dengan Beban Penyusutan / Amortisasi Tahun 2018

No	Uraian	Penyusutan	Amortisasi	Jumlah
1	Saldo awal akumulasi	961.413.790.500,59	10.629.237.079,80	972.043.027.580,39
2	Koreksi saldo awal akumulasi	285.173.718.778,60	579.555.105,00	285.753.273.883,60
3	Mutasi / Reklas berdampak	13.508.311.116,11		13.523.896.163,11

No	Uraian	Penyusutan	Amortisasi	Jumlah
	pada akumulasi		15.585.047,00	
4	Selisih beban penyusutan / amortisasi	(163.352.094,45)		(163.352.094,45)
5	Akumulasi setelah koreksi / mutasi / reklas (1 s/d 4)	1.259.932.468.300,84	11.224.377.231,80	1.271.156.845.532,64
6	Saldo akhir akumulasi	1.383.222.107.719,22	15.385.553.749,60	1.398.607.661.468,82
7	Beban Penyusutan / amortisasi akhir (5-6)	(123.289.639.418,38)	(4.161.176.517,80)	(127.450.815.936,18)

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7. Beban Penyisihan Piutang	7.896.542.608,71	6.482.937.818,08

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.896.542.608,71 dan Rp6.482.937.818,08 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2017.

Tabel 468 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018 dan 2017

Beban Penyisihan Piutang	2018	2017
1. Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.493.371.849,00	4.222.779.485,58
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.184.426.502,57	463.451.279,43
3. Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.218.744.257,14	1.796.707.053,07
Jumlah	7.896.542.608,71	6.482.937.818,08

Tabel 269 Penyisihan Piutang Dengan Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyisihan piutang 2017	43.315.358.721,03
2	Penghapusan piutang PBB-P2	(31.609.574.658,00)
3	Penghapusan piutang Akper	(9.032.500,00)
4	Penyisihan piutang setelah penghapusan (1-2-3)	11.696.751.563,03
5	Penyisihan piutang 2018	19.593.294.171,74
6	Beban penyisihan piutang 2018	(7.896.542.608,71)

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
8. Beban Transfer	200.728.985.390,00	175.772.438.337,00

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer dimaksud adalah beban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang yang menjadi beban Pemerintah Daerah tahun 2018 dan 2017, termasuk pula bantuan keuangan kepada desa dan bantuan keuangan kepada partai politik.

Tabel 270 Daftar Rincian Transfer Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.635.845.292,00	3.156.466.422,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.589.505.142,00	1.791.449.483,00
3	Bantuan Keuangan		
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	128.468.212.000,00	119.151.371.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (BKK)	66.008.884.000,00	51.673.151.432,00
4	Bantuan Keuangan Partai Politik	1.026.538.956,00	0,00
Jumlah		200.728.985.390,00	199.702.446.434,00

Tabel 271 Daftar Rincian Transfer LRA dan LO Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Transfer LRA	Transfer Kurang Bayar 2018	Transfer Kurang Bayar 2017	Reklasifikasi Bantuan Partai Politik	Beban Transfer LO
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.885.220.334,00	1.696.484.854,00	(945.859.896,00)		3.635.845.292,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.849.710.155,00	639.268.199,00	(899.473.212,00)		1.589.505.142,00
3	Bantuan Keuangan					
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	128.468.212.000,00				128.468.212.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Lainnya (BKK)	66.008.884.000,00				66.008.884.000,00
4	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00			1.026.538.956,00	1.026.538.956,00
Jumlah		199.212.026.489,00	2.335.753.053,00	1.845.333.108,00	1.026.538.956,00	200.728.985.390,00

Di dalam beban transfer tidak termasuk Dana Desa sebesar Rp 162.975.939.400,00 yang dialokasikan ke Pemerintah Desa.

C. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4.714.969.273,23)	0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Akademi Keperawatan yang diserahkan kepada Ditjen Dikti Universitas Jember pada tahun 2018 karena adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan Akademi Keperawatan.

Tabel 272 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Nilai kekayaan bersih Akademi Keperawatan yang diserahkan kepada Ditjen Dikti Universitas Jember	3.634.318.050,44
2	Menghapus barang cetakan (karcis) yang sudah kadaluarsa (BPRD)	
	BPRD	783.609.965,00
	Dinas Pemuda Olah Raga	239.206,00
	Dinas Penanaman Modal & PTSP	55.565.483,00
	Dinas Perhubungan	29.600.000,00
	Bagian umum	63.402.575,00
3	Menghapus obat-obatan kadaluarsa (expired) :	
	IPFK - Dinkes	55.807.315,00
	Puskesmas Candipuro	44.536,00
	Puskesmas Klakah	1.471.764,00
	Puskesmas Labruk Kidul	17.800,00
	Puskesmas Pasirjan	3.465,00
	Puskesmas Pasrujambe	132.000,00
	Puskesmas Penanggal	177.880,00
	Puskesmas Randuagung	5.470.520,00
	Puskesmas Sukodono	19.633.632,00
	Puskesmas Tempeh	19.665,00
	Puskesmas Yosowilangun	36.570,58
	Dinas Pengendalian Penduduk	7.658.738,00
	RSUD dr. Haryoto	24.728.359,21
4	Menghapus alkes/ kedokteran habis pakai yang kadaluarsa (IPFK)	33.031.749,00
	Jumlah Defisit Penghapusan Aset non Lancar	4.714.969.273,23

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	(1.219.712.844,06)	(175.714.637.645,28)

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp2.300.364.066,85) dan (Rp175.714.637.645,28). Defisit penghapusan aset non lancar tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Tabel 273 Daftar Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penghapusan aset lain-lain setelah turun sk penghapusan (Dinas Kesehatan)	40.000.000,00
2	Menghapus Aset Tetap Kendaraan Roda Dua Karena Hilang (Dinas Pertanian)	34.198.000,00
3	Penghapusan aset lain lain (Puskesmas Bades)	705.967.864,06
4	Menghapus Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat) di TPI Tempursari (Dinas Pariwisata)	439.546.980,00
	Jumlah defisit penghapusan aset non lancar	(1.219.712.844,06)

D. Pos-pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan kejadian luar biasa yang yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang (ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah, sehingga penyajian Pos-pos luar biasa terpisah dari Pos-pos operasional dan non operasional. Pos-pos luar biasa meliputi pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Beban Luar Biasa	1.976.833.238,00	3.510.495.735,00

Beban luar biasa tahun 2018 sebesar Rp1.976.833.238,00 dan tahun 2017 sebesar Rp3.510.495.735,00 merupakan belanja tidak terduga, yaitu merupakan kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang dan diluar kendali entitas pemerintah daerah.

E. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Surplus (Defisit) L)	163.490.200.401,63	82.367.632.051,15

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 274 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2018 dan 2017

No	Surplus (defisit)	2018	2017
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	171.401.715.756,92	261.592.765.431,43
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(5.934.682.117,29)	(175.714.637.645,28)
3	Pos Luar Biasa	(1.976.833.238,00)	(3.510.495.735,00)
	Jumlah	163.490.200.401,63	82.367.632.051,15

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Tujuan dari LAK adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas pemerintah kabupaten Lumajang tahun 2018 merupakan Arus Kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi :

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	2.077.396.056.404,23	1.956.127.822.292,10
Jumlah Arus Kas Keluar	1.811.954.991.578,79	1.740.464.668.792,24
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	265.441.064.825,44	215.663.153.499,86

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari luar. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 275 Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2018	Tahun 2017
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	66.738.332.790,00	54.156.334.941,00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	44.777.545.701,75	33.577.572.815,50
Penerimaan Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.756.141.496,43	2.983.324.803,80
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	152.867.850.896,05	233.536.438.538,71
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	25.579.762.430,00	43.758.657.232,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam	85.619.152.401,00	16.703.105.162,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	972.852.929.000,00	972.852.929.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	306.661.771.652,00	284.611.017.882,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	198.206.258.000,00	172.636.155.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	126.086.399.749,00	129.448.889.992,00
Penerimaan Hibah	83.939.573.702,00	4.141.000.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	7.892.300.000,00	7.351.786.500,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	418.038.586,00	370.610.425,09
Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktifitas Operasi	2.077.396.056.404,23	1.956.127.822.292,10
Jenis Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Belanja Pegawai	757.321.746.846,00	859.639.514.584,11
Pengeluaran Belanja Barang dan jasa	513.221.030.400,79	421.895.061.848,97
Pengeluaran Bunga		
Pengeluaran Hibah	128.942.462.032,00	84.670.257.207,00
Pengeluaran Bantuan Sosial	47.278.414.217,00	31.181.675.232,00

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2018	Tahun 2017
Pengeluaran Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Pemdes&Parpol	358.479.574.356,00	336.465.081.388,16
Pengeluaran Belanja Tak terduga	1.976.833.238,00	3.510.495.735,00
Pengeluaran Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota & Pemdes	4.734.930.489,00	3.102.582.797,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.811.954.991.578,79	1.740.464.668.792,24
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	265.441.064.825,44	215.663.153.499,86

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	296.928.035.220,96	265.073.151.004,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(296.928.035.220,96)	(265.073.151.004,00)

Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut.

Tabel 276 Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2018	Tahun 2017
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 41)	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	-	3.366.000.000,00
Belanja Tanah	7.004.632.997,00	1.048.921.020,00
Belanja Peralatan dan Mesin	74.751.188.303,37	80.783.643.796,00
Belanja Gedung dan Bangunan	84.921.598.485,16	88.166.020.917,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.178.259.981,43	68.240.283.621,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	17.757.264.954,00	16.087.112.470,00
Belanja Aset Lainnya	5.815.090.500,00	3.932.169.180,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	3.449.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	296.928.035.220,96	265.073.151.004,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(296.928.035.220,96)	(265.073.151.004,00)

c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	1.173.999.000,00	758.208.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	1.931.500.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	1.173.999.000,00	(1.173.292.000,00)

Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut :

Tabel 277 Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 dan 2017

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	1.173.999.000,00	758.208.000,00
Jumlah arus kas masuk	1.173.999.000,00	758.208.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan		
Pemberian pinjaman daerah	-	1.931.500.000,00
Pembayaran utang belanja		
Jumlah Arus Keluar	-	1.931.500.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	1.173.999.000,00	(1.173.292.000,00)

d. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah misalnya penerimaan perhitungan fihak ke tiga (PFK) dan pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta pengiriman uang. Penerimaan/pengeluaran PFK yaitu penerimaan/ penyetoran potongan(potongan SP2D seperti potongan taspen, taperum, pajak penghasilan dan PPN ke kas negara.

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Jumlah Arus Kas Keluar	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut.

Tabel 278 Rincian Potongan Per Jenis Pajak Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Potongan	Setor	Saldo
1	Taspen	28.304.606.718,00	28.304.606.718,00	-
2	BPJS Kesehatan	7.213.232.359,00	7.213.232.359,00	-
3	PPH Pasal 21	675.562.000,00	675.562.000,00	-
4	Taperum	772.600.493,00	772.600.493,00	-
5	JKK	2.216.027.968,00	2.216.027.968,00	-
6	JKM	351.356.356,00	351.356.356,00	-
TOTAL		39.533.385.894,00	39.533.385.894,00	-

Tabel 279 Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 dan 2017

Arus Masuk / Arus Keluar	Tahun 2018	Tahun 2017
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Jumlah arus kas masuk	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Jumlah Arus Keluar	39.533.385.894,00	38.675.410.428,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
e) Kenaikan (Penurunan) Kas	(30.312.971.395,52)	(50.583.289.504,14)

Kenaikan (penurunan) kas merupakan jumlah dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Tabel 280 Rincian Kenaikan Kas Tahun 2018 dan 2017

No	Arus Kas Bersih	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	265.441.064.825,44	215.663.153.499,86
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(296.928.035.220,96)	(265.073.151.004,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	1.173.999.000,00	(1.173.292.000,00)
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-	-
	Kenaikan (Penurunan) Kas	(30.312.971.395,52)	(50.583.289.504,14)

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
f) Saldo Awal Kas	134.753.109.319,17	185.336.398.823,31

Saldo awal kas tahun 2018 adalah saldo akhir kas tahun 2017, dan saldo awal kas tahun 2017 adalah saldo akhir kas tahun 2016. Rincian saldo awal kas per 1 Januari 2018 dan 2017 sebagai berikut.

	2018	2017
1. Saldo Kas di BUD	116.308.323.705,47	155.540.000.145,84
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	103.687.523,00	-
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	12.981.945.429,91	24.201.903.365,00
5. Saldo Akhir Kas di BLUD Akper	3.927.732.517,00	4.585.901.722,00
6. Saldo Akhir Kas Lainnya	1.431.420.143,79	1.667.201.575,48
Jumlah saldo awal kas	134.753.109.319,17	185.995.006.808,32
Koreksi saldo awal kas lainnya	-	(658.607.985,01)
Saldo awal kas	134.753.109.319,17	185.336.398.823,31

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
g) Saldo Akhir Kas	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

Saldo akhir kas adalah saldo awal di tambah dengan kenaikan (penurunan) kas selama satu periode tertentu. Rincian saldo kas per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

	2018	2017
1. Saldo Akhir Kas di BUD	135.646.547.586,02	116.308.323.705,47
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	33.408.678,00	103.687.523,00
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	3.926.633.224,91	12.981.945.429,91
5. Saldo Akhir Kas di BLUD Akper	-	3.927.732.517,00
6. Saldo Akhir Kas Lainnya	1.418.088.093,40	1.431.420.143,79
Saldo kas per 31 Desember 2018	141.024.677.582,33	134.753.109.319,17

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>2.412.426.669.702,81</u>	<u>2.179.631.527.503,97</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp2.412.426.669.702,81 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2017 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp2.179.631.527.503,97 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2016 *audited*.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>163.490.200.401,63</u>	<u>82.367.632.051,15</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sebagai berikut.

Tabel 281 Surplus/Defisit LO Untuk
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Pendapatan LO	1.979.204.626.662,00	1.938.436.832.335,39
2	Beban	1.807.802.910.905,08	1.676.844.066.903,96
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	171.401.715.756,92	261.592.765.431,43
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(5.934.682.117,29)	(175.714.637.645,28)
5	Pos Luar Biasa	(1.976.833.238,00)	(3.510.495.735,00)
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	163.490.200.401,63	82.367.632.051,15

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	<u>(220.696.007.231,04)</u>	<u>150.427.465.147,72</u>

Pada tahun 2018 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo aset, kewajiban dan ekuitas tahun 2017. Koreksi tersebut merupakan tindakan pembetulan atau koreksi secara akuntansi atas adanya beberapa pos atau akun yang masih perlu disesuaikan, yaitu saldo akhir 2017 Kas dana bos kurang catat sebesar Rp21.907.035,19, saldo piutang akhir 2017 lebih catat sebesar Rp10.455.660,00, saldo Persediaan akhir 2017 lebih catat sebesar Rp731.071.743,70, saldo Investasi permanen akhir 2017 kurang catat sebesar Rp812.518.000,00, saldo Akhir 2017 aset tetap lebih catat sebesar Rp223.494.514.353,68, saldo akhir 2017 aset lainnya kurang catat sebesar Rp673.845.430,83 dan saldo akhir 2017 kewajiban jangka pendek lebih catat sebesar Rp569.620.572,92. Koreksi tersebut berdampak pada terjadinya penurunan ekuitas sebesar Rp220.696.007.231,04. Rekapitulasi Akun-akun yang dikoreksi tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 282 Rekapitulasi Daftar Akun Yang Dikoreksi Tahun 2018

No	Akun Yang Dikoreksi	Jumlah (Rp)
1	Kas	21.907.035,19
1.1.	Kas Dana Bos (Kas Lainnya)	21.907.035,19
2	Piutang	(10.455.660,00)
2.1.	Piutang Pajak Reklame	(3.317.488,00)
2.2.	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(7.138.172,00)
3	Persediaan	731.071.743,70
3.1.	Persediaan Barang cetakan	815.042.137,20
3.2.	Persediaan Obat-obatan	(75.586.316,50)
3.3.	Persediaan Bahan Kimia	(2.049.300,00)
3.4.	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat-obatan	(6.334.777,00)
4	Investasi Permanen	812.518.000,00
4.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	812.518.000,00
5	Aset Tetap	(223.494.514.353,68)
5.1.	Tanah	55.076.616.952,67
5.2.	Peralatan dan Mesin	(577.000,00)
5.3.	Gedung dan Bangunan	5.355.091.100,00
5.4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.205.675.513,59
5.5.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.137.967.885,79
5.6.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.931.435.021,30)
5.7.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(285.556.313.784,43)
5.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	278.850.000,00
5.9.	Aset Tetap Lainnya	(60.390.000,00)
6	Aset Lainnya	673.845.430,83
6.1.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(595.140.152,00)
6.2.	Aset Lain-lain	1.268.985.582,83
7	Kewajiban Jangka Pendek	569.620.572,92
7.1.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	27.930.572,92
7.2.	Utang Belanja Jasa	19.555.000,00
7.3.	Utang Transfer Dana Desa	522.135.000,00
TOTAL		(220.696.007.231,04)

Berdasarkan daftar rekapitulasi daftar akun – akun yang dikoreksi tahun 2018 diatas, dibawah ini dijelaskan daftar perincian obyek akun yang dikoreksi dan daftar OPD yang melakukan koreksi terhadap saldo akhir akun tahun 2017. Berikut daftar rinciannya:

Tabel 283 Koreksi Nilai Kas Dana BOS Tahun 2018

No	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN - SEKRETARIAT	21.907.035,19	Koreksi Saldo awal kas lainnya (Dana BOS) berdasarkan hasil verifikasi tahun 2018
TOTAL		21.907.035,19	

Tabel 284 Koreksi Nilai Piutang Pajak Reklame Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(3.317.488,00)	KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG PAJAK REKLAME TAHUN LALU KARENA SALAH CATAT
TOTAL		(3.317.488,00)	

Tabel 285 Koreksi Nilai Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(7.138.172,00)	penghapusan piutang IMB 2017 karena kelebihan catat SKR
TOTAL		(7.138.172,00)	

Tabel 286 Koreksi Nilai Persediaan Barang cetakan Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	607.817.535,00	Mencatat Saldo akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
2	DINAS KESEHATAN	3.884.760,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
3	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	209.088,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
4	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	171.547,20	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	248.292,00	Mencatat Saldo akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	196.257,60	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	91.476,00	Mencatat saldo akhir persediaan cetak (karcis) 2017 yang belum tercatat dalam persediaan Awl 2018
8	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	161.449,20	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
9	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGAJANG	169.646,40	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	167.983,20	Mencatat saldo akhir persediaan karcis th 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal th 2018
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	124.264,80	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	254.588,40	MENCATAT PERSEDIAAN AKHIR KARCIS 2017 YANG BELUM TERCATAT DALAM PERSEDIAAN AWAL 2018
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	179.150,40	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	264.805,20	MENCATAT SALDO AKHIR PERSEDIAAN CETAK/KARCIS TAHUN 2017 YANG BELUM TERCATAT DI PERSEDIAAN AWAL 2018
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	249.480,00	Mencatat saldo ahir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	150.876,00	MENCATAT SALDO AWAL PERSEDIAAN KARCIS 2017 YANG BELUM TERCATAT DI PERSEDIAAN TAHUN 2018
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	116.186,40	Mencatat Persediaan Akhir Karcis 2017 Yang Belum Tercatat Dalam Persediaan Awal 2018
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	300.445,20	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	85.298,40	Mencatat Saldo akhir persediaan karcis tahun 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	111.196,80	Mencatat saldo ahir Persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	150.044,40	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	154.440,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	133.412,40	mencatat saldo akun persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	129.610,80	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	411.998,40	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	155.153,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
27	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	172.854,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
28	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	129.492,00	Koreksi saldo awal persediaan atas kurang catat persediaan cetak

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	956.505,00	Mencatat Saldo Akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat dalam persediaan awal 2018
30	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14.734.861,00	Mencatat Saldo Akhir Persediaan Barang Cetakan (Karcis) 2017 yang belum tercatat di tahun 2018
31	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.032.602,00	Mencatat saldo akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat di tahun 2018
32	DINAS PERDAGANGAN	8.736.321,00	Mencatat saldo akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat di tahun 2018
33	DINAS PERHUBUNGAN	173.119.925,00	Mencatat koreksi saldo awal barang cetakan (Karcis) yang belum di catat tahun 2017
34	DINAS PERTANIAN	70.592,00	Mencatat saldo akhir persediaan karcis 2017 yang belum tercatat di tahun 2018
TOTAL		815.042.137,20	

Tabel 287 Koreksi Nilai Persediaan Obat-obatan Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	383.539.200,00	mencatat koreksi persediaan awal obat dengan perhitungan fifo yang kurang catat
2	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	7.874.537,08	KOREKSI SALDO AWAL ATAS PERSEDIAAN OBAT 2018 DG MENGGUNAKAN METODE FIFO
3	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	(986.001,50)	Mencatat koreksi saldo awal oksigen dan Glukosa 40% Glukosa dari 175 - 190 oksigen dari 625 - 616 oksigen dari 817 - 810
4	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	(69.042.830,00)	koreksi atas Saldo Awal Persediaan Obat 2018 dengan metode FIFO
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	905.720,20	Mencatat Koreksi Saldo Awal atas Persediaan Obat tahun 2018 dengan Metode FIFO
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GESANG	(16.160.808,00)	Koreksi atas saldo awal 2018 persediaan obat dengan menggunakan metode FIFO
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	(1.381.080,04)	Koreksi atas sald awal persediaan obat 2018 yang menggunakan metode FIFO
8	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	(12.297.697,72)	KOREKSI SALDO AWAL ATAS PERSEDIAAN OBAT TAHUN 2018 DENGAN METODE FIFO
9	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	(5.025.710,52)	MENCATAT KOREKSI PERSEDIAAN AWAL OBAT TAHUN 2018 DENGAN METODE FIFO
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	(13.544.491,10)	Koreksi lebih catat persediaan obat-obatan tahun 2017
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	29.002.924,76	Mencatat Koreksi Saldo Awal Persediaan Obat 2018 dengan Menggunakan Metode FIFO sesuai Audited BPK

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	(278.627,24)	Mencatat Koreksi Persediaan Puskesmas Kunir Tahun 2018
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABUK KIDUL	(3.260.490,04)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	(363.881,82)	Koreksi Atas Persediaan Awal Obat 2018 yang Menggunakan Metode FIFO
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	(5.229.550,00)	MENCATAT KOREKSI ATAS SALDO AWAL 2018 PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO (LEBIH CATAT)
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	(96.148.856,32)	Mencatat koreksi atas saldo awal persediaan obat 2018 yang menggunakan metode FIFO sesuai dengan audit BPK
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	21.700.362,00	Koreksi atas saldo awal tahun 2018 persediaan obat dengan menggunakan metode FIFO yang kurang catat
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PRONOJIWO	(1.873.212,00)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL 2018 PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO .
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	(93.110.350,00)	Mencatat koreksi atas saldo awal persediaan obat tahun 2018 dengan menggunakan metode FIFO Sesuai audited BPK
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	54.783.692,06	Mencatat Koreksi Kurang Catat Saldo Akhir Obat tahun 2017 karena ada Kesalahan Harga di Stock Opname Obat
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	3.797.983,84	Koreksi atas saldo awal persediaan obat tahun 2018 dengan metode FIFO
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	(37.025.628,00)	MENCATAT PERSEDIAAN AWAL OBAT - OBATAN TAHUN 2018 DENGAN METODE FIFO
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	(11.206.203,90)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL PERSEDIAAN 2018 OBAT DENGAN METODE FIFO
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	2.329.564,00	Koreksi atas saldo awal tahun 2018 persediaan obat dengan menggunakan metode FIFO yang kurang catat
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	(18.354.530,00)	koreksi atas Saldo Awal Persediaan Obat 2018 dengan metode FIFO
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	(1.232.428,32)	MENCATAT KOREKSI PERSEDIAAN AWAL OBAT TAHUN 2018 DENGAN METODE FIFO
27	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	(9.026.644,54)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL 2018 PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO
28	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	(150.735.671,60)	Mencatat koreksi Saldo Awal persediaan obat - obatan setelah metode FIFO
29	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	(1.231.324,98)	KOREKSI ATAS SALDO AWAL 2018 PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(9.727.108,00)	Koreksi Saldo Awal Bahan Obat Obatan Metode FIFO Hasil Audit BPK 2017
31	RSUD dr. HARYOTO	(25.379.694,00)	Koreksi atas saldo awal 2018 Persediaan obat-obatan dengan metode FIFO
32	RSUD PASIRIAN	3.102.519,20	KOREKSI ATAS SALDO AWAL 2018 PERSEDIAAN OBAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO
TOTAL		(75.586.316,50)	

Tabel 288 Koreksi Nilai Persediaan Bahan Kimia Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(2.049.300,00)	Mencatat Koreksi Saldo Awal atas Persediaan (Bahan Kimia) 2018 yang Menggunakan Metode FIFO
TOTAL		(2.049.300,00)	

Tabel 289 Koreksi Nilai Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat-obatan Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	(6.334.777,00)	Mencatat Koreksi Kurang Catat Saldo Akhir Obat tahun 2017 karena ada Kesalahan Harga di Stock Opname Obat
TOTAL		(6.334.777,00)	

Tabel 290 Koreksi Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	812.518.000,00	Mencatat penambahan penyertaan modal daerah berupa penyerahan barang milik daerah karena temuan BPK 2017 (sesuai Perda Kab. Lumajang no.16 tahun 2018)
TOTAL		812.518.000,00	

Tabel 291 Koreksi Nilai Tanah Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	(30.673.067,00)	Koreksi atas pencatatan ganda aset tanah di KIB A Dinas Perdagangan dan KIB A Puskesmas Tekung
2	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	17.875.000,00	Pendapatan Hibah tanah pada Pukesmas Tunjung yang berupa hasil appraisal tanah yang sebelumnya belum diketahui nilainya
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(34.912.500,00)	Koreksi atas pencatatan ganda aset tanah di KIB A Kelurahan Kepuharjo dan di KIB A Dinas Lingkungan Hidup
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(2.780.520.000,00)	Mutasi Tanah karena tanah sewa
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	68.846.938.550,00	Penilaian Awal Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan dan Bangunan Irigasi, tanah dibawah jalan

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
6	DINAS PENDIDIKAN	(9.220.638.363,33)	Koreksi Ekuitas
7	DINAS PENDIDIKAN	530.253.000,00	Penambahan aset tetap tanah kantor yang belum di catat dalam KIB
8	DINAS PENDIDIKAN	(2.149.590.667,00)	Koreksi atas nilai aset tanah Dinas Pendidikan di SD Rowokangkung 5 yang tercatat di KIB sebesar Rp2.225.930.667,00 sesuai hasil pemeriksaan BPK Th 2017 ditindaklanjuti dengan hasil nilai sebesar Rp76.340.000,00 sehingga lebih catat Rp2.149.590.667,00 (Rp2.225.930.667,00 - Rp76.340.000,00)
9	DINAS PENDIDIKAN	181.730.000,00	kurang catat penilaian ulang nilai KIB A Dinas Pendidikan di SD Urangantung 2 senilai Rp181.730.000,00 (Rp202.900.000,00 - Rp21.170.000,00)
10	DINAS PERDAGANGAN	61.755.000,00	Koreksi atas pencatatan ganda aset tanah di KIB A Dinas Perdagangan karena sudah dicatat di KIB A Puskesmas Tekung
11	DINAS PERTANIAN	(345.600.000,00)	Koreksi atas pencatatan ganda aset tanah di KIB A Dinas Pertanian yang sudah tercatat di KIB A Kelurahan Kepuharjo
TOTAL		55.076.616.952,67	

Tabel 292 Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	(550.000,00)	Koreksi Lebih catat Aset tetap - Meja tahun 2017
2	INSPEKTORAT KABUPATEN	(27.000,00)	Koreksi reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan hasil penelusuran aset tetap Tahun 2017 dengan BPKD Kab. Lumajang
TOTAL		(577.000,00)	

Tabel 293 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	941.760.000,00	Koreksi kurang catat gedung karena Penilaian kembali nilai saldo awal Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan dan Bangunan Irigasi, tanah dibawah jalan
2	DINAS PENDIDIKAN	4.413.331.100,00	Koreksi kurang catat nilai aset tetap gedung dan bangunan karena belum tercatat pada KIB C tahun 2017
TOTAL		5.355.091.100,00	

Tabel 294 Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	14.205.675.513,59	Koreksi kurang catat gedung karena Penilaian kembali nilai saldo awal Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan dan Bangunan Irigasi, tanah dibawah jalan
TOTAL		14.205.675.513,59	

Tabel 295 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PERIKANAN	(60.390.000,00)	Lebih catat aset tetap lainnya berupa induk ikan sebesar Rp, 60.390.000,00 (thn 2009 sebesar Rp. 5.940.000, thn 2010 sebesar Rp. 54.450.000) pada Dinas Perikanan karena sudah diterbitkan SK Penghapusan No. 188.45/183/427.12/2016
TOTAL		(60.390.000,00)	

Tabel 296 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
A. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA ADANYA SELISIH HASIL PENELUSURAN AKUMULASI 2017 DENGAN HASIL AUDITED 2017						
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(59.261.174,50)	51.416.829,00	54.034.203,23		46.189.857,73	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(29.175.625,01)	25.048.115,22	-		(4.127.509,79)	Koreksi karena lebih catat dan kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(106.524.125,00)	176.446.023,68	-		71.921.898,68	Koreksi karena lebih catat dan kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(710.875.775,62)	(986.200,00)	(466.373.300,00)		(1.178.235.275,62)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(361.745.930,50)	(363.584.071,53)	-		(725.330.002,03)	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(21.984.728,03)	(27.365.265,09)	-		(49.349.993,12)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	66.259.322,78	(30.296.494,27)	40.689.678,00		76.652.506,51	Koreksi karena kurang / lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(1.059.200,00)	(345.585.168,36)	(1.519.800,00)		(348.164.168,36)	Koreksi karena kurang dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN	(650.263.311,85)	(155.621.462,53)	89.226.170,40		(716.658.603,98)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
						akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	314.904.654,86	(21.558.399,00)	-		293.346.255,86	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	(13.631.375,23)	(72.314.591,37)	-		(85.945.966,60)	Koreksi saldo akhir penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(48.289.342,51)	(8.939.886,15)	-		(57.229.228,66)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	(47.046.510,68)	(201.176.236,12)	-		(248.222.746,80)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	(321.657.962,64)	(85.474.854,99)	-		(407.132.817,63)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	(21.820.832,43)	(193.246.552,96)	-		(215.067.385,39)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	(35.715.430,13)	(144.906.401,94)	-		(180.621.832,07)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	(27.615.107,09)	(39.753.352,50)	-		(67.368.459,59)	KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	(255.697.599,60)	304.799.118,70	-		49.101.519,10	Mencatat koreksi kurang catat dan lebih catat saldo akhir penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	(81.976.812,89)	(91.090.425,93)	-		(173.067.238,82)	Mencatat Koreksi Penyusutan Sado Awal Tahun 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	(75.533.251,31)	(320.616.282,59)	-		(396.149.533,90)	MENCATAT KOREKSI PENYUSUTAN AWAL 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	(70.865.566,80)	(74.875.113,56)	-		(145.740.680,36)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	(60.990.577,39)	234.170,81	-		(60.756.406,58)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	(210.384.273,50)	(14.574.826,12)	-		(224.959.099,62)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	(224.479.278,44)	(107.184.536,33)	-		(331.663.814,77)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS	353.624.465,01	(420.625.566,02)	-		(67.001.101,01)	Mencatat Koreksi Saldo

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
PRONOJIWO						Awal Penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	(226.113.933,10)	(19.730.100,00)	-		(245.844.033,10)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANUYOSO	(103.204.155,33)	(7.774.637,81)	-		(110.978.793,14)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUMAN	(88.309.523,65)	(263.329.375,56)	-		(351.638.899,21)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	(51.067.551,27)	734.857.342,02	-		683.789.790,75	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	3.565.118,89	32.059.339,07	-		35.624.457,96	Mencatat Koreksi Karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	(64.216.441,46)	(108.920.373,09)	-		(173.136.814,55)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	(53.900.251,81)	(30.102.256,20)	-		(84.002.508,01)	MENCATAT KOREKSI KARENA KURANG CATAT SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	(121.941.085,08)	(5.234.400,78)	-		(127.175.485,86)	Mencatat Koreksi Karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPURSARI	(277.645.270,11)	(493.823.715,65)	-		(771.468.985,76)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	106.024.233,91	(52.576.364,26)	-		53.447.869,65	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS YOSOWILANGUN	(92.797.021,17)	(453.894.106,50)	-		(546.691.127,67)	Koreksi Karena Kurang catat Saldo akumulasi penyusutan 2017
DINAS KETAHANAN PANGAN	(155.193.612,00)	(20.342.506,00)	-		(175.536.118,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(256.156.794,78)	236.080.499,40	-		(20.076.295,38)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	(49.901.875,00)	(48.468.231,06)	8.222.967.491,43		8.124.597.385,37	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
						penyusutan 2017
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	159.998.527,66	(8.070.800,50)	(265.858.102,38)		(113.930.375,22)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	(88.929.718,89)	(1.087.884.497,87)	114.379.700,00		(1.062.434.516,76)	KOREKSI KARENA KURANG CATAT DAN LEBIH CATAT SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(172.685.450,92)	(149.606.885,73)	(289.507.820.053,08)		(289.830.112.389,73)	mencatat koreksi saldo awal 2018 akumulasi penyusutan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(12.499.862,00)	(162.713.387,00)	-		(175.213.249,00)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	(112.194.268,75)	(557.786.852,63)	22.314.375,00	280.200.000,00	(367.466.746,38)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(63.859.950,00)	22.092.502,10	61.040.461,42		19.273.013,52	KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2017 (SESUAI BA DARI BIDANG ASET)
DINAS PENDIDIKAN	7.624.478.555,53	(21.916.186.202,54)	24.551.678,69		(14.267.155.968,32)	Mencatat Koreksi Penyusutan karena Salah catat Pada saldo awal 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(81.035.349,92)	(8.849.452,38)	-		(89.884.802,30)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PERDAGANGAN	(605.711.103,39)	6.536.810.059,17	7.854.999,00		5.938.953.954,78	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PERHUBUNGAN	(356.261.957,45)	(621.067.850,38)	6.800.385.472,49		5.823.055.664,66	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PERIKANAN	(29.727.071,00)	(215.281.565,85)	(37.647.581,56)		(282.656.218,41)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS PERTANIAN	(70.772.108,05)	(231.181.560,33)	(5.029.800,00)		(306.983.468,38)	Mencatat Koreksi SA Akm. Penyusutan 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.070.481,50	346.681.640,00	711.272.213,20		1.076.024.334,70	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
						penyusutan 2017
DINAS SOSIAL	(51.034.940,50)	(904.851.400,50)	-		(955.886.341,00)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
DINAS TENAGA KERJA	(95.507.658,00)	0,37	-		(95.507.657,63)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN	163.017.050,00	-	-		163.017.050,00	Koreksi tahun berjalan atas perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 (Reklas Hasil Penelusuran Aset Tetap)
KECAMATAN CANDIPURO	(19.464.397,00)	(236.370.125,01)	-		(255.834.522,01)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN GUCIALIT	(15.332.020,20)	(140.197.448,01)	-		(155.529.468,21)	Mencatat koreksi akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN JATIROTO	(19.024.030,00)	(25.367.203,71)	-		(44.391.233,71)	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Tahun 2018
KECAMATAN KEDUNGAJANG	(10.699.600,00)	34.359.455,98	-		23.659.855,98	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN KLAKAH	(25.980.625,00)	(43.329.799,76)	-		(69.310.424,76)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN KUNIR	(28.178.350,00)	(113.892.810,18)	-		(142.071.160,18)	Koreksi Karena Kurang Catat Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG	266.028.523,00	(298.221.198,24)	(8.736.000,00)		(40.928.675,24)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	(2.487.500,00)	0,19	-		(2.487.499,81)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUMAN	(3.989.500,00)	(207.442.666,67)	-		(211.432.166,67)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUMAN	(4.020.500,00)	-	-		(4.020.500,00)	KOREKSI KURANG CATAT SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN TA.2017

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	(6.297.500,00)	(72.160.972,00)	-		(78.458.472,00)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	(5.786.600,00)	-	-		(5.786.600,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	(13.005.000,00)	67.131.400,35	-		54.126.400,35	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	(22.433.000,00)	(68.068.304,35)	-		(90.501.304,35)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN PADANG	(14.463.100,00)	(118.055.799,91)	-		(132.518.899,91)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN PASIRIAN	(36.578.124,50)	(104.335.628,13)	-		(140.913.752,63)	Mencatat koreksi akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN PASRUJAMBE	(23.394.167,67)	(214.179.959,95)	-		(237.574.127,62)	Mencatat koreksi akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN PRONOJIWO	(9.980.000,50)	0,11	-		(9.980.000,39)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN RANDUAGUNG	(1.743.150,50)	(36.609.357,00)	-		(38.352.507,50)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN RANUYOSO	(17.245.000,00)	(12.269.856,52)	-		(29.514.856,52)	Mencatat Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2017
KECAMATAN ROWOKANGKUNG	(27.179.125,03)	(917.551,96)	-		(28.096.676,99)	Mencatat koreksi akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN SENDURO	(16.379.800,01)	(55.994.700,00)	-		(72.374.500,01)	Mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan
KECAMATAN SUKODONO	(7.375.000,00)	(9.272.208,04)	-		(16.647.208,04)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
KECAMATAN SUMBERSUKO	(19.794.000,50)	(79.527.510,02)	-		(99.321.510,52)	Mencatat Koreksi Penyusutan Saldo Awal 2018
KECAMATAN TEKUNG	52.145.250,00	(19.024.569,76)	-		33.120.680,24	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
KECAMATAN TEMPEH	(16.988.910,00)	(341.217.822,58)	-		(358.206.732,58)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
						akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN TEMPURSARI	(24.219.713,75)	(26.602.383,71)	-	(1.350.000,00)	(52.172.097,46)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
KECAMATAN YOSOWILANGUN	(9.610.500,00)	(28.935.853,43)	-		(38.546.353,43)	Koreksi karena kurang / lebih catat akumulasi penyusutan saldo awal tahun 2018
RSUD dr. HARYOTO	(4.336.586.529,58)	(292.208.661,10)	(89.731.464,50)		(4.718.526.655,18)	Mencatat koreksi Saldo Awal Kurang Catat dan Lebih Catat sesuai dengan BA Rekon Aset 2018
RSUD PASIRIAN	(1.349.172.514,22)	(76.702.603,40)	(1.563.616,00)		(1.427.438.733,62)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	249.514.825,00	(29.624.659,89)	-		219.890.165,11	KOREKSI KARENA KURANG CATAT DAN LEBIH CATAT SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN	(12.358.078,42)	-	-		(12.358.078,42)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.678.310,88	5.272.840,00	-		34.951.150,88	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	(12.335.754,00)	-	-		(12.335.754,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	(3.546.765,95)	(5.272.840,00)	-		(8.819.605,95)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	2.496.956.075,66	-	-		2.496.956.075,66	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	(2.469.999,50)	-	-		(2.469.999,50)	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	(52.046.433,00)	-	-		(52.046.433,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	2.304.067.873,08	503.827.138,00	15.635.372,50		2.823.530.383,58	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(1.488.898.765,70)	(765.014.742,00)	(5.378.515,00)		(2.259.292.022,70)	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2017
SEKRETARIAT DPRD	(75.585.402,71)	(109.953.949,74)	785.786.653,20		600.247.300,75	Koreksi karena kurang catat dan lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2017
EX. BAGIAN PEMDES	430.613.793,83	-	-		430.613.793,83	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. DINAS PASAR	1.221.484.413,50	-	-		1.221.484.413,50	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. DINAS PERKEBUNAN	1.091.452.400,00	-	-		1.091.452.400,00	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. KANTOR DIKLAT	1.636.081.907,58	-	-		1.636.081.907,58	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. KANTOR PETERNAKAN	1.031.201.342,40	-	-		1.031.201.342,40	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL	5.166.157.917,54	-	-		5.166.157.917,54	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
EX. DINAS KEHUTANAN	1.719.613.724,00	-	-		1.719.613.724,00	Koreksi saldo awal Kantor Ex. karena salah catat di thn 2017 dimana dinas ex sudah merger dan dihapus
JUMLAH	12.053.028.564,09	(24.539.106.920,88)	(273.439.519.763,96)	- 278.850.000,00	(285.646.748.120,75)	
B. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA ADANYA REKLAS ANTAR GOLONGAN BARANG						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.000.000,00	(19.500.000,00)			45.500.000,00	REKLAS ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (Antena FM) KE ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	16.712.652,56	(38.468.052,22)		(21.755.399,66)	Reklas Bangunan Gedung Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
						Jaringan
	(95.502.156,80)	-	-		(95.502.156,80)	Reklas Bangunan Gedung Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(2.511.750,00)				(2.511.750,00)	Mencatat mutasi masuk dan mutasi keluar PUTR 2018
DINAS PENDIDIKAN					-	pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke Ekstra Komptabel
DINAS PERHUBUNGAN	117.843.228,50	(8.934.016,00)	-		108.909.212,50	Mencatat reklas aset tetap peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan (pengadaan ATCS) dan Aset tak berwujud (pengadaan ATCS)
DINAS PERIKANAN	-	(6.743.400,00)	5.268.281,25		(1.475.118,75)	REKLAS ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KE ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
JUMLAH	84.829.321,70	(18.464.763,44)	(33.199.770,97)	-	33.164.787,29	
C. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA ADANYA VALIDASI ATAU PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		(159.647.389,68)	(12.083.594.249,50)		(12.243.241.639,18)	Mencatat mutasi masuk dan mutasi keluar PUTR 2018
JUMLAH	-	(159.647.389,68)	(12.083.594.249,50)	-	(12.243.241.639,18)	
D. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA KURANG CATAT SALDO AKHIR 2017						
DINAS PENDIDIKAN		(214.215.947,30)			(214.215.947,30)	Adanya Penambahan aset tetap gedung dan bangunan karena belum tercatat pada KIB sehingga kurang catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunannya
JUMLAH	-	(214.215.947,30)	-	-	(214.215.947,30)	
E. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA LLEBIH CATAT SALDO AKHIR 2017						
DINAS PENDIDIKAN	110.000,00				110.000,00	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena ada mutasi keluar akumulasi penyusutan peralatan kantor tahun 2017 tetapi belum dikeluarkan di tahun 2018

NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	TOTAL	KETERANGAN
JUMLAH	110.000,00	-	-	-	110.000,00	
TOTAL	12.137.967.885,79	(24.931.435.021,30)	(285.556.313.784,43)	278.850.000,00	(298.070.930.919,94)	

Tabel 297 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PERIKANAN	(60.390.000,00)	Lebih catat aset tetap lainnya berupa induk ikan sebesar Rp. 60.390.000,00 (thn 2009 sebesar Rp. 5.940.000, thn 2010 sebesar Rp. 54.450.000) pada Dinas Perikanan karena sudah diterbitkan SK Penghapusan No. 188.45/183/427.12/2016
TOTAL		(60.390.000,00)	

Tabel 298 Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(33.948.000,00)	Koreksi atas Akumulasi Amortisasi ATB berupa Aplikasi Simpeg di BKD yang belum diamortisasi dari tahun 2014 (perolehan) sehingga kurang disajikan sebesar Rp33.948.000,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(0,20)	Koreksi atas kesalahan perhitungan amortisasi pada periode sebelum TA 2018 pada BAPPEDA
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(102.122.500,00)	Koreksi atas Akumulasi Amortisasi ATB pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas hasil penelusuran berupa kelebihan pembebanan pada TA 2018 sebesar Rp7.920.000,00 dan periode sebelum TA 2018 sebesar Rp94.202.500,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(20.340.000,00)	Koreksi atas Akumulasi Amortisasi ATB pada atas hasil penelusuran berupa kurang pembebanan periode sebelum TA 2018
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(441.539.680,00)	Koreksi atas amortisasi ATB pada Dinas PUTR atas hasil penelusuran berupa kurang pembebanan pada TA 2018
6	DINAS PERDAGANGAN	(26.400.000,00)	Mencatat kurang catat amortisasi aset tak berwujud
7		700.000,00	Mencatat lebih catat amortisasi aset tak berwujud
8	DINAS PERTANIAN	2.488.475,00	Koreksi atas amortisasi ATB pada Dinas Pertanian atas hasil penelusuran berupa

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
			kurang pembebanan pada TA 2018 sebesar Rp25.034.900,00 dan periode sebelumnya sebesar Rp2.488.475,00
9	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	47.230.000,00	Koreksi atas amortisasi ATB pada Bagian Adm. Pemerintahan Setda dengan harga perolehan Rp236.150.000,00 namun nilai Akumulasi Amortisasi awal tahun 2018 sebesar Rp283.380.000,00 sehingga lebih diamortisasi sebesar Rp47.230.000,00
10	AKADEMI KEPERAWATAN	(1.800.000,00)	aset tetap telah dilakukan penghapusan pada tahun 2017 karena dilimpahkan ke dikti, tetapi amortisasinya belum dikeluarkan dari neraca dan seharusnya telah dikeluarkan/dihapus dari neraca pada thn 2017 sehingga di thn 2018 dilakukan koreksi atas saldo awal akumul.amortisasi
11	DINAS KESEHATAN	1.918.600,00	koreksi saldo awal amortisasi yang lebih catat
12	DINAS PERHUBUNGAN	(15.585.046,80)	Mencatat reklas aset tetap peralatan dan mesin ke Aset tak berwujud (pengadaan ATCS)
13	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	(5.742.000,00)	koreksi karena kurang catat amortisasi 2017
TOTAL		(595.140.152,00)	

Tabel 299 Koreksi Nilai Aset Lain-lain Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	(0,45)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2018
2	DINAS KESEHATAN - BALAI KESEHATAN OLAHRAGA	(0,11)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan BA rekonsiliasi aset
3	DINAS KESEHATAN - INSTALASI PERBEKALAN FARMASI KABUPATEN LUMAJANG	(0,20)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain - lain yg disesuaikan dengan BA Rekonsiliasi aset
4	DINAS KESEHATAN - LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(0,03)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disebutkan dengan BA rekonsiliasi aset
5	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BADES	169.432.287,34	Koreksi karena kurang catat saldo akhir aset lain - lain 2017
6	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS CANDIPURO	0,35	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan BA rekonsiliasi aset
7	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GUCIALIT	0,11	Mencatat koreksi pembulatan jumlah aset lain - lain yang disesuaikan dengan BA rekonsiliasi Aset

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
8	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS JATIROTO	0,27	KOREKSI PEMBULATAN JUMLAH ASET LAIN - LAIN YANG DISESUAIKAN DENGAN BA REKONSILIASI ASET
9	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KEDUNGAJANG	(0,16)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset
10	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KLAKAH	(0,27)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan BA rekonsiliasi aset
11	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KUNIR	(0,05)	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yg disesuaikan dengan BA rekonsiliasi aset
12	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	0,46	MENCATAT KOREKSI ASET LAIN LAIN TH 2017
13	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS LABRUK KIDUL	7.175.160,00	REKLAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN YANG DI MASUKAN KEMBALI MENAMBAH NILAI ASET LAIN LAIN
14	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PADANG	11.992.211,11	Koreksi Nominal Jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan BA Rekonsiliasi Aset
15	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	1.129.215.604,86	KOREKSI ASET LAIN-LAIN YANG KURANG CATAT
16	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASIRIAN	5.675.999,00	KOREKSI SALDO AWAL IUD & IMPLAN 2016 YANG SEHARUSNYA MERUPAKAN ASET LAIN-LAIN
17	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PASRUJAMBE	(0,38)	Mencatat Koreksi Aset Lain-lain lebih catat
18	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	(4.500.000,00)	MENCATAT ASET LAIN-LAIN YANG BELUM DIKELUARKAN TAHUN 2017
19	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS PENANGGAL	(0,38)	MENCATAT KOREKSI PEMBULATAN JUMLAH ASET LAIN-LAIN YANG DISESUAIKAN DENGAN BA REKONSILIASI ASET 2018
20	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS RANDUAGUNG	8.559.999,90	Mencatat Koreksi Aset Lain-Lain
21	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	0,06	Koreksi Pembulatan jumlah Aset lain-lain disesuaikan dengan berita acara rekonsiliasi aset tahun 2018
22	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS ROGOTRUNAN	(158.642.556,00)	Mencatat Koreksi Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan yang dihapus
23	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SENDURO	(0,26)	KOREKSI PEMBULATAN JUMLAH ASET LAIN LAIN YANG MENYESUAIKAN DENGAN BA REKONSILIASI ASET
24	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKODONO	0,10	Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang disesuaikan dengan BA rekonsiliasi aset
25	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUMBERSARI	5.599.999,93	mencatat koreksi saldo akhir aset lain lain sesuai hasil penelusuran 2017
26	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEKUNG	0,04	Mencatat koreksi pembulatan aset lain lain yang di sesuaikan dengan hasil penelusuran 2017
27	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	0,45	Mencatat koreksi pembulatan aset lain lain yang di sesuaikan dengan hasil penelusuran 2017
28	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TEMPEH	94.476.877,00	mencatat koreksi saldo akhir aset lain lain sesuai hasil penelusuran 2017
29	DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TUNJUNG	0,14	Mencatat koreksi pembulatan aset lain lain yang di sesuaikan dengan hasil penelusuran 2017
TOTAL		1.268.985.582,83	

Tabel 300 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.333.333,34	Koreksi saldo awal 2018 pendapatan diterima dimuka retribusi perijinan karena lebih catat
2	DINAS PERDAGANGAN	26.597.239,58	Koreksi saldo awal 2018 pendapatan diterima dimuka retribusi perijinan karena lebih catat
TOTAL		27.930.572,92	

Tabel 301 Koreksi Nilai Utang Belanja Jasa Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.555.000,00	Koreksi saldo utang belanja tahun 2016 yang di bayar tahun 2017
TOTAL		19.555.000,00	

Tabel 302 Koreksi Nilai Utang Transfer Dana Desa Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	522.135.000,00	MEMBALIK BEBAN UTANG TRF DANA DESA TH 2017
TOTAL		522.135.000,00	

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	2.355.220.862.873,40	2.412.426.669.702,81

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018 dan 2017, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 303 Laporan Perubahan Ekuitas

No	Keterangan	2018	2017
1	Ekuitas Awal	2.412.426.669.702,81	2.179.631.572.503,94
2	Surplus (defisit) LO	163.490.200.401,63	82.367.632.051,15
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	(220.696.007.231,04)	150.427.465.147,72
4	Ekuitas Akhir	2.355.220.862.873,40	2.412.426.669.702,81

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 - 1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 - 1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 - 1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 - 1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 - 1973);
- 6) Suwandi (1973 - 1983);
- 7) Karsid (1983 (1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 - 1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 - 1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998 - 2003);

- 11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013 - 2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018)
- 15) H. Thoriqul Haq, M.ML – Ir. H. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur & Bermartabat

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yg lebih sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan

pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan 0 – 15% (61% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15 – 25% (7% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25 – 40% (13% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (19% luas wilayah) merupakan daerah yang mutlak dihutankan sebagai pelindung sumber daya alam.

Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industry dan pariwisata, Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial yang bisa diandalkan untuk pariwisata.

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);

6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

VII. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2018 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2018 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2018.
 - (7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.